



PUTUSAN

Nomor : 22/PID/TPK/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	DERMAWAN GINTING
Tempat lahir	Kuta Buluh, Tanah Karo, Sumatera Utara
Umur/tanggal lahir	49 tahun / 31 Desember 1965
Jenis kelamin	laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegar	Indonesia
Tempat tinggal	Jalan Madio Santoso No.204/1 Glugur Darat Kota Medan • Jalan Letjend. Soetoyo No.266 RT.013 RW 004 Kel. Medaeng Kec.Waru Sidoarjo Jawa Timur. (alamat KTP) • Perumahan Makarya Binangun Blok R.11 No.6 Waru Kab. Sidoarjo Timur.
Agama	Katholik
Pekerjaan	Hakim PTUN Medan
Pendidikan	S-2

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik pada KPK, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 29 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum KPK, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;
- 3 Diperpanjang Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Penuntut Umum KPK, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
- 5 Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2015;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 05 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016 di Rutan POLRES METRO JAKARTA SELATAN ;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Desember 2015, No 393/Pen.Pid/TPK /2015/PT.DKI, sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2016 di Rutan POLRES METRO JAKARTA SELATAN ;
- 8 Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Januari 2016, No.71/Pen.Pid/TPK/2016/ PT.DKI, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 24 Pebruari 2016 di Rutan POLRES METRO JAKARTA SELATAN ;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 04 Pebruari 2016 No, 06/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 di Rutan POLRES METRO JAKARTA SELATAN ;

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya **1. Rahmatsyah,SH., 2. Rinaldi, SH., 3. Dono Bintoro, SH.,4. Tommy Sontosa, SH.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum /Law Firm, yang beralamat di Gedung TRIO Lt,2 Suite 207 Jl.Mampang Prapatan Raya No.17 EF Jakarta Selatan & Jl.KH Agus Salim No. 53 Bekasi Timur Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.K-07/R3-DG/PIKOR/II/16, tanggal 22 Pebruari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- 1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DERMAWAN GINTING selaku *Hakim* yaitu Anggota Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor . 25/PEN/2015/PTUN-MDN tanggal 6 Mei 2015 bersama-sama dengan TRIPENI IRIANTO PUTRO selaku Ketua Majelis Hakim PTUN Medan dan AMIR FAUZI selaku Anggota Majelis Hakim PTUN Medan serta SYAMSIR YUSFAN selaku Panitera Pengganti PTUN Medan (*masing-masing dilakukan tuntutan secara terpisah*) yang menangani perkara Nomor : 25/G/6015/PTUN-MDN pada bulan Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di kantor PTUN Medan Jalan Bunga Raya No.18 Medan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan serta sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadilinya telah *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji* yaitu menerima hadiah berupa uang tunai seluruhnya sejumlah USD 5,000 (*lima ribu dolar Amerika Serikat*) dari GATOT PUJO NUGROHO dan EVY SUSANTI (istri Gatot Pujo Nugroho) melalui OTTO CORNELIS KALIGIS dan MOH. AGAVI BHASTERA GUNTUR alias GARY, *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili*, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan terkait dengan keinginan GATOT PUJO NUGROHO, EVY SUSANTI dan OTTO CORNELIS KALIGIS serta MOH.YAGARI BHASTARA GUNTUR alias GARY, agar Terdakwa bersama TRIPENI IRIANTO PUTRO dan AMIR FAUZI serta SYAMSIR YUSFAN mengabulkan permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam mengeluarkan panggilan permintaan keterangan Nomor : B-473/N.2.5/Fd.1/03 /2015 tanggal 31 Maret 2015 terhadap AHMAD FUAD LUBIS selaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DFH) serta Penyertaan Modal pada sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: PRINT-71/N.2/Fd 1/43/2415 tanggal 16 Maret 2015 yang diadili dan diperiksa oleh Terdakwa, TRIPENI IRIANTO PUTRO, dan AMIR FAUZI sebagai Majelis Hakim PTUN Medan serta SYAMSIR YUSFAN selaku panitera pengganti. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2015, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : PRINT-31/N.2/Fd.1/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 melakukan pemanggilan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara APBD 2012 dengan mengirimkan surat panggilan permintaan keterangan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : B-385/N.2.1 / Fd.1/03/2015 tanggal 19 Maret 2015 sehubungan dengan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. setelah itu Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Tidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI juga mengirimkan surat Nomor: F-174/F/2/ Fd.1/02/2015 tanggal 20 Maret 2015 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara perihal bantuan permintaan keterangan yang pada pokoknya meminta bantuan Gubernur menyampaikan surat permintaan keterangan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Biro Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Terhadap panggilan Kejaksaan RI tersebut, Gatot Pujo Nugroho memerintahkan kepada R. Sabrina dan Ahmad Fuad Lubis untuk hadir pada panggilan kedua.
- Selanjutnya Gatot Pujo Nugroho setelah mengetahui adanya panggilan dari Kejaksaan RI tersebut, kemudian bersama Evi Suwanti datang ke kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates di Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123 Jakarta Pusat dan bertemu dengan Otto Cornelis Kaligis, Yulius Irwansyah, Anis Rifai, dan Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary, membahas bagaimana upaya agar pemanggilan R. Sabrina dan Ahmad Fuad Lubis tersebut tidak mengarah kepada keterlibatan Gatot Pujo Nugroho. Pada pertemuan tersebut Otto Cornelis Kaligis memberikan saran kepada Gatot Pujo Nugroho apabila ada pemanggilan agar tidak dipenuhi dan mengajukan permohonan pengujian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke PTUN Medan. Atas saran Otto Cornelis Kaligis tersebut Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti menyetujuinya, sedangkan untuk mengantisipasi apabila adanya pemanggilan permintaan keterangan saksi Kejaksaan RI, Otto Cornelis Kaligis akan lebih dahulu meminta penjelasan dari R. Sabrina dan Ahmad Fuad Lubis.

- Bahwa pada tanggal 1 April 2015 setelah ada panggilan kedua dari Kejaksaan Agung RI, R. Sabrina dan Ahmad Fuad Lubis menemui Gatot Pujo Nugroho di ruang kerjanya. Selanjutnya Gatot Pujo Nugroho memerintahkan R. Sabrina dan Ahmad Fuad Lubis untuk memenuhi panggilan tersebut dengan terlebih dahulu menemui dan berkonsultasi kepada Otto Cornelis Kaligis selaku penasihat hukum pribadi Gatot Pujo Nugroho serta membawa dokumen terkait perkara tersebut. Selanjutnya pada tanggal 2 April 2015 sekitar pukul 08.00 wib R. Sabrina dan Ahmad Fuad Lubis pergi ke kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates dan bertemu dengan Otto Cornelis Kaligis, Anis Rifai, Yulius Irwansyah, Rico Pandairot, dan Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary serta Evy Susanti membahas adanya surat permintaan keterangan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Dirdik Jampidsus Kejaksaan Agung RI. Dalam pertemuan tersebut disepakati R. Sabrina dan Ahmad Fuad Lubis akan memenuhi panggilan tersebut dengan didampingi Penasihat Hukum dari kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates.
- Bahwa masih sekitar bulan April 2015 bertempat di sebuah rumah makan di kota Medan, Ahmad Fuad Lubis atas permintaan Gatot Pujo Nugroho menandatangani surat kuasa kepada tim penasihat hukum Otto Cornelis Kaligis & Associates untuk mengajukan permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di PTUN Medan dalam mengeluarkan surat pemanggilan untuk permintaan keterangan Nomor : B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 kepada Ahmad Fuad Lubis selaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) serta Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Setelah penandatanganan surat kuasa tersebut Ahmad Fuad Lubis dipanggil oleh Gatot Pujo Nugroho dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan,” *Sudah diteken ya surat kuasa itu?* yang dijawab Ahmad Fuad Lubis, *”Sudah pak”*.

- Akhir bulan April 2015 Otto Cornelis Kaligis, Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah menemui Syamsir Yusfan untuk dipertemukan dengan Tripeni Irianto Putro selaku Ketua PTUN Medan. Kemudian Syamsir Yusfan mengantarkan Otto Cornelis Kaligis, Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurindra Tri Achyuni alias Indah menemui Tripeni Irianto Putro di ruangan Ketua PTUN di lantai II kantor PTUN Medan untuk konsultasi mengenai gugatan penyalahgunaan kewenangan yang rencananya akan diajukan ke PTUN Medan yang sebelumnya belum pernah disidangkan di PTUN. Selanjutnya Tripeni Irianto Putro mengatakan *”silahkan dimasukkan saja, nanti akan kita periksa.”* Setelah Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah keluar dari ruangan Tripeni Irianto Putro, Otto Cornelis Kaligis kemudian memberikan amplop berisi uang SGD 5.000 (*lima ribu dolar Singapura*) kepada Tripeni Irianto Putro dan kembali menemui Syamsir Yusfan di ruangnya lalu Otto Cornelis Kaligis memberikan uang sebesar USD 1,000 (*seribu dolar Amerika Serikat*).
- Pada sekitar awal bulan Mei 2015, Syamsir Yusfan menghubungi Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary melalui telepon menyampaikan pesan Tripeni Irianto Pujo bahwa permohonan dapat didaftarkan di PTUN Medan dengan mengatakan *”Kata Pak Ketua PTUN gugatan bisa di daftarkan jadi datang aja”*. Atas pemberitahuan tersebut, Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary melaporkan kepada Otto Cornelis Kaligis yang selanjutnya Otto Cornelis Kaligis memutuskan mendaftarkan permohonannya pada tanggal 5 Mei 2015, sehingga pada tanggal 4 Mei 2015 Otto Cornelis Kaligis memerintahkan Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary agar menghubungi Mustafa yang merupakan orang kepercayaan Gatot Pujo Nugroho untuk menyiapkan tiket pesawat ke Medan berikut penjemputannya untuk Otto Cornelis Kaligis dan Moh. Yagari Bhastava Guntur alias Gary.
- Pada tanggal 5 Mei 2015 sebelum mendaftarkan gugatan ke PTUN Medan, Otto Cornelis Kaligis menemui Tripeni Irianto Putro di ruangan Ketua PTUN Medan berkonsultasi terkait permohonan gugatan penyalahgunaan kewenangan yang akan diajukannya, kemudian Otto Cornelis Kaligis memberikan beberapa buku keterangannya dan 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah USD 10,000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) dengan permintaan agar Tripeni Irianto Putro menjadi hakim yang nantinya akan menangani gugatan tersebut. Setelah itu Otto Cornelis Kaligis menemui Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary yang menunggu di luar ruangan Ketua PTUN Medan dengan mengatakan, —*sudah saya kasih pak Ketua, saya mau pulang duluan ke Jakarta, mau urus aja dulu pendaftaran*—. Kemudian Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary mendaftarkan gugatan Permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam mengeluarkan panggilan permintaan keterangan Nomor B-473/N.2.5/Fd.5/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 terhadap AHMAD FUAD LUBIS selaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) serta Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke PTUN Medan dengan Nomor register Berkas Perkara Gugatan Nomor: 25/G/2015/PTUN.MDN dengan Pemohon Drs. ACHMAD FUAD LUBIS, M.Si dan Termohon Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

- Bahwa setelah mendaftarkan gugatan, Syamsir Yusfan menyuruh Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary bertemu dengan Tripeni Irianto Putro di ruangan Ketua PTUN Medan, yang mana Terdakwa dan Amir Fauzi sudah berada dalam ruangan tersebut. Kemudian Tripeni Irianto Putro mengatakan kepada Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary, “*kemarin pak O.C Kaligis meminta saya (Tripeni Irianto Putro) menjadi hakim dalam perkara ini, kemudian saya menunjuk 2 (dua) orang majelis ini sebagai anggota Majelis Hakimnya*” sambil memperkenalkan Terdakwa dan Amir Fauzi sebagai hakim anggota.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2015 Tripeni Irianto Putro selaku Ketua PTUN Medan mengeluarkan surat penetapan Nomor : 25/PEN/2015/PTUN-MDN yang menetapkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut adalah Tripeni, Irianto Putro sebagai Ketua Majelis Hakim dengan anggota Majelis Hakim masing-masing Terdakwa dan Amir Fauzi, sedangkan Syamsir Yusfan walau Panitera PTUN Medan menetapkan dirinya sebagai Panitera Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa, Tripeni Irianto Putro dan Amir Fauzi menerima Berkas Gugatan Permohonan, kemudian mendiskusikan perkara tersebut saat itu Amir Fauzi berpendapat keputusan berupa Surat Panggilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang dijadikan obyek permohonan adalah tidak tepat menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 sedangkan yang tepat menjadi obyek permohonan adalah Keputusan dan atau tindakan Ahmad Fuad Lubis selaku pemohon berkaitan dengan Penggunaan Dana Bansos, Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD. Selanjutnya Terdakwa, Tripeni Irianto Putro, dan Amir Fauzi bersepakat akan memanggil langsung para pemohon untuk memberikan penjelasan tanpa melalui Proses Pemeriksaan persiapan.
- Beberapa hari kemudian Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah menemui Terdakwa, Tripeni Irianto Putro, dan Amir Fauzi di ruangan kerja Tripeni Irianto Putro. Dalam pertemuan tersebut Tripeni Irianto Putro menanyakan tentang obyek dari permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak sah. Selanjutnya Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary menyampaikan bahwa yang dimohon untuk dinyatakan tidak sah adalah sebagaimana petitum permohonan tersebut yang sudah dinilai oleh beberapa ahli. Saat itu Amir Fauzi mengatakan “*Kok gugatan Pak OC maunya seperti ini. Obyeknya tidak pas, seharusnya yang dijadikan obyek permohonan adalah keputusan/ tindakan pemohon terkait dengan tanggungan dana BOS dll bukannya Keputusan dari Kejati.*” Selanjutnya Terdakwa dan Tripeni Irianto Putro juga memberikan pendapat yang sama dan atas pendapat tersebut Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gery mengatakan akan menyampaikannya kepada Otto Cornelis Kaligis.
- Behwa pada tanggal 18 Mei 2015 sebelum dilaksanakan sidang dengan agenda pembacaan permohonan dan tanggapan Termohon, Otto Cornelis Kaligis, Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni menemui Syamsir Yusfan dan meminta untuk dipertemukan dengan Tripeni Irianto Putro lalu Syamsir Yusfan mengantar Otto Gornelis Kaligis, Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni ke ruangan kerja Tripeni Irianto Putro. Dalam pertemuan dengan Tripeni Irianto Putro tersebut Otto Gornelis Kaligis meyakinkan Tripeni Irianto Putro mengenai gugatan permohonan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta agar Tripeni Irianto Putro bersikap berani dalam memutus sesuai dengan petitum gugatan karena permohonan tersebut termasuk kategori baru.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 Yenny Octorina Misnan melaporkan kepada Otto Cornelis Kaligis terkait penerimaan uang sejumlah USD 30,000 (*tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat*) dan Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari Evy Susanti. Kemudian Otto Cornelis Kaligis memerintahkan Yenny Octorina Misnan agar sebagian uang tersebut dimasukkan ke dalam 4 (empat) buah amplop putih dengan perincian masing-masing berisi USD.5,000 (*lima ribu dolar Amerika Serikat*) dalam bentuk pecahan USD.100 (*seratus dolar Amerika Serikat*) selanjutnya Yenny Octorina Misnan menyerahkan uang tersebut kepada Otto Cornelis Kaligis. Pada malam harinya Otto Cornelis Kaligis, Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah berangkat ke Medan. Setelah sesampainya di Medan Otto Cornelis Kaligis, Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah menemui Gatot Pujo Nugroho membahas perkembangan gugatan di PTUN Medan.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2015 Otto Cornelis Kaligis, Moh.Yagari Bhastava Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah menemui Tripeni Irianto Putro di ruangan kerjanya dan meminta agar permohonannya dimasukkan dalam wewenang Pengadilan PTUN sesuai Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Setelah itu, Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah keluar dari ruangan Tripeni Irianto Putro lebih dahulu, sedangkan Otto Gornelis Kaligis tetap dalam ruangan dan menyerahkan sebuah amplop warna putih kepada Tripeni Irianto Putro, namun Tripeni Irianto Putro menolaknya. Setelah itu Otto Cornelis Kaligis dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah pulang ke Jakarta dan menyuruh MoH.Yagari Bhatarra Guntur alias Gary untuk menemui Terdakwa guna menjelaskan kesimpulan yang sudah dibuatnya namun Terdakwa tidak berada di kantor sehingga Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary juga meninggalkan kantor PTUN Medan menuju Bandara Kualanamu Medan dengan tujuan Jakarta. Setelah Otto Cornelis Kaligis sampai di Jakarta kemudian menitipkan 2 (dua) buah buku yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah amplop putih kepada Yurinda Tri Achyuni alias Indah karena buku tersebut akan dibawa kembali ke Medan sambil menunggu informasi dari Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary menunggu Bandara Kualanamu Medan, Terdakwa diberitahu oleh Syamsir Yusfan bahwa Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary ingin bertemu dan Terdakwa mempersilakannya. Setelah itu Syamsir Yusfan menghubungi Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary melalui telepon dan mengatakan "*Hakim ingin bertemu*". Kemudian Terdakwa ditemui oleh Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary di kantor PTUN Medan di ruangan Syamsir Yusfan. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary, "*Mana pak OC Kaligis ?*". Moh.Yageri Bhastara Guntur alias Gary menyampaikan bahwa Otto Cornelis kaligis sudah terlebih dahulu pulang ke Jakarta. selanjutnya Terdakwa meminta Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gery melakukan pemaparan hukum terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan menyampaikan permintaan Otto Gornelis Kaligis agar putusannya nanti sesuai dengan petitum gugatan yaitu Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan surat panggilan permintaan keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dinyatakan tidak sah serta untuk permintaan keterangan harus ada pemeriksaan pengawasan internal terlebih dahulu.
- Terdakwa kemudian menemui Amir Fauzi di ruang kerjanya dan memberitahukan Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary telah datang menemui Terdakwa menyampaikan permintaan Otto Cornelis Kaligis agar dibantu dikabulkan permohonannya, saat itu Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary juga menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Amir Fauzi. Atau permintaan dan janji akan diberikannya sejumlah uang oleh Otto Cornelis Kaligis melalui Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary tersebut Terdakwa dan Amir Fauzi sepakat untuk memenuhi permintaan Otto Cornelis Kaligis tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa kembali menemui Moh.Yageri Bhastara Guntur alias Gary di ruangan Syamsir Yusfan dan menyampaikan "*oke kalo gitu, terus buat kita apa? Bisa tidak, nanti hari minggu pak OC Kaligis ketemu saya langsung disini*". Atas permintaan Terdakwa tersebut, Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gavy mengatakan "*kalau begitu nanti saya sampaikan ke pak OC Kaligis, karena yang memutuskan pak OC Kaligis*". Atas permintaan tersebut, Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary akan menyampaikannya kepada Otto



Cornelis Kaligis dan meminta pertemuan hari Minggu dilakukan pada pukul 10.00 WIB. Setelah itu Terdakwa memberitahukan apa yang telah di-sampaikan oleh Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary tersebut kepada Amir Fauzi, kemudian Amir Fauzi menjawab “*Sekarang kita menghadap ke Pak Ketua untuk musyawarah majelis hakim*”. Terdakwa dan Amir Fauzi lalu menghadap kepada Tripeni Irianto Putro untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim. Didalam musyawarah tersebut, Terdakwa menyampaikan tentang pertemuannya dengan Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary sedangkan Tripeni Irianto Putro juga menyampaikan pertemuannya dengan Otto Gornelis Kaligis. Pada Musyawarah Majelis Hakim tersebut Tripeni Irianto meminta kepada Terdakwa dan Amir Fauzi untuk membantu mengatur permohonan dari Otto Cornelis Kaligis selaku kuasa dari Ahmad Fuad Lubis. Kemudian Tripeni Irianto menyarankan untuk tidak mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyelidikan karena itu bersifat umum atau pidana, tetapi hanya pada surat permintaan keterangan karena bersifat khusus. Kemudian Amir Fauzi mengatakan “*kalaupun diterima sebagai obyek permohonan untuk diuji hanyalah permohonan angka 3 dan 4 maupun pengujiannya hanya dari aspek prosedur hukum administrasi sedangkan petitum permohonan angka 2 kita tidak berwenang menguji karena itu ranah pidana*”. Akhirnya disepakati bahwa permohonan dapat dikabulkan sebagian;

- Bahwa sesampainya di Jakarta Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary menghubungi Otto Cornelis Kaligis melalui telepon menyampaikan permintaan Terdakwa untuk bertemu langsung dengan Otto Cornelis Kaligis pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 pada pukul 10.00 WIB di Kantor PTUN Medan yang disetujui oleh Otto Gornelis Kaligis dengan mengatakan “*kita bertiga berangkat hari Minggu*”.
- Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 2 Juli 2015 bertempat di kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates, Otto Cornelis Kaligis juga bertemu dengan Evy Susanti membicarakan mengenai perkembangan persidangan di PTUN Medan dan Otto Cornelis Kaligis meminta tambahan uang sejumlah USD.25,000 (*dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat*) untuk diberikan kepada hakim PTUN Medan agar gugatannya dikabulkan. Kemudian atas permintaan Otto Cornelis kaligis tersebut Evy Susanti menyampaikannya kepada Gatot Pujo Nugroho.



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 Otto Cornelis Kaligis, Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah berangkat ke Medan dimana Otto Cornelis Kaligis memerintahkan Yurinda Tri Achyuni alias Indah melalui Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary agar membawa 2 dua-buah buku dan 4 (empat) buah amplop berwarna putih dengan mengatakan, *cek Indah ...sampai mana dia bawa nggak "bukunya" buat disana? percuma kalau dia nggak bawa*. Sesampainya di Medan, Otto Cornelis Kaligis, Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah dengan mengendarai Toyota Alphard Velfire warna hitam menuju ke kantor PTUN Medan. Kemudian sesampainya di kantor PTUN Medan Otto Cornelis Kaligis meminta Yurinda Tri Achyuni alias Indah mengeluarkan 2 (dua) buah buku dan 4 (empat) buah amplop setelah melihat mobil Ford Estate yang dikendarai Terdakwa dan Amir Fauzi masuk ke halaman PTUN Medan. selanjutnya Otto Cornelis Kaligis memerintahkan Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary untuk memberikan 2 (dua) buah buku yang didalamnya masing-masing diselipkan 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang sejumlah USD 5.000 (*lima ribu dolar Amerika Serikat*) untuk diberikan kepada Terdakwa dan Amir Fauzi. Kemudian Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary mendatangi Terdakwa dan Amir Fauzi dan menyerahkan masing-masing 1 (satu) buah buku yang di dalamnya telah diselipkan 1 (satu) amplop berisi uang senilai USD.5000 (*lima ribu dolar Amerika Serikat*) dengan mengatakan *"Ini titipan dari pak OC Kaligis buat bapak dan pak OC ada di depan"* dan menawarkan *"Mau ketemu pak OC Kaligis pak?"* yang dijawab oleh Terdakwa *"Oya terima kasih, ga usah ga pa-pa."* Setelah itu, Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary masuk kembali ke dalam mobil dan menyampaikan kepada Otto Cornelis Kaligis bahwa buku sudah diserahkan kepada Terdakwa dan Amir Fauzi. Kemudian didalam mobil tersebut Otto Cornelis Kaligis kembali menyerahkan 6 (dua) buah amplop putih lainnya yang berisi uang kepada Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary dengan mengatakan *"Itu yang tipis amplopnya kasih ke Pansek Syamsir Yusfan dan yang satunya simpan dulu"*. Setelah itu Otto Cornelis Kaligis kembali ke Jakarta sedangkan Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary diminta Otto Cornelis Kaligis untuk tetap tinggal di Medan.
- Pada malam harinya Otto Cornelis Kaligis menghubungi Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary melalui telepon dan meminta agar amplop yang tadi dibawa diserahkan kepada Syamsir Yusfan dengan mengatakan *"jangan lupa"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera". Masih pada hari yang sama sekitar pukul 11.30 wib Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary dihubungi Evy Susanti melalui telepon milik Mustafa yang menanyakan apakah penyerahan uang kepada hakim aman atau tidak, dan dijawab oleh Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary bahwa uang telah diserahkan. Atas jawaban Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary tersebut Evy Susanti kemudian menjawab, "*Ya udah kalo sudah aman, saya takut tadi Gary lama replynya, takut kan saya, ini Gary kemana ya takutnya jebakan dan OTT.*"

- Terdakwa dan Amir Fauzi pada keesokan harinya di hari Senin tanggal 6 Juli 2015 melaporkan kepada Tripeni Irianto Putro di ruang kerjanya perihal adanya penerimaan uang dari Otto Cornelis Kaligis melalui Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary namun jumlahnya tidak sesuai harapan Terdakwa dan Amir Fauzi yang ditanggapi oleh Tri peni Irianto Putro dengan mengatakan, "*Itu kan hanya sebagian yang dikabulkan*".
- Masih pada hari yang sama, Otto Gornelis Kaligis menghubungi Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary melalui telepon membahas kemungkinan putusan Majelis Hakim karena khawatir gugatannya akan ditolak dengan mengatakan "*Kemarin dia bilang apa? kau kasih buku dia terima ya?*" namun Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary meyakinkan Otto Cornelis Kaligis bahwa uang telah diserahkan kepada Terdakwa dan Amir Fauzi sehingga gugatannya akan dikabulkan dengan mengatakan "*iya dia terima, cuma dia kan bilang kemarin bahwa itu nanti akan ada di pertimbangan mengenai bahwa tindakannya.*" Selain itu Otto Cornelis Kaligis juga mengarahkan Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary untuk memastikan isi pertimbangan putusannya mengabulkan permohonannya dengan mengatakan, "*Kalo bisa bilang ke paniteranya dibikin itu aja, diketik aja dia sekarang, kan ketahuan kan pertimbangannya, kau ngomong sama paniteranya, kau kasih itu dolarnya dulu.*"
- Kemudian masih pada hari yang sama MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR alias GARY diajak oleh MUSTAFA menemui GATOT PUJO NUGROHO di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut GATOT PUJO NUGROHO menanyakan perkembangan persidangan, kemudian MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR alias GARY menyampaikan bahwa sidang putusan akan dilaksanakan tanggal 7 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa, Tripeni Irianto Putro dan Amir Fauzi membacakan putusan Perkara Gugatan No. 25/ G/2415/PTUN-MDN, dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;*
- *Menyatakan keputusan Termohon nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov. Sumut. Ada unsur penyalahgunaan Wewenang;*
- *Menyatakan tidak sah Keputusan Termohon nomor: B/473/N.2.5/Fd.1/43/2415 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku Mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (FUD) Pemprov. Sumut.*
- *Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp269.000,.(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).*
- *Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*
- Selesai persidangan, Moh.Yagari Bhastara Guntur alies Gary menemui Syamsir Yusfan di ruangnya dan menyerahkan amplop tipis berwarna putih berisi uang sebesar USD 1000 (*seribu dolar Amerika Serikat*) sebagaimana arahan OC Kaligis dengan mengatakan “*Ini THR dari pak OC Kaligis*”.
- Pada hari itu juga sekitar jam 23:31:50 WIB Otto Cornelis Kaligis menelpon Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary melalui handphone milik Yurinda Tri Achyuni alias Indah menanyakan hasil putusan sidang, dalam pembicaraan tersebut Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary menyampaikan bahwa uang untuk Tripeni Irianto Putro belum diserahkan karena menunggu arahan dari Otto Cornelis Kaligis. Atas penyampaian tersebut Otto Cornelis Kaligis mengatakan bahwa dirinya yang akan menyerahkan langsung kepada Tripeni Irianto Putro minggu depan dengan kalimat “*ok nanti minggu depan saya langsung*”.
- Pada tanggal 8 Juli 2015 sore hari Syamsir Yusfan menghubungi Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary melalui telepon dengan mengatakan, “*Pak Gary, Ketua mau mudik nih, gimana?*” Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary menjawab, “*nanti saya tanya pak OC Kaligis dulu, saya ga bisa mutusin*”. Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tersebut, Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary menyampaikan kepada Otto Cornelis Kaligis melalui Yurinda Tri Achyuni alias Indah dengan mengatakan, “*yang tengah minat buku*” dan mengirimkan *Short Message Service (SMS)* yang berbunyi, “*ini mau dikasih kapan, soalnya senin mau mudik*”. Setelah Yurinda Tri Achyuni alias Indah menyampaikannya kepada Otto Cornelis Kaligis lalu mengirimkan pesan melalui LINE kepada Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary dengan mengatakan, “*menurut bapak, Pak OC Kaligis, pokoknya pasti dikasih*”. Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary kembali mengatakan, “*iya tapi katanya mau mudik*”. Kemudian Yurinda Tri Achyuni alias Indah mengatakan, “*Ger ini ada diperintahkan bapak besok pagi kamu aja yang berangkat*”.

- Pagi hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary pergi ke Medan menuju Kantor PTUN menemui Syamsir Yusfan di ruangannya dan menyampaikan keinginannya bertemu Tripeni Irianto Putro dengan mengatakan, “*ini ada titipan pak OG Kaligis untuk pak Ketua*”. Kemudian Syamsir Yusfan mengatakan, “*ayo saya antar*”, kemudian Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary mengatakan, “*nggak apa nih pak ?*” Syamsir Yusfan menjawab, “*tenang saja*” Kemudian Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary diantar Syamsir Yusfan menemui Tripeni Irianto Putro di ruangannya sambil membawa amplop berisi uang yang sebelumnya telah dititipkan oleh Otto Cornelis Kaligis. Kemudian Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary bertemu dengan Tripeni Irianto Putro seorang diri, dan menyerahkan amplop putih berisi uang dengan mengatakan, “*ini ada titipan dan pak OC Kaligis untuk mudik*” dan Tripeni Irianto Putro menerima amplop berisi uang sebesar USD.5,000 (*lima ribu dolar Amerika Serikat*) tersebut. Kemudian Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary keluar dari ruangan Tripeni Irianto Putro, selanjutnya pada saat Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary keluar dari pintu utama Kantor PTUN Medan Petugas KPK menangkap Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary, Terdakwa, Tripeni Irianto Putro dan Amir Fauzi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

A T A U

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DERMAWAN GINTING selaku *Pegawai Negeri* yaitu Hakim PTUN Medan yang menerima tunjangan jabatan dan hak-hak lainnya dari Keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, atau selaku *Penyelenggara Negara* yaitu Hakim PTUN Medan yang di angkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) tanggal 8 Juli 2003 Nomor : 105/M Talun 2003 dan ditempatkan sebagai Hakim PTUN Medan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 58a./DJMT/KEP/1X/2013 tanggal 17 September 2013 bersama-sama dengan TRI PENI IRIANTO selaku Ketua Majelis Hakim PTUN Medan dan AMIR FAUZI selaku Hakim PTUN Medan serta SYAMSIR YUSFAN selaku Panitera PTUN Medan pada bulan Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Jalan Bunga Raya No.18 Medan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan serta sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Menerima hadiah atau janji* yaitu menerima hadiah pertama uang tunai seluruhnya sejumlah USD.5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) dari GATOT PUJO NUGROHO DAN EVY SUWANTI melalui OTTO CORNELIS KALIGIS DAN MOH.YAGARI BHASTARA GUNTUR alias GARY, *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya* yaitu hadiah tersebut diketahui atau patut diduga diberikan kepada Terdakwa karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Hakim PTUN Medan yang dapat mengabulkan permohonan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam mengeluarkan panggilan permintaan keterangan Nomor : B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 terhadap AHMAD FUAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS selaku Ketua Bendahara Umum Daerah , BUD) terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DFH) serta Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara *atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya* yaitu yang menurut pikiran GATOT PUJO NUGROHO, EVY SUSANTI dan OTTO CORNELIS KALIGIS serta MOH.YAGARI BHASTARA GUNTUR alias GARY Pemberian hadiah tersebut *ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa*, selaku Hakim PTUN yang dapat mengabulkan permohonan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atas Penyelidikan tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDF), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2015, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor : PRINT-35/N.6/Fd.1/07/2055 tanggal 16 Maret 2015 melakukan pemanggilan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara APBD 2052 dengan mengirimkan surat panggilan permintaan keterangan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor : B-385/N.2.1/Fd.5/03/2015 tanggal 19 Maret 2015 sehubungan dengan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDF), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI juga mengirimkan surat Nomor: B-170/F/2/Fd.1/02/2015 tanggal 20 Maret 2015 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara perihal bantuan permintaan keterangan yang pada pokoknya meminta bantuan Gubernur menyampaikan surat permintaan keterangan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Biro Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Terhadap panggilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan RI tersebut, Gatot Pujo Nugroho memerintahkan kepada R. Sabrina dan Ahmad Fuad Lubis untuk hadir pada panggilan kedua.

- Selanjutnya Gatot Pujo Nugroho setelah mengetahui adanya panggilan dari Kejaksaan RI tersebut, kemudian bersama Evy Susanti datang ke kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates di Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123 Jakarta Pusat dan bertemu dengan Otto Cornelis Kaligis, Yulius Irwansyah, Anis Rifai, dan Moh. Yagari Bastara Guntur alias Gary, membahas bagaimana upaya agar pemanggilan R. Sabrina dan Ahmad Fuad Lubis tersebut tidak mengarah kepada keterlibatan Gatot Pujo Nugroho. Pada pertemuan tersebut Otto Cornelis Kaligis memberikan saran kepada Gatot Pujo Nugroho apabila ada pemanggilan agar tidak dipenuhi dan mengajukan permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke PTUN Medan. atas saran Otto Cornelis Keligis tersebut Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti menye-tujuinya, sedangkan untuk mengantisipasi apabila adanya pemanggilan permintaan keterangan oleh Kejaksaan RI, Otto Cornelis Kaligis akan lebih dahulu meminta penjelasan dari R. Sabrina dan Ahmad Fuad Lubis.
- Bahwa pada tanggal 1 April 2015 setelah ada panggilan kedua dari Kejaksaan Agung RI, R. Sabrina dan Ahmad Fuad Lubis menemui Gatot Pujo Nugroho di ruang kerjanya. Selanjutnya Gatot Pujo Nugroho memerintahkan R. Sabrina dan Ahmad Fuad Lubis untuk memenuhi panggilan tersebut dengan terlebih dahulu menemui dan berkonsultasi kepada Otto Cornelis Kaligis selaku penasihat hukum pribadi Gatot Pujo Nugroho serta membawa dokumen terkait perkara tersebut. Selanjutnya pada tanggal 2 April 2015 sekitar pukul 08.40 wib R. Sabrina dan Ahmad Fuad Lubis pergi ke kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates dan bertemu dengan Otto Cornelis Kaligis, Enis Rifai, Yulius Irwansyah, Rico Pandairot, dan Moh. Yagari Bhatara Guntur alias Gary serta Evy Susanti membahas adanya surat permintaan keterangan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara den Dirdik Jampidsus Kejaksaan Agung RI. Dalam pertemuan tersebut disepakati R. Sabrina dan Ahmad Fuad Lubis akan memenuhi panggilan tersebut dengan didampingi Penasihat Hukum dari kantor Otto Gornelis Kaligis & Associates.
- Bahwa masih sekitar bulan April 2015 bertempat di sebuah rumah makan di kota Medan, Ahmad Fuad Lubis atas permintaan Gatot Pujo Nugroho menandatangani surat kuasa kepada tim penasihat hukum Otto Cornelis Kaligis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Associates untuk mengajukan permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PTUN Medan dalam mengeluarkan surat pemanggilan untuk permintaan keterangan Nomor : B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 kepada Ahmad Fuad Lubis selaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) serta Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Setelah penandatanganan surat kuasa tersebut Ahmad Fuad Lubis dipanggil oleh Gatot Pujo Nugroho dengan menanyakan, " *Sudah diteken ya surat kuasa itu?*" yang dijawab Ahmad Fuad Lubis, " *Sudah pak*".

- Akhir bulan April 2015 Otto Cornelis Kaligis Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah menemui Syamsir Yusfan untuk dipertemukan dengan Tripeni Irianto Putro selaku Ketua PTUN Medan. Kemudian Syamsir Yusfan mengantarkan Otto Cornelis Kaligis, Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah menemui Tripeni Irianto Putro di ruangan Ketua PTUN di lantai II kantor PTUN Medan untuk Konsultasi mengenai gugatan penyalahgunaan kewenangan yang rencananya akan diajukan ke PTUN Medan yang sebelumnya belum pernah disidangkan di PTUN. Selanjutnya Tripeni Irianto Putro mengatakan *silahkan dimasukkan saja, nanti akan kita periksa.*" Setelah Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah keluar dari ruangan Tripeni Irianto Putro, Otto Cornelis Kaligis kemudian memberikan amplop berisi uang SGD 5.000 (*lima ribu dolar Singapura*) kepada Tripeni Irianto Putro dan kembali menemui Syamsir Yusfan di ruangannya lalu Otto Cornelis Kaligis memberikan uang sebesar USD 1.000 (*seribu dolar Amerika Serikat*).
- Pada sekitar awal bulan Mei 2015, Syamsir Yusfan menghubungi Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary melalui telepon menyampaikan pesan Tripeni Irianto Putro bahwa permohonan dapat didaftarkan di PTUN Medan dengan mengatakan " *Kata Pak Ketua PTUN gugatan bisa di daftarkan jadi datang aja*". Atas pemberitahuan tersebut, Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary melaporkan kepada Otto Cornelis Kaligis yang selanjutnya Otto Cornelis Kaligis memutuskan mendaftarkan permohonannya pada tanggal 5 Mei 2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selingga pada tanggal 4 Mei 2015 Otto Cornelis Kaligis memerintahkan Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary agar menghubungi Mustafa yang merupakan orang kepercayaan Gatot Pujo Nugroho untuk menyiapkan tiket pesawat ke Medan berikut penjemputannya untuk Otto Gornelis Kaligis dan Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary.

- Pada tanggal 5 Mei 2015 sebelum mendaftarkan gugatan ke PTUN Medan Otto Cornelis Kaligis menemui Tripeni Irianto Putro di ruangan Ketua PTUN Medan berkonsultasi terkait permohonan gugatan penyalahgunaan kewenangan yang akan diajukannya, kemudian Otto Cornelis Kaligis memberikan beberapa buku karangannya dan 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi uang berjumlah USD 10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) dengan permintaan agar Tripeni Irianto Putro menjadi hakim yang nantinya akan menangani gugatan tersebut. Setelah itu Otto Cornelis Kaligis menemui Moh.Yagari Bhatara Guntur alias Gary yang menunggu di luar ruangan Ketua PTUN Medan dengan mengatakan, “*sudah saya kasih pak Ketua, saya mau pulang duluan ke Jakarta, Kau urus aja dulu pendaftaran*”. Kemudian Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary mendaftarkan gugatan Permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam mengeluarkan panggilan permintaan keterangan Nomor : B-473/N.2.5 /Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 terhadap AHMAD FUAD LUBIS selaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) serta Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke PTUN Medan dengan nomor register Berkas Perkara Gugatan Nomor : 65/G/2015/PTUN-MDN dengan Pemohon Drs. ACHMAD FUAD LUBIS, MS.i den Termohon Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
- Bahwa setelah mendaftarkan gugatan, Syamsir Yusfan menyuruh Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary bertemu dengan Tripeni Irianto Putro di ruangan Ketua PTUN Medan, yang mana Terdakwa dan Amir Fauzi sudah berada dalam ruangan tersebut. Kemudian Tripeni Irianto Putro mengatakan kepada Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary, “*kemarin pak O.C Kaligis meminta saya (Tripeni Irianto Putro) menjadi hakim dalam perkara ini, kemudian saya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk 2 (dua) orang majelis ini sebagai anggota Majelis Hakimnya” sambil memperkenalkan Terdakwa dan Amir Fauzi sebagai hakim anggota.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2015 Tripeni Irianto Putro selaku Ketua PTUN Medan mengeluarkan surat penetapan nomor : 25/PEN/2015/PTUN-MDN yang menetapkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut adalah Tripeni Irianto Putro sebagai Ketua Majelis Hakim dengan anggota Majelis Hakim masing-masing Terdakwa dan Amir Fauzi sedangkan Syamsir Yusfan selaku Panitera PTUN Medan menetapkan dirinya sebagai Panitera Pengganti.
- Bahwa setelah Terdakwa Tripeni Irianto Putro dan Amir Fauzi menerima Berkas Gugatan Permohonan, kemudian mendiskusikan perkara tersebut saat itu Amir Fauzi berpendapat Keputusan berupa Surat Panggilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang dijadikan obyek permohonan adalah tidak tepat menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 70 Tahun 2014 sedangkan yang tepat menjadi obyek permohonan adalah Keputusan dan atau tindakan Ahmad Fuad Lubis selaku pemohon berkaitan dengan Penggunaan Dana Bansos, Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penyerahan Modal pada sejumlah BUMD. Selanjutnya Terdakwa, Tripeni Irianto Putro, dan Amir Fauzi bersepakat akan memanggil langsung para pemohon untuk memberikan penjelasan tanpa melalui Proses Pemeriksaan Persiapan.
- Beberapa hari kemudian Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah menemui Terdakwa, Tripeni Irianto Putro, dan Amir Fauzi di ruangan kerja Tripeni Irianto Putro. Dalam pertemuan tersebut Tripeni Irianto Putro menanyakan tentang obyek dari permohonan Termohon untuk dinyatakan tidak sah. Selanjutnya Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary menyampaikan bahwa yang dimohon untuk dinyatakan tidak sah adalah sebagaimana petitum permohonan tersebut yang sudah dinilai oleh beberapa ahli. Saat itu Amir Fauzi mengatakan “*Kok gugatan Pak OC maunya seperti ini. Obyeknya tidak pas, seharusnya yang dijadikan obyek permohonan adalah keputusan/ tindakan pemohon terkait dengan penggunaan dana BOS dll bukannya Keputusan dari Kejati.*” Selanjutnya Terdakwa dan Tripeni Irianto Putro juga memberikan pendapat yang sama dan atas pendapat tersebut Moh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yagari Bhastara Guntur alias Gary mengatakan akan menyampaikannya kepada Otto Cornelis Kaligis.

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2015 sebelum dilaksanakan sidang dengan agenda pembacaan termohonan dan tanggapan Termohon, Otto Cornelis Kaligis, Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni menemui Syamsir Yusfan dan meminta untuk dipertemukan dengan Tripeni Irianto Putro lalu Syamsir Yusfan mengantar Otto Cornelis Kaligis, Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni ke ruangan kerja Tripeni Irianto Putro. Dalam pertemuan dengan Tripeni Irianto Putro tersebut Otto Cornelis Kaligis meyakinkan Tripeni Irianto Putro mengenai gugatan permohonan dan minta agar Tripeni Irianto Putro bersikap berani dalam memutuskan sesuai dengan petitum gugatan karena permohonan tersebut termasuk kategori baru.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 Yenny Octorine Misnan melaporkan kepada Otto Cornelis Kaligis terkait penerimaan uang sejumlah USD 30.000 (*tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat*) dan Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari Evy Susanti. Kemudian Otto Cornelis Kaligis memerintahkan Yenny Octorina Misnan agar sebagian uang tersebut dimasukkan ke dalam 4 (empat) buah amplop putih dengan perincian masing-masing berisi USD 5.000 (*lima ribu dolar Amerika Serikat*) dalam bentuk pecahan USD 100 (*seratus dolar Amerika Serikat*) selanjutnya Yenny Octorina Misnan menyerahkan uang tersebut kepada Otto Cornelis Kaligis. Pada malam harinya Otto Cornelis Kaligis, Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah berangkat ke Medan. Setelah sesampainya di Medan Otto Cornelis Kaligis, Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah menemui Gatot Pujo Nugroho membahas perkembangan gugatan di PTUN Medan.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 Otto Cornelis Kaligis, Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah menemui Tripeni Irianto Putro di ruangan kerjanya dan meminta agar permohonannya dimasukkan dalam wewenang Pengadilan PTUN sesuai Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Setelah itu, Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah keluar dari ruangan Tripeni Irianto Putro lebih dahulu, sedangkan Otto Cornelis Kaligis tetap dalam ruangan dan menyerahkan sebuah amplop warna putih kepada Tripeni Irianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putro, namun Tripeni Irianto Putro menolaknya. Setelah itu Otto Cornelis Oaligis dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah pulang ke Jakarta dan menyuruh Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary untuk menemui Terdakwa guna menjelaskan kesimpulan yang sudah dibuatnya namun Terdakwa tidak berada di kantor sehingga Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary juga meninggalkan kantor PTUN Medan menuju Bandara Kualanamu Medan dengan tujuan Jakarta. Setelah Otto Cornelis Kaligis sampai di Jakarta kemudian menitipkan 2 (dua) buah buku yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah amplop putih kepada Yurinda Tri Achyuni alias Indah karena buku tersebut akan dibawa kembali ke Medan sambil menunggu informasi dari Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary.

- Bahwa pada saat Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary menuju Bandara Kualanamu Medan, Terdakwa diberitahu oleh Syamsir Yusfan bahwa Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary ingin bertemu dan Terdakwa mempersilahkannya. Setelah itu Syamsir Yusfan menghubungi Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary melalui telepon dan mengatakan "*Hakim ingin bertemu*". Kemudian Terdakwa ditemui oleh Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary di kantor PTUN Medan di ruangan Syamsir Yusfan. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary, "*Mana pak OC Kaligis?*". Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary menyampaikan bahwa Otto Cornelis Kaligis sudah terlebih dahulu pulang ke Jakarta. Selanjutnya Terdakwa meminta Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary melakukan pemaparan hukum terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan menyampaikan permintaan Otto Cornelis Kaligis agar putusannya nanti sesuai dengan petitum gugatan yaitu Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan surat panggilan permintaan keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dinyatakan tidak sah serta untuk permintaan keterangan harus ada pemeriksaan pengawasan internal terlebih dahulu.
- Terdakwa kemudian menemui Amir Fauzi di ruang kerjanya dan memberitahukan Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary telah datang menemui Terdakwa menyampaikan permintaan Otto Cornelis Kaligis agar dibantu dikabulkan permohonannya, saat itu Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary juga menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Amir Fauzi. Atas permintaan dan janji akan diberikannya sejumlah uang oleh Otto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cornelis Kaligis melalui Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary tersebut Terdakwa dan Amir Fauzi sepakat untuk memenuhi permintaan Otto Cornelis Kaligis tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa kembali menemui Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary di ruangan Syamsir Yusfan dan menyampaikan *“oke kalo gitu, terus buat kita apa? Bisa tidak, nanti hari minggu pak OC Kaligis ketemu saya langsung disini?”*. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary mengatakan *“kalau begitu nanti saya sampaikan ke pak OC Kaligis, karena yang memutuskan pak OC Keligis”*. Atas permintaan tersebut, Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary akan menyampaikannya kepada Otto Cornelis Kaligis dan meminta pertemuan hari minggu dilakukan pada pukul 10.00 WIB. Setelah itu Terdakwa memberitahukan apa yang telah disampaikan oleh Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary tersebut Kepada Amir Fauzi, kemudian Amir Fauzi menjawab *“Sekarang kita menghadap ke Pak Ketua untuk musyawarah majelis hakim”*. Terdakwa dan Amir Fauzi lalu menghadap kepada Tripeni Irianto Putro untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim. Di dalam musyawarah tersebut, Terdakwa menyampaikan tentang pertemuannya dengan Moh.Yagari Bhatara Guntur alias Gary, sedangkan Tripeni Irianto Putro tugas menyampaikan pertemuannya dengan Otto Cornelis Kaligis. Pada Musyawarah Majelis Hakim tersebut Tripeni Irianto meminta kepada Terdakwa dan Amir Fauzi untuk membantu mengabulkan permohonan dari Otto Cornelis Kaligis selaku kuasa dari Ahmad Fuad Lubis. kemudian Tripeni Irianto menyarankan untuk tidak mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyelidikan karena itu bersifat umum atau pidana, tetapi hanya pada surat permintaan keterangan karena bersifat khusus. Kemudian Amir Fauzi mengatakan *“kalaupun diterima sebagai obyek permohonan untuk diuji hanyalah permohonan angka 3 dan 4 itupun pengujiannya hanya dari aspek prosedur hukum administrasi sedangkan petitum permohonan angka 6 kita tidak berwenang menguji karena itu ranah pidana”*. Akhirnya disepakati bahwa permohonan dapat dikabulkan sebagian;
- Bahwa sesampainya di Jakarta Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary menghubungi Otto Cornelis Kaligis melalui telepon menyampaikan permintaan Terdakwa untuk bertemu langsung dengan Otto Cornelis kaligis pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 pada pukul 10.00 WIB diKantor PTUN Medan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Otto Cornelis Kaligis dengan mengatakan *"kita bertiga berangkat hari Minggu"*.

- Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 2 Juli 2015 bertempat di kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates, Otto Cornelis Kaligis juga bertemu dengan Evy Susanti membicarakan mengenai perkembangan persidangan di PTUN Medan dan Otto Cornelis Kaligis meminta tambahan uang sejumlah USD 25.000 (*dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat*) untuk diberikan kepada hakim PTUN Medan agar gugatannya dikabulkan. Kemudian atas permintaan Otto Cornelis Kaligis tersebut Evy Susanti menyampaikannya kepada Gatot Pujo Nugroho.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 Otto Cornelis Kaligis, Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah berangkat ke Medan dimana Otto Cornelis Kaligis memerintahkan Yurinda Tri Achyuni alias Indah melalui Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary agar membawa 2 (dua) buah buku dan 4 (empat) buah amplop berwarna putih dengan mengatakan, *"cek Indahsampai mana dia bawa nggak "bukunya" buat disana? ... percuma kalau dia nggak bawa"*. Sesampainya di Medan, Otto Cornelis Kaligis, Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah dengan mengendarai Toyota Alphard Velfire warna hitam menuju ke Kantor PTUN Medan. Kemudian sesampainya di kantor PTUN Medan Otto Cornelis Kaligis meminta Yurindra Tri Achyuni alias Indah mengeluarkan 2 (dua) buah buku dan 4 (empat) buah amplop setelah melihat mobil Ford Escape yang dikendarai Terdakwa dan Amir Fauzi masuk ke halaman PTUN Medan. Selanjutnya Otto Cornelis Kaligis memerintahkan Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary untuk memberikan 2 (dua) buah buku yang di dalamnya masing-masing diselipkan 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang sejumlah USD 5.000 (*lima ribu dolar Amerika Serikat*) untuk diberikan kepada Terdakwa dan Amir Fauzi. Kemudian Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary mendatangi Terdakwa dan Amir Fauzi dan menyerahkan masing-masing 1 (satu) buah buku yang di dalamnya telah diselipkan 1 (satu) amplop berisi uang berisi USD 5.000 (*lima ribu dolar Amerika Serikat*) dengan mengatakan *"Ini titipan dari pak OC Kaligis buat Bapak dan pak OC ada di depan"* dan menawarkan *"Mau ketemu pak OC Kaligis pak?"* yang dijawab oleh Terdakwa *"Oya terima kasih, ga usah ga pa-pa."* Setelah itu, Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary masuk kembali ke dalam mobil dan menyampaikannya kepada Otto Cornelis Kaligis bahwa buku sudah diserahkan kepada Terdakwa dan Amir Fauzi. Kemudian di dalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Otto Cornelis Kaligis kembali menyerahkan 2 (dua) buah amplop putih lainnya yang berisi uang kepada Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary dengan mengatakan *“Itu yang tipis amplopnya kasih ke Pansek Syamsir Yusfan dan yang satunya simpan dulu”*. Setelah itu Otto Cornelis Kaligis kembali ke Jakarta sedangkan Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary diminta Otto Cornelis Kaligis untuk tetap tinggal di Medan.

- Pada malam harinya Otto Cornelis Kaligis menghubungi Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary melalui telepon dan meminta agar amplop yang tadi dibawa diserahkan kepada Syamsir Yusfan dengan mengatakan *“jangan lupa panitera”*. Masih pada hari yang sama sekitar pukul 11.30 wib Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary dihubungi Evy Susanti melalui telepon milik Mustafa yang menanyakan apakah penyerahan uang kepada hakim aman atau tidak, dan dijawab oleh Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary bahwa uang telah diwerahkan. Atas jawaban Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary tersebut Evy Suwanti kemudian menjawab, *“Ya udah kalo sudah aman, saya takut tadi Gary lama replynya, takut kan saya, ini Gary kemana ya takutnya jebakan dan OTT.”*
- Terdakwa dan Amir Fauzi pada keesokan harinya di hari Senin tanggal 6 Juli 2015 melaporkan kepada Tripeni Irianto Putro di ruang kerjanya perihal adanya penerimaan uang dari Otto Cornelis Kaligis melalui Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary namun jumlahnya tidak sesuai harapan Terdakwa dan Amir Fauzi yang ditanggapi oleh Tripeni Irianto Putro dengan mengata-kan, *“Itu kan hanya sebagian yang dikabulkan”*.
- Masih pada hari yang sama, Otto Cornelis Kaligis menghubungi Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary melalui telepon membahas kemungkinan putusan Majelis Hakim karena khawatir gugatannya akan ditolak dengan mengatakan *“Kemarin dia bilang apa? kau kasih buku dia terima ya?”* namun Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary meyakinkan Otto Cornelis Kaligis bahwa uang telah diserahkan kepada Terdakwa dan Amir Fauzi sehingga gugatannya akan dikabulkan dengan mengatakan *“iya dia terima, cuma dia kan bilang kemarin bahwa itu nanti akan ada di pertimbangan mengenai bahwa tindakannya.”* selain itu Otto Cornelis Kaligis juga mengarahkan Moh.Yagari Bhasara Guntur alias Gary untuk memastikan isi pertimbangan putusnya mengabulkan permohonannya dengan mengatakan, *“Kalo bisa bilang ke paniteranya dibikin*



itu aja, diketik aja dia sekarang kan ketahuan kan pertimbangannya, kau ngomong sama paniteranya, kau kasih itu dolarnya dulu.”

- Kemudian masih pada hari yang sama MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR alias GARY diajak oleh MUSTAFA menemui GATOT PUJO NUGROHO di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut GATOT PUJO NUGROHO menanyakan perkembangan persidangan kemudian MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR alias GARY menyampaikan bahwa sidang putusan akan dilaksanakan tanggal 7 Juli 2015 ;
- Pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa, Tripeni Irianto Putro dan Amir Fauzi membacakan putusan Perkara Gugatan No. 25/G/2015/PTUN-MDN, dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Poook Perkara :

- *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;*
- *Menyatakan keputusan Termohon nomor: B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov. Sumut. Ada unsur penyalahgunaan Wewenang;*
- *Menyatakan tidak sah Keputusan Termohon nomor : B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 35 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku Mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov. Sumut.*
- *Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp269.000, (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).*
- *Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*
- Selesai persidangan, Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary menemui Syamsir Yusfan di ruangannya dan menyerahkan amplop tipis berwarna putih berisi uang sebesar USD1,000 (seribu dolar Amerika Serikat- sebagaimana arahan OC Kaligis dengan mengatakan “Ini THR dari Pak OC Kaligis”.
- Pada hari itu juga sekitar jam 13:31:50 WIB Otto Cornelis Kaligis menelpon Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary melalui handphone milik Yurinda Tri Achyuni alias Indah menanyakan hasil putusan sidang, dalam pembicaraan tersebut Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary menyampaikan bahwa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tripeni Irianto Putro belum diserahkan karena menunggu arahan dari Otto Cornelis Kaligis. Atas penyampaian tersebut Otto Cornelis Kaligis mengatakan bahwa dirinya yang akan menyerahkan langsung kepada Tripeni Irianto Putro minggu depan dengan kalimat *“ok nanti minggu depan saya langsung”*.

- Pada tanggal 8 Juli 2015 sore hari Syamsir Yusfan menghubungi Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary melalui telepon dengan mengatakan, *“Pak Gary, Ketua mau mudik nih, gimana?”* Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary menjawab, *“nanti saya tanya pak OC Kaligis dulu, saya ga bisa mutusin”*. Atas permintaan tersebut, Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary menyampaikan kepada Otto Cornelis Kaligis melalui Yurinda Tri Achyuni alias Indah dengan mengatakan, *“yang tengah minta buku”* dan mengirimkan *Short Message Service (SMS)* yang berbunyi, *“ini mau dikasih kapan, soalnya senin mau mudik,”*. Setelah Yurinda Tri Achyuni alias Indah menyampaikannya kepada Otto Cornelis Kaligis lalu mengirimkan pesan melalui LINE kepada Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary dengan mengatakan, *“menurut bapak (Pak OC Kaligis-, pokoknya nanti dikasih”*. Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary kembali mengatakan, *“iya tapi katanya mo mudik”*. Kemudian Yurinda Tri Achyuni alias Indah mengatakan, *“Ger ini ada diperintahkan bapak besok pagi kamu aja yang berangkat.”*
- Pagi hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary pergi ke Medan menuju Kantor PTUN menemui Syamsir Yusfan di ruangannya dan menyampaikan keinginannya bertemu Tripeni Irianto Putro dengan mengatakan, *“ini ada titipan pak OC Kaligis untuk pak Ketua”*. Kemudian Syamsir Yusfan mengatakan, *“ayo saya antar”*, kemudian Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary mengatakan, *“nggak papa nih pak ?”* Syamsir Yusfan menjawab, *“tenang saja”*. Kemudian Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary diantar Syamsir Yusfan menemui Tripeni Irianto Putro di ruangannya sambil membawa amplop berisi uang yang sebelumnya telah ditiptkan oleh Otto Cornelis Kaligis. Kemudian Moh. Yagari Bhastara Guntur menyerahkan amplop putih berisi uang dengan menyatakan *“ini ada titipan dari pak OC Kaligis untuk mudik”* dan Tripeni Irianto Putro menerima amplop berisi uang sebesar USD5,000 (*lima ribu dolar Amerika Serikat*) tersebut. Kemudian Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary keluar dari ruangan Tripeni Irianto Putro, selanjutnya pada saat Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu utama Kantor PTUN Medan Petugas KPK menangkap Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary, Terdakwa, Tripeni Irianto Putro dan Amir Fauzi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (5) ke-1 KUHPidana.

2 **Surat Tuntutan Penuntut Umum** pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DERMAWAN GINTING** bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Pearl, Imei: 351975042890962 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 0176 2583 9777 02, dan terdapat memory card micro SD 2 GB merk SanDisk.
 - 2 1 (satu) buah handphone Merk: Nokia, Tipe: RM-555, Model: N97-4, Imei: 358315/03/191732/1 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 1113 2580 9762, dan tanpa memory card
 - 3 1 (satu) buah tablet Merk: Samsung, Model: SM-T311, Imei: 357397/05/710829/1 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel tanpa No ICCID, dan tanpa memory card beserta 1 buah charger warna putih Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) KTP Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo a.n TRIPENI IRIANTO PUTRO no. 3307090507620006
- 5 1 (satu) buah tanda pengenal Mahkamah Agung RI a.n TRIPENI IRIANTO P., SH. MH, Dengan NIP 196207051988031004, Nomor tanda pengenal: 511/TPMA 2013 masa berlaku sampai dengan 13 Juni 2016, tertanggal 13 Juni 2013
- 6 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a/ n TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH, Msi dengan nomor NIP 196207051988031004
- 7 2 (dua) buah kunci meja kerja di ruang kantor PTUN Medan.
- 8 1 (satu) buah kartu atm BNI SYARIAH Master Card tanpa nama no.5264 2281 1031 6293.
- 9 1 (satu) buah kartu atm Mandiri Visa tanpa nama no.4097 6621 5237 3083.
- 10 1 (satu) buah kartu atm Paspur BCA a.n TRIPENI IRIANTO PUTRO SH no. 6019 0010 5557 0612.
- 11 1 (satu) buah kartu anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH., Msi. Dengan nomor anggota 7326.
- 12 1 (satu) buah amplop coklat dengan kop amplop Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi 5 lembar uang pecahan @ Sing \$1.000,- dengan total Sing\$5.000,-
- 13 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 100 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD10.000,-.
- 14 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 50 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD5.000,-.
- 15 2 (dua) buah flashdisc:
 - a Merk Toshiba sebesar 4 GB warna putih.
 - b Merk SanDisk sebesar 2 GB warna hitam.
- 16 1 (satu) buah buku berjudul “Barack Obama A Gift of Hope” karangan Otto Cornelis Kaligis.
- 17 2 (dua) buah buku berjudul “Antologi Tulisan Ilmu Hukum” Jilid 11, karangan Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.
- 18 3 (tiga) buah buku berjudul “Kasus Menarik Praperadialn di Indonesia” ditulis oleh Prof. DR. O.C. Kaligis, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 1 (satu) buah buku berjudul “Carut Marut Pemilu Legislatif 2014, Contoh Study Kasus” ditulis oleh Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH., MH.
- 20 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Curve, Imei: 356932046753699 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 1431 3237 6249, dan terdapat memory card.
- 21 Handphone Merk Apple, Type: iPhone, Model: MGAA2SA/A, SN: FK1NV33FG5QT, IMEI: 3544400067159434, MEID: 35444006715943, yang didalamnya terdapat simcard provider Telkomsel dengan ICCID: 8962100065624749201
- 22 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Torch, Imei: 35620 1043062805 yang didalamnya terdapat Simcard XL, No ICCID: 8962116113 54240640-5, dan terdapat memory card merk V-Gel Micro SD 2 GB.
- 23 1 (satu) buah kartu kredit Danamon Mastercard no. 5577 9114 4068 6285.
- 24 1 (satu) buah kartu Silver Debit Mandiri visa no. 4097 6624 0851 5081
- 25 1 (satu) buah kartu BRI Card Mastercard no. 5221 8410 9243 8794 a.n DERMAWAN GINTING SH.
- 26 1 (satu) buah kartu Mega Pass Visa no. 4214 0814 1004 5359 a.n RUFINA TARIGAN
- 27 1 (satu) buah kartu atm Bank BRI 6013 0113 8701 0530
- 28 1 (satu) buah kartu atm BCA no. 6019 0025 4525 2852.
- 29 1 (satu) buah kartu Paspor BCA no. 6019 0045 1791 8106.
- 30 1 (satu) buah kartu Silver Debit Mandiri visa no. 4097 6624 9115 1240.
- 31 1 (satu) buah A Card Flazz - BCA no. 0145 0018 0681 9722
- 32 2 (dua) buah kartu anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n DERMAWAN GINTING SH, no anggota 6428.
- 33 1 (satu) buah kartu Pengenal Mahkamah Agung RI no. 3512/TPMA/2009 a.n DERMAWAN GINTING, SH, nomor NIP: 040 069 069, tertanggal 1 Maret 2009.
- 34 3 (tiga) buah flashdisc:
 - a Merk iLive-T Series.
 - b Merk Kingston.
 - c Tanpa merk warna abu-abu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, no. 3515183112650015 a.n DERMAWAN GINTING, SH berlaku hingga 31 Desember 2015.
- 36 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, no. 3515183112650015 a.n DERMAWAN GINTING, SH berlaku hingga 31 Desember 2015.
- 37 1 (satu) bungkus bekas kartu Telkomsel Simpati no. 0813-6134 2420.
- 38 1 (satu) buah voice recorder merk Sony dengan no kode: 2660972.
- 39 1 (satu) bundel dokumen Kesimpulan; Dalam Perkara Permohonan Pengujian Kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor: 25/G/2015/PTUN.MDN atas nama pemohon: Drs. AHMAD FUAD LUBIS, MSI terhadap termohon: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates Advocates & Legal Consultants.
- 40 1 (satu) map warna hijau berisi:
- a 1 (satu) bundel print out berjudul “Tentang Pertimbangan Hukum”.
 - b 1 (satu) bundel print out berjudul “PUTUSAN nomor: 25/G/2015/PTUN-MDN – DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan terdapat catatan Biaya Perkara no.25/G/2015 – Sheilla.
- 41 2 (dua) lembar kertas tulisan tangan berjudul “Tentang Pertimbangan Hukum”.
- 42 1 (satu) buah external hardisk warna hitam merk Seagate Expansion Portable Drive model SRD00F1PN1D6AP1-500, SN: NA43A7B3, kapasitas 500 GB beserta kabel.
- 43 1 (satu) buah laptop warna abu-abu hitam merk Toshiba Satellite L745, SN: 5B366858W yang di dalamnya terdapat hardisc merk HGST, SN: BM0549KP, Model: HTS543232A7A384, Kapasitas 320 GB.
- 44 1 (satu) buah handphone Merk: Samsung GT-I9060, Tipe: Galaxy Grand Neo Duos, Imei: 352700/06/328491/2 dan imei no;352726/06/328491/7 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 0044 2209 3591 dan Simcard XL, No ICCID: 8962116713 38286417-3 dan terdapat memory card 16 GB merk SanDisk.
- 45 1 (satu) KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang a.n AMIR FAUZI no.3603280504690011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 46 1 (satu) buah tanda pengenal Mahkamah Agung RI a.n AMIR FAUZI SH.
Dengan NIP 040 066 818, Nomor tanda pengenal: PTUN/SEK/001/
VIII/2006 masa berlaku sampai dengan 31 Agustus 2011, tertanggal 31
Agustus 2006.
- 47 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI no.1380
TPMA/2015 a.n AMIR FAUZI, SH. MH. Dengan NIP:
196904051993031004 dengan jabatan Hakim PTUN Medan, tertanggal 07
Mei 2015 dan berlaku sampai dengan 7 Mei 2018.
- 48 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Acer, Model: Aspire 4750 Series,
Model No. MS2316, SN: LXRC80C02711508DFD2000.
- 49 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI
PEMOHON yang terdiri dari:
- a 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: B-473/N.2.5/Fd./03/2015 tanggal
31 Maret 2015 Perihal: Permintaan Keterangan (BUKTI P-1).
 - b 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari
C.H ENDRA GINTING, SH tanggal 24 Januari 2012 (BUKTI P-2).
 - c 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari M.
JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 25 Januari 2012 (BUKTI
P-3).
 - d 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari M.
JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 26 Januari 2012 (BUKTI
P-4).
 - e 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari
MIMIN INDRAYATI, S.Sos tanggal 1 Februari 2012 (BUKTI P-5).
 - f 5 (lima) lembar copy printout Artikel internet tentang Penandatanganan
Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan RI dan Kemendagri (BUKTI
P-6).
 - g 7 (tujuh) lembar copy Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksam Agung Republik
Indonesia Nomor: 01/KB/I-VIII.3/07/2007, Nomor: KEP-071/A/
JA/07/2007 Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap
Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak
Pidana (BUKTI P-7).
 - h 1 (satu) lembar copy Lampiran IV Surat Nomor: 068/KMA/HK.01/
VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012 Perihal: Permohonan Penerbitan



Fatwa MA Tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/
Daerah Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BUKTI P-8).

- i 1 (satu) bundel copy Dokumen Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Negara Pemerintah, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Politik, Seminar Nasional H.U.T Ikahi Ke – 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 maret 2015 (BUKTI P-9).
- j 1 (satu) bundel copy Dokumen Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang administrasi Pemerintahan), Dr. D. Andhi Nirwanto, Wakil Jaksa Agung RI, Seminar Nasional H.U.T Ikahi Ke – 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 maret 2015 (BUKTI P-10).
- k 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2009 Di Medan, Nomor: 104/S/XVIII.MDN/05/2010 Tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P-11).
- l 7 (tujuh) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010, Nomor: 198.A/S/XVIII.MDN/05/2011 Tanggal: 27 Mei 2011 (BUKTI P-12).
- m 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor: 43.B/LHP/XVIII.MDN/06/2012 Tanggal: 28 Juni 2012 (BUKTI P-13).
- n 5 (lima) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor: 87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 Tanggal: 13 Mei 2013 (BUKTI P-14).
- o 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor:



12.A/LHP/XVIII.MDN/05/2014 Tanggal: 20 Mei 2014 (BUKTI P-15).

p 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/1612/2014 Lampiran : 1.- Tanggal 2 Mei 2014 (BUKTI P-16).

q 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT KUASA yang terdiri dari:

50 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Substitusi R. ANDIKA YOEDISTIRA, S.H., M.H., tanggal 24 Juni 2015.

a 3 (tiga) lembar asli Daftar Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara Perdata Nomor: 05/.G/2015/PTUN.MDN.

b 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Sdr. R. ANDIKA YOEDISTIRA, SH. Tanggal 11 Juni 2002.

c 1 bundel surat kuasa khusus nomor : SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 2015, yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.
- 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.
- 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.
- d 1 bundel Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015, terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.
 - 2 (dua) bundel asli Surat Substitusi Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.

51 1 (satu) bundel asli dan 3 (tiga) bundel copy Surat Kuasa Nomor: 132/SK.IV/2015 Tanggal 28 April 2015 dan 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, S.H.

a 4 (empat) lembar Surat – Panggilan Ke II No. 25 / G / 2015 PTUN – MDN Tanggal 18 Mei 2015 dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT PANGGILAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 1 (satu) bundel tulisan tangan “*SprinLid =>.
- c 1 (satu) bundel copy Dokumen Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya.
- d 1 (satu) bundel copy Kesimpulan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.
- e 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- f 1 (satu) bundel copy Dokumen Upaya Administratif Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Sudarsono, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya.
- g 1 (satu) bundel copy tanggapan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.
- h 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.
- i 1 (satu) bundel copy Daftar Tambahan Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j 1 (satu) bundel copy Dokumen Diskresi Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Tatiek Sri Djatminati, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya.
- k 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Santer Sitorus, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015.
- l 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Pengadilan Atas Penerimaan Permohonan Untuk Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.
- 52 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan Berkas Perkara Gugatan No. 25/G/2015/PTUN-MDN tanggal 05 Mei 2015 yang terdiri dari:
 - a 1 (satu) bundel Draf Tentang Pertimbangan Hukum (tulisan tangan).
 - b 1 (satu) bundel Surat Asli Tanggal 5 Mei 2015 Perihal: Permohonan Pengujian Kewenangan.
 - c 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP C yang terdiri dari:
 - a 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan “Perkara No. 25/G/2015/PTUN-MDN”.
 - b 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan “Sidang Tgl. 9/6-15 Perkara No. 25/G/2015/PTUN-MDN”.
 - c 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan “No. 25/G/2015/PTUN-MDN Kamis, 11 Juni 2015”.
- 53 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP B yang terdiri dari:
 - a 3 (tiga) lembar copy Riwayat Pendidikan / Pekerjaan a.n. Dr. Lintong Oloan Siahaan, SH., MH.
 - b 6 (enam) lembar copy Daftar Riwayat Hidup a.n. Dr. H. Darwinsyah Minin, S.H., M.H.



- c 5 (lima) lembar copy Curriculum Vitae a.n. Muhammad Rullyandi, SH., HM.
- d 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor. 56/Ket/WD.II/FH/01/2015 Sdr. Muhammad Rullyandi, SH., MH. Jabatan: Tenaga Pengajar Luar Biasa.
- e 6 (enam) lembar copy Curriculum Vitae a.n. Muhammad Rullyandi, SH., HM.
- 54 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI TERMOHON yang terdiri dari:
 - a 3 (tiga) lembar Draf Bukti Surat Penggugat Dalam Perkara Nomor: 39/G/2015/PTUN-MDN antara PT. Sinar Agung Jaya Lestari Diwakili Oleh: Flinery Linsangan Sugiyono Sebagai Penggugat Melawan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Pangkalan Dodek Sebagai Tergugat.
 - b 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-31/N.2/Fd.1/03/2015 (T.1).
 - c 1 (satu) bundel copy Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 Tanggal: 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (T.2).
 - d 2 (dua) lembar copy Surat Nomor: B-384/N.2.1/Fd.1/03/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.3).
 - e 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: B-385/N.2.1/Fd.1/03/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Perihal: Permintaan Keterangan (T.4).
 - f 3 (tiga) lembar copy KUHP dan KUHAP Dilengkapi Dengan Yurisprudendi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad R. Soenarto Soerodibroto, S.H Edisi Kelima. (T.5).
 - g 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B-470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6).
 - h 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7).
- 55 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP A yang terdiri dari:
 - a 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan laporan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2009 Di Medan, Nomor: 104 B/S/XVIII.MDN/05/2010 Tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P-11).

- b 1 (satu) bundel copy Kesimpulan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.
- c 1 (satu) bundel asli Kesimpulan Dalam Perkara Permohonan Pengujian Kewenangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Atas Nama Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
- d 1 (satu) bundel Draf Surat No. 758/OCK.V/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Perihal: Akta Bukti Pemohon Pengujian Kewenangan.
- e 2 (dua) lembar copy legalisir cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.
- f 1 (satu) bundel asli Resume-Gugatan No. 25/G/215/PTUN-MDN beserta lampirannya.
- 56 1 (satu) bundel dokumen asli dengan kalimat awal “ Akan kita beri kesempatan kepada termohon terlebih dahulu untuk bertanya kepada ahli.
- 57 2 (dua) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan “No. 25/G/2015/PTUN-MDN (1)”.- 58 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan “Saksi Termohon”.- 59 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan “Saksi Penggugat/Pemohon”.- 60 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul menggunakan Tulisan Tangan “Saksi Ahli Dari Pemohon (2)”.- 61 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul menggunakan Tulisan Tangan “Saksi Ahli Dari Pemohon (1)”.- 62 1 (satu) lembar printout Tanggal Persidangan Perkara No. 25/G/2015/PTUN-MDN dalam map warna hijau dengan tulisan Permohonan Pemohon.- 63 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna kuning dengan tulisan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:



- a 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, No. Agenda: 428, Tgl. Masuk: 01 Juli 2015 beserta lampirannya.
- b 1 (satu) bundel asli Daftar Tambahan Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Sebagai Pemohon Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.
- c 1 (satu) bundel asli tanggapan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.
- d 1 (satu) lembar asli Surat No. 770/OCK.V/2015 Tanggal 22 Mei 2015 Perihal: Akta Bukti Tambahan Pemohon Pengujian Kewenangan.
- 64 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan Berita Acara No. 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:
 - a 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan “Sidang tgl 29/6-15”.
 - b 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan “Sidang tgl 25/6-15”.
 - c 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan “Termohon”.
- 65 1 (satu) buah hand phone warna hitam merk Sony, Model: D2403, Imei: 355101063719386, SN: ZH800670B2 yang didalamnya terdapat sim card dengan Provider Telkomsel dengan Kode: 6210 0075 3254 0720 04, tanpa memory card.
- 66 1 (satu) buah Lifebook warna hitam merk Fujitsu, Model SH561, SN: R1501615 yang didalamnya terdapat hardisk merk Seagate, SN: 5WX3CNCR, Model: ST9640320AS, kapasitas 64GB.
- 67 1 (satu) bundel tulisan tangan berjudul “Perkara No.25/6/2015/PTUN-MDN – BERITA ACARA SIDANG.
- 68 1 (satu) bundel dokumen asli dengan perihal: PERMOHONAN PENGUJIAN KEWENANGAN tertanggal 5 Mei 2015.
- 69 1 (satu) buah handphone warna putih Merk: Apple, Tipe: Iphone, Imei: 354441067168003, No. ICCID: 8962119212418884377, Model MGA2PA/A.
- 70 1 (satu) buah hp warna hitam merk Samsung, Type: Galaxy Note 3, Model: SM-N900, IMEI: 358916050746671, SN: RFID94VHJKX yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat Memory Card Micro SD merk SanDisk, kapasitas 2 GB dan simcard XL.

- 71 1 (satu) buah flashdisc warna hijau muda merk Toshiba, kapasitas 8 GB dengan kode: N723 D32210.
- 72 1 (satu) buah kartu atm Paspor BCA no. 6019 0016 8898 2556.
- 73 1 (satu) buah kartu BNI Mastercard Debit no. 5371 7618 1014 0993.
- 74 1 (satu) buah kartu BNI Style Titanium Mastercard a.n M. YAGARI BHASTARA no.5241 2509 1001 2623.
- 75 1 (satu) lembar boarding pass Garuda Indonesia tanggal 9 Juli 2015 rute Jakarta-Medan a.n GUNTUR/MYAGARIBHAS flight GA180.
- 76 1 (satu) buah KTP Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar a.n MUHAMMAD YAGARI BHASTARA GUNTUR, no KTP: 7371131805850011.
- 77 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta a.n MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, no: 3175081805850011.
- 78 1 (satu) lembar tanda terima warna kuning dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 631/51.537/US.XII/2014, tertanggal 5 Desember 2014, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,- dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO.
- 79 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 261/51.218/US.V/2015, tertanggal 27 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp20.000.000,- dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO.
- 80 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 257/51.214/US.V/2015, tertanggal 26 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,- dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO.
- 81 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 301/51.245/US.VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015, sudah terima uang sebesar Rp60.000.000,- dari Ibu EVI.
- 82 1 (satu) lembar Tanda Terima dari OC Kaligis & Associates Surat no. 1006/OCK.VII/2015, tanggal surat 1 Juli 2015, Kepada Bapak Gatot Pujo Nugroho Gubernur Sumatera Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR S.H pada Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2014.
- 84 1 (satu) buah buku yang berjudul Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan Pasca UU No 30 tahun 2014) yang ditulis Prof Dr OC Kaligis, SH MH.
- 85 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim diluar pasal 77 – pasal 83 KUHAP) yang ditulis oleh Prof Dr OC Kaligis, SH MH.
- 86 1 (satu) buah buku yang berjudul Barack Obama A Gift Of Hope Karangan Prof Dr OC Kaligis, SH MH.
- 87 1 (satu) buah buku mutasi besar yang di dalamnya terdapat tulisan sebagai berikut : No. 8, Nomor Perkara 25/G/2015/PTUN.MDN, Penggugat Drs. Ahmad Fuad Lubis, Ms, Tergugat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Majelis Hakim/ Panitera Pengganti: Tripeni Irianto Putro, SH, Msi, Dermawan Ginting, SH, MH , Amir Fauz SH, MH.
- 88 1(satu) map warna hijau bertuliskan Berita Acara No. 25/G/2015/PTUN-MDN yang berisi Berita Acara Reg No. 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs Ahmad Fuad Lubis, Msi sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai termohon.
- 89 1 (satu) buah map warna hijau dengan lambang PTUN Medan, Nomor : No. 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs Ahmad Fuad Lubis, Msi sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai termohon.
- 90 1 (satu) buah buku agenda warna biru tua bertuliskan Agenda Sidang Hakim Pengadilan TUN 2015.
- 91 1 (satu) buah buku Agenda warna pink motif kotak bertuliskan College House Campus.
- 92 1 (satu) buah buku dengan judul Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- 93 1 (satu) buah amplop besar warna putih dengan lambang Garuda bertuliskan petikan keputusan Presiden RI Nomor 71/K TAHUN 2014 ditujukan kepada Tripeni Irianto Putro Ketua Pengadilan TUN Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 94 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang senilai total USD 5000 (Lima ribudolar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD 100 (Seratus dolar Amerika).
- 95 1 (satu) buah buku yang berjudul Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan tulisan Dr. Ni'matul Huda SH, M. Hum dan R. Nazriyah SH, MH yang didalamnya terdapat amplop warna putih merk Jaya berisi uang senilai total USD 5000 (Lima ribudolar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD 100 (Seratus dolar Amerika).
- 96 1 (satu) buah buku warna merah jambu bertuliskan perkara masuk tahu 2015 'PANSEK'.
- 97 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D-518-Kp.04.02-Th.1989 tanggal 22 Agustus 1989, yang menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama TRI PENI IRIANTO PUTRO, SH menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- 98 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan Menjalankan Tugas Nomor : W1-TUN/833/Kp-04.6/IX/2012 tanggal 4 September 2012 yang menyatakan bahwa Tripeni Irianto Putro, SH Msi telah melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengadilan TUN Medan.
- 99 1(satu) bundel asli salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 35/KMA/SK/II/2014 tangal 28 Februrair 2014 tentang Pengangkatan dan Penempatan Hakim Lingkungan Hidup.
- 100 1 (satu) bundel asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 71/K/TAHUN 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan Golongan atas nama Tripeni Arianto Putro.
- 101 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bpk HM PRASETYO Jaksa Agung Republik Indonesia No. 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal permohonan dan klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh Prof. DR. OC KALIGIS, SH MH.
- 102 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bpk Muhammad Yusni SH MH Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal permohonan dan klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh Prof. DR. OC KALIGIS, SH MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103 1(satu) buah amplop warna putih tercetak OTTO CORNELIS KALIGIS dan Associates Advocat dan Legal Consultan Jalan Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160 Indonesia, yang berisi :

- a 1 (satu) lembar asli surat yang ditujukan kepada Yth Drs Ahmad Fuad Lubis, Msi No 759/OCK.V/2015 tertanggal 19 Mei 2013 hal Laporan sidang ke-1 yang ditandatangani oleh Prof Dr Oc Kaligis SH MH.
- b 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai tempel Rp 6000,- dengan kop Otto Cornellis Kaligis No /249/51.208/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bpk Gatot Pujo Nugroho, banyaknya uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bp. M. YAGARI BHASTARI SH dan Ibu Yurinda Achyuni SH LLM) ke Medan tgl 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Prof Dr Oc Kaligis SH MH tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015.
- c 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai tempel Rp 6000,- dengan kop Otto Cornellis Kaligis No 250/51.209/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bpk Gatot Pujo Nugroho, banyaknya uang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bp. Yulius Irawansyah SH, Bp. M. YAGARI BHASTARI SH dan Ibu Yurinda Achyuni SH LLM) ke Medan tgl 21 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Prof Dr Oc Kaligis SH MH tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015.
- d 1 (satu) lembar asli ber kop Garuda Indonesia tertulis diantaranya booking beeing ticket by sales counter Garuda Indonesia HAFIS TOUR dan TRAVEL, Booking Code : 8RTMXP book date : 2015-01-11, Pasenger detail : 1. RICO PANDEIROT/MR. 2. YULIUS IRAWANSYA/MR. 3 YAGARI BHASTARA/MR. Total Payment 6.357.600 IDR.

104 Uang senilai total USD 700 (Tujuh ratus dolar Amerika) yang terdiri dari 7 lembar uang pecahan USD 100 (Seratus dolar Amerika).

105 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim di luar pasal 77- Pasal 83 KUHAP) karangan Prof. DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.

106 (Tidak diajukan);

107 3 (tiga) lembar fotocopy draft Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Tahun Anggaran 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 2 (dua) lembar print out Daftar Bansos Mesjid Yang Ada Dalam Buku APBD 2014.
- 109 2 (dua) lembar fotocopy Penetapan No.01/Akta Pid.Sus. TPK/2014 / PN.Mdn tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali atas nama RIDWAN PANJAITAN, S.Psi sebagai Terdakwa yang memberikan kuasa kepada Prof. Dr. O.C KALIGIS, SH. MH.
- 110 1 (satu) lembar print out Resume Perkara Pemprov Sumut.
- 111 1 (satu) buku berjudul Carut Marut Pemilu Legislatif 2014 Contoh Study Kasus, karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH.
- 112 1 (satu) buku berjudul Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam tugas kedinasan (Pasca UU No .30 Tahun 2014), karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH.
- 113 1 (satu) buku berjudul KONTRAK BISNIS Teori dan Praktik Jilid 2 karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH.
- 114 1 (satu) lembar foto Prof. Dr. OC KALIGIS, SH., MH bersama Gatot Pujo Nugroho dan Yurinda Tri Achyuni.
- 115 1 (satu) bundel copy dokumen yang bertuliskan RESUME PERKARA PEMPROV SUMUT yang berisi :
- a 1(satu) bundel dokumen terdiri dari :
- 1(satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Gubernur Sumut, Nomor B-170/F/2/Fd.1/02/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal Bantuan Permintaan Keterangan (Pidsus 53).
 - 1(satu) lembar copy dokumen Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Sekda Propinsi Sumut, Nomor B-768/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan.
 - 1(satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Kepala Biro Keuangan Daerah Propinsi Sumut, Nomor B-767/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan.
 - 1(satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Gubernur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumut, Nomor B-973/F2/Fd.1/02/2015 tanggal 30 Maret 2015
Perihal Bantuan Permintaan Keterangan ke II.

- 1(satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Sekda Propinsi Sumut, Nomor B-843/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan ke II.
- 1(satu) lembar copy dokumen surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut Kepada Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahar Umum Daerah (BUD) Propinsi Sumut, Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan.
- 1(satu) lembar copy dokumen surat Plh Sekda Propinsi Sumut kepada 1. Mahmud Segala (bendahara Umum Daerah Pempropstu Periode 2012), 2. Baharuddin (Bendahara Umum Daerah Pempropstu Periode Juni 2012-2014) 3. Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahar Umum Daerah (BUD) Propinsi Sumut Periode 2014, Nomor 180/2542/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Bantuan Pemanggilan.

b 1 (satu) bundel copy dokumen berisi dokumen sbb :

- 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 24 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan C.H Endra Ginting,SH.
- 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 25 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan M. Juli Samsir Siregar, S.Sos.
- 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 26 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan M. Juli Samsir Siregar, S.Sos.
- 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 1 Februari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan Mimin Indrayati, S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 481/OCK.III/2015, tanggal 27 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk Maruli Hutagalung, SH, MH (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.
- d 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 48.../OCK.III/2015, tanggal Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk Tjahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri RI) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.
- e 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 482/OCK.III/2015, tanggal 30 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk Muhammad Yusni, SH, MH Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.
- f 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 489/OCK.III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.
- g 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 490/OCK.III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk HM Prasetyo (Jaksa Agung RI) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.
- h 4 (empat) lembar copy Surat dari Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H.,M.H kepada Bapak H. M Prasetyo Jaksa Agung RI No 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum.
- i 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 513/OCK.IV/2015, tanggal 6 April 2015 yang ditujukan kepada Bpk Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum tanpa tanda tangan.
- j 1 (satu) lembar copy surat dari Mahkamah Agung RI Nomor: 068/KMA/HK.01VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 Perihal : Permohonan Penerbitan Fatwa MA tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/ Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang ditujukan kepada Ketua BPK.
- k 1 (satu) bundel copy dokumen "Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kejaksaan Agung RI" Nomor : 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK.

116 1 (satu) bundel surat hasil print out dari Komputer MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dengan Nomor: 2318/OCK.XII/2014 yang ditujukan kepada **Bpk Gatot Pujo Nugroho** Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 1 Desember 2014 yang di dalamnya berisi Nomor urut 6 perihal Bantuan Sosial TA 2013, Nomor urut 7 (tujuh) perihal Dana Bagi Hasil, Nomor urut 8 perihal Bantuan Keuangan Provnsi, Nomor urut 9 perihal Bantuan Operasional Sekolah.

117 3 (tiga) buah kartu nama, atas nama : Yurinda Tri Achyuni, M. Yagari Bhastara Guntur, Yulius Irwansyah, masing-masing dari Kantor OCK & Associates Advocates & Legal Consultants.

118 1 (satu) buah map warna biru muda yang berlogo "OCK & Associates Advocates & Legal Consultants" yang di dalamnya terdapat :

- a 1 (satu) bundel copy dokumen yang bertuliskan Ahli Dr. Lintang Siahaan, SH, MH yang menerangkan dengan berjanji pada persidangan tanggal 9 Juni 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
- b 2 (dua) lembar copy dokumen yang pada point 1 (satu) bertuliskan Apakah Ahli mengetahui adanya UU NO. 30 TAHUN 2014? Tentang apa?
- c 4 (empat) rangkap copy dokumen yang berisi daftar pertanyaan-pertanyaan.

119 1 (satu) lembar copy buku register yang bertuliskan surat kuasa tanggal 28 April 2015 atas nama Achmad Fuad Lubis, PH TUN Medan, 132, Gary yang dilegalisir oleh Afrian Bondjol.

120 2 (dua) lembar print out foto yang masing-masing lembar terdapat 2 (dua) foto :

- a HAM – 1356 size : 15,4 MB, created 21 Juni 2013, 9:56 : 08, midfied : 19 Juni 2013, 12:47 : 22.
- b HAM – 1357, 7,75 MB, created : 21 Juni 2013, 9:56:09, Modified: 20 Juni 2013, 10:29:11.
- c HAM – 1350, size 7,95MB, created 21 Juni 2013, 9:56:06, Modified 20 Juni 2013, 10:10:22.



- d HAM – 1355, size 6,36MB, created 21 Juni 2013, 9:56:08, Modified 20 Juni 2013, 10:22:08.
- 121 a. 1 (satu) lembar Foto copy warna KTP Provinsi DKI Jakarta, berlaminating atas nama O.C. KALIGIS, SH dengan NIK : 3171011906420005.
- b. 1 (satu) lembar Foto copy warna Kartu Anggota PERADI dengan nomor anggota 78.10032 berlaku s/d 31-12-2015 atas nama O.C. KALIGIS.
- c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).
- 122 a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibu Evie USD 900 Rp. (USD 40). --
- b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/ KALIGIS MR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal 01 Juli dengan No. Seat 8H.
- c. 1 (satu) lembar asli kartu nama dari OCK & Associates Advocates & Legal Consultants atas nama Aryani Novitasari, SE.
- 123 1 (satu) lembar copy Payroll Gaji Karyawan OCK Bulan Juni & THR melalui BCA tertulis tanggal 30/6.2015, Nomor urut 34. Moh Yagari Bastara.
- 124 1 (satu) buah Handphone dengan merk :VIVO, type: Y15, Imei 1 :867590029019173, Imei 2: 867590029019165, SN: EX15OFB06A04, warna putih, di dalamnya terdapat Sim Card Telkomsel, No ICCID: 0520 0000 1011 4946 dan Nucri SD Winova 8 GB dengan No. HP 081375344283.
- 125 1 (satu) buah HandPhone Merek VIVO warna putih dengan sarung handphone warna hitam dengan nomor telepon 085721711285, IMEI 1: 866403023065237 yang digunakan oleh RAMDAN TAUFIK SODIKIN.
- 126 Kartu Keluarga Nomor : 3217082208140009, dengan Nama Kepala Keluarga : G Pujo N, Alamat : Jl. Rambut Setra No. 16, Kota Baru Parahyangan, RT:006/RW: 011, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat.
- 127 Sobekan Surat Nikah, antara seorang laki-laki yang bernama GATOT PUJO NUGROHO, Tempat tanggal lahir : Megelang, 11-06-1962, dengan



seorang perempuan yang bernama EVY SUSANTI Binti HAIKIN RACHMAT.

128 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian antara GATOT PUJO NUGROHO dengan OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS tentang penunjukkan selaku Penasehat Hukum Tetap no.042/OCK.K.VII/2013 tanggal 23 September 2013.

129 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terkait Bantuan Sosial .

130 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor : 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak H.M.Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia).

131 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor : 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Husni (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara).

132 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Mobil Nomor K-05913773, dengan Plat Nomor Mobil BK 14 GE, Merek Toyota, Type Vellfire ZG 2.4 A/T, Warna Hitam.

133 1 (satu) bundel copy dokumen yang tertuliskan “daftar penanganan perkara tahun 2014”.

134 1 (satu) lembar copy resume perkara pemprov Sumut

135 1 (satu) Bundel copy dokumen surat Bantuan Permintaan Keterangan dari kejaksaan kepada Pemprov Sumut

136 1 (satu) Bundel copy dokumen Tanda terima data/dokumen/benda dari yang menyerahkan CH HENDRA GINTING, SH dan yang menerima Jaksa Penyelidik MURNANADA UTAMA, SH

137 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 481/OCK.III/2015 tanggal 27 Maret 2015 Perihal Permohonan Informasi dan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Maruli Hutagalung SH., M.H

138 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 483/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Tjahyo Kumolo

139 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 482/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Yusni, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 489/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia
- 141 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 490/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak HM Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia
- 142 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak HM Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia
- 143 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 513/OCK.IV/2015 tanggal 6 April 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
- 144 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen yang bertuliskan “LAMPIRAN”
- 145 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen yang bertuliskan “Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan”
- 146 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen yang bertuliskan “Arah Pemberantasan Korupsi ke depan”
- 147 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Permohonan penerbitan fatwa MA tentang kewenangan perhitungan kerugian negara/daerah oleh badan pemeriksa keuangan nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 dari ketua MA kepada Ketua BPK
- 148 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Kesepakatan Bersama BPK dan Kejaksaan RI Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007, nomor Kep : KEP-071/A/JA/07/2007 tentang tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana.
- 149 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Surat Nomor K/263/VI/2014/ Ditreskrimsus Tanggal 12 Juni 2014 perihal Pemberitahuan penghentian penyidikan perkara atas nama Tersangka MUHAMMAD ILYAS, S.Sos., M.Si.
- 150
- 151 1 (satu) amplop coklat yang dibagikan depan bertuliskan “Data Keuangan (gaji dan Renumerasi bulan Jan ’15 s/d Juli ’15) an. 1). Tripeni Irianto Putro. 2). Dermawan Ginting. 3). Amir Fauzi. 4). Syamsir Yusfan. Yang ditandatangani Mary I.N. Kasub.bag. KU, yang didalamnya berisi dokumen berupa : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan Januari 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.
- b 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan Februari 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi-.
- c 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nduk Pembayaran Gaji Induk **bulan Maret 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.

d 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan April 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.

e 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan Mei 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7.



Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan
Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.

f 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji nduk Pembayaran Gaji Induk **bulan Juni 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan
Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.

g 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji nduk Pembayaran Gaji Induk **bulan Juli 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan
Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk
54 orang Pegawai dengan nomor urut
8. Amir Fauzi.

h 6 (enam) lembar fotocopy legalisir
"Tanda Terima Tunjangan Khusus
Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Klas 1A Bulan Januari s/d Juni
2015, nomor urut 1 an. Syamsir
Yusfan.

152 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas No.
4672 ter tanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI
sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Pemb honorarium 2 orang ahli u/
memberikan keterangan di PTUN.

153 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas No.
4671 ter tanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI
sejumlah Rp. 60.000.000,- untuk Pemb uang saku Prof. Dr. O.C. Kaligis
dan GERY menghadiri sidang di PTUN tanggal 9/6/2015 beserta 1 (satu)
lembar fotocopy kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan
aslinya Nomor : 289/51.234/US.VI.2015.

154 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas No. 5328 ter tanggal
1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp.
50.000.000,- untuk uang saku Prof. Dr. O.C. Kaligis ke Medan tanggal 2/7
2015 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto Cornelis Kaligis &
Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 334/51.274/US.VII.2015.

155 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas No. 5330 ter tanggal
1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp.
399.600.000,- untuk deposit/ cicilan retainer fee Pak GATOT PUJO USD
30.000 kurs Rp. 13.320,- beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto
Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 335/51.275/
RF.VII.2015.

156 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas No. 5552 ter tanggal
7.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp.
33.000.000,- untuk deposit biaya administrasi untuk ambil salinan putusan
PTUN Medan USD 2.500,- kurs Rp. 13.300,- beserta 2 (dua) lembar asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya
Nomor : 345/51.280/Adm.VII.2015.

157 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Tanpa Nomor ter tanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 325.000.000,- untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO.

158 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 3746 ter tanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah SGD 55.000 senilai Rp. 538.615.000,- untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO.

159 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4346 ter tanggal 28/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk cicilan retainer fee GATOT PUDJO.

160 1 (satu) lembar asli salinan Pengeluaran Kas No. 5329 ter tanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 50.000.000,- keperluan pengambilan uang saku sidang PTUN Medan.

161 1 (satu) lembar asli salinan Pengeluaran Kas No. 5331 ter tanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah USD. 20.000, keperluan pengambilan tunai kurs Rp. 13.320.

162 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung model "SM-C111" dengan IMEI : 354598/06/010041/4 S/N : CF1F800DG6A warna putih beserta baterainya tanpa simcard.

163 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry 9790 Model REC710W dengan IMEI : 354730054344985 PIN : 2AF97033 warna hitam beserta baterainya tanpa simcard dan tanpa penutup belakang.

164 1 (satu) buah simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "621005623210141404".

165 1 (satu) buah micro simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "6210027032920440".

166 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Velvire ZG 2.4 A/T (2.362 CC) Model Minibus Tahun Pembuatan 2013 Isi Silinder 2362, dengan Nomor Polisi **BK 14 GE**, No Rangka : ANH20-8299086, No. Mesin : 2AZ-G256793, Warna Hitam Tahun Registrasi 2013, Nomor BPKB : L00036706, Atas Nama : EVI SUSANTY, ALAMAT : DUSUN V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEL. LIMAU MANIS KEC. TANJUNG MORAWA D/S beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kuncinya.-

- 167 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau model RM-1011 dengan IMEI-1 : 353672/06/020064/8 dan IMEI-2 : 353672/06/020065/5, yang didalamnya terdapat sim card XL dengan Nomor ICCID : 896211910166157700-4 tanpa memory card.
- 168 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Z10 PIN: 24E626DD, IMEI: 354010053823846 dengan SimCard Telkomsel tanpa memory card.
- 169 3 (tiga) lembar prin out dokumen Rincian Perjalanan OC KALIGIS Team yang ditandatangani PENTA RIRIS LUBIS tertanggal 30 Juli 2015.
- 170 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an. JEFRY HAMONANGAN dengan nomor rekening 137-00-0122207-0 periode 1 Mei 2015 sampai dengan 30 Juli 2015 cabang KCP Medan Ahmad Yani nomor katu 4617005117684239.
- 171 5 (lima) lembar print out Enhanced Passenger Manifest dengan nomor flight : IW 7012 Date : 05 Juli 2015 untuk penerbangan dari Bandara Kuala Namu Medan ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta.
- 172 3 (tiga) lembar print PNR (Print Number Record) yang diantaranya bertuliskan BMBTXP 2015/07/05 IW 7012 2015/07/04 2312 5 GWB 034 JKT 002 000 JKT 102.
- 173 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 28-04-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 29-04-2015, dengan nomor kamar yang dipesan kamar nomor 2001, 2033, jenis kamar Excutive Deluxe (ENK), dengan konfirmasi 3959468, dengan tanda tangan pemesan tanpa nama.
- 174 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2001, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,- nett, Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 11.23.
- 175 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2033, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,- nett, Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 12.05.
- 176 1 (satu) lembar foto copy KTP an. MUSTAFA, SE dengan no NIK 1271201308730005 berlaku hingga 13-08-2017.



177 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 01-07-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 02-07-2015, dengan nomor kamar yang dipesan kamar nomor 2906,2921,2927, (JNK) dengan konfirmasi 4252713, dengan tanda tangan pemesan MUSTAFA (081375344283).

178 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2921, type Junor Suit, Name Mr Mustafa, Mustafa Address Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 3.750.000,- nett, Arrival 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 02 Juli 2015 time 14.34..

179 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2906, type Deluxe, Name Mr Mustafa, Mustafa Address Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,- nett, Arriva 01 Juli 2015 time 21.07, Departure 02 Juli 2015 time 13.20.

180 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2906 tanggal 02-07-2015 jam 03:31 AM dengan bill yang harus dbayar lunas Rp. 300.080,-

181 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2927, type Deluxe, Name Mr Mustafa, Mustafa Address Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,- nett, Arriva 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 02 Juli 2015 time 13.21.

182 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2927 tanggal 02-07-2015 jam 01:31 AM dengan bill yang harus dbayar lunas Rp. 469.480,-

183 1 (satu) keping CD-R, Merk: Verbatim, warna: Silver, Kapasitas: 700 MG, S/N: C3131RE03214235LH dengan tulisan CCTV JW MARRIOTT MEDAN yang berisi rekaman CCTV dengan nama file:

- a Nama file: 003_150702002043.dav, MD5 HASH: 3675 EE3FE 20A39284385BF5241453, LOKASI: Lobby Depan Cam 3, MENIT: 12:20:43 s/d 12:21:20.
- b Nama file: 005_150702002043.dav, MD5 HASH 9 B47 C9E5F 3815EBFC9D1C7BAC1250390, LOKASI: Lobby Depan Cam 5, MENIT: 12:20:43 s/d 12:21:20.
- c Nama file: 007_150702002118.dav, MD5 HASH: D19 CBA 868FE8C576C05F3E178FBA9251, LOKASI: COR HPL – Cam 7, MENIT: 12:21:18 s/d 12:21:38.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Archive_20150702_002300.600, MD5 HASH: F95F CC92 CC9
E8AB4E3359692369052FC, LOKASI: Level 28 Cor D, MENIT:
12:23:00 s/d 12:31:00.

184 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA192 yang terdapat penumpang atas nama
KALIGIS / OTTO CORNELI dan BASTARA / Y. dari Bandara Soekarno
Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 April 2015 jam
boarding 16.50 WIB.

185 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama
BASTARA / MYAGARI MR. dari Bandara Kualanamu, Medan ke
Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 April 2015 jam boarding 13.45
WIB.

186 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama
KALIGIS / MR dan YAGARI / BHASTARA dari Bandara Soekarno Hatta,
Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 Mei 2015 jam boarding
05.15 WIB.

187 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama
YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara
Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 05 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB.

188 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama
YAGARI / M BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS dari
Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 18
Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.

189 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama
YURINDA / ACHYUNI MRS dan M YAGARI / BHASTARA G MR dari
Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 18
Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB.

190 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama
YAGARI / M BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS dari



Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.

191 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / ACHYUNI MRS dan YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB.

192 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M YAGARI / BHASTARA MR dan ANIS / RIFAI MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.

193 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS / RIFAI MR dan M YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB.

194 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 15.15 WIB.

195 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan, ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB.

196 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.

197 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB.

198 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonewia GA184 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 11 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.

199 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 11 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB.

200 1 (setu) bundel trintout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.

201 1 (satu) bundel printout legalisir Eccettance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA161 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB.

202 1 (satu) bundel prmntout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / M. YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 05.55 WIB.

203 5 (setu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atau nama GUNTUR / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 17.45 WIB.

204 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS / RIFAI MR dan GUNTUR / M. YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 Juni 2015 jam boarding 13.45 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA196 yang terdapat penumpang atas nama
YUVINDA / TRI ACHYUNI MRS, OC / KALIGIS MR dan GUNTUR /
M. YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke
Bandara Kualanamu, Medan tanggal 01 Juli 2015 jam boarding 19.25 WIB.
- 206 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA187 yang terdapat penumpang atas nama
OC / KALIGIS MR dan YURINDA / TRI ACHYUNI MRS dari Bandara
Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 02 Juli
2015 jam boarding 16.00 WIB.
- 207 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama
GUNTUR / M. YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Soekarno Hatta,
Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 06 Juli 2015 jam boarding
15.45 WIB.
- 208 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA184 yang terdapat penumpang atas nama
GUNTUR / M. YAGARI / BHASTARA MR, OC / KALIGIS MR dan
YURINDA / TRI ACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke
Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 Juli 2015 jam boarding 05.15 WIB.
- 209 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama
ANIS RIFAI, dan GUNTUR / M. YAGARI / BHASTARA MR dari
Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 07
Juli 2015 jam boarding 13.45 WIB.
- 210 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama
GUNTUR / M. YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Soekarno Hatta,
Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juli 2015 jam boarding
05.15 WIB.
- 211 5 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA186 yang terdapat penumpang atau nama
AFRIAN / BONDJOL MR dan VINCENCIUS / TOBING MR dari
Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 17
Juli 2015 jam boarding 10.30 WIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Samsung, Tipe: GT-E1205Y,
Imei: 356755064486219, warna hitam dan didalamnya terdapat Sim card
Telkomsel-

213 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan nomor
MAPA25PH290835117 yang berisikan antara lain :

- 1 File PDF 6281262622622_2015-06-04_07-17-53
- 2 File TDF 6281262622622_2015-06-29_16-15-02
- 3 File PDF 6681262622622_2015-06-30_12-47-47
- 4 File PDF 6281262622622_2015-07-41_0--31-11
- 5 File PDF 6281262622622_2015-07-01_09-33-43
- 6 File PDF 6281662622626_2055-07-01_23-45-37
- 7 File PDF 6281262622622_2015-07-04_47-30-14

214 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor
MAPA25TH295350972 yang berisikan antara lain :

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_6281362101414_2015-05-18_17-28-55.pdf	efb5755a19db78ffbab1df6085294fc4	Softcopy SMS
2	SMS_6281362101414_2015-05-20_07-29-58.pdf	6cb882de4e81a6d3520dfe6ccdd8f31b	Softcopy SMS
3	SMS_6281362101414_2015-05-20_07-34-45.pdf	04f94d07f1604869ef8473c100db48ac	Softcopy SMS
4	SMS_6281362101414_2015-05-20_08-32-04.pdf	d67660763ce59643a2362841179cd51d	Softcopy SMS
5	SMS_6281362101414_2015-05-20_08-41-24.pdf	6ebce7badf3145e4892b14c0c8987f63	Softcopy SMS
6	SMS_6281362101414_2015-05-20_13-58-04.pdf	818f18d7623e918469fbc9d7be31c5f	Softcopy SMS
7	SMS_6281362101414_2015-05-21_20-52-00.pdf	b71e2cf2b94bdc6b74f82049d6a66385	Softcopy SMS
8	SMS_6281362101414_2015-05-21_20-53-10.pdf	3c507e645b7c3ac6b32271b82d011333	Softcopy SMS
9	SMS_6281362101414_2015-05-21_20-54-13.pdf	101d6769f06ae586b5884185f8dff235	Softcopy SMS
10	SMS_6281362101414_2015-05-21_20-56-42.pdf	fae6a13fa86043a7a6664c143979c627	Softcopy SMS
11	SMS_6281362101414_2015-05-21_20-57-43.pdf	9207389ded2f0f63c1338479d7a12dd4	Softcopy SMS
12	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-05-33.pdf	77fd5b6a6e3f67230eb884d84cf6413d	Softcopy SMS
13	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-07-41.pdf	251a59ae53b3a07f1754628e3ecef7df	Softcopy SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-07-43.pdf	0f26633e4f27f93dcf499c0afbb86747	Softcopy SMS
15	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-07-51.pdf	2506479d73428a3757dde7bbe8f4bbfc	Softcopy SMS
16	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-24-43.pdf	baaed7ef6d05d6f803215a7a31a54c65	Softcopy SMS
17	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-28-35.pdf	09b6c4291218fcb3d221abe092732505	Softcopy SMS
18	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-32-01.pdf	56463b4bb980993edd741403614e3dc6	Softcopy SMS
19	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-04-50.pdf	6185ac826c216c0626921895c6954779	Softcopy SMS
20	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-22-17.pdf	38cab774eb16d9b074f49d08cf7a48a4	Softcopy SMS
21	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-24-14.pdf	0f76eb41aa9991fe9c6679dffe68086e	Softcopy SMS
22	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-26-22.pdf	e1300a1fb209001574e63a942c32c275	Softcopy SMS
23	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-28-03.pdf	4d93a39f1a90e43a9288495341084a31	Softcopy SMS
24	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-28-17.pdf	d8bf2878dedfe0fdc83b7a028cd57401	Softcopy SMS
25	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-28-53.pdf	fab970de0d2d3887843b0798377945f5	Softcopy SMS
26	SMS_6281362101414_2015-05-22_09-13-51.pdf	4aaf323716c1f5c7d22967dea8112b83	Softcopy SMS
27	SMS_6281362101414_2015-05-22_09-26-29.pdf	4558fc7e0c08d3e32e9f9e127e93a6e0	Softcopy SMS
28	SMS_6281362101414_2015-05-22_09-27-07.pdf	5827346afb1c85d952c0027cfcea2466	Softcopy SMS
29	SMS_6281362101414_2015-05-22_15-03-07.pdf	de73c850c31d074cec2681411b07b3ad	Softcopy SMS
30	SMS_6281362101414_2015-06-01_09-04-21.pdf	92596273abf500b25e5c1826e5429b40	Softcopy SMS
31	SMS_6281362101414_2015-06-01_09-07-48.pdf	a4646065306f0bef057514d4ec97eee5	Softcopy SMS
32	SMS_6281362101414_2015-06-01_09-51-02.pdf	ef7e4fb3080308bf54cb62fde0d4e1fa	Softcopy SMS
33	SMS_6281362101414_2015-06-01_09-59-27.pdf	bc70377392313d5a568f665ae3b2dd73	Softcopy SMS
34	SMS_6281362101414_2015-06-01_10-06-04.pdf	d673110e31a4d8a42c1e1a690837ba42	Softcopy SMS
35	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-30-18.pdf	2aa2760e5c660d2a9fea5b67788fa8a5	Softcopy SMS
36	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-37-33.pdf	8ea3bc57b4729750291038f3f310eb4e	Softcopy SMS
37	SMS_6281362101414_201	a129cd3add3c88ca1a9b	Softcopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5-06-01_16-39-10.pdf	b17e838f6e0f	SMS
38	SMS_6281362101414_201 5-06-01_16-40-05.pdf	acbac6b32988550bcea8 851215e38dd2	Softcopy SMS
39	SMS_6281362101414_201 5-06-01_16-42-08.pdf	12a3bd474de3f339f5ca 7fdd16f0eda0	Softcopy SMS
40	SMS_6281362101414_201 5-06-01_16-42-48.pdf	cea4b66a7bbfceb7ac9b 2034be7d8b29	Softcopy SMS
41	SMS_6281362101414_201 5-06-01_16-43-32.pdf	20eec616780035dff567 f1d544674f48	Softcopy SMS
42	SMS_6281362101414_201 5-06-01_16-44-07.pdf	54437057ee424599d16 27086eff4ade1	Softcopy SMS
43	SMS_6281362101414_201 5-06-01_19-30-13.pdf	92196f96b6fbace6592 51d4a7bb4528	Softcopy SMS
44	SMS_6281362101414_201 5-06-01_19-30-40.pdf	dcf78fbf37818233dfb0 cd597e377617	Softcopy SMS
45	SMS_6281362101414_201 5-06-01_20-23-05.pdf	845eb02a22ca3509fac6 1cd9d55b7f2c	Softcopy SMS
46	SMS_6281362101414_201 5-06-01_20-26-04.pdf	5f2ec7da849c632f1aee 9c62da6793c9	Softcopy SMS
47	Voice_call_34011337_6281 362101414_2015-05-10_21 -17-29.wav	35b36161568af1f7f9db f8da2f446b2c	Voice
48	Voice_call_34052581_6281 362101414_2015-05-14_07 -33-28.wav	fe49f542af041fe67dc6c 9b6a55d3a1e	Voice
49	Voice_call_34053629_6281 362101414_2015-05-14_09 -45-56.wav	1ebef4f21ad52ef24582 ebb8cccace2a	Voice
50	Voice_call_34063420_6281 362101414_2015-05-15_08 -31-52.wav	25d3da860f195693319 3a3fbc709f9e8	Voice
51	Voice_call_34066001_6281 362101414_2015-05-15_11 -43-12.wav	95db60ef713311f8ae11 876a2970c392	Voice
52	Voice_call_34098674_6281 362101414_2015-05-18_15 -51-35.wav	1b11c8685086a7d02e2 ce1b264460937	Voice
53	Voice_call_34103277_6281 362101414_2015-05-18_22 -16-47.wav	1dc8008ce9c18fa0e4dd 158d2a2ea750	Voice
54	Voice_call_34117640_6281 362101414_2015-05-19_22 -39-32.wav	da9d5b9bb64f7b76c5ba 0d0793dd66c5	Voice
55	Voice_call_34118817_6281 362101414_2015-05-20_07 -26-26.wav	02643d743d97f125ea2f 5a50d0929753	Voice
56	Voice_call_34118885_6281 362101414_2015-05-20_07 -32-55.wav	c213f5115c927740443f 74a1c4262005	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	Voice_call_34118932_6281 362101414_2015-05-20_07 -37-13.wav	4a2ed16b24b59185f52 8dd0cb444e762	Voice
58	Voice_call_34119210_6281 362101414_2015-05-20_08 -07-03.wav	f70a3e111ba962d573cc 27498a1ed9c4	Voice
59	Voice_call_34125523_6281 362101414_2015-05-20_15 -14-01.wav	56d7387ef63163aeabd3 6713d2cfccbd	Voice
60	Voice_call_34269689_6281 362101414_2015-05-21_11 -32-53.wav	1557885e02c6f2dd880 93e930b6370c1	Voice
61	Voice_call_34269690_6281 362101414_2015-05-21_11 -32-54.wav	59be457a95bd5bbe915 c148fde65217e	Voice
62	Voice_call_34270507_6281 362101414_2015-05-21_12 -20-42.wav	28aefdd7a7bfae5e09c7 65186a7fee26	Voice
63	Voice_call_34270745_6281 362101414_2015-05-21_12 -37-53.wav	19902ddd9041824a09a 8d4773a9551dd	Voice
64	Voice_call_34277206_6281 362101414_2015-05-21_20 -50-21.wav	3db239906064d260fba 962ac9dda5a7e	Voice
65	Voice_call_34280673_6281 362101414_2015-05-22_09 -31-33.wav	45a2f10ef15f965173b1 ca2fe1e2be3b	Voice
66	Voice_call_34288163_6281 362101414_2015-05-22_18 -35-45.wav	ff984cae2283e6db3ac9 4537b7b424e3	Voice
67	Voice_call_34288521_6281 362101414_2015-05-22_19 -07-47.wav	d55ddc3e1feb7b35f100 8cd75e3ef8fb	Voice
68	Voice_call_34288571_6281 362101414_2015-05-22_19 -12-43.wav	aa113a5f1f9c763b71eb 82dd3f1e3dba	Voice
69	Voice_call_34288679_6281 362101414_2015-05-22_19 -18-16.wav	a8d3cd2670837f31cf2b 9e3d71220f18	Voice
70	Voice_call_34385649_6281 362101414_2015-05-31_10 -51-57.wav	4644ee44d0d8d934303 7b0d5730f5fba	Voice
71	Voice_call_34392708_6281 362101414_2015-06-01_09 -02-10.wav	4603d75f3ade464ddb6a 3fbf30f97a0f	Voice
72	Voice_call_34404985_6281 362101414_2015-06-01_22 -45-07.wav	99b13e34a8a7a5aeadda 3ef95bd2ecbe	Voice
73	SMS_6281362101414_201	01090dc9224b37912b3	Softcopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5-06-05_13-54-40.pdf	fdcdfb556dab9	SMS
74	SMS_6281362101414_201 5-06-05_13-55-41.pdf	852c8ba7e7885c75d2b 7de55d3628e2e	Softcopy SMS
75	SMS_6281362101414_201 5-06-05_13-59-51.pdf	77738d6b08c66e6fbed9 46d83a88de53	Softcopy SMS
76	SMS_6281362101414_201 5-06-05_14-00-06.pdf	561a2b926912267e096 9cf19efd464f0	Softcopy SMS
77	SMS_6281362101414_201 5-06-06_16-59-36.pdf	b4838ffc4e39dba6fbdd c90d38cd751a	Softcopy SMS
78	SMS_6281362101414_201 5-06-06_17-05-33.pdf	9dbb57f14a9eb6cf861c 9f4c187f3f67	Softcopy SMS
79	SMS_6281362101414_201 5-06-06_17-05-53.pdf	b15ec3d788338c4c39d 043c99e0cc2ee	Softcopy SMS
80	SMS_6281362101414_201 5-06-06_17-06-03.pdf	85cc027f703b08a3345d 401cb1f512c2	Softcopy SMS
81	SMS_6281362101414_201 5-06-06_17-27-37.pdf	2858633a06154cdd8bf 9a89cb1413d3b	Softcopy SMS
82	SMS_6281362101414_201 5-06-06_19-18-55.pdf	13eea0804f30ceddd3c7 2063f3a08138	Softcopy SMS
83	SMS_6281362101414_201 5-06-06_19-19-38.pdf	2ffb69b6752351c6b9e8 a9e712bfccf7	Softcopy SMS
84	SMS_6281362101414_201 5-06-06_19-32-34.pdf	7727cedee51e473abd0d 89d9cb23a2c9	Softcopy SMS
85	SMS_6281362101414_201 5-06-06_19-34-45.pdf	8200ad27b5985a43407 356e0fd3bf17d	Softcopy SMS
86	SMS_6281362101414_201 5-06-06_19-35-28.pdf	4b197d8433ca00f293ea 04b931794b65	Softcopy SMS
87	SMS_6281362101414_201 5-06-06_19-35-38.pdf	de2117e8af210a322400 9af6a62fb8d0	Softcopy SMS
88	SMS_6281362101414_201 5-06-06_19-36-23.pdf	c0b20a3128ae6796f0fa 91289c2accb8	Softcopy SMS
89	SMS_6281362101414_201 5-06-06_19-36-45.pdf	40b27a87df0ab88f85d8 43458192563a	Softcopy SMS
90	SMS_6281362101414_201 5-06-06_19-42-57.pdf	53f7eadf7ad851938410 012ec642c34c	Softcopy SMS
91	SMS_6281362101414_201 5-06-06_19-43-36.pdf	d49c652a0c736aae1f80 6d43bad939c9	Softcopy SMS
92	SMS_6281362101414_201 5-06-06_19-45-58.pdf	f91d4b8c74a8210c3e5d 629822bb8d17	Softcopy SMS
93	SMS_6281362101414_201 5-06-06_19-46-48.pdf	538b37711de239b6b52 fa740a529d4e2	Softcopy SMS
94	SMS_6281362101414_201 5-06-06_19-48-29.pdf	7a840c36da08f6c193ef 88f7dccbf3c	Softcopy SMS
95	SMS_6281362101414_201 5-06-06_19-50-18.pdf	bac338997a8b7586b99 188b86a2b3240	Softcopy SMS
96	SMS_6281362101414_201 5-06-06_19-50-25.pdf	c9b5765286e0eb6dbb4 8daf563251b1c	Softcopy SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-58-07.pdf	390c20e174fbadf6570a7f9f6d3c6275	Softcopy SMS
98	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-59-58.pdf	3f49bf0580df27abff92f179aafc5fef	Softcopy SMS
99	SMS_6281362101414_2015-06-06_20-29-10.pdf	d65c277c5f784b859c64fb33f9301e1c	Softcopy SMS
100	SMS_6281362101414_2015-06-08_07-32-54.pdf	df493a1417560e5c8832fd289938fe11	Softcopy SMS
101	SMS_6281362101414_2015-06-08_16-34-32.pdf	640ad9de6d9f94f88b818bd549ee6eb8	Softcopy SMS
102	SMS_6281362101414_2015-06-09_08-38-42.pdf	22bde247dfa1fee607628fccf0f30fef	Softcopy SMS
103	SMS_6281362101414_2015-06-09_08-41-55.pdf	0a564d78863b61f74fd5248f78a1b6bd	Softcopy SMS
104	SMS_6281362101414_2015-06-09_08-42-25.pdf	a02148afb6f6f64b5428ce36d7cfd1a87	Softcopy SMS
105	SMS_6281362101414_2015-06-09_08-51-48.pdf	b30657406a0d24b7305fb23e6c95dc09	Softcopy SMS
106	SMS_6281362101414_2015-06-09_08-52-08.pdf	e2ff77236c034f28bcb69c63bbc44848	Softcopy SMS
107	SMS_6281362101414_2015-06-16_15-25-40.pdf	df5a167caec13e1e990b13639c4dbbd9	Softcopy SMS
108	SMS_6281362101414_2015-06-16_15-26-59.pdf	05228ba908ca7232de976a599ba11a0e	Softcopy SMS
109	SMS_6281362101414_2015-06-16_15-27-02.pdf	96950ae64ca0458eba07e5c300b2e047	Softcopy SMS
110	SMS_6281362101414_2015-06-17_18-01-25.pdf	7ca3da6d5fc3a4b1e7a7836eb944a18c	Softcopy SMS
111	SMS_6281362101414_2015-06-17_18-13-14.pdf	2b3afc57645848176651f8e1a85e14b6	Softcopy SMS
112	SMS_6281362101414_2015-06-17_18-14-15.pdf	ac567ddcff7ac1d62251f346c10c3254	Softcopy SMS
113	SMS_6281362101414_2015-06-19_12-21-48.pdf	1f87b800a8e99554d4a655a36dc459ad	Softcopy SMS
114	Voice_call_34441919_6281362101414_2015-06-05_08-31-14.wav	677c67dcc72fa72b9305ff47772ec122	Voice
115	Voice_call_34455385_6281362101414_2015-06-06_09-46-57.wav	136d946bd6928e7cd281943078f12436	Voice
116	Voice_call_34455413_6281362101414_2015-06-06_09-50-41.wav	f55abf4c26cf1a0b16229f39e7ba3c7f	Voice
117	Voice_call_34459791_6281362101414_2015-06-06_17-22-34.wav	3913d64e698c7347dac933f4bf6ee07d	Voice
118	Voice_call_34461183_6281362101414_2015-06-06_19-43-40.wav	d62b840030f6178103ca053c5255f3c1	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	Voice_call_34462716_6281 362101414_2015-06-06_22 -48-46.wav	12d47b31d8a2b311c56 97071bd7fa7e8	Voice
120	Voice_call_34470609_6281 362101414_2015-06-07_19 -27-43.wav	8389176732dcd084472 deaaaa2e395e9	Voice
121	Voice_call_34477792_6281 362101414_2015-06-08_11 -40-47.wav	f909a2241f6a99a1ca4e 87fc0ee5648b	Voice
122	Voice_call_34482362_6281 362101414_2015-06-08_16 -35-41.wav	00acabd54c9326cb7fb0 9ca0a4f9e227	Voice
123	Voice_call_34487364_6281 362101414_2015-06-09_06 -49-14.wav	e9f8feedd5bceae3c41cf a7d6bea8726	Voice
124	Voice_call_34487382_6281 362101414_2015-06-09_06 -51-09.wav	8622ee352c871687427f 23b1d0e4ce3d	Voice
125	Voice_call_34488677_6281 362101414_2015-06-09_08 -28-05.wav	f483d294f8ec906fa672 063e7158f8cc	Voice
126	Voice_call_34488701_6281 362101414_2015-06-09_08 -29-09.wav	d4bdb9c77dc01246027 639c9b75d6e6c	Voice
127	Voice_call_34511030_6281 362101414_2015-06-10_17 -02-38.wav	84acf7ec026bf2836c7f 7078ae1c66e2	Voice
128	Voice_call_34571408_6281 362101414_2015-06-15_23 -26-42.wav	01f40a5266c2dbb36ff4 f5b35f19d9f5	Voice
129	Voice_call_34573571_6281 362101414_2015-06-16_08 -15-30.wav	12a82976fdb0dfbc15c8 2f5570989d40	Voice
130	Voice_call_34578888_6281 362101414_2015-06-16_14 -36-44.wav	a92b78d303644a07c0d 1deb6fc870b07	Voice
131	Voice_call_34579008_6281 362101414_2015-06-16_14 -44-14.wav	e657e52b93f7aa8dba6f c19aacc7a5f9	Voice
132	Voice_call_34579553_6281 362101414_2015-06-16_15 -24-31.wav	1211643613a7922f3ea8 a0bdeb15d2f9	Voice
133	Voice_call_34579638_6281 362101414_2015-06-16_15 -31-05.wav	647e165985613a83737 d784306caaa24	Voice
134	Voice_call_34593794_6281 362101414_2015-06-17_17 -13-03.wav	980ea40ef532efae4b6b c1f14a86682b	Voice
135	Voice_call_34593848_6281	dd18b812ac03e124262	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	362101414_2015-06-17_17-16-33.wav	92ace7259db13	
136	Voice_call_34594055_6281362101414_2015-06-17_17-35-25.wav	a07148dd3be63de2e6abbef08d084e6	Voice
137	Voice_call_34594148_6281362101414_2015-06-17_17-42-26.wav	97c9f6ae8e4f9084b90afe62c3fd6bc	Voice
138	Voice_call_34607530_6281362101414_2015-06-18_23-47-29.wav	88e8b160dcba6579710a96542e736bc	Voice
139	Voice_call_34609969_6281362101414_2015-06-19_09-20-36.wav	3708548118624340a639123b7d70d184	Voice
140	Voice_call_34643364_6281362101414_2015-06-22_18-55-49.wav	6f1ad6cac55584a896016818eedac52f	Voice
141	Voice_call_34653171_6281362101414_2015-06-24_09-12-27.wav	f83a6c894a8e4bc87c4729230cb026af	Voice
142	Voice_call_34680615_6281362101414_2015-06-27_22-45-45.wav	10170dde8a16ab7099ae0bc6ac1e28d4	Voice
143	Voice_call_34699326_6281362101414_2015-06-30_11-14-40.wav	4e2022a1650b8d38a7cf d3fa87d8d508	Voice
144	Voice_call_34699826_6281362101414_2015-06-30_11-43-28.wav	e3ff6577cf127815f06ed14ee9709650	Voice
145	Voice_call_34700708_6281362101414_2015-06-30_12-41-54.wav	fd9e48f1ecb711add9839abda700ae8d	Voice
146	Voice_call_34700780_6281362101414_2015-06-30_12-47-48.wav	7a0966ca98faf4aa06379396a6ec18e3	Voice
147	Voice_call_34710119_6281362101414_2015-07-01_09-31-12.wav	175b56156bafc2b3c011c ff77262c25e	Voice
148	Voice_call_34710176_6281362101414_2015-07-01_09-33-44.wav	89295eb49baec3e1d0e50b36ec46cc6d	Voice
149	Voice_call_34710842_6281362101414_2015-07-01_10-19-06.wav	e8de7c9310fd7cffe7255ae78f3ffea2	Voice
150	Voice_call_34710941_6281362101414_2015-07-01_10-26-34.wav	09e1888b5a28c88a9404fce1255f2421	Voice
151	Voice_call_34719693_6281362101414_2015-07-01_22	780cd9a6f1d648399d0e6c48c8f063de	Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-17-47.wav		
152	Voice_call_34720219_6281362101414_2015-07-01_23-45-38.wav	6845b4fc4b118cbd0b232e0db8fddc1e	Voice
153	Voice_call_34743989_6281362101414_2015-07-04_12-08-15.wav	66785bdf609f66a09166496e9910b9c	Voice
154	Voice_call_34749043_6281362101414_2015-07-04_22-19-40.wav	af1697f3554e74ca534d53cf604063a6	Voice
155	SMS_6287788877191_2015-07-05_11-48-04.pdf	a67d1a89a755d583d0b496430e3d6bb6	Softcopy SMS
156	SMS_6287788877191_2015-07-05_11-48-57.pdf	80346eba2eaaf49c9f21efab7b041fb2	Softcopy SMS
157	Voice_call_34773172_628161902088_2015-07-07_12-02-20.wav	4820f8cddf304bf730d761b46d318e47	Voice
158	SMS_6281221848850_2015-06-07_08-16-55.pdf	6c95e9a1e5d065fcb650a148b9a8f402	Softcopy SMS
159	SMS_6281221848850_2015-06-07_08-24-47.pdf	3c0f4cd29ff00e79707518157567f6ab	Softcopy SMS
160	SMS_6281221848850_2015-06-07_08-34-16.pdf	cd4460a94891f396620500db939241bf	Softcopy SMS
161	SMS_6281221848850_2015-06-07_10-01-05.pdf	85d5ffc2b181507efa6309aab9b45159	Softcopy SMS
162	SMS_6281221848850_2015-06-07_10-02-01.pdf	25a065232728fcb81ab8b4143f990c8	Softcopy SMS
163	SMS_6281221848850_2015-06-08_07-32-46.pdf	ce2363f41e43786751c24d06c9f97d7e	Softcopy SMS
164	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-38-33.pdf	11b79b5497d03a57aa9b0f401e322c4e	Softcopy SMS
165	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-41-47.pdf	f87d51c992886ec05c0419300e9bd6c0	Softcopy SMS
166	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-51-40.pdf	28c5e2c540466aa7b9a42c25f907c24a	Softcopy SMS
167	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-52-08.pdf	0383501c92029cfbad34b9353fbccaff	Softcopy SMS
168	SMS_6281221848850_2015-06-09_09-46-56.pdf	2bfc9e69547a307fe26ec9652d8be932	Softcopy SMS
169	SMS_6281221848850_2015-06-09_10-49-37.pdf	2da6a8efb177b517f4f653e884fe3836	Softcopy SMS
170	SMS_6281221848850_2015-06-09_10-52-35.pdf	7d3122ccc429d4bf930b2debfbabe7ab	Softcopy SMS
171	SMS_6281221848850_2015-06-26_08-30-25.pdf	6757fc61f92663901bd03903df2061fd	Softcopy SMS
172	Voice_call_34422375_6281221848850_2015-06-03_18-38-58.wav	23632205887f8e400b1c323d167612ed	Voice
173	Voice_call_34422404_6281	e9963c3a0899e6a9afb0	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	221848850_2015-06-03_18-41-35.wav	a4776cfb5f90	
174	Voice_call_34422773_6281 221848850_2015-06-03_19-05-22.wav	cb056b6750bc44e7aeaa bb9000072619	Voice
175	Voice_call_34464211_6281 221848850_2015-06-07_08-20-32.wav	0f00e60561df62930ac1 67f4d54c3cf0	Voice
176	Voice_call_34470608_6281 221848850_2015-06-07_19-27-42.wav	9cca08076dead39acbc2 5ed56e26b816	Voice
177	Voice_call_34473182_6281 221848850_2015-06-08_06-57-26.wav	716e2471a77998ab301 244370cc6b1b3	Voice
178	Voice_call_34477789_6281 221848850_2015-06-08_11-40-46.wav	6e4511374140dd6e69e 2f6b3da0c0b70	Voice
179	Voice_call_34487383_6281 221848850_2015-06-09_06-51-12.wav	cc1cfc6b6af0a664b91f6 6a9a0f17492	Voice
180	Voice_call_34488636_6281 221848850_2015-06-09_08-25-29.wav	db5a4c85b549b075836 735da81182d5c	Voice
181	Voice_call_34488703_6281 221848850_2015-06-09_08-29-11.wav	aa9e00d3aa17bd4bf36f 5e5dfc8271ed	Voice
182	Voice_call_34491548_6281 221848850_2015-06-09_11-00-08.wav	0ca8e00e58636a8ef9f9 3e9f3672f764	Voice
183	Voice_call_34511325_6281 221848850_2015-06-10_17-20-05.wav	8e43c4ce25a05f5f0817 714fb34c44a9	Voice
184	Voice_call_34592000_6281 221848850_2015-06-17_14-52-01.wav	5833ec0fb4cb5c406891 c2af8b1a47e8	Voice
185	Voice_call_34653178_6281 221848850_2015-06-24_09-13-24.wav	8d0e9040afbfe7ba1b66 13d2fa6ac5d5	Voice
186	Voice_call_34661000_6281 221848850_2015-06-25_13-00-50.wav	0e5320a7d46255f3ff35 7a420a7d1b6d	Voice
187	Voice_call_34687337_6281 221848850_2015-06-29_08-53-02.wav	c670dcc98e83d8b7189 12a9d1433d156	Voice
188	Voice_call_34710916_6281 221848850_2015-07-01_10-24-58.wav	1bf9b6f1a08a4e60bb36 f460c9632f2c	Voice
189	Voice_call_34719694_6281 221848850_2015-07-01_22	3312d26a79f6310b1b6 7eda493125ad0	Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-17-48.wav		
190	Voice_call_34719755_6281 221848850_2015-07-01_22 -26-09.wav	9a9b73fbe2091e328a24 6a08172f9e15	Voice
191	Voice_call_34758771_6281 221848850_2015-07-06_09 -06-16.wav	a7e0534b1868b23aadfa 1a413c4b816d	Voice
192	Voice_call_34762777_6281 221848850_2015-07-06_13 -58-49.wav	7025a305e4918307aec 97703b2352e6c	Voice
193	Voice_call_34762860_6281 221848850_2015-07-06_14 -03-57.wav	fa944d5f32f350b6a99d 969d1ba45750	Voice
194	Voice_call_34771730_6281 221848850_2015-07-07_10 -35-49.wav	98087a2dbbbcafdcaffd 243c33f0d18a	Voice
195	Voice_call_34773308_6281 221848850_2015-07-07_12 -09-09.wav	a28540792979415dfaa0 6ec1b4abc791	Voice
196	Voice_call_34798486_6281 221848850_2015-07-09_10 -29-49.wav	9e96ffda76357fe6c4a5c 7fbadc943d3	Voice
197	Voice_call_34798624_6281 221848850_2015-07-09_10 -38-23.wav	a53fd9570420b7c2ce8e 6142a8893596	Voice
198	Voice_call_34802883_6281 221848850_2015-07-09_14 -55-23.wav	b2ee69a699de6831c60 6720afa494f71	Voice
199	Voice_call_34803389_6281 221848850_2015-07-09_15 -30-57.wav	b1be665400d09584a82 4d7b32294cfb1	Voice
200	Voice_call_34804743_6281 221848850_2015-07-09_16 -59-09.wav	a486f2864c681ad35152 d605c3054702	Voice
201	Voice_call_34680188_6281 311183687_2015-06-27_21 -30-15.wav	c6946248dc685bfd8e27 ff2e76e2d651	Voice
202	SMS_6282111000071_201 5-07-07_12-34-12.pdf	85dce338dd071e8050f3 e3a262cf34a2	Softcopy SMS
203	SMS_6282111000071_201 5-07-07_12-58-39.pdf	8d33d32dc81ff2090a76 805dd046eb65	Softcopy SMS
204	SMS_6282111000071_201 5-07-07_12-59-48.pdf	85690f90329ab2bca16a 9e68a17d089a	Softcopy SMS
205	SMS_6282111000071_201 5-07-09_00-15-15.pdf	9b1b3e9838161f571b1 3ee24f9b8ee80	Softcopy SMS
206	Voice_call_34643366_6282 111000071_2015-06-22_18 -55-51.wav	fb4a11361147e0871dc3 8c8814898433	Voice
207	Voice_call_34699325_6282	493c83fc9ea0793d30ec	Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	111000071_2015-06-30_11-14-38.wav	d5bb5f6e6b9b	
208	Voice_call_34743894_6282111000071_2015-07-04_11-55-16.wav	7a7144a1f1db12944a0650e5ad4439de	Voice
209	Voice_call_34743988_6282111000071_2015-07-04_12-08-12.wav	54b2335eef25b609f6d97d180ca61c59	Voice
210	Voice_call_34758562_6282111000071_2015-07-06_08-50-45.wav	22f5c6af955c75ef7a4c7c95afe04a13	Voice
211	Voice_call_34758599_6282111000071_2015-07-06_08-54-37.wav	826739816c49bfcf6763c724cee7db6e	Voice
212	Voice_call_34763025_6282111000071_2015-07-06_14-15-46.wav	1677762d9a3cf9be9b4237a78697692e	Voice
213	Voice_call_34763154_6282111000071_2015-07-06_14-25-12.wav	1484d318e9e1a636da59eeacb54c45d9	Voice
214	Voice_call_34763199_6282111000071_2015-07-06_14-27-52.wav	14360281766016e3a35e1656ba9d8c3b	Voice
215	Voice_call_34772727_6282111000071_2015-07-07_11-35-35.wav	1631af5954ab7dbcf932a23a77839b7	Voice
216	Voice_call_34773328_6282111000071_2015-07-07_12-09-56.wav	274c14ace420f70258066a722180e1f4	Voice
217	Voice_call_34773840_6282111000071_2015-07-07_12-37-31.wav	e71f1d00436b71ac5e97ede127da876c	Voice
218	Voice_call_34773928_6282111000071_2015-07-07_12-42-05.wav	40966a0d33a0e624d62c20c481a39018	Voice
219	Voice_call_34774118_6282111000071_2015-07-07_12-52-53.wav	8def3496392814448092e9c9e7772190	Voice
220	Voice_call_34797777_6282111000071_2015-07-09_09-47-30.wav	e4de501f8c2ec42495034a063461dd2b	Voice
221	Voice_call_34797887_6282111000071_2015-07-09_09-54-46.wav	d3ef4e88056fef81d7e8748fc1547581	Voice
222	Voice_call_34797969_6282111000071_2015-07-09_09-59-41.wav	f1526268bc8e390585e961bf11df19b5	Voice
223	Voice_call_34798022_6282111000071_2015-07-09_10-57-05.wav	e93094a4a173edff9ee957056cd90f2e	Voice



	-02-56.wav		
224	Voice_call_34798102_6282111000071_2015-07-09_10-08-53.wav	1657feddf36a8a811308227e137718d5	Voice
225	Voice_call_34798623_6282111000071_2015-07-09_10-38-21.wav	c2c0904baf2962ae0395a1854b99369	Voice
226	Voice_call_34799925_6282111000071_2015-07-09_11-49-07.wav	35588e03e0e8dd37b25988dcb08cca41	Voice

215 2 (dua) lembar print out Registrasi Data Pelanggan dengan Nomor Handphone 628161906088, nama pemilik nomor Kantor Pengacara O.C.KALIGIS, Alamat Komp. Majapahit Permai Blok B123 No. 18 20 - 22.

216 1 (satu) bundel print out CDR (Call Data Record) untuk nomor 628161902088 dari bulan April 2015 sampai dengan Desember 2015.

217 Data rekaman CCTV dengan nama file "CCTVBANDARA.iso" yang memiliki MD5 Has : 3923fa253ec4d8f53d1f77deed5b24cf, dan nilai SHA-1 Hash : fae2d15a7a7555499dg1e9ea2254867a78de8bf5 dihitung dengan aplikasi Gizmo Manager V2.7, yang disimpan kedalam DVD Logo KPK dengan S/n: MAPA02RD25031632 5. Yeng berisi rekaman CCTV sbb :

1 Rekaman CCTV tanggal 1 Juli 2015 diantaranya sbb:

- CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 22.27.07 s/d 22.27.23.—
- CCTV Pintu Arrival Domestik Lantai 1 pada jam 22.28.43 s/d 22.28.47.-
- CCTV Departure Luar zona Lantai 2 pada jam 22.30.30 s/d 22.32.37.
- CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 22.31.37 s/d 22.32.40.

1 Rekaman CCTV tanggal 6 Juli 2015 diantaranya sbb:

- CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.48.3= s/d 12.09.02.
- CCTV Garbarata 2 + Parking 27 pada jem 12.09.59 w/d 12.10.14.-
- CCTV Dropzone Keberangkatan (239) pada jam 10.58.73 s/d 10.59.37.-
- CCTV Travelator WR Scp Dome Lantai 2 pada jam 11.13.53 s/d 11.14.33.-
- CCTV Automatic Gate zona Lt 6 pada jam 15.09.52 s/d 11.11.12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f CCTV Departure dalam zona Lantai 2 (238) pada jam 10.59.10 s/d 10.59.47
 - g CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 15.54.00 s/d 15.33.03.
 - h CCTV Departure dalam zona lantai 2 pada jam 15.13.00 s/d 15.13.34.
 - i CCTV Garbarata H/Parking 27 pada jam 15.55.07 s/d 15.57.57.
- 1 Rekaman CCTV tanggal 5 Juli 2015 diantaranya sbb .
- a CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 08.08.52 s/d 08.09.05.—
 - b CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 5 pada jam 08.15.41 s/d 08.15.49.
 - c CCTV Dropzone keberangkatan pada jam 08.18.39 s/d 08.19.43.-
 - d CCTV Departure luar zona lantai 2 keberangkatan pada jam 08.18.19 s/d 08.18.49.-
 - e CCTV Main Gate waiting room domestic 9-12 lantai 2 pada jam 12.14.40 s/d 12.55.46.
 - f CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 16.15.49 s/d 16.16.35.
 - g CCTV Automatic gate zona lantai 2 pada jam 11.43.15 s/d 11.43.47.-
 - h CCTV Automatic gate zona lantai 2 (237) pada jam 11.41.56 s/d 11.42.50.
 - i CCTV Waiting Room Gate 10 Lantai 2 pada jam 12.56.34 s/d 12.17.05.-
 - j CCTV Departure luar zona lantai 2 pada jam 15.38.26 s/d 15.39.32.-
 - k CCTV Gate 10 pada jam 12.16.74 s/d 16.17.05.-
- 1 4.Rekaman CCTV tanggal 7 Juli 2015 diantaranya sbb :--
- a CCTV Garbarata G+Parking 29 (197) pada jam 14.06.35 s/d 14.06.44.-
 - b CCTV automatic gate zona lantai 2 pada jam 13.48.16 s/d 13.48.76.
 - c CCTV Dept Dalam Zona Lantai 2 pada jam 13.41.24 s/d 13.45.52.
- 1 Rekaman CCTV tanggal 9 Juli 2015 diantaranya sbb :--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a CCTV Garbarata H+Parking 27 pada jam 08.12.19 s/d 08.12.37.-
- b GCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 (156) pada jam 08.16.00 s/d 08.56.16.-
- c CCTV Pintu Arrival Dom Lantai 1 pada jam 08.74.14 s/d 08.35.53.
- d CCTV Main Gate arrival lantai 1 (145) pada jam 08.35.42 s/d 08.35.53.

218 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan serial number (SN) MAPA25PH291921771 yang berisi :

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_6281362101414_2015-07-06_20-39-35.pdf	f647c978e4dbc218c921ba54a2615261	Softcopy SMS
2	Voice_call_34720219_6281362101414_2015-07-01_23-45-38.wav	6845b4fc4b118cbd0b232e0db8fddc1e	Voice
3	Voice_call_34746745_6281362101414_2015-07-04_17-30-15.wav	1f89fcc53422b8277bb210433a30c1e6	Voice
4	Voice_call_34752424_6281362101414_2015-07-05_11-21-52.wav	8f5b3a6891933d47f06592eff9f73123	Voice
5	Voice_call_34752545_6281362101414_2015-07-05_11-35-53.wav	cf698eb64004ee6e2e6f4a4d6c08b7e5	Voice
6	Voice_call_34763121_6281362101414_2015-07-06_14-22-44.wav	7a90e33da400d48b43708c2231b84806	Voice
7	Voice_call_34763156_6281362101414_2015-07-06_14-25-14.wav	ffdf4760c167f58c892a41363f48f1da	Voice
8	Voice_call_34773186_6281362101414_2015-07-07_12-03-08.wav	196a2d8d81d5a22a48cc73ebfbadf302	Voice
9	Voice_call_34773837_6281362101414_2015-07-07_12-37-26.wav	c8c872a146565a6211a6303d23fc0537	Voice
10	Voice_call_34774151_6281362101414_2015-07-07_12-54-30.wav	d8c857b20e2ee8087dc94e4cd28a2087	Voice
11	Voice_call_34710277_6281269705761_2015-07-01_09-43-01.wav	46ef250cd251f43dfef7f72836511d3d	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Voice_call_34727117_6281 269705761_2015-07-02_17-03-26.wav	083598ac849911a986 86974578dcdcf	Voice
13	Voice_call_34728827_6281 269705761_2015-07-02_20-30-02.wav	a0196f07739d30d21c becd8a387f599f	Voice
14	Voice_call_34732650_6281 269705761_2015-07-03_10-06-55.wav	4da44d63b0526cdd75 96c498d2573bd7	Voice
15	Voice_call_34756623_6281 269705761_2015-07-05_22-28-05.wav	7f7bd6ba7b21d460be 0eca0e3e32ee83	Voice
16	Voice_call_34758142_6281 269705761_2015-07-06_08-09-59.wav	4243bf443e56a307cf 8fdbae6d610ec6	Voice
17	Voice_call_34758772_6281 269705761_2015-07-06_09-06-17.wav	e110135a13c451d234 188ee682bdb7fc	Voice
18	Voice_call_34762776_6281 269705761_2015-07-06_13-58-46.wav	917acc98a51ae939e2 a0314d23d10b23	Voice
19	Voice_call_34762859_6281 269705761_2015-07-06_14-03-56.wav	480b7bbba0fe136385 84a20bf85d0954	Voice
20	SMS_6287883327443_2015-07-01_11-28-50.pdf	86bb8caf3653e3a206 9150bb73de4ce9	Softcopy SMS
21	SMS_6287883327443_2015-07-03_11-01-07.pdf	dcf97e72b77746a64d fbc7b7671b667e	Softcopy SMS
22	SMS_6287883327443_2015-07-03_13-08-11.pdf	636130bca6a530002a e42b9a669572b5	Softcopy SMS
23	Voice_call_34708495_6287 883327443_2015-07-01_06-56-05.wav	77dac2233984e6927e 797b40e5fd53f1	Voice
24	Voice_call_34710475_6287 883327443_2015-07-01_09-55-17.wav	2ed373ad16552bcaed ffbd33607302ce	Voice
25	Voice_call_34710515_6287 883327443_2015-07-01_09-58-06.wav	033b7714e558ad0ac6 b8aa2eea8087ce	Voice
26	Voice_call_34710582_6287 883327443_2015-07-01_10-01-30.wav	dd9104ffcd2d963d56 97741438ebdeba	Voice
27	Voice_call_34710661_6287 883327443_2015-07-01_10-07-14.wav	b4207947bcbbc43642 f27a51d17bb879	Voice
28	Voice_call_34710900_6287 883327443_2015-07-01_10-23-33.wav	d5b1270b248a23b58c b845a3312f6587	Voice
29	Voice_call_34734337_6287	542d98bb7af5541d03	Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	883327443_2015-07-03_13-00-11.wav	5ab47eda0bd680	
30	Voice_call_34752532_6287883327443_2015-07-05_11-34-10.wav	babf073394b4a2e1f537317cc66242bf	Voice
31	Voice_call_34767251_6287883327443_2015-07-06_20-35-08.wav	2784180b4bc810ae8fd846734dbc899a	Voice
32	Voice_call_34773131_6287883327443_2015-07-07_11-59-48.wav	c6d30b308bbd25af2811f1377e481b03	Voice
33	SMS_6281262622622_2015-07-06_09-10-02.pdf	97695390c9c2c4f9e13a314819fc74f2	Softcopy SMS
34	Voice_call_34435906_6281262622622_2015-06-04_17-55-13.wav	f325fc2a15c37d73c9b54665ff7b4c30	Voice
35	Voice_call_34441914_6281262622622_2015-06-05_08-31-12.wav	64748c961a4df6e43920ee0073ebc883	Voice
36	Voice_call_34450871_6281262622622_2015-06-05_19-26-38.wav	146425cb607d3c7de433f1468ab8f02f	Voice
37	Voice_call_34450929_6281262622622_2015-06-05_19-31-31.wav	956234273d645be609778e486933c62e	Voice
38	Voice_call_34462717_6281262622622_2015-06-06_22-48-48.wav	1a317db12a841f79817be6e3e067667a	Voice
39	Voice_call_34462866_6281262622622_2015-06-06_23-35-02.wav	b2689cb92020004af6cb9c05662c0041	Voice
40	Voice_call_34680614_6281262622622_2015-06-27_22-45-44.wav	b7bf7eb5a863cded8c76b1f2673d9aa7	Voice
41	Voice_call_34693032_6281262622622_2015-06-29_16-15-02.wav	53103ad0b9dbdb533b22146a21e06632	Voice
42	Voice_call_34710118_6281262622622_2015-07-01_09-31-11.wav	301aa232e2a18c3e912c66cf5d91cde2	Voice
43	Voice_call_34710175_6281262622622_2015-07-01_09-33-43.wav	be0be1a206396053c7264293b47038a8	Voice
44	Voice_call_34720218_6281262622622_2015-07-01_23-45-37.wav	8965677d29b5b845ede28cd68e96ad0c	Voice
45	Voice_call_34746744_6281262622622_2015-07-04_17-30-14.wav	e06f10ebb4d843ed803e93f19c964e60	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	SMS_6287788877191_2015-06-08_17-52-19.pdf	9eac6e4dbc89c04044c0ba53e1329fa8	Softcopy SMS
47	SMS_6287788877191_2015-07-04_09-37-37.pdf	87d67481821c3f59dbb9f4ac092635c6	Softcopy SMS
48	SMS_6287788877191_2015-07-04_10-17-46.pdf	2afbb3f09c3eedeb8a2314dd66ec8541	Softcopy SMS
49	SMS_6287788877191_2015-07-04_10-19-11.pdf	f47da370759e8a25e3214f36fb8f9a84	Softcopy SMS
50	SMS_6287788877191_2015-07-07_13-37-19.pdf	be96746b93e982c182bb74a667a01ada	Softcopy SMS
51	SMS_6287788877191_2015-07-07_13-38-29.pdf	9e891d967b16031d3abc8bef12fea15f	Softcopy SMS
52	SMS_6287788877191_2015-07-07_13-38-42.pdf	6fe67d6baadfc1b6214afd1ce5f8b27d	Softcopy SMS
53	SMS_6287788877191_2015-07-07_13-38-51.pdf	a13244aac2c661908b485161b9103322	Softcopy SMS
54	SMS_6287788877191_2015-07-08_12-28-51.pdf	f88a07cd762e4edd03c20114c22086a6	Softcopy SMS
55	SMS_6287788877191_2015-07-08_12-30-14.pdf	660527af7433d91352b9741687ef2bf5	Softcopy SMS
56	SMS_6287788877191_2015-07-08_12-30-41.pdf	53e288400a0183e94d96d866da23fb8b	Softcopy SMS
57	SMS_6287788877191_2015-07-08_12-31-43.pdf	7ea581422a96ec1e0cf2bfab732ca5f7	Softcopy SMS
58	SMS_6287788877191_2015-07-08_13-41-20.pdf	81832dbcbc20aa76e185c86792ad3154	Softcopy SMS
59	SMS_6287788877191_2015-07-08_16-13-41.pdf	b8e5738decff025d81f375c4b729e246	Softcopy SMS
60	SMS_6287788877191_2015-07-08_17-50-11.pdf	3c19bab778d58e5c7c777d4c79e7dc82	Softcopy SMS
61	Voice_call_34449985_6287788877191_2015-06-05_18-04-07.wav	6c8b0c0c4a46a48e01493ec24f1479d0	Voice
62	Voice_call_34464575_6287788877191_2015-06-07_09-11-07.wav	7c2d18aaf7ff569afb392e77eb0c048b	Voice
63	Voice_call_34473669_6287788877191_2015-06-08_07-43-52.wav	0b7e98d43ac80c9b075fb42cd259e804	Voice
64	Voice_call_34495672_6287788877191_2015-06-09_15-18-12.wav	42bc2d571e1552f741d942bcc01cedfa	Voice
65	Voice_call_34502411_6287788877191_2015-06-10_07-41-21.wav	d820f05086aac890a207e685d7882d5d	Voice
66	Voice_call_34743134_6287788877191_2015-07-04_10-33-44.wav	8827ced676e0e70fe1dce9fdd7d90207	Voice
67	Voice_call_34749976_6287	38c3dac6b641120b3d	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	788877191_2015-07-05_02-47-58.wav	4ce35ecac74015	
68	Voice_call_34750183_6287788877191_2015-07-05_04-04-01.wav	af933c7b032a87625be9afef511986f1	Voice
69	Voice_call_34750198_6287788877191_2015-07-05_04-08-14.wav	d31013e3474810af714d51e43231a887	Voice
70	Voice_call_34750208_6287788877191_2015-07-05_04-11-49.wav	d22093408874a53e6cc1072ceccce551	Voice
71	Voice_call_34752099_6287788877191_2015-07-05_10-46-56.wav	d994abc0fa5a0af7ee3e8f3a4ea6643b	Voice
72	Voice_call_34752534_6287788877191_2015-07-05_11-34-12.wav	d5e1447ecd9a7a76b455e928f9961e45	Voice
73	Voice_call_34757577_6287788877191_2015-07-06_06-48-24.wav	c1092212a700bb0d96a7db84fba75946	Voice
74	Voice_call_34758886_6287788877191_2015-07-06_09-16-33.wav	6c555b71cff2538e4202d83797464a67	Voice
75	Voice_call_34758923_6287788877191_2015-07-06_09-19-39.wav	021b6c9adb27a470600cecbd51c215ae	Voice
76	Voice_call_34760889_6287788877191_2015-07-06_11-41-08.wav	b648bbc769899602e790a0a8d3ff0b66	Voice
77	Voice_call_34760936_6287788877191_2015-07-06_11-44-39.wav	5bb704a299f8109de0b0abe8f82a4a15	Voice
78	Voice_call_34762578_6287788877191_2015-07-06_13-48-14.wav	0a2d7876d42bf9dee2cd744a0b342d66	Voice
79	Voice_call_34764880_6287788877191_2015-07-06_16-21-59.wav	b8a5d58a4a7041df1c2779113ccf971f	Voice
80	Voice_call_34765302_6287788877191_2015-07-06_16-55-26.wav	6970a7bac118a29026a440e728d982e8	Voice
81	Voice_call_34770320_6287788877191_2015-07-07_08-57-21.wav	40afcef06ce5aab48d02e52e5f5e2fad	Voice
82	Voice_call_34773073_6287788877191_2015-07-07_11-55-32.wav	61a120e77d79d982a04249b0839a3796	Voice
83	Voice_call_34774410_6287788877191_2015-07-07_13-	a9d2a70f13dd82cd3ade0987cc388089	Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08-00.wav		
84	Voice_call_34774458_6287788877191_2015-07-07_13-10-42.wav	c0ac219c10bdd0ecff604fad50710106	Voice
85	Voice_call_34774532_6287788877191_2015-07-07_13-14-16.wav	05aad2372e45424ceffa44621e9016f	Voice
86	Voice_call_34774872_6287788877191_2015-07-07_13-31-50.wav	6e4b9676b2d062c8ac9d569853f110ec	Voice
87	Voice_call_34784580_6287788877191_2015-07-08_10-04-39.wav	9b16300b4a1f634dc96e0f59d1a71172	Voice
88	Voice_call_34787002_6287788877191_2015-07-08_12-20-58.wav	48357d41bf9dcce413670263ee837636	Voice
89	Voice_call_34787061_6287788877191_2015-07-08_12-24-28.wav	7a6d1e5c4a8daf261cec90d6e63929b4	Voice
90	Voice_call_34792778_6287788877191_2015-07-08_19-06-37.wav	b43d69f8ee77a6eaedc9a1b82fe1f8c2	Voice
91	Voice_call_34792971_6287788877191_2015-07-08_19-27-38.wav	b097d201331b479871a65c7d655f5673	Voice
92	Voice_call_34796822_6287788877191_2015-07-09_08-44-20.wav	a6fe9066eb5c416f50281bb2d1324cd2	Voice
93	Voice_call_34797857_6287788877191_2015-07-09_09-53-02.wav	ef4133c3b3611e02970e22ff268cb37f	Voice
94	Voice_call_34691379_6282111000071_2015-06-29_13-54-49.wav	c59716b5fd4e1097a7fe26acc02f86	Voice
95	Voice_call_34700707_6282111000071_2015-06-30_12-41-52.wav	6936d53fb6106329ae38830adc0b4184	Voice
96	Voice_call_34710841_6282111000071_2015-07-01_10-19-03.wav	16da9a4dc9d35f9ce44cd353528b838d	Voice
97	Voice_call_34710939_6282111000071_2015-07-01_10-26-32.wav	fd911c97591b361e20c9295ce9f1f248	Voice
98	Voice_call_34734401_6282111000071_2015-07-03_13-05-10.wav	9c656be2c7c70b589afb815bc5b597a8	Voice
99	Voice_call_34743132_6282111000071_2015-07-04_10-33-42.wav	ebb54efd503ec4a0917d52bb90193a14	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	SMS_6281221848850_2015-06-08_07-32-46.pdf	fb0acaff93cc64a0fd1380a63c79f284	Softcopy SMS
101	SMS_6281221848850_2015-06-09_10-49-37.pdf	3b55b1b5665509b648c2d6ef346740c8	Softcopy SMS
102	SMS_6281221848850_2015-06-09_10-52-35.pdf	56e9ca3559f2ba65a30626a11a6c72c0	Softcopy SMS
103	Voice_call_34470608_6281221848850_2015-06-07_19-27-42.wav	9cca08076dead39acb c25ed56e26b816	Voice
104	Voice_call_34473182_6281221848850_2015-06-08_06-57-26.wav	716e2471a77998ab301244370cc6b1b3	Voice
105	Voice_call_34473667_6281221848850_2015-06-08_07-43-49.wav	edc9d01a29ebd41d7767f16eb7741ec5	Voice
106	Voice_call_34477789_6281221848850_2015-06-08_11-40-46.wav	fd15e2274bed957d131f262f15e2c1a8	Voice
107	Voice_call_34487383_6281221848850_2015-06-09_06-51-12.wav	cc1cfc6b6af0a664b91f66a9a0f17492	Voice
108	Voice_call_34593223_6281375344283_2015-06-17_16-34-18.wav	255f7e55a2978f4a8dea37796c7bbc0e	Voice
109	Voice_call_34653230_6281375344283_2015-06-24_09-19-15.wav	aa12ba301698aa4ae613386ac1c79b49	Voice
110	Voice_call_34710278_6281375344283_2015-07-01_09-43-04.wav	b90bc2ae451a80a3f772c4d3ac7cede0	Voice
111	Voice_call_34723613_6281375344283_2015-07-02_11-12-28.wav	bc89af1efc1547f596d56e1cfa9d58a2	Voice
112	Voice_call_34724304_6281375344283_2015-07-02_12-17-25.wav	8a7c30f84581d8be332c91e2340b6a9e	Voice
113	Voice_call_34758143_6281375344283_2015-07-06_08-09-59.wav	3dc8275903444cd9db8caae93eaa1623	Voice
114	Voice_call_34763122_6281375344283_2015-07-06_14-22-45.wav	8ddaed8f0c830cc001e2f34dd55bbf12	Voice
115	Voice_call_34763201_6281375344283_2015-07-06_14-27-54.wav	c53ec6b2adc81a0bdaac6b934a95ccea	Voice
116	Voice_call_34774155_6281375344283_2015-07-07_12-54-32.wav	85aa9cf97371ea378824ad2eabd84dd1	Voice
117	SMS_628161902088_2015-	d9859a7ae5d197c51c	Softcopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-03_13-08-14.pdf	2670388e461f76	SMS
118	SMS_628161902088_2015-07-06_20-34-23.pdf	7c5d902c49b1fb16e54a112dc04a7bd8	Softcopy SMS
119	Voice_call_34573985_628161902088_2015-06-16_08-47-36.wav	84c1709aa6cdaf1c5c7d33af68f963de	Voice
120	Voice_call_34708522_628161902088_2015-07-01_07-02-25.wav	7c8c5b8c22daa57b8dfc0a69712726aa	Voice
121	Voice_call_34708530_628161902088_2015-07-01_07-05-28.wav	aa8874b9fd73e291cd9ec9826e8f1035	Voice
122	Voice_call_34708646_628161902088_2015-07-01_07-24-02.wav	fda450bfe47de2a6b2feb9c30d86b949	Voice
123	Voice_call_34711028_628161902088_2015-07-01_10-30-59.wav	1f27f1041d6fb71541c60c3ae916cfe1	Voice
124	Voice_call_34715839_628161902088_2015-07-01_15-25-45.wav	a5671170b1daa2b017d2a70240d7c983	Voice
125	Voice_call_34721823_628161902088_2015-07-02_08-48-49.wav	eddc8623a7e89085346f3bc63c96475	Voice
126	Voice_call_34721880_628161902088_2015-07-02_08-52-43.wav	4f49e0111712a3fb24a998d525b4ca38	Voice
127	Voice_call_34721957_628161902088_2015-07-02_08-58-21.wav	1fab0839b2a35b00203fd4d3897845201	Voice
128	Voice_call_34722497_628161902088_2015-07-02_09-47-07.wav	a2085fc6139ddd4c36e9485ee563270b	Voice
129	Voice_call_34722729_628161902088_2015-07-02_10-04-27.wav	f038d218119a52b54b5cd440bbe2f84c	Voice
130	Voice_call_34730756_628161902088_2015-07-03_06-10-21.wav	d529b85b323e8eeaac8bb3fd5ee38205	Voice
131	Voice_call_34734334_628161902088_2015-07-03_13-00-08.wav	a50b0dbf8c14a02318420a25852df5a6	Voice
132	Voice_call_34735091_628161902088_2015-07-03_13-50-34.wav	54a04a4620c6afe1a08397bfafed43a4	Voice
133	Voice_call_34750322_628161902088_2015-07-05_04-45-00.wav	f1573aa5f94f05fc9a0122a03ac0bfa7	Voice
134	Voice_call_34751050_6281	0fa0c6a74ddf3a5fb28	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	61902088_2015-07-05_08-24-08.wav	d93b419b95d28	
135	Voice_call_34752351_628161902088_2015-07-05_11-10-14.wav	60a77f4fc0d6b1e31886fbcca25ef547	Voice
136	Voice_call_34767252_628161902088_2015-07-06_20-35-11.wav	a153eacbf7ddd6ef10197047e871299e	Voice
137	Voice_call_34797886_628161902088_2015-07-09_09-54-39.wav	954afc426096d4ed77f5536d32bf53b4	Voice
138	Voice_call_34797901_628161902088_2015-07-09_09-55-39.wav	771b858acb1c3e205da6943abec18636	Voice
139	Voice_call_34798000_628161902088_2015-07-09_10-01-53.wav	2105b7804b11da109bf05b28422a1253	Voice
140	Voice_call_34798328_628161902088_2015-07-09_10-20-59.wav	6ac15b9d3a179505f957f00cb503f16a	Voice
141	Voice_call_34798503_628161902088_2015-07-09_10-30-36.wav	343eb58e832be8c179800626f329d69f	Voice
142	Voice_call_34798807_628161902088_2015-07-09_10-48-00.wav	c4deba8b4ba21cf44fc5c64e9483d59c	Voice
143	Voice_call_34799030_628161902088_2015-07-09_11-01-58.wav	e40ea1a3b3e30e39a24d1f1548154e7b	Voice
144	Voice_call_34799179_628161902088_2015-07-09_11-09-45.wav	3ae403075c7a83fc9952f4f50a5880dd	Voice
145	Voice_call_34799326_628161902088_2015-07-09_11-18-02.wav	95ec1a42225e04346176fc02ad0774c7	Voice
146	Voice_call_34799581_628161902088_2015-07-09_11-29-43.wav	10bd3923957bab8855acc650696f483d	Voice
147	Voice_call_34799842_628161902088_2015-07-09_11-43-16.wav	9e117bf59ecb1f267f027e75e7c44897	Voice
148	SMS_6281375540717_2015-07-07_10-51-28.pdf	e97695d111f7b05c98b173dca80c35b9	Softcopy SMS
149	SMS_6281375540717_2015-07-08_12-30-55.pdf	a3d3375db22dcd430bde51e0a6f17dda	Softcopy SMS
150	SMS_6281375540717_2015-07-08_12-31-44.pdf	2d63bc5d5793783f6ca0d93429da907d	Softcopy SMS
151	Voice_call_34771965_6281375540717_2015-07-07_10-	d04fbce9f99b9a571269dfc345ec0a31	Voice



	48-49.wav		
152	Voice_call_34773074_6281375540717_2015-07-07_11-55-32.wav	7bed89d0215598254f9170b1d6b6bec6	Voice
153	Voice_call_34786966_6281375540717_2015-07-08_12-18-28.wav	f94609de3560bbd51360b9cc8f91f7ba	Voice
154	Voice_call_34786989_6281375540717_2015-07-08_12-19-57.wav	683bd853f6207181c0f6377ae57f59ec	Voice
155	Voice_call_34787064_6281375540717_2015-07-08_12-24-32.wav	e48efa9b462c340a0efa6285e6820f57	Voice
156	Voice_call_34787156_6281375540717_2015-07-08_12-28-48.wav	26a2f20262d2f97eb3fb8ddc5fc2dee6	Voice
157	Voice_call_34787332_6281375540717_2015-07-08_12-40-25.wav	632667ccae33358b6021673d88177e45	Voice

- 219 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2007 tentang Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 220 1(satu) bundel fotocoty legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 221 1(satu) lemfar fotocopy legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu No 979/HUK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal : permintaan keperluan seminar (Mobil, Ulos, Penginapan dan Ruang VIP Kualanamu) beserta 1 (satu) lembar Disposisi dan 1(satu) lembar fotocopy Invoice JW Mariot tanggal 27 April 2015 untuk sewa 6 (enam) kamar tanggal 13 April 2015 dengan total sebesar Rp 9.975.000,-(sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
- 222 1(satu- lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu No 1113/HUK/IV/2015 tanggal 10 April 2015 perihal : permintaan fasilitasi jamuan makan siang bersama Prof DR O.C Kaligis, SH, MH untuk kegiatan Seminar terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan dalam rangka hari jadi Pemerintah Propinsi Sumut ke-67 beserta 2 (dua) lembar Disposisi.



- 223 1(satu) lemfar Fotocopy legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 3 Juni 2015 Nomor 13/BP/KDH/WKDH/2015 K Rekening 1.20.1.20.02. \$00.00.5.1.1.03.02 untuk pembayaran belanja penunjang operasional kepala Daerah tahun 2015 sebesar Rp 517.904.500,- (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah). dengan lempiran 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 03 Juni 2015 dan 1 (satu Bundel) Rincian penggunaan biaya penunjang operasional Gubernur Sumut bulan Februari dan Maret 2015 dengan lampiran dokumen pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran).
- 224 1(satu) lemfar Fotocopy legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 15 Juli 2015 Nomor 58/BT/KDH/WKDH/2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.5.03.02 untuk pembayaran belanja penunjang operasional kepala Daerah tahun 2015 sebesar Rp 405.200.000,- (empat ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan lampiran 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 15 Juli 2015 dan 1 (satu Bundel) Rincian penggunaan biaya penunjang operawionel Gubernur Sumut dengan lampiran dokumen pertanggungjawabannya ,bon dan kuitansi pengeluaran).
- 225 2 (Dua) lembar dokumen Copy wesuei asli (dilegalisir) Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D.498-KP.04.10-92 tanggal 06 Agustus 1992 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si sebagai Penata Muda (III/a) dalam jabatan Hakim Pengadilan Negeri yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementrian Kehakiman Republik Indonesia.
- 226 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 47/DjMT/KEP/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si dalam Jabatan baru sebagai Hakim Madya Utama/Pembina Utama Muda/Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Mndonesia.



- 227 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal 20 Oktober 2003 beserta lampirannya tentang pencatatan Sdr. DERMAWAN GINTING, SH sebagai Penata Muda Tk I (III/b) dengan status Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementerian Kehakiman Retublik Indonesia.
- 228 3 (Tiga) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usala Negara Nomor : 58.a/DjMT/KEP/IX/2013 tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. DERMAWAN GINTING, SH dalam Jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I / Hakim Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 229 1 (Satu) lembar Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 84/M tahun 2002 tanggal 01 Mei 2002 tentang pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, SH. Sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia.
- 230 3 (Tiga) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 132/DnMT/OEP/IX/2414 tanggal 15 September 2014 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, SH,.MH dalam Jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I /Hakim Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 231 6 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir- Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. SYAMSIR YUSFAN, S.H., MH dalam Jabatan baru sebagai Pembina Tingkat I, Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.



- 232 1 (satu) Bundel dokumen invoice nomor 115042013 tanggal 02 April 2015 table 09 dengan jumlah totql Rp 2.596.459,- (Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)
- 233 1 (satu) lembar print out rekapitulasi kasir tanggal 02 April 2015.
- 234 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir tabel kas harian kantor pengacara OC Kaligis & Associates terkait pembayaran dari Ibu EVY dan Pak GATOT pada tahun 2015.
- 235 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengeluaran Kas No. 7732 ter tanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 260.000.000,- keperluan USD 20.000.
- 236 1 (satu) lembar fotogopy legalisir Pengeluaran Kas No. 3748 ter tanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 293.790.000,- keperluan pengambilan tunai SGD 30.000.
- 237 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penerimaan Kas No. 4062 ter tanggal 20/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 140.040.000,- untuk Deposit LF perkara PTUN Medan.
- 238 1 (satu) lemfar fotocopy legelisir Pengeluaran Kas No. 5577 ter tanggal 7/7/6015, sejumlah Rt. 20.000.000,- keperluan pengambilan tunai.
- 239 HP Warna Merah Merk Nokia E90 dengan IMEI : 353660011887373 yang didalamnya terdapat SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan no kode : 6610 4211 2584 8850, No Telepon : 081221848850, Memory Card Micro SD Merk V-Gen Kapasitas 2GB dengan no kode : P 1019445.
- 240 HP Warna Putih Merk Blackberry Model ; Q10, IMEI : 3577 590538 454467 Pin BB : 2B1D7E9B, yang didalamnya terhadap SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan ICC ID : 8962100118258693714 dan tanpa memory card, No. telepon 085218869371.
- 241 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih model GT-E1272 dengan SN:RV1G60BQKLH, IMEI 1 : 3575420641299401, IMEI 2: 357543064129933 yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210000608202199401 yang digunakan oleh ISMAIL FAHMI.
- 242 1 (satu) buah handphone merk Nokia 106 warna hitam dengan MMEI: 355145061742007, yang di dalamnya terdapat sim card XL dengan ICCID: 8962116101731443800 yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan ICGID: 6214016625622622,
yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST

244 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 14/07 '15, OG
KALIGIW yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 14 Juli 2015

245 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 15/07 '15, OC
KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 15 Juli 2015.

246 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PH29077231
yang berisikan antara lain :

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	a6d67adab87412c4a4f86a6bdb628164	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-07-01_23-45-38.pdf	c4567ea891d58e5f7f94fbb0c374616a	Softcopy Transkrip
3	6281362101414_2015-07-04_17-30-15.pdf	4401f5bf0d660e6aae4fd3cb2c5c83a6	Softcopy Transkrip
4	6281362101414_2015-07-05_11-21-52.pdf	90b39962576c63eb284b8ebc88415af6	Softcopy Transkrip
5	6281362101414_2015-07-05_11-35-53.pdf	659e373fd2ac36e2f012420fe9460230	Softcopy Transkrip
6	6281362101414_2015-07-06_14-22-44.pdf	3b8b4fff2b0baa514fdf1304c51a8d77	Softcopy Transkrip
7	6281362101414_2015-07-06_14-25-14.pdf	76c886ee7033da39ea06932feac61e90	Softcopy Transkrip
8	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	9452e5edd5e25389d641bf95c2490543	Softcopy Transkrip
9	6281362101414_2015-07-07_12-54-30.pdf	4cc467e81122a3c6b961f5bad0b6128f	Softcopy Transkrip
10	6281269705761_2015-07-01_09-43-01.pdf	d90dd42b956bbafde4ef8b0a54683796	Softcopy Transkrip
11	6281269705761_2015-07-02_17-03-26.pdf	448a535b88f83f568edb38e24bc90381	Softcopy Transkrip
12	6281269705761_2015-07-02_20-30-02.pdf	65c77d29518b2a28398f7f3bc035d461	Softcopy Transkrip
13	6281269705761_2015-07-03_10-06-55.pdf	0f7476c31ad8b3d0c27ff8f1e8769027	Softcopy Transkrip
14	6281269705761_2015-07-05_22-28-05.pdf	9870fa2f8a363f88b7836916bc6afc65	Softcopy Transkrip
15	6281269705761_2015-07-06_08-09-59.pdf	075829afcf5730fbcabc0bdf6441502d9	Softcopy Transkrip
16	6281269705761_2015-07-06_09-06-17.pdf	8e0c7b8a676fbc371e3eb86a04ccab84	Softcopy Transkrip
17	6281269705761_2015-07-06_13-58-46.pdf	0791a7d4b3dc40426bac3c61c6ae7d4c	Softcopy Transkrip
18	6281269705761_2015-07-06_14-03-56.pdf	66ac812a21e83e873e512a7bf9cf3944	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	6287883327443_2015-07-01_06-56-05.pdf	bec1b2091cb929c0f287d68462022841	Softcopy Transkrip
20	6287883327443_2015-07-01_09-55-17.pdf	69b51e6061149d4710c87ead32dfa5e7	Softcopy Transkrip
21	6287883327443_2015-07-01_09-58-06.pdf	d8870e27844331a819fb7325427e3ade	Softcopy Transkrip
22	6287883327443_2015-07-01_10-01-30.pdf	720c3cc9410bc4a48dd90e5e927e1a6a	Softcopy Transkrip
23	6287883327443_2015-07-01_10-07-14.pdf	11fa0a2d315d1a75a1d4adb0d26332ca	Softcopy Transkrip
24	6287883327443_2015-07-03_13-00-11.pdf	cccade84b0f69907df3718d05faafd40	Softcopy Transkrip
25	6287883327443_2015-07-05_11-34-10.pdf	26b9855ecf8f4210175f5ddab88b49e5	Softcopy Transkrip
26	6287883327443_2015-07-06_20-35-08.pdf	be4b72cb244ea8d84050d5171ddc3bf0	Softcopy Transkrip
27	6287883327443_2015-07-07_11-59-48.pdf	8eae4a620ea7f40d2ccd9ee96dc99b05	Softcopy Transkrip
28	6287788877191_2015-06-05_18-04-07.pdf	8d49108ed577076b4460e1e158c1fb18	Softcopy Transkrip
29	6287788877191_2015-06-07_09-11-07.pdf	f6f545d8bc44252fa3c9b583f8145a7c	Softcopy Transkrip
30	6287788877191_2015-06-08_07-43-52.pdf	5f0ddea870e9f7250dd4816060ed4baf	Softcopy Transkrip
31	6287788877191_2015-06-09_15-18-12.pdf	6125fa24a5e33f46cec0bf2d7b08155e	Softcopy Transkrip
32	6287788877191_2015-06-10_07-41-23.pdf	554afa1043f47e3cb31f8419d91e025b	Softcopy Transkrip
33	6287788877191_2015-07-04_10-33-44.pdf	b942da3f293cd58e1b638423b57d12e3	Softcopy Transkrip
34	6287788877191_2015-07-05_02-47-58.pdf	fafa82aed79657ce895f3e71ba23810c	Softcopy Transkrip
35	6287788877191_2015-07-05_04-04-01.pdf	573a9b5d66c83296109735f9b646540b	Softcopy Transkrip
36	6287788877191_2015-07-05_04-08-14.pdf	eddb12b2412cd5f210b70d78d84afa3e	Softcopy Transkrip
37	6287788877191_2015-07-05_04-11-49.pdf	850a60073b00111a3f237263112cb13c	Softcopy Transkrip
38	6287788877191_2015-07-05_10-46-56.pdf	235bbd77a5f5bde22e4120a84abd6593	Softcopy Transkrip
39	6287788877191_2015-07-05_11-34-12.pdf	152b8d3eb82eb506be54fe613d541883	Softcopy Transkrip
40	6287788877191_2015-07-06_06-48-24.pdf	83faeabd1da6d05eb1aac1a95777da48	Softcopy Transkrip
41	6287788877191_2015-07-06_09-16-33.pdf	f83f08af322f0d2691b6c4927bae3dd7	Softcopy Transkrip
42	6287788877191_2015-07-06_09-19-39.pdf	6b67783b2ddd4eab7f528fc91c6e85d1	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	6287788877191_2015-07-06_11-41-08.pdf	b9549c9fe211fe7b4e51f4565f2e2184	Softcopy Transkrip
44	6287788877191_2015-07-06_11-44-39.pdf	3456d3b1eabdbe203ec3fde478df3b3e	Softcopy Transkrip
45	6287788877191_2015-07-06_13-48-14.pdf	7ca7162fb88c44ab127472d812f74b30	Softcopy Transkrip
46	6287788877191_2015-07-06_16-21-59.pdf	e782acedf0e8b58da9cb1f18b7011a3e	Softcopy Transkrip
47	6287788877191_2015-07-06_16-55-26.pdf	0f1ac8cede984e3b75fe009b16420708	Softcopy Transkrip
48	6287788877191_2015-07-07_08-57-21.pdf	188c2246138a37c1098e7c83f78a5ca3	Softcopy Transkrip
49	6287788877191_2015-07-07_11-55-32.pdf	cde979ae1a20a4163846606eba8b1419	Softcopy Transkrip
50	6287788877191_2015-07-07_13-08-00.pdf	7b9d3ce882a7a73138245edc7618a2f3	Softcopy Transkrip
51	6287788877191_2015-07-07_13-10-42.pdf	6a63ee80646f3df596f50b90354ab837	Softcopy Transkrip
52	6287788877191_2015-07-07_13-14-16.pdf	606ace7e701f28f32c5c654180e5f96a	Softcopy Transkrip
53	6287788877191_2015-07-07_13-31-50.pdf	90bff85764a8a4e09062040831c19012	Softcopy Transkrip
54	6287788877191_2015-07-08_10-04-39.pdf	b203a865754e561895473bdbefeca84e	Softcopy Transkrip
55	6287788877191_2015-07-08_12-20-58.pdf	c159a54436147976393a33b11d2eccd1	Softcopy Transkrip
56	6287788877191_2015-07-08_12-24-28.pdf	72f2e8b8a1e9f4a70652823681032181	Softcopy Transkrip
57	6287788877191_2015-07-08_19-06-37.pdf	c724167525b73620d4ce218b4d89f7ba	Softcopy Transkrip
58	6287788877191_2015-07-08_19-27-38.pdf	97106fa240ebe2c6b69e42fb59620206	Softcopy Transkrip
59	6287788877191_2015-07-09_08-44-20.pdf	2c354456968764548b9c0044efb6cce2	Softcopy Transkrip
60	6287788877191_2015-07-09_09-53-02.pdf	cfb7fb63b60bb3bfef42b611066be248	Softcopy Transkrip
61	6281221848850_2015-06-03_18-38-58.pdf	a86a87c95536fe01617e59a7ebaaac5	Softcopy Transkrip
62	6281221848850_2015-06-03_18-41-35.pdf	73c9f22e1a5710f0de599ee0ba4f78a0	Softcopy Transkrip
63	6281221848850_2015-06-03_19-05-22.pdf	0ab90155e6742627df8dd5bd375e5ebb	Softcopy Transkrip
64	6281221848850_2015-06-07_08-20-32.pdf	700bbce2eb1cbe276ced3c2cd3a2ef6a	Softcopy Transkrip
65	6281221848850_2015-06-07_19-27-42.pdf	2f031d5b43b3875b0ae02cf5866a3415	Softcopy Transkrip
66	6281221848850_2015-06-08_06-57-26.pdf	992dcdb516bdfb954d4b0f247c9adf34	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	6281221848850_2015-06-08_11-40-46.pdf	21fa99e52a8e728eba770261968cf7af	Softcopy Transkrip
68	6281221848850_2015-06-09_06-51-12.pdf	b78165bc5be718c0e50d37f5afa33cee	Softcopy Transkrip
69	6281221848850_2015-06-09_08-25-29.pdf	b141d08aca84f94646f8820a453cf29e	Softcopy Transkrip
70	6281221848850_2015-06-09_08-29-11.pdf	2d013f94c24261c33ea61d3e40e51b9f	Softcopy Transkrip
71	6281221848850_2015-06-09_11-00-08.pdf	180a2c06ee0081a4d594d8214524e293	Softcopy Transkrip
72	6281221848850_2015-06-10_17-20-05.pdf	098244a439e2cc952cf43ef9ef1e8f26	Softcopy Transkrip
73	6281221848850_2015-06-17_14-52-01.pdf	0499c0a7e22d74c16d07e93748aaf6be	Softcopy Transkrip
74	6281221848850_2015-06-24_09-13-24.pdf	c86aad6e8076be9cf3ab4db540bbcbd4	Softcopy Transkrip
75	6281221848850_2015-06-25_13-00-50.pdf	8ab63d534121c8f20363ae05b787136e	Softcopy Transkrip
76	6281221848850_2015-06-29_08-53-02.pdf	4ff1a359a839202daecfba88c9cd34f2	Softcopy Transkrip
77	6281221848850_2015-07-01_10-24-58.pdf	4f8d2ca09d72580724054571622c16b6	Softcopy Transkrip
78	6281221848850_2015-07-01_22-17-48.pdf	d7cd6356f579836bc90cce33ab7e1f9e	Softcopy Transkrip
79	6281221848850_2015-07-01_22-26-09.pdf	d58fe8de8f30cb0e0b0f112a8a88d745	Softcopy Transkrip
80	6281221848850_2015-07-06_09-06-16.pdf	b6f5cf705fa21386342a874e56a65c2e	Softcopy Transkrip
81	6281221848850_2015-07-06_13-58-49.pdf	ebf5b8bcd95faf4d9c2b72ebf7befa77	Softcopy Transkrip
82	6281221848850_2015-07-06_14-03-57.pdf	3a7bf9dfca07c96bc898f469005c0ac5	Softcopy Transkrip
83	6281221848850_2015-07-07_10-35-49.pdf	ddffcaebb7074213722fe289ab9a70a5	Softcopy Transkrip
84	6281221848850_2015-07-07_12-09-09.pdf	684e6d1cc24f02ae3987cef7ced0f672	Softcopy Transkrip
85	6281221848850_2015-07-09_10-29-49.pdf	d31163601b0ccfcedfcc79f9158615e0	Softcopy Transkrip
86	6281221848850_2015-07-09_10-38-23.pdf	851677a8cafa5ba9b9fc40dd72400842	Softcopy Transkrip
87	6281221848850_2015-07-09_14-55-23.pdf	2b80eb533684ff27018d771a25b96dfb	Softcopy Transkrip
88	6281221848850_2015-07-09_15-30-57.pdf	b60796250c5b64407e7aa2c8dd55b08e	Softcopy Transkrip
89	6281221848850_2015-07-09_16-59-09.pdf	42670eb27ae2ff83d6593f8542e5fff6	Softcopy Transkrip
90	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	85d8b2ac4f3a3fa7d9b721f52774d0af	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	5d972dcf358e03bcf3e6d72515efe755	Softcopy Transkrip
92	628161902088_2015-06-16_08-47-36.pdf	04727bf3cd3ab25ce82ea70b47563040	Softcopy Transkrip
93	628161902088_2015-07-01_07-02-25.pdf	86c52a660507194d1f25595f6a17158e	Softcopy Transkrip
94	628161902088_2015-07-01_07-05-28.pdf	91156c27ce45c056b6af7eb17e997d7c	Softcopy Transkrip
95	628161902088_2015-07-01_07-24-02.pdf	9d24f9e85d263ce1b553d73a04102322	Softcopy Transkrip
96	628161902088_2015-07-01_10-30-59.pdf	eb54d1196d9b51d2050e3c709bc74507	Softcopy Transkrip
97	628161902088_2015-07-01_15-25-45.pdf	7f4560f530d03a51574aff61bdcf62cb	Softcopy Transkrip
98	628161902088_2015-07-02_08-48-49.pdf	7acbb6d343731f81a9d490616c13a169	Softcopy Transkrip
99	628161902088_2015-07-02_08-52-43.pdf	65cedcf050629c87b2e38e9ea63b364b	Softcopy Transkrip
100	628161902088_2015-07-02_08-58-21.pdf	55f6b126cead5f4b4b795fee6bef18fd	Softcopy Transkrip
101	628161902088_2015-07-02_09-47-07.pdf	da29a9e600e3a773ccaf8f877619593d	Softcopy Transkrip
102	628161902088_2015-07-02_10-04-27.pdf	d37d7a22261954585d03f712a73cd76e	Softcopy Transkrip
103	628161902088_2015-07-03_06-10-21.pdf	a9511aa206b9fd543bc2bd4f6f3b5706	Softcopy Transkrip
104	628161902088_2015-07-03_13-00-08.pdf	8f780eb1d7add9f2678d8e13d59d7081	Softcopy Transkrip
105	628161902088_2015-07-03_13-50-34.pdf	88b56f23333ec02e67edc013a9867f7d	Softcopy Transkrip
106	628161902088_2015-07-05_04-45-00.pdf	72792e57550cb53680765a104846ad21	Softcopy Transkrip
107	628161902088_2015-07-05_08-24-08.pdf	cdd337be0044f87dedeb95078695c13c	Softcopy Transkrip
108	628161902088_2015-07-05_11-10-14.pdf	ea797cc01b11554512fea89fdbfdd5f0	Softcopy Transkrip
109	628161902088_2015-07-06_20-35-11.pdf	5e72b44dd243f5c31d12af9393f191e4	Softcopy Transkrip
110	628161902088_2015-07-07_12-02-20.pdf	5678b3d1dc5833304d1afad1a303343f	Softcopy Transkrip
111	628161902088_2015-07-09_09-54-39.pdf	9b54f1360d4659c553591cfdd0941942	Softcopy Transkrip
112	628161902088_2015-07-09_10-01-53.pdf	071250e906de5d8eafd3e20599130d0f	Softcopy Transkrip
113	628161902088_2015-07-09_10-20-59.pdf	245813582608158f55762e0d76baef12	Softcopy Transkrip
114	628161902088_2015-07-09_10-30-36.pdf	1b4880c99187ad75db00dd92458169e2	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115	628161902088_2015-07-09_10-48-00.pdf	f6e9193f773e3d53ef50617c60058381	Softcopy Transkrip
116	628161902088_2015-07-09_11-01-58.pdf	7b37bd9e6905e24fac8b1d43d9d9f6f5	Softcopy Transkrip
117	628161902088_2015-07-09_11-09-45.pdf	07c47fcf0e9b35db197245e61a46ef8d	Softcopy Transkrip
118	628161902088_2015-07-09_11-18-02.pdf	ac5cfd7b05b47c3ffb345534dc9ca251	Softcopy Transkrip
119	628161902088_2015-07-09_11-29-43.pdf	dbf7ec16b7604dcd3af34c35763e0904	Softcopy Transkrip
120	628161902088_2015-07-09_11-43-16.pdf	eb93ddb87c73366408e3fade06e7fa67	Softcopy Transkrip
121	628161902088_2015_07_09_09-55-39.pdf	ab55d76b4ebc37e482942e120cb076e9	Softcopy Transkrip

247 1 (SATU) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor
MAPA25P1102149454 yang berisikan antara Lain :

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-06-16_15-24-31.pdf	743fbbeac81bf056c291fe8e6c215485	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-06-16_15-31-05.pdf	f1e5ec365ddd34da98ffe574d58dcb75	Softcopy Transkrip
3	6281311183687_2015-06-27_21-30-15.pdf	249bdf77bcd14548590a7ef1b7c47388	Softcopy Transkrip
4	6282111000071_2015-06-22_18-55-51.pdf	85163fbfd3b7ae18564a7bf1bce0d8c9	Softcopy Transkrip
5	6282111000071_2015-06-30_11-14-38.pdf	237cec7fbb277e743c1ae4ee864a6e4f	Softcopy Transkrip
6	6282111000071_2015-07-04_11-55-16.pdf	ee754a872a64d2ad72d8a0b3c6781766	Softcopy Transkrip
7	6282111000071_2015-07-04_12-08-12.pdf	e0e7564970b465bdac5ec9f084f864e3	Softcopy Transkrip
8	6282111000071_2015-07-06_08-50-45.pdf	7e5619a287052788437d6968cc50f270	Softcopy Transkrip
9	6282111000071_2015-07-06_08-54-37.pdf	208eceda3d48069328fa32788359ffee	Softcopy Transkrip
10	6282111000071_2015-07-06_14-15-46.pdf	5fa47e65e01f278d6e3823118b94a999	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	6282111000071_2015-07-06_14-25-12.pdf	28e01c4f22edefb1febb57c1d0722e0f	Softcopy Transkrip
12	6282111000071_2015-07-06_14-27-52.pdf	b26d720ef962b40b2e933e19b2b63806	Softcopy Transkrip
13	6282111000071_2015-07-07_11-35-35.pdf	85e022421c5f909a75b06f6de4447f16	Softcopy Transkrip
14	6282111000071_2015-07-07_12-09-56.pdf	665a863e85335752599418fb807399a8	Softcopy Transkrip
15	6282111000071_2015-07-07_12-37-31.pdf	7560c77430e4d8f68516c5385288e82b	Softcopy Transkrip
16	6282111000071_2015-07-07_12-42-05.pdf	809aa8edce196041191dcf284dde8f75	Softcopy Transkrip
17	6282111000071_2015-07-07_12-52-53.pdf	353ef0b750f2b7a0d31bf86af5b87e6b	Softcopy Transkrip
18	6282111000071_2015-07-09_09-47-30.pdf	ef2e19e0798979a8ed09db45dc7a448a	Softcopy Transkrip
19	6282111000071_2015-07-09_09-54-46.pdf	46c4fee597bd65e56572e3af6396d2a0	Softcopy Transkrip
20	6282111000071_2015-07-09_09-59-41.pdf	106bdfd5d64b020e8e09816c1e489bcc	Softcopy Transkrip
21	6282111000071_2015-07-09_10-02-56.pdf	48f9bd84ecfc317a2beda2150e6ff6fd	Softcopy Transkrip
22	6282111000071_2015-07-09_10-08-53.pdf	575b5277517faf64843860e315cd2379	Softcopy Transkrip
23	6282111000071_2015-07-09_10-38-21.pdf	6fb2ecde322b9058334604bd7904fea9	Softcopy Transkrip
24	6282111000071_2015-07-09_11-49-07.pdf	951e28d9a09f67a03aa7ffc6f73acee5	Softcopy Transkrip
25	6281375344283_2015-06-17_16-34-18.pdf	bd404f0453f6a1df2d09dc4bcc0aa345	Softcopy Transkrip
26	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	7482c51d403203ddd12de7faaf8e9b21	Softcopy Transkrip
27	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	e22592bfc2257ea091f27a29e7aa587b	Softcopy Transkrip
28	6281375344283_2015-07-02_11-12-28.pdf	c9c1b1baab2c99838a058252c6e06ba4	Softcopy Transkrip
29	6281375344283_2015-07-02_12-17-25.pdf	a7ced85e5652eaff1bfdc7193355cfee	Softcopy Transkrip
30	6281375344283_2015-07-06_08-09-59.pdf	05679d228901b99beb8f7f14079da1ec	Softcopy Transkrip
31	6281375344283_2015-07-06_14-22-45.pdf	8f3828ef4fca6cf83a27698aa5f66155	Softcopy Transkrip
32	6281375344283_2015-07-06_14-27-54.pdf	cf742e1cb2c70f72a82c825378785f80	Softcopy Transkrip
33	6281375344283_2015-07-07_12-54-32.pdf	36cc084b1e67423edf53fae57f5bb555	Softcopy Transkrip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3 **Salinan** resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 126/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Januari 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DERMAWAN GINTING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Pearl, Imei: 351975042890962 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 0176 2583 9777 02, dan terdapat memory card micro SD 2 GB merk SanDisk.
 - 2 1 (satu) buah handphone Merk: Nokia, Tipe: RM-555, Model: N97-4, Imei: 358315/03/191732/1 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 1113 2580 9762, dan tanpa memory card
 - 3 1 (satu) buah tablet Merk: Samsung, Model: SM-T311, Imei: 357397/05/710829/1 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel tanpa No ICCID, dan tanpa memory card beserta 1 buah charger warna putih Samsung
 - 4 1 (satu) KTP Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo a.n TRIPENI IRIANTO PUTRO no. 3307090507620006
 - 5 1 (satu) buah tanda pengenal Mahkamah Agung RI a.n TRIPENI IRIANTO P., SH. MH, Dengan NIP 196207051988031004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor tanda pengenal: 511/TPMA 2013 masa berlaku sampai dengan 13 Juni 2016, tertanggal 13 Juni 2013

- 6 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a/n TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH, Msi dengan nomor NIP 196207051988031004
- 7 2 (dua) buah kunci meja kerja di ruang kantor PTUN Medan.
- 8 1 (satu) buah kartu atm BNI SYARIAH Master Card tanpa nama no.5264 2281 1031 6293.
- 9 1 (satu) buah kartu atm Mandiri Visa tanpa nama no.4097 6621 5237 3083.
- 10 1 (satu) buah kartu atm Paspor BCA a.n TRIPENI IRIANTO PUTRO SH no. 6019 0010 5557 0612.
- 11 1 (satu) buah kartu anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH., Msi. Dengan nomor anggota 7326.
- 12 1 (satu) buah amplop coklat dengan kop amplop Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi 5 lembar uang pecahan @ Sing\$1.000,- dengan total Sing\$5.000,-
- 13 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 100 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD10.000,-.
- 14 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 50 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD5.000,-.
- 15 2 (dua) buah flashdisc:
 - a Merk Toshiba sebesar 4 GB warna putih.
 - b Merk SanDisk sebesar 2 GB warna hitam.
- 16 1 (satu) buah buku berjudul “Barack Obama A Gift of Hope” karangan Otto Cornelis Kaligis.
- 17 2 (dua) buah buku berjudul “Antologi Tulisan Ilmu Hukum” Jilid 11, karangan Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.
- 18 3 (tiga) buah buku berjudul “Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia” ditulis oleh Prof. DR. O.C. Kaligis, SH., MH.
- 19 1 (satu) buah buku berjudul “Carut Marut Pemilu Legislatif 2014, Contoh Study Kasus” ditulis oleh Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Curve, Imei: 356932046753699 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 1431 3237 6249, dan terdapat memory card.
- 21 Handphone Merk Apple, Type: iPhone, Model: MGAA2SA/A, SN: FK1NV33FG5QT, IMEI: 3544400067159434, MEID: 35444006715943, yang didalamnya terdapat simcard provider Telkomsel dengan ICCID: 8962100065624749201
- 22 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Torch, Imei: 35620 1043062805 yang didalamnya terdapat Simcard XL, No ICCID: 8962116113 54240640-5, dan terdapat memory card merk V-Gel Micro SD 2 GB.
- 23 1 (satu) buah kartu kredit Danamon Mastercard no. 5577 9114 4068 6285.
- 24 1 (satu) buah kartu Silver Debit Mandiri visa no. 4097 6624 0851 5081
- 25 1 (satu) buah kartu BRI Card Mastercard no. 5221 8410 9243 8794 a.n DERMAWAN GINTING SH.
- 26 1 (satu) buah kartu Mega Pass Visa no. 4214 0814 1004 5359 a.n RUFINA TARIGAN
- 27 1 (satu) buah kartu atm Bank BRI 6013 0113 8701 0530
- 28 1 (satu) buah kartu atm BCA no. 6019 0025 4525 2852.
- 29 1 (satu) buah kartu Paspor BCA no. 6019 0045 1791 8106.
- 30 1 (satu) buah kartu Silver Debit Mandiri visa no. 4097 6624 9115 1240.
- 31 1 (satu) buah A Card Flazz - BCA no. 0145 0018 0681 9722
- 32 2 (dua) buah kartu anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n DERMAWAN GINTING SH, no anggota 6428.
- 33 1 (satu) buah kartu Pengenal Mahkamah Agung RI no. 3512/TPMA/2009 a.n DERMAWAN GINTING, SH, nomor NIP: 040 069 069, tertanggal 1 Maret 2009.
- 34 3 (tiga) buah flashdisc:
- a Merk iLive-T Series.
 - b Merk Kingston.
 - c Tanpa merk warna abu-abu.
- 35 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, no. 3515183112650015 a.n DERMAWAN GINTING, SH berlaku hingga 31 Desember 2015.
- 36 1 (satu) buah simcard Telkomsel tanpa nomor.
- 37 1 (satu) bungkus bekas kartu Telkomsel Simpati no. 0813-6134 2420.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38 1 (satu) buah voice recorder merk Sony dengan no kode: 2660972.
- 39 1 (satu) bundel dokumen Kesimpulan; Dalam Perkara Permohonan Pengujian Kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor: 25/G/2015/PTUN.MDN atas nama pemohon: Drs. AHMAD FUAD LUBIS, MSI terhadap termohon: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates Advocates & Legal Consultants.
- 40 1 (satu) map warna hijau berisi:
- 1 (satu) bundel print out berjudul “Tentang Pertimbangan Hukum”.
 - 1 (satu) bundel print out berjudul “PUTUSAN nomor: 25/G/2015/PTUN-MDN – DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan terdapat catatan Biaya Perkara no.25/G/2015 – Sheilla.
- 41 2 (dua) lembar kertas tulisan tangan berjudul “Tentang Pertimbangan Hukum”.
- 42 1 (satu) buah external hardisk warna hitam merk Seagate Expansion Portable Drive model SRD00F1PN1D6AP1-500, SN: NA43A7B3, kapasitas 500 GB beserta kabel.
- 43 1 (satu) buah laptop warna abu-abu hitam merk Toshiba Satellite L745, SN: 5B366858W yang di dalamnya terdapat hardisc merk HGST, SN: BM0549KP, Model: HTS543232A7A384, Kapasitas 320 GB.
- 44 1 (satu) buah handphone Merk: Samsung GT-I9060, Tipe: Galaxy Grand Neo Duos, Imei: 352700/06/328491/2 dan imei no;352726/06/328491/7 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 0044 2209 3591 dan Simcard XL, No ICCID: 8962116713 38286417-3 dan terdapat memory card 16 GB merk SanDisk.
45. 1 (satu) KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang a.n AMIR FAUZI no.3603280504690011.
46. 1 (satu) buah tanda pengenal Mahkamah Agung RI a.n AMIR FAUZI SH. Dengan NIP 040 066 818, Nomor tanda pengenal: PTUN /SEK /001/ VIII/2006 masa berlaku sampai dengan 31 Agustus 2011, tertanggal 31 Agustus 2006.
47. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI no.1380 TPMA/2015 a.n AMIR FAUZI, SH. MH. Dengan NIP: 196 904 05199 3031004 dengan jabatan Hakim PTUN Medan, tertanggal 07 Mei 2015 dan berlaku sampai dengan 7 Mei 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Acer, Model: Aspire 4750 Series, Model No. MS2316, SN: LXRC80C02711508DFD2000.
49. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI PEMOHON yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: B-473/N.2.5/Fd./03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal: Permintaan Keterangan (BUKTI P-1).
 - b. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari C.H ENDRA GINTING, SH tanggal 24 Januari 2012 (BUKTI P-2).
 - c. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 25 Januari 2012 (BUKTI P-3).
 - d. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 26 Januari 2012 (BUKTI P-4).
 - e. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari MIMIN INDRAYATI, S.Sos tanggal 1 Februari 2012 (BUKTI P-5).
 - f. 5 (lima) lembar copy print out Artikel internet tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan RI dan Kemendagri (BUKTI P-6).
 - g. 7 (tujuh) lembar copy Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksam Agung Republik Indonesia Nomor: 01/KB/I-VIII.3/07/2007, Nomor: KEP-071/A/JA/07/2007 Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana (BUKTI P-7).
 - h. 1 (satu) lembar copy Lampiran IV Surat Nomor: 068 /KMA /HK.01/ VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012 Perihal: Permohonan Penerbitan Fatwa MA Tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BUKTI P-8).
 - i. 1 (satu) bundel copy Dokumen Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Negara Pemerintah, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Politik, Seminar Nasional H.U.T Ikahi Ke – 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 maret 2015 (BUKTI P-9).
 - j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang administrasi Pemerintahan), Dr. D. Andhi Nirwanto, Wakil Jaksa Agung RI, Seminar Nasional H.U.T Ikahi Ke – 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 maret 2015 (BUKTI P-10).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2009 Di Medan, Nomor: 104/S/XVIII.MDN/05/2010 Tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P-11).
- l. 7 (tujuh) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010, Nomor: 198. A/S /XVIII. MDN/05/2011 Tanggal: 27 Mei 2011 (BUKTI P-12).
- m. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor: 43.B/LHP/ XVIII.MDN/06/2012 Tanggal: 28 Juni 2012 (BUKTI P-13).
- n. 5 (lima) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor: 87. A/LHP/ XVIII.MDN/05/2013 Tanggal: 13 Mei 2013 (BUKTI P-14).
- o. 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor: 12.A/LHP/ XVIII.MDN/05/2014 Tanggal: 20 Mei 2014 (BUKTI P-15).
- p. 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/1612/2014 Lampiran : 1.- Tanggal 2 Mei 2014 (BUKTI P-16).
50. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT KUASA yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Substitusi R. ANDIKA YOEDISTIRA, S.H., M.H., tanggal 24 Juni 2015.
- b. 3 (tiga) lembar asli Daftar Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara Perdata Nomor: 05/.G/2015/PTUN.MDN.
- c. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Sdr. R. ANDIKA YOEDISTIRA, SH. Tanggal 11 Juni 2002.
- d. 1 (satu) bundel surat kuasa khusus nomor : SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 2015, yang terdiri dari :



- 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.
 - 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.
 - 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.
 - e. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015, terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.
 - 2 (dua) bundel asli Surat Substitusi Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.
 - f. 1 (satu) bundel asli dan 3 (tiga) bundel copy Surat Kuasa Nomor: 132/SK.IV/2015 Tanggal 28 April 2015 dan 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, S.H.
51. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru Nomor: 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:
- a. 4 (empat) lembar Surat – Panggilan Ke II No. 25 / G / 2015 PTUN – MDN Tanggal 18 Mei 2015 dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT PANGGILAN.
 - b. 1 (satu) bundel tulisan tangan “*SprinLid =>.
 - c. 1 (satu) bundel copy Dokumen Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya.
 - d. 1 (satu) bundel copy Kesimpulan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.
 - e. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bundel copy Dokumen Upaya Administratif Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Sudarsono, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya.
- g. 1 (satu) bundel copy tanggapan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.
- h. 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.
- i. 1 (satu) bundel copy Daftar Tambahan Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.
- j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Diskresi Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Tatiek Sri Djatminati, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya.
- k. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Santer Sitorus, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015.
- l. 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Pengadilan Atas Penerimaan Permohonan Untuk Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan Berkas Perkara Gugatan No. 25/G/2015/PTUN-MDN tanggal 05 Mei 2015 yang terdiri dari:
- 1 (satu) bundel Draf Tentang Pertimbangan Hukum (tulisan tangan).
 - 1 (satu) bundel Surat Asli Tanggal 5 Mei 2015 Perihal: Permohonan Pengujian Kewenangan.
 - 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP C yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan “Perkara No. 25/G/2015/PTUN-MDN”.
 - 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan “Sidang Tgl. 9/6-15 Perkara No. 25/G/2015/PTUN-MDN”.
 - 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan “No. 25/G/2015/PTUN-MDN Kamis, 11 Juni 2015”.
53. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP B yang terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar copy Riwayat Pendidikan / Pekerjaan a.n. Dr. Lintang Oloan Siahaan, SH., MH.
 - 6 (enam) lembar copy Daftar Riwayat Hidup a.n. Dr. H. Darwinsyah Minin, S.H., M.H.
 - 5 (lima) lembar copy Curriculum Vitae a.n. Muhammad Rullyandi, SH., HM.
 - 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor. 56 /Ket/ WD.II / FH/01/2015 Sdr. Muhammad Rullyyandi, SH., MH. Jabatan: Tenaga Pengajar Luar Biasa.
 - 6 (enam) lembar copy Curriculum Vitae a.n. Muhammad Rullyandi, SH., HM.
54. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI TERMOHON yang terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar Draf Bukti Surat Penggugat Dalam Perkara Nomor: 39/G/2015/PTUN-MDN antara PT. Sinar Agung Jaya Lestari Diwakili Oleh: Flinery Linsangan Sugiyono Sebagai Penggugat Melawan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Pangkalan Dodek Sebagai Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-31/N.2/Fd.1/03/2015 (T.1).
- c. 1 (satu) bundel copy Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 Tanggal: 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (T.2).
- d. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor: B-384/N.2.1/Fd.1/03/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.3).
- e. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: B-385/N.2.1/Fd.1/03/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Perihal: Permintaan Keterangan (T.4).
- f. 3 (tiga) lembar copy KUHP dan KUHAP Dilengkapi Dengan Yurisprudendi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad R. Soenarto Soerodibroto, S.H Edisi Kelima. (T.5).
- g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B-470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6).
- h. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7).
55. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP A yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2009 Di Medan, Nomor: 104 B/S/XVIII.MDN/05/2010 Tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P-11).
 - b. 1 (satu) bundel copy Kesimpulan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.
 - c. 1 (satu) bundel asli Kesimpulan Dalam Perkara Permohonan Pengujian Kewenangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Atas Nama Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel Draf Surat No. 758/OCK.V/2015 Tanggal 21 Mei 2015
Perihal: Akta Bukti Pemohon Pengujian Kewenangan.
- e. 2 (dua) lembar copy legalisir cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor:
SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.
- f. 1 (satu) bundel asli Resume-Gugatan No. 25/G/215/PTUN-MDN beserta
lampirannya.
56. 1 (satu) bundel dokumen asli dengan kalimat awal “ Akan kita beri
kesempatan kepada termohon terlebih dahulu untuk bertanya kepada ahli.
57. 2 (dua) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan “No. 25/G/2015/PTUN-MDN
(1)”.- 58. 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan “Saksi Termohon”.- 59. 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan “Saksi Penggugat/Pemohon”.- 60. 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul menggunakan Tulisan Tangan “Saksi
Ahli Dari Pemohon (2)”.- 61. 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul menggunakan Tulisan Tangan “Saksi
Ahli Dari Pemohon (1)”.- 62. 1 (satu) lembar printout Tanggal Persidangan Perkara No. 25/G/2015/PTUN-
MDN dalam map warna hijau dengan tulisan Permohonan Pemohon.- 63. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna kuning dengan tulisan Kejaksaan
Tinggi Sumatera Utara No. 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,
No. Agenda: 428, Tgl. Masuk: 01 Juli 2015 beserta lampirannya.
 - b. 1 (satu) bundel asli Daftar Tambahan Bukti Tertulis Dari Termohon
Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN
Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad
Lubis, M.Si Sebagai Pemohon Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara Sebagai Termohon.
 - c. 1 (satu) bundel asli tanggapan Termohon Dalam Perkara TUN Reg.
Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya
Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon)
Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.
- d. 1 (satu) lembar asli Surat No. 770/OCK.V/2015 Tanggal 22 Mei 2015
Perihal: Akta Bukti Tambahan Pemohon Pengujian Kewenangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan Berita Acara No. 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan “Sidang tgl 29/6-15”.
 - b. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan “Sidang tgl 25/6-15”.
 - c. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan “Termohon”.
65. 1 (satu) buah hand phone warna hitam merk Sony, Model: D2403, Imei: 355101063719386, SN: ZH800670B2 yang didalamnya terdapat sim card dengan Provider Telkomsel dengan Kode: 6210 0075 3254 0720 04, tanpa memory card.
66. 1 (satu) buah Lifebook warna hitam merk Fujitsu, Model SH561, SN: R1501615 yang didalamnya terdapat hardisk merk Seagate, SN: 5WX3CNCR, Model: ST9640320AS, kapasitas 64GB.
67. 1 (satu) bundel tulisan tangan berjudul “Perkara No.25/6/2015/PTUN-MDN – BERITA ACARA SIDANG.
68. 1 (satu) bundel dokumen asli dengan perihal: PERMOHONAN PENGUJIAN KEWENANGAN tertanggal 5 Mei 2015.
69. 1 (satu) buah handphone warna putih Merk: Apple, Tipe: Iphone, Imei: 354441067168003, No. ICCID: 8962119212418884377, Model MGA2PA/A.
70. 1 (satu) buah hp warna hitam merk Samsung, Type: Galaxy Note 3, Model: SM-N900, IMEI: 358916050746671, SN: RFID94VHJKX yang di dalamnya terdapat Memory Card Micro SD merk SanDisk, kapasitas 2 GB dan simcard XL.
71. 1 (satu) buah flashdisc warna hijau muda merk Toshiba, kapasitas 8 GB dengan kode: N723 D32210.
72. 1 (satu) buah kartu atm Paspor BCA no. 6019 0016 8898 2556.
73. 1 (satu) buah kartu BNI Mastercard Debit no. 5371 7618 1014 0993.
74. 1 (satu) buah kartu BNI Style Titanium Mastercard a.n M. YAGARI BHASTARA no.5241 2509 1001 2623.
75. 1 (satu) lembar boarding pass Garuda Indonesia tanggal 9 Juli 2015 rute Jakarta-Medan a.n GUNTUR/MYAGARIBHAS flight GA180.
76. 1 (satu) buah KTP Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar a.n MUHAMMAD YAGARI BHASTARA GUNTUR, no KTP: 737 1131 80585 0011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta a.n MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, no: 3175081805850011.
78. 1 (satu) lembar tanda terima warna kuning dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 631/51.537/US.XII/2014, tertanggal 5 Desember 2014, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,- dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO.
79. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 261/51.218/US.V/2015, tertanggal 27 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp20.000.000,- dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO.
80. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 257/51.214/US.V/2015, tertanggal 26 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,- dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO.
81. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 301/51.245/US.VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015, sudah terima uang sebesar Rp60.000.000,- dari Ibu EVI.
82. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari OC Kaligis & Associates Surat no. 1006/OCK.VII/2015, tanggal surat 1 Juli 2015, Kepada Bapak Gatot Pujo Nugroho Gubernur Sumatera Utara.
83. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR S.H pada Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2014.
84. 1 (satu) buah buku yang berjudul Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan Pasca UU No 30 tahun 2014) yang ditulis Prof Dr OC Kaligis, SH MH.
85. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim diluar pasal 77 – pasal 83 KUHAP) yang ditulis oleh Prof Dr OC Kaligis, SH MH.
86. 1 (satu) buah buku yang berjudul Barack Obama A Gift Of Hope Karangan Prof Dr OC Kaligis, SH MH.
87. 1 (satu) buah buku mutasi besar yang di dalamnya terdapat tulisan sebagai berikut : No. 8, Nomor Perkara 25/G/2015/PTUN.MDN, Penggugat Drs. Ahmad Fuad Lubis, Ms, Tergugat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim/ Panitera Pengganti: Tripeni Irianto Putro, SH, Msi, Dermawan Ginting, SH, MH, Amir Fauz SH, MH.

88. 1 (satu) map warna hijau bertuliskan Berita Acara No. 25/G/2015/PTUN-MDN yang berisi Berita Acara Reg No. 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs Ahmad Fuad Lubis, Msi sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai termohon.
89. 1 (satu) buah map warna hijau dengan lambang PTUN Medan, Nomor : No. 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs Ahmad Fuad Lubis, Msi sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai termohon.
90. 1 (satu) buah buku agenda warna biru tua bertuliskan Agenda Sidang Hakim Pengadilan TUN 2015.
91. 1 (satu) buah buku Agenda warna pink motif kotak bertuliskan College House Campus.
92. 1 (satu) buah buku dengan judul Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
93. 1 (satu) buah amplop besar warna putih dengan lambang Garuda bertuliskan petikan keputusan Presiden RI Nomor 71/K TAHUN 2014 ditujukan kepada Tripeni Irianto Putro Ketua Pengadilan TUN Medan.
94. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang senilai total USD 5000 (Lima ribudolar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD 100 (Seratus dolar Amerika).
95. 1 (satu) buah buku yang berjudul Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan tulisan Dr. Ni'matul Huda SH, M. Hum dan R. Nazriyah SH, MH yang didalamnya terdapat amplop warna putih merk Jaya berisi uang senilai total USD 5000 (Lima ribudolar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD 100 (Seratus dolar Amerika).
96. 1 (satu) buah buku warna merah jambu bertuliskan perkara masuk tahu 2015 'PANSEK'.
97. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D-518-Kp.04.02-Th.1989 tanggal 22 Agustus 1989, yang menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama TRI PENI IRIANTO PUTRO, SH menjadi Pegawai Negeri Sipil.
98. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan Menjalankan Tugas Nomor : W1-TUN/833/Kp-04.6/IX/2012 tanggal 4 September 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Tripeni Irianto Putro, SH Msi telah melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengadilan TUN Medan.

99. 1 (satu) bundel asli salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 35/KMA/SK/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengangkatan dan Penempatan Hakim Lingkungan Hidup.
100. 1 (satu) bundel asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 71/K/TAHUN 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan Golongan atas nama Tripeni Arianto Putro.
101. 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bpk HM PRASETYO Jaksa AGung Republik Indonesia No. 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal permohonan dan klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh Prof. DR. OC KALIGIS, SH MH.
102. 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bpk Muhammad Yusni SH MH Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal permohonan dan klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh Prof. DR. OC KALIGIS, SH MH.
103. 1 (satu) buah amplop warna putih tercetak OTTO CORNELIS KALIGIS dan Associates Advocat dan Legal Consultan Jalan Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160 Indonesia, yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar asli surat yang ditujukan kepada Yth Drs Ahmad Fuad Lubis, Msi No 759/OCK.V/2015 tertanggal 19 Mei 2013 hal Laporan sidang ke-1 yang ditandatangani oleh Prof Dr Oc Kaligis SH MH.
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai tempel Rp 6000,- dengan kop Otto Cornellis Kaligis No /249/51.208/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bpk Gatot Pujo Nugroho, banyaknya uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bp. M. YAGARI BHASTARI SH dan Ibu Yurinda Achyuni SH LLM) ke Medan tgl 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Prof Dr Oc Kaligis SH MH tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015.
 - c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai tempel Rp 6000,- dengan kop Otto Cornellis Kaligis No 250/51.209/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bpk Gatot Pujo Nugroho, banyaknya uang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bp. Yulius Irawansyah SH, Bp. M. YAGARI BHASTARI SH dan Ibu Yurinda



Achyuni SH LLM) ke Medan tgl 21 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Prof Dr Oc Kaligis SH MH tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015.

d. 1 (satu) lembar asli ber kop Garuda Indonesia tertulis diantaranya booking beeing ticket by sales counter Garuda Indonesia HAFIS TOUR dan TRAVEL, Booking Code : 8RTMXP book date : 2015-01-11, Pasenger detail : 1. RICO PANDEIROT/MR. 2. YULIUS IRAWANSYA/MR. 3 YAGARI BHASTARA/MR. Total Payment 6.357. 600 IDR.

104. Uang senilai total USD 700 (Tujuh ratus dolar Amerika) yang terdiri dari 7 lembar uang pecahan USD 100 (Seratus dolar Amerika).
105. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim di luar pasal 77- Pasal 83 KUHAP) karangan Prof. DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.
106. 3 (tiga) lembar fotocopy draft Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Tahun Anggaran 2014.
107. 2 (dua) lembar print out Daftar Bansos Mesjid Yang Ada Dalam Buku APBD 2014.
108. 2 (dua) lembar fotocopy Penetapan No.01/Akta Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali atas nama RIDWAN PANJAITAN, S.Psi sebagai Terdakwa yang memberikan kuasa kepada Prof. Dr. O.C KALIGIS, SH. MH.
109. 1 (satu) lembar print out Resume Perkara Pemprov Sumut.
110. 1 (satu) buku berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim diluar pasal 77 – Pasal 83 KUHAP) karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH.
111. 1 (satu) buku berjudul Carut Marut Pemilu Legislatif 2014 Contoh Study Kasus,karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH.
112. 1 (satu) buku berjudul Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam tugas kedinasan (Pasca UU No .30 Tahun 2014), karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH.
113. 1 (satu) buku berjudul KONTRAK BISNIS Teori dan Praktik Jilid 2 karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH.
114. 1 (satu) lembar foto Prof. Dr. OC KALIGIS, SH., MH bersama Gatot Pujo Nugroho dan Yurinda Tri Achyuni. -



115. 1 (satu) bundel copy dokumen yang bertuliskan RESUME PERKARA PEMPROV SUMUT yang berisi :

a. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Gubernur Sumut, Nomor B-170/F2/Fd.1/02/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal Bantuan Permintaan Keterangan (Pidsub 53).
- 1 (satu) lembar copy dokumen Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Sekda Propinsi Sumut, Nomor B-768/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan.
- 1 (satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Kepala Biro Keuangan Daerah Propinsi Sumut, Nomor B-767/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan.
- 1 (satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Gubernur Propinsi Sumut, Nomor B-973/F2/Fd.1/02/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Bantuan Permintaan Keterangan ke II.
- 1 (satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Sekda Propinsi Sumut, Nomor B-843/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan ke II.
- 1 (satu) lembar copy dokumen surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut Kepada Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahar Umum Daerah (BUD) Propinsi Sumut, Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan.
- 1 (satu) lembar copy dokumen surat Plh Sekda Propinsi Sumut kepada 1. Mahmud Segala (bendahara Umum Daerah Pempropu Periode 2012), 2. Baharuddin (Bendahara Umum Daerah Pempropu Periode Juni 2012-2014) 3. Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahar Umum Daerah (BUD) Propinsi Sumut Periode 2014, Nomor 180/2542/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Bantuan Pemanggilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel copy dokumen berisi dokumen sbb :
- 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari Kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 24 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan C.H Endra Ginting,SH.
 - 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari Kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 25 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan M. Juli Samsir Siregar, S.Sos.
 - 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari Kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 26 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan M. Juli Samsir Siregar, S.Sos.
 - 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari Kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 1 Februari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan Mimin Indrayati, S.Sos.
- c. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 481/OCK.III/2015, tanggal 27 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk Maruli Hutagalung, SH, MH (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.
- d. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 48.../OCK.III/2015, tanggal Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk Tjahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri RI) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.
- e. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 482/OCK.III/2015, tanggal 30 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk Muhammad Yusni, SH, MH Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.
- f. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 489/OCK.III/2015, tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.

g. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 490/OCK.III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk HM Prasetyo (Jaksa Agung RI) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.

h. 4 (empat) lembar copy Surat dari Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H.,M.H kepada Bapak H. M Prasetyo Jaksa Agung RI No 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum.

i. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 513/OCK.IV/2015, tanggal 6 April 2015 yang ditujukan kepada Bpk Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum tanpa tanda tangan.

j. 1 (satu) lembar copy surat dari Mahkamah Agung RI Nomor: 068/KMA/HK.01VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 Perihal : Permohonan Penerbitan Fatwa MA tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/ Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang ditujukan kepada Ketua BPK.

k. 1 (satu) bundel copy dokumen “Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kejaksaan Agung RI” Nomor : 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan Nomor : KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK.

116. 1 (satu) bundel surat hasil print out dari Komputer MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dengan Nomor: 2318/OCK.XII/2014 yang ditujukan kepada Bpk Gatot Pujo Nugroho Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 1 Desember 2014 yang di dalamnya berisi Nomor urut 6 perihal Bantuan Sosial TA 2013, Nomor urut 7 (tujuh) perihal Dana Bagi Hasil, Nomor urut 8 perihal Bantuan Keuangan Provnsi, Nomor urut 9 perihal Bantuan Operasional Sekolah.

117. 3 (tiga) buah kartu nama, atas nama : Yurinda Tri Achyuni, M. Yagari Bhastara Guntur, Yulius Irwansyah, masing-masing dari Kantor OCK & Associates Advocates & Legal Consultants.

118. 1 (satu) buah map warna biru muda yang berlogo “OCK & Associates Advocates & Legal Consultants” yang di dalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel copy dokumen yang bertuliskan Ahli Dr. Lintong Siahaan, SH, MH yang menerangkan dengan berjanji pada persidangan tanggal 9 Juni 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
 - b. 2 (dua) lembar copy dokumen yang pada point 1 (satu) bertuliskan Apakah Ahli mengetahui adanya UU NO. 30 TAHUN 2014? Tentang apa?
 - c. 4 (empat) rangkap copy dokumen yang berisi daftar pertanyaan-pertanyaan.
119. 1 (satu) lembar copy buku register yang bertuliskan surat kuasa tanggal 28 April 2015 atas nama Achmad Fuad Lubis, PH TUN Medan, 132, Gary yang dilegalisir oleh Afrian Bondjol.
120. 2 (dua) lembar print out foto yang masing-masing lembar terdapat 2 (dua) foto :
- a. HAM – 1356 size : 15,4 MB, created 21 Juni 2013, 9:56 : 08, midfied : 19 Juni 2013, 12:47 : 22.
 - b. HAM – 1357, 7,75 MB, created : 21 Juni 2013, 9:56:09, Modified: 20 Juni 2013, 10:29:11.
 - c. HAM – 1350, size 7,95MB, created 21 Juni 2013, 9:56:06, Modified 20 Juni 2013, 10:10:22.
 - d. HAM – 1355, size 6,36MB, created 21 Juni 2013, 9:56:08, Modified 20 Juni 2013, 10:22:08.
121. a. 1 (satu) lembar Foto copy warna KTP Provinsi DKI Jakarta, berlaminating atas nama O.C. KALIGIS, SH dengan NIK : 3171011906420005.
- b. 1 (satu) lembar Foto copy warna Kartu Anggota PERADI dengan nomor anggota 78.10032 berlaku s/d 31-12-2015 atas nama O.C. KALIGIS.
 - c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).
122. a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibu Evie USD 900 Rp. (USD 40). --
- b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGIS MR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal 01 Juli dengan No. Seat 8H.
 - c. 1 (satu) lembar asli kartu nama dari OCK & Associates Advocates & Legal Consultants atas nama Aryani Novitasari, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123. 1 (satu) lembar copy Payroll Gaji Karyawan OCK Bulan Juni & THR melalui BCA tertulis tanggal 30/6.2015, Nomor urut 34. Moh Yagari Bastara.
124. 1 (satu) buah Handphone dengan merk :VIVO, type: Y15, Imei 1 :867590029019173, Imei 2: 867590029019165, SN: EX15OFB06A04, warna putih, di dalamnya terdapat Sim Card Telkomsel, No ICCID: 0520 0000 1011 4946 dan Nucri SD Winova 8 GB dengan No. HP 081375344283.
125. 1 (satu) buah HandPhone Merek VIVO warna putih dengan sarung handphone warna hitam dengan nomor telepon 085721711285, IMEI 1: 866403023065237 yang digunakan oleh RAMDAN TAUFIK SODIKIN.
126. Kartu Keluarga Nomor : 3217082208140009, dengan Nama Kepala Keluarga : G Pujo N, Alamat : Jl. Rambut Setra No. 16, Kota Baru Parahyangan, RT:006/RW: 011, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat.
127. Sobekan Surat Nikah, antara seorang laki-laki yang bernama GATOT PUJO NUGROHO, Tempat tanggal lahir : Megelang, 11-06-1962, dengan seorang perempuan yang bernama EVY SUSANTI Binti HAIKIN RACHMAT.
128. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian antara GATOT PUJO NUGROHO dengan OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS tentang penunjukkan selaku Penasehat Hukum Tetap no.042/OCK.K.VII/2013 tanggal 23 September 2013.
129. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terkait Bantuan Sosial .
130. 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor : 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak H.M.Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia).
131. 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor : 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Husni (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara).
132. 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Mobil Nomor K-05913773, dengan Plat Nomor Mobil BK 14 GE, Merek Toyota, Type Vellfire ZG 2.4 A/T, Warna Hitam.
133. 1 (satu) bundel copy dokumen yang tertuliskan “daftar penanganan perkara tahun 2014”.
134. 1 (satu) lembar copy resume perkara pemprov Sumut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) Bundel copy dokumen surat Bantuan Permintaan Keterangan dari kejaksaan kepada Pemprov Sumut
136. 1 (satu) Bundel copy dokumen Tanda terima data/dokumen/benda dari yang menyerahkan CH HENDRA GINTING, SH dan yang menerima Jaksa Penyelidik MURNANADA UTAMA, SH
137. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 481/OCK.III/2015 tanggal 27 Maret 2015 Perihal Permohonan Informasi dan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Maruli Hutagalung SH., M.H
138. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 483/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Tjahyo Kumolo
139. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 482/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Yusni, S.H., M.H
140. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 489/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia
141. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 490/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak HM Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia
142. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak HM Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia
143. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 513/OCK.IV/2015 tanggal 6 April 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
144. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen yang bertuliskan "LAMPIRAN"
145. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen yang bertuliskan "Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan"
146. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen yang bertuliskan "Arah Pemberantasan Korupsi ke depan"
147. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Permohonan penerbitan fatwa MA tentang kewenangan perhitungan kerugian negara/daerah oleh badan pemeriksa keuangan nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 dari ketua MA kepada Ketua BPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Kesepakatan Bersama BPK dan Kejaksaan RI Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007, nomor Kep : KEP-071/A/JA/07/2007 tentang tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana.

149. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Surat Nomor K/263/VI/2014/Ditreskrimsus Tanggal 12 Juni 2014 perihal Pemberitahuan penghentian penyidikan perkara atas nama Tersangka MUHAMMAD ILYAS, S.Sos., M.Si.

150. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang dibagian depan tertulis "Data Kepegawaian an: 1). Amir Fauzi, SH. 2). Dermawan Ginting, SH. 3). Syamsir Yusfan. Yang bertanda tangan Kasub.bag Kepegawaian Ramaida Silalahi. Yang didalamnya berisi dokumen berupa:

A. Data Kepegawaian an. AMIR FAUZI yang terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar asli beserta lampirannya : Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Selatan Nomor : W.5 189-KP.04.02 Th 1994, tanggal 15 Agustus 1994 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. AMIR FAUZI.
2. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir beserta lampirannya : Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : D.510.KP.04.10 Th.2002 tanggal 6 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara an. AMIR FAUZI, SH.
3. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta lampirannya, Nomor : 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan jabatan Baru beserta Tunjangan Jabatan an. AMIR FAUZI, SH, MH. NIP : 040066818.

B. Data Kepegawaian an. DERMAWAN GINTING yang terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar asli Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI Kantor Wilayah Bali beserta lampirannya, Nomor : W16-28-KP.04.02.TH.1995 tanggal 31 Maret 1995 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. DERMAWAN GINTING.
2. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir beserta lampirannya "Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal 20 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20113 Pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
an. DERMAWAN GINTING, SH. NIP : 040069069.

C. Data Kepegawaian an. SYAMSIR YUSFAN yang terdiri dari :

1. 2 (dua) lembar fotocopy “Petikan Keputusan Kepala Wilayah Departemen Kehadikhan Propinsi Sumatera Utara Nomor : W2.20923.KP.04.Thn 1983 tanggal 21 Oktober 1983 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. SYAMSIR YUSFAN.
2. 3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 09/SK/DIRJEN-X/D1/PP/02/2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang Pengangkatan Jabatan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu an. SYAMSIR YUSFAN, SH. NIP:040039212.
3. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir “Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan iliter dan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pengangkata Jabatan sebagai Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

151. 1 (satu) amplop coklat yang dibagian depan bertuliskan “Data Keuangan (gaji dan Renumerasi bulan Jan ’15 s/d Juli ’15) an. 1). Tripeni Irianto Putro. 2). Dermawan Ginting. 3). Amir Fauzi. 4). Syamsir Yusfan. Yang ditandatangani Mary I.N. Kasub.bag. KU, yang didalamnya berisi dokumen berupa :

- a. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji nduk Pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.
- b. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji nduk Pembayaran Gaji Induk bulan Februari 2015 untuk 54 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.
- c. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji nduk Pembayaran Gaji Induk bulan Maret 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.
- d. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji nduk Pembayaran Gaji Induk bulan April 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.
- e. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji nduk Pembayaran Gaji Induk bulan Mei 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.
- f. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji nduk Pembayaran Gaji Induk bulan Juni 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.

- g. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji nduk Pembayaran Gaji Induk bulan Juli 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.
- h. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir “Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Klas 1A Bulan Januari s/ d Juni 2015, nomor urut 1 an. Syamsir Yusfan.

152. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas No. 4672 ter tanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Pemb honorarium 2 orang ahli u/ memberikan keterangan di PTUN.

153. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas No. 4671 ter tanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 60.000.000,- untuk Pemb uang saku Prof. Dr. O.C. Kaligis dan GERY menghadiri sidang di PTUN tanggal 9/6/2015 beserta 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 289/51.234/US.VI.2015.

154. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas No. 5328 ter tanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk uang saku Prof. Dr. O.C. Kaligis ke Medan tanggal 2/7 2015 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 334/51.274/US.VII.2015.

155. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas No. 5330 ter tanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 399.600.000,- untuk deposit/ cicilan retainer fee Pak GATOT PUJO USD 30.000 kurs Rp. 13.320,- beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 335/51.275/RF.VII.2015.

156. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas No. 5552 ter tanggal 7.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 33.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk deposit biaya administrasi untuk ambil salinan putusan PTUN Medan USD 2.500,- kurs Rp. 13.300,- beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 345/51.280/Adm.VII.2015.

157. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Tanpa Nomor ter tanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 325.000.000,- untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO.
158. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 3746 ter tanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah SGD 55.000 senilai Rp. 538.615.000,- untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO.
159. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4346 ter tanggal 28/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk cicilan retainer fee GATOT PUDJO.
160. 1 (satu) lembar asli salinan Pengeluaran Kas No. 5329 ter tanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 50.000.000,- keperluan pengambilan uang saku sidang PTUN Medan.
161. 1 (satu) lembar asli salinan Pengeluaran Kas No. 5331 ter tanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah USD. 20.000, keperluan pengambilan tunai kurs Rp. 13.320.
162. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung model "SM-C111" dengan IMEI : 354598/06/010041/4 S/N : CF1F800DG6A warna putih beserta baterainya tanpa simcard.
163. 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry 9790 Model REC710W dengan IMEI : 354730054344985 PIN : 2AF97033 warna hitam beserta baterainya tanpa simcard dan tanpa penutup belakang.
164. 1 (satu) buah simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "621005623210141404".
165. 1 (satu) buah micro simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "6210027032920440".
166. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Velvire ZG 2.4 A/T (2.362 CC) Model Minibus Tahun Pembuatan 2013 Isi Silinder 2362, dengan Nomor Polisi BK 14 GE, No Rangka : ANH20-8299086, No. Mesin : 2AZ-G256793, Warna Hitam Tahun Registrasi 2013, Nomor BPKB :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L00036706, Atas Nama : EVI SUSANTY, ALAMAT : DUSUN V KEL. LIMAU MANIS KEC. TANJUNG MORAWA D/S beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kuncinya.

167. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau model RM-1011 dengan IMEI-1 : 353672/06/020064/8 dan IMEI-2 : 353672/06/020065/5, yang didalamnya terdapat sim card XL dengan Nomor ICCID : 896211910166157700-4 tanpa memory card.
168. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Z10 PIN: 24E626DD, IMEI: 354010053823846 dengan SimCard Telkomsel tanpa memory card.
169. 3 (tiga) lembar prin out dokumen Rincian Perjalanan OC KALIGIS Team yang ditandatangani PENTA RIRIS LUBIS tertanggal 30 Juli 2015.
170. 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an. JEFRY HAMONANGAN dengan nomor rekening 137-00-0122207-0 periode 1 Mei 2015 sampai dengan 30 Juli 2015 cabang KCP Medan Ahmad Yani nomor katu 4617005117684239.
171. 5 (lima) lembar print out Enhanced Passenger Manifest dengan nomor flight : IW 7012 Date : 05 Juli 2015 untuk penerbangan dari Bandara Kuala Namu Medan ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta.
172. 3 (tiga) lembar print PNR (Print Number Record) yang diantaranya bertuliskan BMBTXP 2015/07/05 IW 7012 2015/07/04 2312 5 GWB 034 JKT 002 000 JKT 102.
173. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 28-04-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 29-04-2015, dengan nomor kamar yang dipesan kamar nomor 2001, 2033, jenis kamar Excutive Deluxe (ENK), dengan konfirmasi 3959468, dengan tanda tangan pemesan tanpa nama.
174. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2001, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,- nett, Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 11.23.
175. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2033, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,- nett, Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 12.05.



176. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. MUSTAFA, SE dengan no NIK 1271201308730005 berlaku hingga 13-08-2017.
177. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 01-07-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 02-07-2015, dengan nomor kamar yang dipesan kamar nomor 2906,2921,2927, (JNK) dengan konfirmasi 4252713, dengan tanda tangan pemesan MUSTAFA (081375344283).
178. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2921, type Junor Suit, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 3.750.000,- nett, Arrival 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 02 Juli 2015 time 14.34.
179. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2906, type Deluxe, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,- nett, Arriva 01 Juli 2015 time 21.07, Departure 02 Juli 2015 time 13.20.
180. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2906 tanggal 02-07-2015 jam 03:31 AM dengan bill yang harus dbayar lunas Rp. 300.080,-
181. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2927, type Deluxe, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,- nett, Arriva 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 02 Juli 2015 time 13.21.
182. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2927 tanggal 02-07-2015 jam 01:31 AM dengan bill yang harus dbayar lunas Rp. 469.480,-
183. 1 (satu) keping CD-R, Merk: Verbatim, warna: Silver, Kapasitas: 700 MG, S/N: C3131RE03214235LH dengan tulisan CCTV JW MARRIOTT MEDAN yang berisi rekaman CCTV dengan nama file :
1. Nama file: 003_150702002043.dav, MD5 HASH: 367 5EE 3FE 20A 39284385BF5241453, LOKASI: Lobby Depan Cam 3, MENIT: 12:20:43 s/d 12:21:20.
 2. Nama file: 005_150702002043.dav, MD5 HASH 9B47 C9E 5F 3815EBFC9D1C7BAC1250390, LOKASI: Lobby Depan Cam 5, MENIT: 12:20:43 s/d 12:21:20.
 3. Nama file: 007_150702002118.dav, MD5 HASH: D 19CB A868 FE8C576C05F3E178FBA9251, LOKASI: COR HPL – Cam 7, MENIT: 12:21:18 s/d 12:21:38.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Archive_20150702_002300.600, MD5 HASH: F95 FCC9 2CC9E 8AB4E3359692369052FC, LOKASI: Level 28 Cor D, MENIT: 12:23:00 s/d 12:31:00.
184. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA192 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OTTOCORNELI dan BASTARA / Y. dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 April 2015 jam boarding 16.50 WIB.
185. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama BASTARA / MYAGARI MR. dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 April 2015 jam boarding 13.45 WIB.
186. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / MR dan YAGARI / BHASTARA dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.
187. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 05 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB.
188. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / M BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 18 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.
189. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / ACHYUNI MRS dan M YAGARI / BHASTARA G MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 18 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB.
190. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / M BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.

191. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / ACHYUNI MRS dan YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB.
192. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M YAGARI / BHASTARA MR dan ANIS / RIFAI MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.
193. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS / RIFAI MR dan M YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB.
194. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.
195. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB.
196. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARAM MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.
197. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARAM MR dari Bandara



Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB.

198. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 11 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.
199. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 11 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB.
200. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.
201. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB.
202. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.
203. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 13.45 WIB.
204. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS /RIFAI MR dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 Juni 2015 jam boarding 13.45 WIB.



205. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA196 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / TRIACHYUNI MRS, OC / KALIGIS MR dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 01 Juli 2015 jam boarding 19.25 WIB.
206. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA187 yang terdapat penumpang atas nama OC / KALIGIS MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 02 Juli 2015 jam boarding 12.00 WIB.
207. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 02 Juli 2015 jam boarding 15.45 WIB.
208. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR, OC / KALIGIS MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 Juli 2015 jam boarding 05.15 WIB.
209. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS RIFAI, dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 07 Juli 2015 jam boarding 13.45 WIB.
210. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juli 2015 jam boarding 05.15 WIB.
211. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA186 yang terdapat penumpang atas nama AFRIAN / BONDJOL MR dan VINCENCIUS / TOBING MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 13 Juli 2015 jam boarding 10.30 WIB.



212. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Samsung, Tipe: GT-E1205Y, Imei: 356755064486219, warna hitam dan didalamnya terdapat Sim card Telkomsel-
213. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan nomor MAPA25PH290835117 yang berisikan antara lain :
1. File PDF 6281262622622_2015-06-04_07-17-53
 2. File PDF 6281262622622_2015-06-29_16-15-02
 3. File PDF 6281262622622_2015-06-30_12-47-47
 4. File PDF 6281262622622_2015-07-01_09-31-11
 5. File PDF 6281262622622_2015-07-01_09-33-43
 6. File PDF 6281262622622_2015-07-01_23-45-37
 7. File PDF 6281262622622_2015-07-04_07-30-14
214. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PH291350972 yang berisikan antara lain :

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_6281362101414_2015-05-18_17-28-55.pdf	efb5755a19db78ffbab1df6085294fc4	Softcopy SMS
2	SMS_6281362101414_2015-05-20_07-29-58.pdf	6cb882de4e81a6d3520dfe6ccdd8f31b	Softcopy SMS
3	SMS_6281362101414_2015-05-20_07-34-45.pdf	04f94d07f1604869ef8473c100db48ac	Softcopy SMS
4	SMS_6281362101414_2015-05-20_08-32-04.pdf	d67660763ce59643a2362841179cd51d	Softcopy SMS
5	SMS_6281362101414_2015-05-20_08-41-24.pdf	6ebce7badf3145e4892b14c0c8987f63	Softcopy SMS
6	SMS_6281362101414_2015-05-20_13-58-04.pdf	818f18d7623e918469fbc b9d7be31c5f	Softcopy SMS
7	SMS_6281362101414_2015-05-21_20-52-00.pdf	b71e2cf2b94bdc6b74f82049d6a66385	Softcopy SMS
8	SMS_6281362101414_2015-05-21_20-53-10.pdf	3c507e645b7c3ac6b32271b82d011333	Softcopy SMS
9	SMS_6281362101414_2015-05-21_20-54-13.pdf	101d6769f06ae586b5884185f8dff235	Softcopy SMS
10	SMS_6281362101414_2015-05-21_20-56-42.pdf	fae6a13fa86043a7a6664c143979c627	Softcopy SMS
11	SMS_6281362101414_2015-05-21_20-57-43.pdf	9207389ded2f0f63c1338479d7a12dd4	Softcopy SMS
12	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-05-33.pdf	77fd5b6a6e3f67230eb884d84cf6413d	Softcopy SMS
13	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-07-41.pdf	251a59ae53b3a07f1754628e3ecef7df	Softcopy SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-07-43.pdf	0f26633e4f27f93dcf499c0afb86747	Softcopy SMS
15	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-07-51.pdf	2506479d73428a3757dde7bbe8f4bbfc	Softcopy SMS
16	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-24-43.pdf	baaed7ef6d05d6f803215a7a31a54c65	Softcopy SMS
17	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-28-35.pdf	09b6c4291218fcb3d221abe092732505	Softcopy SMS
18	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-32-01.pdf	56463b4bb980993edd741403614e3dc6	Softcopy SMS
19	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-04-50.pdf	6185ac826c216c0626921895c6954779	Softcopy SMS
20	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-22-17.pdf	38cab774eb16d9b074f49d08cf7a48a4	Softcopy SMS
21	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-24-14.pdf	0f76eb41aa9991fe9c6679dffe68086e	Softcopy SMS
22	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-26-22.pdf	e1300a1fb209001574e63a942c32c275	Softcopy SMS
23	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-28-03.pdf	4d93a39f1a90e43a9288495341084a31	Softcopy SMS
24	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-28-17.pdf	d8bf2878dedfe0fdc83b7a028cd57401	Softcopy SMS
25	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-28-53.pdf	fab970de0d2d3887843b0798377945f5	Softcopy SMS
26	SMS_6281362101414_2015-05-22_09-13-51.pdf	4aaf323716c1f5c7d22967dea8112b83	Softcopy SMS
27	SMS_6281362101414_2015-05-22_09-26-29.pdf	4558fc7e0c08d3e32e9f9e127e93a6e0	Softcopy SMS
28	SMS_6281362101414_2015-05-22_09-27-07.pdf	5827346afb1c85d952c0027cfcea2466	Softcopy SMS
29	SMS_6281362101414_2015-05-22_15-03-07.pdf	de73c850c31d074cec2681411b07b3ad	Softcopy SMS
30	SMS_6281362101414_2015-06-01_09-04-21.pdf	92596273abf500b25e5c1826e5429b40	Softcopy SMS
31	SMS_6281362101414_2015-06-01_09-07-48.pdf	a4646065306f0bef057514d4ec97eee5	Softcopy SMS
32	SMS_6281362101414_2015-06-01_09-51-02.pdf	ef7e4fb3080308bf54cb62fde0d4e1fa	Softcopy SMS
33	SMS_6281362101414_2015-06-01_09-59-27.pdf	bc70377392313d5a568f665ae3b2dd73	Softcopy SMS
34	SMS_6281362101414_2015-06-01_10-06-04.pdf	d673110e31a4d8a42c1e1a690837ba42	Softcopy SMS
35	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-30-18.pdf	2aa2760e5c660d2a9fea5b67788fa8a5	Softcopy SMS
36	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-37-33.pdf	8ea3bc57b4729750291038f3f310eb4e	Softcopy SMS
37	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-39-10.pdf	a129cd3add3c88ca1a9bb17e838f6e0f	Softcopy SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-40-05.pdf	acbac6b32988550bcea8851215e38dd2	Softcopy SMS
39	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-42-08.pdf	12a3bd474de3f339f5ca7fdd16f0eda0	Softcopy SMS
40	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-42-48.pdf	cea4b66a7bbfceb7ac9b2034be7d8b29	Softcopy SMS
41	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-43-32.pdf	20eec616780035dff567f1d544674f48	Softcopy SMS
42	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-44-07.pdf	54437057ee424599d1627086eff4ade1	Softcopy SMS
43	SMS_6281362101414_2015-06-01_19-30-13.pdf	92196f96b6fbace659251d4a7bb4528	Softcopy SMS
44	SMS_6281362101414_2015-06-01_19-30-40.pdf	dcf78fbf37818233dfb0cd597e377617	Softcopy SMS
45	SMS_6281362101414_2015-06-01_20-23-05.pdf	845eb02a22ca3509fac61cd9d55b7f2c	Softcopy SMS
46	SMS_6281362101414_2015-06-01_20-26-04.pdf	5f2ec7da849c632f1aee9c62da6793c9	Softcopy SMS
47	Voice_call_34011337_6281362101414_2015-05-10_21-17-29.wav	35b36161568af1f7f9dbf8da2f446b2c	Voice
48	Voice_call_34052581_6281362101414_2015-05-14_07-33-28.wav	fe49f542af041fe67dc6c9b6a55d3a1e	Voice
49	Voice_call_34053629_6281362101414_2015-05-14_09-45-56.wav	1ebef4f21ad52ef24582ebb8cccace2a	Voice
50	Voice_call_34063420_6281362101414_2015-05-15_08-31-52.wav	25d3da860f1956933193a3fbc709f9e8	Voice
51	Voice_call_34066001_6281362101414_2015-05-15_11-43-12.wav	95db60ef713311f8ae11876a2970c392	Voice
52	Voice_call_34098674_6281362101414_2015-05-18_15-51-35.wav	1b11c8685086a7d02e2ce1b264460937	Voice
53	Voice_call_34103277_6281362101414_2015-05-18_22-16-47.wav	1dc8008ce9c18fa0e4dd158d2a2ea750	Voice
54	Voice_call_34117640_6281362101414_2015-05-19_22-39-32.wav	da9d5b9bb64f7b76c5ba0d0793dd66c5	Voice
55	Voice_call_34118817_6281362101414_2015-05-20_07-26-26.wav	02643d743d97f125ea2f5a50d0929753	Voice
56	Voice_call_34118885_6281362101414_2015-05-20_07-32-55.wav	c213f5115c927740443f74a1c4262005	Voice
57	Voice_call_34118932_62813	4a2ed16b24b59185f528d	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	62101414_2015-05-20_07-37-13.wav	d0cb444e762	
58	Voice_call_34119210_62813 62101414_2015-05-20_08-07-03.wav	f70a3e111ba962d573cc2 7498a1ed9c4	Voice
59	Voice_call_34125523_62813 62101414_2015-05-20_15-14-01.wav	56d7387ef63163aeabd36 713d2cfccbd	Voice
60	Voice_call_34269689_62813 62101414_2015-05-21_11-32-53.wav	1557885e02c6f2dd88093 e930b6370c1	Voice
61	Voice_call_34269690_62813 62101414_2015-05-21_11-32-54.wav	59be457a95bd5bbe915c 148fde65217e	Voice
62	Voice_call_34270507_62813 62101414_2015-05-21_12-20-42.wav	28aefdd7a7bfae5e09c76 5186a7fee26	Voice
63	Voice_call_34270745_62813 62101414_2015-05-21_12-37-53.wav	19902ddd9041824a09a8 d4773a9551dd	Voice
64	Voice_call_34277206_62813 62101414_2015-05-21_20-50-21.wav	3db239906064d260fba96 2ac9dda5a7e	Voice
65	Voice_call_34280673_62813 62101414_2015-05-22_09-31-33.wav	45a2f10ef15f965173b1c a2fe1e2be3b	Voice
66	Voice_call_34288163_62813 62101414_2015-05-22_18-35-45.wav	ff984cae2283e6db3ac94 537b7b424e3	Voice
67	Voice_call_34288521_62813 62101414_2015-05-22_19-07-47.wav	d55ddc3e1feb7b35f1008 cd75e3ef8fb	Voice
68	Voice_call_34288571_62813 62101414_2015-05-22_19-12-43.wav	aa113a5f1f9c763b71eb8 2dd3f1e3dba	Voice
69	Voice_call_34288679_62813 62101414_2015-05-22_19-18-16.wav	a8d3cd2670837f31cf2b9 e3d71220f18	Voice
70	Voice_call_34385649_62813 62101414_2015-05-31_10-51-57.wav	4644ee44d0d8d9343037 b0d5730f5fba	Voice
71	Voice_call_34392708_62813 62101414_2015-06-01_09-02-10.wav	4603d75f3ade464ddb6a3 fbf30f97a0f	Voice
72	Voice_call_34404985_62813 62101414_2015-06-01_22-45-07.wav	99b13e34a8a7a5aeadda3 ef95bd2ecbe	Voice
73	SMS_6281362101414_2015-06-05_13-54-40.pdf	01090dc9224b37912b3fd cdfb556dab9	Softcopy SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	SMS_6281362101414_2015-06-05_13-55-41.pdf	852c8ba7e7885c75d2b7de55d3628e2e	Softcopy SMS
75	SMS_6281362101414_2015-06-05_13-59-51.pdf	77738d6b08c66e6fbed946d83a88de53	Softcopy SMS
76	SMS_6281362101414_2015-06-05_14-00-06.pdf	561a2b926912267e0969cf19efd464f0	Softcopy SMS
77	SMS_6281362101414_2015-06-06_16-59-36.pdf	b4838ffc4e39dba6fbddc90d38cd751a	Softcopy SMS
78	SMS_6281362101414_2015-06-06_17-05-33.pdf	9dbb57f14a9eb6cf861c9f4c187f3f67	Softcopy SMS
79	SMS_6281362101414_2015-06-06_17-05-53.pdf	b15ec3d788338c4c39d043c99e0cc2ee	Softcopy SMS
80	SMS_6281362101414_2015-06-06_17-06-03.pdf	85cc027f703b08a3345d401cb1f512c2	Softcopy SMS
81	SMS_6281362101414_2015-06-06_17-27-37.pdf	2858633a06154cdd8bf9a89cb1413d3b	Softcopy SMS
82	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-18-55.pdf	13eea0804f30ceddd3c72063f3a08138	Softcopy SMS
83	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-19-38.pdf	2ffb69b6752351c6b9e8a9e712bfccf7	Softcopy SMS
84	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-32-34.pdf	7727cedee51e473abd0d89d9cb23a2c9	Softcopy SMS
85	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-34-45.pdf	8200ad27b5985a43407356e0fd3bf17d	Softcopy SMS
86	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-35-28.pdf	4b197d8433ca00f293ea04b931794b65	Softcopy SMS
87	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-35-38.pdf	de2117e8af210a3224009af6a62fb8d0	Softcopy SMS
88	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-36-23.pdf	c0b20a3128ae6796f0fa91289c2accb8	Softcopy SMS
89	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-36-45.pdf	40b27a87df0ab88f85d843458192563a	Softcopy SMS
90	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-42-57.pdf	53f7eadf7ad851938410012ec642c34c	Softcopy SMS
91	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-43-36.pdf	d49c652a0c736aae1f806d43bad939c9	Softcopy SMS
92	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-45-58.pdf	f91d4b8c74a8210c3e5d629822bb8d17	Softcopy SMS
93	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-46-48.pdf	538b37711de239b6b52fa740a529d4e2	Softcopy SMS
94	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-48-29.pdf	7a840c36da08f6c193ef88f7dccbff3c	Softcopy SMS
95	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-50-18.pdf	bac338997a8b7586b99188b86a2b3240	Softcopy SMS
96	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-50-25.pdf	c9b5765286e0eb6dbb48daf563251b1c	Softcopy SMS
97	SMS_6281362101414_2015-	390c20e174fbadf6570a7	Softcopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06-06_19-58-07.pdf	f9f6d3c6275	SMS
98	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-59-58.pdf	3f49bf0580df27abff92f179aafc5fef	Softcopy SMS
99	SMS_6281362101414_2015-06-06_20-29-10.pdf	d65c277c5f784b859c64fb33f9301e1c	Softcopy SMS
100	SMS_6281362101414_2015-06-08_07-32-54.pdf	df493a1417560e5c8832fd289938fe11	Softcopy SMS
101	SMS_6281362101414_2015-06-08_16-34-32.pdf	640ad9de6d9f94f88b818bd549ee6eb8	Softcopy SMS
102	SMS_6281362101414_2015-06-09_08-38-42.pdf	22bde247dfa1fee607628fccf0f30fef	Softcopy SMS
103	SMS_6281362101414_2015-06-09_08-41-55.pdf	0a564d78863b61f74fd5248f78a1b6bd	Softcopy SMS
104	SMS_6281362101414_2015-06-09_08-42-25.pdf	a02148afb6f6f64b5428ce36d7cfd1a87	Softcopy SMS
105	SMS_6281362101414_2015-06-09_08-51-48.pdf	b30657406a0d24b7305fb23e6c95dc09	Softcopy SMS
106	SMS_6281362101414_2015-06-09_08-52-08.pdf	e2ff77236c034f28bcb69c63bbc44848	Softcopy SMS
107	SMS_6281362101414_2015-06-16_15-25-40.pdf	df5a167caec13e1e990b13639c4dbbd9	Softcopy SMS
108	SMS_6281362101414_2015-06-16_15-26-59.pdf	05228ba908ca7232de976a599ba11a0e	Softcopy SMS
109	SMS_6281362101414_2015-06-16_15-27-02.pdf	96950ae64ca0458eba07e5c300b2e047	Softcopy SMS
110	SMS_6281362101414_2015-06-17_18-01-25.pdf	7ca3da6d5fc3a4b1e7a7836eb944a18c	Softcopy SMS
111	SMS_6281362101414_2015-06-17_18-13-14.pdf	2b3afc57645848176651f8e1a85e14b6	Softcopy SMS
112	SMS_6281362101414_2015-06-17_18-14-15.pdf	ac567ddcff7ac1d62251f346c10c3254	Softcopy SMS
113	SMS_6281362101414_2015-06-19_12-21-48.pdf	1f87b800a8e99554d4a655a36dc459ad	Softcopy SMS
114	Voice_call_34441919_6281362101414_2015-06-05_08-31-14.wav	677c67dcc72fa72b9305ff47772ec122	Voice
115	Voice_call_34455385_6281362101414_2015-06-06_09-46-57.wav	136d946bd6928e7cd281943078f12436	Voice
116	Voice_call_34455413_6281362101414_2015-06-06_09-50-41.wav	f55abf4c26cf1a0b16229f39e7ba3c7f	Voice
117	Voice_call_34459791_6281362101414_2015-06-06_17-22-34.wav	3913d64e698c7347dac933f4bf6ee07d	Voice
118	Voice_call_34461183_6281362101414_2015-06-06_19-43-40.wav	d62b840030f6178103ca053c5255f3c1	Voice
119	Voice_call_34462716_62813	12d47b31d8a2b311c569	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	62101414_2015-06-06_22-48-46.wav	7071bd7fa7e8	
120	Voice_call_34470609_62813_62101414_2015-06-07_19-27-43.wav	8389176732dcd084472deaaaa2e395e9	Voice
121	Voice_call_34477792_62813_62101414_2015-06-08_11-40-47.wav	f909a2241f6a99a1ca4e87fc0ee5648b	Voice
122	Voice_call_34482362_62813_62101414_2015-06-08_16-35-41.wav	00acabd54c9326cb7fb09ca0a4f9e227	Voice
123	Voice_call_34487364_62813_62101414_2015-06-09_06-49-14.wav	e9f8feedd5bceae3c41cfa7d6bea8726	Voice
124	Voice_call_34487382_62813_62101414_2015-06-09_06-51-09.wav	8622ee352c871687427f23b1d0e4ce3d	Voice
125	Voice_call_34488677_62813_62101414_2015-06-09_08-28-05.wav	f483d294f8ec906fa672063e7158f8cc	Voice
126	Voice_call_34488701_62813_62101414_2015-06-09_08-29-09.wav	d4bdb9c77dc01246027639c9b75d6e6c	Voice
127	Voice_call_34511030_62813_62101414_2015-06-10_17-02-38.wav	84acf7ec026bf2836c7f7078ae1c66e2	Voice
128	Voice_call_34571408_62813_62101414_2015-06-15_23-26-42.wav	01f40a5266c2dbb36ff4f5b35f19d9f5	Voice
129	Voice_call_34573571_62813_62101414_2015-06-16_08-15-30.wav	12a82976fdb0dfbc15c82f5570989d40	Voice
130	Voice_call_34578888_62813_62101414_2015-06-16_14-36-44.wav	a92b78d303644a07c0d1deb6fc870b07	Voice
131	Voice_call_34579008_62813_62101414_2015-06-16_14-44-14.wav	e657e52b93f7aa8dba6fc19aacc7a5f9	Voice
132	Voice_call_34579553_62813_62101414_2015-06-16_15-24-31.wav	1211643613a7922f3ea8a0bdeb15d2f9	Voice
133	Voice_call_34579638_62813_62101414_2015-06-16_15-31-05.wav	647e165985613a83737d784306caaa24	Voice
134	Voice_call_34593794_62813_62101414_2015-06-17_17-13-03.wav	980ea40ef532efae4b6bc1f14a86682b	Voice
135	Voice_call_34593848_62813_62101414_2015-06-17_17-16	dd18b812ac03e12426292ace7259db13	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-33.wav		
136	Voice_call_34594055_62813 62101414_2015-06-17_17-35 -25.wav	a07148dd3be63de2e6abb bef08d084e6	Voice
137	Voice_call_34594148_62813 62101414_2015-06-17_17-42 -26.wav	97c9f6ae8e4f9084b90afe f62c3fd6bc	Voice
138	Voice_call_34607530_62813 62101414_2015-06-18_23-47 -29.wav	88e8b160dcbda6579710 a96542e736bc	Voice
139	Voice_call_34609969_62813 62101414_2015-06-19_09-20 -36.wav	3708548118624340a639 123b7d70d184	Voice
140	Voice_call_34643364_62813 62101414_2015-06-22_18-55 -49.wav	6f1ad6cac55584a896016 818eedac52f	Voice
141	Voice_call_34653171_62813 62101414_2015-06-24_09-12 -27.wav	f83a6c894a8e4bc87c472 9230cb026af	Voice
142	Voice_call_34680615_62813 62101414_2015-06-27_22-45 -45.wav	10170dde8a16ab7099ae0 bc6ac1e28d4	Voice
143	Voice_call_34699326_62813 62101414_2015-06-30_11-14 -40.wav	4e2022a1650b8d38a7cfd 3fa87d8d508	Voice
144	Voice_call_34699826_62813 62101414_2015-06-30_11-43 -28.wav	e3ff6577cf127815f06ed1 4ee9709650	Voice
145	Voice_call_34700708_62813 62101414_2015-06-30_12-41 -54.wav	fd9e48f1ecb711add9839 abda700ae8d	Voice
146	Voice_call_34700780_62813 62101414_2015-06-30_12-47 -48.wav	7a0966ca98faf4aa06379 396a6ec18e3	Voice
147	Voice_call_34710119_62813 62101414_2015-07-01_09-31 -12.wav	175b56156bafc2b3c011c ff77262c25e	Voice
148	Voice_call_34710176_62813 62101414_2015-07-01_09-33 -44.wav	89295eb49baec3e1d0e50 b36ec46cc6d	Voice
149	Voice_call_34710842_62813 62101414_2015-07-01_10-19 -06.wav	e8de7c9310fd7cffe7255a e78f3ffea2	Voice
150	Voice_call_34710941_62813 62101414_2015-07-01_10-26 -34.wav	09e1888b5a28c88a9404f ce1255f2421	Voice
151	Voice_call_34719693_62813 62101414_2015-07-01_22-17 -47.wav	780cd9a6f1d648399d0e6 c48c8f063de	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152	Voice_call_34720219_6281362101414_2015-07-01_23-45-38.wav	6845b4fc4b118cbd0b232e0db8fddc1e	Voice
153	Voice_call_34743989_6281362101414_2015-07-04_12-08-15.wav	66785bdf609f66a09166496e9910b9c	Voice
154	Voice_call_34749043_6281362101414_2015-07-04_22-19-40.wav	af1697f3554e74ca534d53cf604063a6	Voice
155	SMS_6287788877191_2015-07-05_11-48-04.pdf	a67d1a89a755d583d0b496430e3d6bb6	Softcopy SMS
156	SMS_6287788877191_2015-07-05_11-48-57.pdf	80346eba2eaf49c9f21efab7b041fb2	Softcopy SMS
157	Voice_call_34773172_628161902088_2015-07-07_12-02-20.wav	4820f8cddf304bf730d761b46d318e47	Voice
158	SMS_6281221848850_2015-06-07_08-16-55.pdf	6c95e9a1e5d065fcb650a148b9a8f402	Softcopy SMS
159	SMS_6281221848850_2015-06-07_08-24-47.pdf	3c0f4cd29ff00e79707518157567f6ab	Softcopy SMS
160	SMS_6281221848850_2015-06-07_08-34-16.pdf	cd4460a94891f396620500db939241bf	Softcopy SMS
161	SMS_6281221848850_2015-06-07_10-01-05.pdf	85d5ffc2b181507efa6309aab9b45159	Softcopy SMS
162	SMS_6281221848850_2015-06-07_10-02-01.pdf	25a065232728fcb8a1ab8b4143f990c8	Softcopy SMS
163	SMS_6281221848850_2015-06-08_07-32-46.pdf	ce2363f41e43786751c24d06c9f97d7e	Softcopy SMS
164	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-38-33.pdf	11b79b5497d03a57aa9b0f401e322c4e	Softcopy SMS
165	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-41-47.pdf	f87d51c992886ec05c0419300e9bd6c0	Softcopy SMS
166	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-51-40.pdf	28c5e2c540466aa7b9a42c25f907c24a	Softcopy SMS
167	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-52-08.pdf	0383501c92029cfbad34b9353fbccaff	Softcopy SMS
168	SMS_6281221848850_2015-06-09_09-46-56.pdf	2bfc9e69547a307fe26ec9652d8be932	Softcopy SMS
169	SMS_6281221848850_2015-06-09_10-49-37.pdf	2da6a8efb177b517f4f653e884fe3836	Softcopy SMS
170	SMS_6281221848850_2015-06-09_10-52-35.pdf	7d3122ccc429d4bf930b2debfabab7ab	Softcopy SMS
171	SMS_6281221848850_2015-06-26_08-30-25.pdf	6757fc61f92663901bd03903df2061fd	Softcopy SMS
172	Voice_call_34422375_628121848850_2015-06-03_18-38-58.wav	23632205887f8e400b1c323d167612ed	Voice
173	Voice_call_34422404_628121848850_2015-06-03_18-41	e9963c3a0899e6a9afb0a4776cfb5f90	Voice



	-35.wav		
174	Voice_call_34422773_62812 21848850_2015-06-03_19-05 -22.wav	cb056b6750bc44e7aeab b9000072619	Voice
175	Voice_call_34464211_62812 21848850_2015-06-07_08-20 -32.wav	0f00e60561df62930ac16 7f4d54c3cf0	Voice
176	Voice_call_34470608_62812 21848850_2015-06-07_19-27 -42.wav	9cca08076dead39acbc25 ed56e26b816	Voice
177	Voice_call_34473182_62812 21848850_2015-06-08_06-57 -26.wav	716e2471a77998ab3012 44370cc6b1b3	Voice
178	Voice_call_34477789_62812 21848850_2015-06-08_11-40 -46.wav	6e4511374140dd6e69e2f 6b3da0c0b70	Voice
179	Voice_call_34487383_62812 21848850_2015-06-09_06-51 -12.wav	cc1cfc6b6af0a664b91f66 a9a0f17492	Voice
180	Voice_call_34488636_62812 21848850_2015-06-09_08-25 -29.wav	db5a4c85b549b0758367 35da81182d5c	Voice
181	Voice_call_34488703_62812 21848850_2015-06-09_08-29 -11.wav	aa9e00d3aa17bd4bf36f5 e5dfc8271ed	Voice
182	Voice_call_34491548_62812 21848850_2015-06-09_11-00 -08.wav	0ca8e00e58636a8ef9f93 e9f3672f764	Voice
183	Voice_call_34511325_62812 21848850_2015-06-10_17-20 -05.wav	8e43c4ce25a05f5f08177 14fb34c44a9	Voice
184	Voice_call_34592000_62812 21848850_2015-06-17_14-52 -01.wav	5833ec0fb4cb5c406891c 2af8b1a47e8	Voice
185	Voice_call_34653178_62812 21848850_2015-06-24_09-13 -24.wav	8d0e9040afbfe7ba1b661 3d2fa6ac5d5	Voice
186	Voice_call_34661000_62812 21848850_2015-06-25_13-00 -50.wav	0e5320a7d46255f3ff357 a420a7d1b6d	Voice
187	Voice_call_34687337_62812 21848850_2015-06-29_08-53 -02.wav	c670dcc98e83d8b71891 2a9d1433d156	Voice
188	Voice_call_34710916_62812 21848850_2015-07-01_10-24 -58.wav	1bf9b6f1a08a4e60bb36f 460c9632f2c	Voice
189	Voice_call_34719694_62812 21848850_2015-07-01_22-17 -48.wav	3312d26a79f6310b1b67e da493125ad0	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190	Voice_call_34719755_62812 21848850_2015-07-01_22-26 -09.wav	9a9b73fbe2091e328a246 a08172f9e15	Voice
191	Voice_call_34758771_62812 21848850_2015-07-06_09-06 -16.wav	a7e0534b1868b23aadfa1 a413c4b816d	Voice
192	Voice_call_34762777_62812 21848850_2015-07-06_13-58 -49.wav	7025a305e4918307aec97 703b2352e6c	Voice
193	Voice_call_34762860_62812 21848850_2015-07-06_14-03 -57.wav	fa944d5f32f350b6a99d9 69d1ba45750	Voice
194	Voice_call_34771730_62812 21848850_2015-07-07_10-35 -49.wav	98087a2dbbbcafdcafd24 3c33f0d18a	Voice
195	Voice_call_34773308_62812 21848850_2015-07-07_12-09 -09.wav	a28540792979415dfaa06 ec1b4abc791	Voice
196	Voice_call_34798486_62812 21848850_2015-07-09_10-29 -49.wav	9e96ffda76357fe6c4a5c7 fbadc943d3	Voice
197	Voice_call_34798624_62812 21848850_2015-07-09_10-38 -23.wav	a53fd9570420b7c2ce8e6 142a8893596	Voice
198	Voice_call_34802883_62812 21848850_2015-07-09_14-55 -23.wav	b2ee69a699de6831c6067 20afa494f71	Voice
199	Voice_call_34803389_62812 21848850_2015-07-09_15-30 -57.wav	b1be665400d09584a824 d7b32294cfb1	Voice
200	Voice_call_34804743_62812 21848850_2015-07-09_16-59 -09.wav	a486f2864c681ad35152d 605c3054702	Voice
201	Voice_call_34680188_62813 11183687_2015-06-27_21-30 -15.wav	c6946248dc685bfd8e27f f2e76e2d651	Voice
202	SMS_6282111000071_2015- 07-07_12-34-12.pdf	85dce338dd071e8050f3e 3a262cf34a2	Softcopy SMS
203	SMS_6282111000071_2015- 07-07_12-58-39.pdf	8d33d32dc81ff2090a768 05dd046eb65	Softcopy SMS
204	SMS_6282111000071_2015- 07-07_12-59-48.pdf	85690f90329ab2bca16a9 e68a17d089a	Softcopy SMS
205	SMS_6282111000071_2015- 07-09_00-15-15.pdf	9b1b3e9838161f571b13e e24f9b8ee80	Softcopy SMS
206	Voice_call_34643366_62821 11000071_2015-06-22_18-55 -51.wav	fb4a11361147e0871dc38 c8814898433	Voice
207	Voice_call_34699325_62821 11000071_2015-06-30_11-14	493c83fc9ea0793d30ecd 5bb5f6e6b9b	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-38.wav		
208	Voice_call_34743894_6282111000071_2015-07-04_11-55-16.wav	7a7144a1f1db12944a0650e5ad4439de	Voice
209	Voice_call_34743988_6282111000071_2015-07-04_12-08-12.wav	54b2335eef25b609f6d97d180ca61c59	Voice
210	Voice_call_34758562_6282111000071_2015-07-06_08-50-45.wav	22f5c6af955c75ef7a4c7c95afe04a13	Voice
211	Voice_call_34758599_6282111000071_2015-07-06_08-54-37.wav	826739816c49bfcf6763c724cee7db6e	Voice
212	Voice_call_34763025_6282111000071_2015-07-06_14-15-46.wav	1677762d9a3cf9be9b4237a78697692e	Voice
213	Voice_call_34763154_6282111000071_2015-07-06_14-25-12.wav	1484d318e9e1a636da59eeacb54c45d9	Voice
214	Voice_call_34763199_6282111000071_2015-07-06_14-27-52.wav	14360281766016e3a35e1656ba9d8c3b	Voice
215	Voice_call_34772727_6282111000071_2015-07-07_11-35-35.wav	1631af5954ab7dbcf932a23a77839b7	Voice
216	Voice_call_34773328_6282111000071_2015-07-07_12-09-56.wav	274c14ace420f70258066a722180e1f4	Voice
217	Voice_call_34773840_6282111000071_2015-07-07_12-37-31.wav	e71f1d00436b71ac5e97ede127da876c	Voice
218	Voice_call_34773928_6282111000071_2015-07-07_12-42-05.wav	40966a0d33a0e624d62c20c481a39018	Voice
219	Voice_call_34774118_6282111000071_2015-07-07_12-52-53.wav	8def3496392814448092e9c9e7772190	Voice
220	Voice_call_34797777_6282111000071_2015-07-09_09-47-30.wav	e4de501f8c2ec42495034a063461dd2b	Voice
221	Voice_call_34797887_6282111000071_2015-07-09_09-54-46.wav	d3ef4e88056fef81d7e8748fc1547581	Voice
222	Voice_call_34797969_6282111000071_2015-07-09_09-59-41.wav	f1526268bc8e390585e961bf11df19b5	Voice
223	Voice_call_34798022_6282111000071_2015-07-09_10-02-56.wav	e93094a4a173edff9ee957056cd90f2e	Voice



224	Voice_call_34798102_6282111000071_2015-07-09_10-08-53.wav	1657feddf36a8a811308227e137718d5	Voice
225	Voice_call_34798623_6282111000071_2015-07-09_10-38-21.wav	c2c0904baf2962ae0395a1854b99369	Voice
226	Voice_call_34799925_6282111000071_2015-07-09_11-49-07.wav	35588e03e0e8dd37b25988dcb08cca41	Voice

215 2 (dua) lembar print out Registrasi Data Pelanggan dengan Nomor Handphone 628161902088, nama pemilik nomor Kantor Pengacara O.C.KALIGIS, Alamat Komp. Majapahit Permai Blok B123 No. 18 20 - 22.

216 1 (satu) bundel print out CDR (Call Data Record) untuk nomor 628161902088 dari bulan April 2015 sampai dengan Desember 2015.

217 Data rekaman CCTV dengan nama file "CCTVBANDARA.iso" yang memiliki MD5 Has : 3923fa213ec0d8f53d1f77daed5b24cf, dan nilai SHA-1 Hash : fae 2d15 a7a7 555499 dc1e9 ea2254867a78de8bf5 dihitung dengan aplikasi Gizmo Manager V2.7, yang disimpan kedalam DVD Logo KPK dengan S/n: MAPA02RD25031632 5. Yang berisi rekaman CCTV sbb :

1 Rekaman CCTV tanggal 1 Juli 2015 diantaranya sbb.

- CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 22.27.07 s/d 22.27.23.
- CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 22.28.43 s/d 22.28.47.
- CCTV Departure Luar Zona Lantai 2 pada jam 22.30.30 s/d 22.32.37.
- CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 22.31.37 s/d 22.32.40.

1 Rekaman CCTV tanggal 2 Juli 2015 diantaranya sbb.

- CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.08.39 s/d 12.09.02.
- CCTV Garbarata 2 + Parking 27 pada jam 12.09.59 s/d 12.10.14.
- CCTV Dropzone Keberangkatan (239) pada jam 10.58.33 s/d 10.59.37.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d CCTV Travelator WR Scp Dome Lantai 2 pada jam 11.13.53 s/d 11.14.33.
 - e CCTV Automatic Gate zona Lt 2 pada jam 11.09.52 s/d 11.11.12.
 - f CCTV Departure dalam zona Lantai 2 (238) pada jam 10.59.10 s/d 10.59.47
 - g CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 15.54.00 s/d 15.33.03.
 - h CCTV Departure dalam zona lantai 2 pada jam 15.13.00 s/d 15.13.34.
 - i CCTV Garbarata H+Parking 27 pada jam 15.55.07 s/d 15.57.57.
- 3 Rekaman CCTV tanggal 5 Juli 2015 diantaranya sbb .
- a CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 08.08.52 s/d 08.09.05.
 - b CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 08.15.41 s/d 08.15.49.
 - c CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 08.18.39 s/d 08.19.43.
 - d CCTV Departure luar zona lantai 2 keberangkatan pada jam 08.18.19 s/d 08.18.49.
 - e CCTV Main Gate waiting room domestic 9-12 lantai 2 pada jam 12.14.40 s/d 12.15.46.
 - f CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.15.49 s/d 12.16.35.
 - g CCTV Automatic gate zona lantai 2 pada jam 11.43.15 s/d 11.43.47.
 - h CCTV Automatic gate zona lantai 2 (237) pada jam 11.41.56 s/d 11.42.50.
 - i CCTV Waiting Room Gate 10 Lantai 2 pada jam 12.16.34 s/d 12.17.05.
 - j CCTV Departure luar zona lantai 2 pada jam 11.38.26 s/d 11.39.32.
 - k CCTV Gate 10 pada jam 12.16.34 s/d 12.17.05.
- 4 Rekaman CCTV tanggal 7 Juli 2015 diantaranya sbb :
- a CCTV Garbarata G+Parking 29 (197) pada jam 14.06.35 s/d 14.06.44.
 - b CCTV automatic gate zona lantai 2 pada jam 13.48.16 s/d 13.48.36.
 - c CCTV Dept Dalam Zona Lantai 2 pada jam 13.41.24 s/d 13.41.52.
- 5 Rekaman CCTV tanggal 9 Juli 2015 diantaranya sbb :-
- a CCTV Garbarata H+Parking 27 pada jam 08.12.19 s/d 08.12.37.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 (156) pada jam 08.16.00 s/d 08.16.12.-
- c CCTV Pintu Arrival Dom Lantai 1 pada jam 08.34.10 s/ d 08.35.53.
- d CCTV Main Gate arrival lantai 1 (145) pada jam 08.35.42 s/ 08.35.53.

218 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan serial number (SN) MAPA25PH291921771 yang berisi :

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_6281362101414_2015-07-06_20-39-35.pdf	f647c978e4dbc218c921ba54a2615261	Softcopy SMS
2	Voice_call_34720219_6281362101414_2015-07-01_23-45-38.wav	6845b4fc4b118cbd0b232e0db8fddc1e	Voice
3	Voice_call_34746745_6281362101414_2015-07-04_17-30-15.wav	1f89fcc53422b8277bb210433a30c1e6	Voice
4	Voice_call_34752424_6281362101414_2015-07-05_11-21-52.wav	8f5b3a6891933d47f06592eff9f73123	Voice
5	Voice_call_34752545_6281362101414_2015-07-05_11-35-53.wav	cf698eb64004ee6e2e6f4a4d6c08b7e5	Voice
6	Voice_call_34763121_6281362101414_2015-07-06_14-22-44.wav	7a90e33da400d48b43708c2231b84806	Voice
7	Voice_call_34763156_6281362101414_2015-07-06_14-25-14.wav	ffdf4760c167f58c892a41363f48f1da	Voice
8	Voice_call_34773186_6281362101414_2015-07-07_12-03-08.wav	196a2d8d81d5a22a48cc73ebfbadf302	Voice
9	Voice_call_34773837_6281362101414_2015-07-07_12-37-26.wav	c8c872a146565a6211a6303d23fc0537	Voice
10	Voice_call_34774151_6281362101414_2015-07-07_12-54-30.wav	d8c857b20e2ee8087dc94e4cd28a2087	Voice
11	Voice_call_34710277_6281269705761_2015-07-01_09-43-01.wav	46ef250cd251f43dfef7f72836511d3d	Voice
12	Voice_call_34727117_6281269705761_2015-07-02_17-03-26.wav	083598ac849911a98686974578dcdfc	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Voice_call_34728827_6281 269705761_2015-07-02_20- 30-02.wav	a0196f07739d30d21c becd8a387f599f	Voice
14	Voice_call_34732650_6281 269705761_2015-07-03_10- 06-55.wav	4da44d63b0526cdd75 96c498d2573bd7	Voice
15	Voice_call_34756623_6281 269705761_2015-07-05_22- 28-05.wav	7f7bd6ba7b21d460be 0eca0e3e32ee83	Voice
16	Voice_call_34758142_6281 269705761_2015-07-06_08- 09-59.wav	4243bf443e56a307cf 8fdbae6d610ec6	Voice
17	Voice_call_34758772_6281 269705761_2015-07-06_09- 06-17.wav	e110135a13c451d234 188ee682bdb7fc	Voice
18	Voice_call_34762776_6281 269705761_2015-07-06_13- 58-46.wav	917acc98a51ae939e2 a0314d23d10b23	Voice
19	Voice_call_34762859_6281 269705761_2015-07-06_14- 03-56.wav	480b7bbba0fe136385 84a20bf85d0954	Voice
20	SMS_6287883327443_2015 -07-01_11-28-50.pdf	86bb8caf3653e3a206 9150bb73de4ce9	Softcopy SMS
21	SMS_6287883327443_2015 -07-03_11-01-07.pdf	dcf97e72b77746a64d fbc7b7671b667e	Softcopy SMS
22	SMS_6287883327443_2015 -07-03_13-08-11.pdf	636130bca6a530002a e42b9a669572b5	Softcopy SMS
23	Voice_call_34708495_6287 883327443_2015-07-01_06- 56-05.wav	77dac2233984e6927e 797b40e5fd53f1	Voice
24	Voice_call_34710475_6287 883327443_2015-07-01_09- 55-17.wav	2ed373ad16552bcaed ffbd33607302ce	Voice
25	Voice_call_34710515_6287 883327443_2015-07-01_09- 58-06.wav	033b7714e558ad0ac6 b8aa2eea8087ce	Voice
26	Voice_call_34710582_6287 883327443_2015-07-01_10- 01-30.wav	dd9104ffcd2d963d56 97741438ebdeba	Voice
27	Voice_call_34710661_6287 883327443_2015-07-01_10- 07-14.wav	b4207947bcbbc43642 f27a51d17bb879	Voice
28	Voice_call_34710900_6287 883327443_2015-07-01_10- 23-33.wav	d5b1270b248a23b58c b845a3312f6587	Voice
29	Voice_call_34734337_6287 883327443_2015-07-03_13- 00-11.wav	542d98bb7af5541d03 5ab47eda0bd680	Voice
30	Voice_call_34752532_6287	babf073394b4a2e1f5	Voice



	883327443_2015-07-05_11-34-10.wav	37317cc66242bf	
31	Voice_call_34767251_6287883327443_2015-07-06_20-35-08.wav	2784180b4bc810ae8fd846734dbc899a	Voice
32	Voice_call_34773131_6287883327443_2015-07-07_11-59-48.wav	c6d30b308bbd25af2811f1377e481b03	Voice
33	SMS_6281262622622_2015-07-06_09-10-02.pdf	97695390c9c2c4f9e13a314819fc74f2	Softcopy SMS
34	Voice_call_34435906_6281262622622_2015-06-04_17-55-13.wav	f325fc2a15c37d73c9b54665ff7b4c30	Voice
35	Voice_call_34441914_6281262622622_2015-06-05_08-31-12.wav	64748c961a4df6e43920ee0073ebc883	Voice
36	Voice_call_34450871_6281262622622_2015-06-05_19-26-38.wav	146425cb607d3c7de433f1468ab8f02f	Voice
37	Voice_call_34450929_6281262622622_2015-06-05_19-31-31.wav	956234273d645be609778e486933c62e	Voice
38	Voice_call_34462717_6281262622622_2015-06-06_22-48-48.wav	1a317db12a841f79817be6e3e067667a	Voice
39	Voice_call_34462866_6281262622622_2015-06-06_23-35-02.wav	b2689cb92020004af6cb9c05662c0041	Voice
40	Voice_call_34680614_6281262622622_2015-06-27_22-45-44.wav	b7bf7eb5a863cded8c76b1f2673d9aa7	Voice
41	Voice_call_34693032_6281262622622_2015-06-29_16-15-02.wav	53103ad0b9dbdb533b22146a21e06632	Voice
42	Voice_call_34710118_6281262622622_2015-07-01_09-31-11.wav	301aa232e2a18c3e912c66cf5d91ede2	Voice
43	Voice_call_34710175_6281262622622_2015-07-01_09-33-43.wav	be0be1a206396053c7264293b47038a8	Voice
44	Voice_call_34720218_6281262622622_2015-07-01_23-45-37.wav	8965677d29b5b845ede28cd68e96ad0c	Voice
45	Voice_call_34746744_6281262622622_2015-07-04_17-30-14.wav	e06f10ebb4d843ed803e93f19c964e60	Voice
46	SMS_6287788877191_2015-06-08_17-52-19.pdf	9eac6e4dbc89c04044c0ba53e1329fa8	Softcopy SMS
47	SMS_6287788877191_2015	87d67481821c3f59db	Softcopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-07-04_09-37-37.pdf	b9f4ac092635c6	SMS
48	SMS_6287788877191_2015-07-04_10-17-46.pdf	2afbb3f09c3eedeb8a2314dd66ec8541	Softcopy SMS
49	SMS_6287788877191_2015-07-04_10-19-11.pdf	f47da370759e8a25e3214f36fb8f9a84	Softcopy SMS
50	SMS_6287788877191_2015-07-07_13-37-19.pdf	be96746b93e982c182bb74a667a01ada	Softcopy SMS
51	SMS_6287788877191_2015-07-07_13-38-29.pdf	9e891d967b16031d3abc8bef12fea15f	Softcopy SMS
52	SMS_6287788877191_2015-07-07_13-38-42.pdf	6fe67d6baadfc1b6214afd1ce5f8b27d	Softcopy SMS
53	SMS_6287788877191_2015-07-07_13-38-51.pdf	a13244aae2c661908b485161b9103322	Softcopy SMS
54	SMS_6287788877191_2015-07-08_12-28-51.pdf	f88a07cd762e4edd03c20114c22086a6	Softcopy SMS
55	SMS_6287788877191_2015-07-08_12-30-14.pdf	660527af7433d91352b9741687ef2bf5	Softcopy SMS
56	SMS_6287788877191_2015-07-08_12-30-41.pdf	53e288400a0183e94d96d866da23fb8b	Softcopy SMS
57	SMS_6287788877191_2015-07-08_12-31-43.pdf	7ea581422a96ec1e0cf2bfab732ca5f7	Softcopy SMS
58	SMS_6287788877191_2015-07-08_13-41-20.pdf	81832dbcbc20aa76e185c86792ad3154	Softcopy SMS
59	SMS_6287788877191_2015-07-08_16-13-41.pdf	b8e5738decff025d81f375c4b729e246	Softcopy SMS
60	SMS_6287788877191_2015-07-08_17-50-11.pdf	3c19bab778d58e5c7c777d4c79e7dc82	Softcopy SMS
61	Voice_call_34449985_6287788877191_2015-06-05_18-04-07.wav	6c8b0c0c4a46a48e01493ec24f1479d0	Voice
62	Voice_call_34464575_6287788877191_2015-06-07_09-11-07.wav	7c2d18aaf7ff569afb392e77eb0c048b	Voice
63	Voice_call_34473669_6287788877191_2015-06-08_07-43-52.wav	0b7e98d43ac80c9b075fb42cd259e804	Voice
64	Voice_call_34495672_6287788877191_2015-06-09_15-18-12.wav	42bc2d571e1552f741d942bcc01cedfa	Voice
65	Voice_call_34502411_6287788877191_2015-06-10_07-41-21.wav	d820f05086aac890a207e685d7882d5d	Voice
66	Voice_call_34743134_6287788877191_2015-07-04_10-33-44.wav	8827ced676e0e70fe1dce9fdd7d90207	Voice
67	Voice_call_34749976_6287788877191_2015-07-05_02-47-58.wav	38c3dac6b641120b3d4ce35ecac74015	Voice
68	Voice_call_34750183_6287	af933c7b032a87625b	Voice



	788877191_2015-07-05_04-04-01.wav	e9afef511986f1	
69	Voice_call_34750198_6287 788877191_2015-07-05_04-08-14.wav	d31013e3474810af71 4d51e43231a887	Voice
70	Voice_call_34750208_6287 788877191_2015-07-05_04-11-49.wav	d22093408874a53e6c c1072ceccce551	Voice
71	Voice_call_34752099_6287 788877191_2015-07-05_10-46-56.wav	d994abc0fa5a0af7ee3 e8f3a4ea6643b	Voice
72	Voice_call_34752534_6287 788877191_2015-07-05_11-34-12.wav	d5e1447ecd9a7a76b4 55e928f9961e45	Voice
73	Voice_call_34757577_6287 788877191_2015-07-06_06-48-24.wav	c1092212a700bb0d96 a7db84fba75946	Voice
74	Voice_call_34758886_6287 788877191_2015-07-06_09-16-33.wav	6c555b71cff2538e42 02d83797464a67	Voice
75	Voice_call_34758923_6287 788877191_2015-07-06_09-19-39.wav	021b6c9adb27a47060 0cecbd51c215ae	Voice
76	Voice_call_34760889_6287 788877191_2015-07-06_11-41-08.wav	b648bbc769899602e7 90a0a8d3ff0b66	Voice
77	Voice_call_34760936_6287 788877191_2015-07-06_11-44-39.wav	5bb704a299f8109de0 b0abe8f82a4a15	Voice
78	Voice_call_34762578_6287 788877191_2015-07-06_13-48-14.wav	0a2d7876d42bf9dec2 cd744a0b342d66	Voice
79	Voice_call_34764880_6287 788877191_2015-07-06_16-21-59.wav	b8a5d58a4a7041df1c 2779113ccf971f	Voice
80	Voice_call_34765302_6287 788877191_2015-07-06_16-55-26.wav	6970a7bac118a29026 a440e728d982e8	Voice
81	Voice_call_34770320_6287 788877191_2015-07-07_08-57-21.wav	40afcef06ce5aab48d0 2e52e5f5e2fad	Voice
82	Voice_call_34773073_6287 788877191_2015-07-07_11-55-32.wav	61a120e77d79d982a0 4249b0839a3796	Voice
83	Voice_call_34774410_6287 788877191_2015-07-07_13-08-00.wav	a9d2a70f13dd82cd3a de0987cc388089	Voice
84	Voice_call_34774458_6287 788877191_2015-07-07_13-	c0ac219c10bdd0ecff6 04fad50710106	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10-42.wav		
85	Voice_call_34774532_6287788877191_2015-07-07_13-14-16.wav	05aad2372e45424ceffa44621e9016f	Voice
86	Voice_call_34774872_6287788877191_2015-07-07_13-31-50.wav	6e4b9676b2d062c8ac9d569853f110ec	Voice
87	Voice_call_34784580_6287788877191_2015-07-08_10-04-39.wav	9b16300b4a1f634dc96e0f59d1a71172	Voice
88	Voice_call_34787002_6287788877191_2015-07-08_12-20-58.wav	48357d41bf9dcce413670263ee837636	Voice
89	Voice_call_34787061_6287788877191_2015-07-08_12-24-28.wav	7a6d1e5c4a8daf261cec90d6e63929b4	Voice
90	Voice_call_34792778_6287788877191_2015-07-08_19-06-37.wav	b43d69f8ee77a6eaedc9a1b82fe1f8c2	Voice
91	Voice_call_34792971_6287788877191_2015-07-08_19-27-38.wav	b097d201331b479871a65c7d655f5673	Voice
92	Voice_call_34796822_6287788877191_2015-07-09_08-44-20.wav	a6fe9066eb5c416f50281bb2d1324cd2	Voice
93	Voice_call_34797857_6287788877191_2015-07-09_09-53-02.wav	ef4133c3b3611e02970e22ff268cb37f	Voice
94	Voice_call_34691379_6282111000071_2015-06-29_13-54-49.wav	c59716b5fd4e1097a7fe26acc02f86	Voice
95	Voice_call_34700707_6282111000071_2015-06-30_12-41-52.wav	6936d53fb6106329ae38830adc0b4184	Voice
96	Voice_call_34710841_6282111000071_2015-07-01_10-19-03.wav	16da9a4dc9d35f9ce44cd353528b838d	Voice
97	Voice_call_34710939_6282111000071_2015-07-01_10-26-32.wav	fd911c97591b361e20c9295ce9f1f248	Voice
98	Voice_call_34734401_6282111000071_2015-07-03_13-05-10.wav	9c656be2c7c70b589afb815bc5b597a8	Voice
99	Voice_call_34743132_6282111000071_2015-07-04_10-33-42.wav	ebb54efd503ec4a0917d52bb90193a14	Voice
100	SMS_6281221848850_2015-06-08_07-32-46.pdf	fb0acaff93cc64a0fd1380a63c79f284	Softcopy SMS
101	SMS_6281221848850_2015	3b55b1b5665509b648	Softcopy



	-06-09_10-49-37.pdf	c2d6ef346740c8	SMS
102	SMS_6281221848850_2015-06-09_10-52-35.pdf	56e9ca3559f2ba65a30626a11a6c72c0	Softcopy SMS
103	Voice_call_34470608_6281221848850_2015-06-07_19-27-42.wav	9cca08076dead39acb25ed56e26b816	Voice
104	Voice_call_34473182_6281221848850_2015-06-08_06-57-26.wav	716e2471a77998ab301244370cc6b1b3	Voice
105	Voice_call_34473667_6281221848850_2015-06-08_07-43-49.wav	edc9d01a29ebd41d7767f16eb7741ec5	Voice
106	Voice_call_34477789_6281221848850_2015-06-08_11-40-46.wav	fd15e2274bed957d131f262f15e2c1a8	Voice
107	Voice_call_34487383_6281221848850_2015-06-09_06-51-12.wav	cc1cfc6b6af0a664b91f66a9a0f17492	Voice
108	Voice_call_34593223_6281375344283_2015-06-17_16-34-18.wav	255f7e55a2978f4a8dea37796c7bbc0e	Voice
109	Voice_call_34653230_6281375344283_2015-06-24_09-19-15.wav	aa12ba301698aa4ae613386ac1c79b49	Voice
110	Voice_call_34710278_6281375344283_2015-07-01_09-43-04.wav	b90bc2ae451a80a3f772c4d3ac7cede0	Voice
111	Voice_call_34723613_6281375344283_2015-07-02_11-12-28.wav	bc89af1efc1547f596d56e1cfa9d58a2	Voice
112	Voice_call_34724304_6281375344283_2015-07-02_12-17-25.wav	8a7c30f84581d8be332c91e2340b6a9e	Voice
113	Voice_call_34758143_6281375344283_2015-07-06_08-09-59.wav	3dc8275903444cd9db8caae93eaa1623	Voice
114	Voice_call_34763122_6281375344283_2015-07-06_14-22-45.wav	8ddaed8f0c830cc001e2f34dd55bbf12	Voice
115	Voice_call_34763201_6281375344283_2015-07-06_14-27-54.wav	c53ec6b2adc81a0bdaac6b934a95ccea	Voice
116	Voice_call_34774155_6281375344283_2015-07-07_12-54-32.wav	85aa9cf97371ea378824ad2eabd84dd1	Voice
117	SMS_628161902088_2015-07-03_13-08-14.pdf	d9859a7ae5d197c51c2670388e461f76	Softcopy SMS
118	SMS_628161902088_2015-07-06_20-34-23.pdf	7c5d902c49b1fb16e54a112dc04a7bd8	Softcopy SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	Voice_call_34573985_6281 61902088_2015-06-16_08-4 7-36.wav	84c1709aa6cdaf1c5c7 d33af68f963de	Voice
120	Voice_call_34708522_6281 61902088_2015-07-01_07-0 2-25.wav	7c8c5b8c22daa57b8d fc0a69712726aa	Voice
121	Voice_call_34708530_6281 61902088_2015-07-01_07-0 5-28.wav	aa8874b9fd73e291cd 9ec9826e8f1035	Voice
122	Voice_call_34708646_6281 61902088_2015-07-01_07-2 4-02.wav	fda450bfe47de2a6b2f eb9c30d86b949	Voice
123	Voice_call_34711028_6281 61902088_2015-07-01_10-3 0-59.wav	1f27f1041d6fb71541c 60c3ae916cfe1	Voice
124	Voice_call_34715839_6281 61902088_2015-07-01_15-2 5-45.wav	a5671170b1daa2b017 d2a70240d7c983	Voice
125	Voice_call_34721823_6281 61902088_2015-07-02_08-4 8-49.wav	eddc8623a7e890853 46f3bc63c96475	Voice
126	Voice_call_34721880_6281 61902088_2015-07-02_08-5 2-43.wav	4f49e0111712a3fb24 a998d525b4ca38	Voice
127	Voice_call_34721957_6281 61902088_2015-07-02_08-5 8-21.wav	1fab0839b2a35b0020 3f4d3897845201	Voice
128	Voice_call_34722497_6281 61902088_2015-07-02_09-4 7-07.wav	a2085fc6139ddd4c36 e9485ee563270b	Voice
129	Voice_call_34722729_6281 61902088_2015-07-02_10-0 4-27.wav	f038d218119a52b54b 5cd440bbe2f84c	Voice
130	Voice_call_34730756_6281 61902088_2015-07-03_06-1 0-21.wav	d529b85b323e8eeaac 8bb3fd5ee38205	Voice
131	Voice_call_34734334_6281 61902088_2015-07-03_13-0 0-08.wav	a50b0dbf8c14a02318 420a25852df5a6	Voice
132	Voice_call_34735091_6281 61902088_2015-07-03_13-5 0-34.wav	54a04a4620c6afe1a0 8397bfafed43a4	Voice
133	Voice_call_34750322_6281 61902088_2015-07-05_04-4 5-00.wav	f1573aa5f94f05fc9a0 122a03ac0bfa7	Voice
134	Voice_call_34751050_6281 61902088_2015-07-05_08-2 4-08.wav	0fa0c6a74ddf3a5fb28 d93b419b95d28	Voice
135	Voice_call_34752351_6281	60a77f4fc0d6b1e318	Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	61902088_2015-07-05_11-10-14.wav	86fbcca25ef547	
136	Voice_call_34767252_628161902088_2015-07-06_20-35-11.wav	a153eacbf7ddd6ef10197047e871299e	Voice
137	Voice_call_34797886_628161902088_2015-07-09_09-54-39.wav	954afc426096d4ed77f5536d32bf53b4	Voice
138	Voice_call_34797901_628161902088_2015-07-09_09-55-39.wav	771b858acb1c3e205da6943abec18636	Voice
139	Voice_call_34798000_628161902088_2015-07-09_10-01-53.wav	2105b7804b11da109bf05b28422a1253	Voice
140	Voice_call_34798328_628161902088_2015-07-09_10-20-59.wav	6ac15b9d3a179505f957f00cb503f16a	Voice
141	Voice_call_34798503_628161902088_2015-07-09_10-30-36.wav	343eb58e832be8c179800626f329d69f	Voice
142	Voice_call_34798807_628161902088_2015-07-09_10-48-00.wav	c4deba8b4ba21cf44fc5c64e9483d59c	Voice
143	Voice_call_34799030_628161902088_2015-07-09_11-01-58.wav	e40ea1a3b3e30e39a24d1f1548154e7b	Voice
144	Voice_call_34799179_628161902088_2015-07-09_11-09-45.wav	3ae403075c7a83fc9952f4f50a5880dd	Voice
145	Voice_call_34799326_628161902088_2015-07-09_11-18-02.wav	95ec1a42225e04346176fc02ad0774c7	Voice
146	Voice_call_34799581_628161902088_2015-07-09_11-29-43.wav	10bd3923957bab8855acc650696f483d	Voice
147	Voice_call_34799842_628161902088_2015-07-09_11-43-16.wav	9e117bf59ecb1f267f027e75e7c44897	Voice
148	SMS_6281375540717_2015-07-07_10-51-28.pdf	e97695d111f7b05c98b173dca80c35b9	Softcopy SMS
149	SMS_6281375540717_2015-07-08_12-30-55.pdf	a3d3375db22dcd430bde51e0a6f17dda	Softcopy SMS
150	SMS_6281375540717_2015-07-08_12-31-44.pdf	2d63bc5d5793783f6ca0d93429da907d	Softcopy SMS
151	Voice_call_34771965_6281375540717_2015-07-07_10-48-49.wav	d04fbce9f99b9a571269dfc345ec0a31	Voice
152	Voice_call_34773074_6281375540717_2015-07-07_11-	7bed89d0215598254f9170b1d6b6bec6	Voice



	55-32.wav		
153	Voice_call_34786966_6281375540717_2015-07-08_12-18-28.wav	f94609de3560bbd51360b9cc8f91f7ba	Voice
154	Voice_call_34786989_6281375540717_2015-07-08_12-19-57.wav	683bd853f6207181c0f6377ae57f59ec	Voice
155	Voice_call_34787064_6281375540717_2015-07-08_12-24-32.wav	e48efa9b462c340a0efa6285e6820f57	Voice
156	Voice_call_34787156_6281375540717_2015-07-08_12-28-48.wav	26a2f20262d2f97eb3fb8ddc5fc2dee6	Voice
157	Voice_call_34787332_6281375540717_2015-07-08_12-40-25.wav	632667ccae33358b6021673d88177e45	Voice

- 219 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 220 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 221 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu No 979/HUK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal : permintaan keperluan seminar (Mobil, Ulos, Penginapan dan Ruangan VIP Kualanamu) beserta 1 (satu) lembar Disposisi dan 1(satu) lembar fotocopy Invoice JW Mariot tanggal 27 April 2015 untuk sewa 6 (enam) kamar tanggal 13 April 2015 dengan total sebesar Rp 9.975.000,-(sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 222 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu No 1113/HUK/IV/2015 tanggal 10 April 2015 perihal : permintaan fasilitasi jamuan makan siang bersama Prof DR O.C kaligis, SH, MH untuk kegiatan Seminar terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan dalam rangka hari jadi Pemerintah Propinsi Sumut ke-67 beserta 2 (dua) lembar Disposisi.
- 223 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 3 Juni 2015 Nomor 13/BP/KDH/WKDH/ 2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5. 1.1.03.02 untuk pembayaran belanja penunjang operasional kepala Daerah tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sebesar Rp 517.904.500,- (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah). dengan lampiran 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 03 Juni 2015 dan 1 (satu Bundel) Rincian penggunaan biaya penunjang operasional Gubernur Sumut bulan Februari dan Maret 2015 dengan lampiran dokumen pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran).

224 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 15 Juli 2015 Nomor 18/BP/KDH/WKDH/2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5. 1.1.03.02 untuk pembayaran belanja penunjang operasional kepala Daerah tahun 2015 sebesar Rp 405.200.000,- (empat ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan lampiran 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 15 Juli 2015 dan 1 (satu Bundel) Rincian penggunaan biaya penunjang operasional Gubernur Sumut dengan lampiran dokumen pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran).

225 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D.498-KP.04.10-92 tanggal 06 Agustus 1992 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si sebagai Penata Muda (III/a) dalam jabatan Hakim Pengadilan Negeri yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementrian Kehakiman Republik Indonesia.

226 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 47/DjMT/KEP/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si dalam Jabatan baru sebagai Hakim Madya Uatama/Pembina Utama Muda/Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.

227 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal 20 Oktober 2003 beserta lampirannya tentang pencatatan Sdr. DERMAWAN GINTING, SH sebagai Penata Muda Tk I (III/b) dengan status Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementrian Kehakiman Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 228 3 (Tiga) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 58.a/DjMT/KEP/IX/2013 tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. DERMAWAN GINTING, SH dalam Jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I /Hakim Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 229 1 (Satu) lembar Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 84/M tahun 2002 tanggal 01 Mei 2002 tentang pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, SH. Sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia.
- 230 3 (Tiga) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, SH.,MH dalam Jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I /Hakim Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 231 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. SYAMSIR YUSFAN, S.H., MH dalam Jabatan baru sebagai Pembina Tingkat I, Panitera/Sekertaris Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 232 1 (satu) Bundel dokumen invoice nomor 115042013 tanggal 02 April 2015 table 09 dengan jumlah total Rp 2.596.459,- (Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)
- 233 1 (satu) lembar print out rekapitulasi kasir tanggal 02 April 2015.
- 234 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir tabel kas harian kantor pengacara OC Kaligis & Associates terkait pembayaran dari Ibu EVY dan Pak GATOT pada tahun 2015.
- 235 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengeluaran Kas No. 3732 ter tanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 260.000.000,- keperluan USD 20.000.



- 236 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengeluaran Kas No. 3748 ter tanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 293.790.000,- keperluan pengambilan tunai SGD 30.000.
- 237 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penerimaan Kas No. 4062 ter tanggal 20/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Deposit LF perkara PTUN Medan.
- 238 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengeluaran Kas No. 5577 ter tanggal 7/7/2015, sejumlah Rp. 20.000.000,- keperluan pengambilan tunai.
- 239 HP Warna Merah Merk Nokia E90 dengan IMEI : 35 366 0011887373 yang didalamnya terdapat SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan no kode : 6210 0211 2584 8850, No Telepon : 081221848850, Memory Card Micro SD Merk V-Gen Kapasitas 2GB dengan no kode : P 1019445.
- 240 HP Warna Putih Merk Blackberry Model ; Q10, IMEI : 3577 5905 38454467 Pin BB : 2B1D7E9B, yang didalamnya terhadap SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan ICC ID : 89 62100 118 258693714 dan tanpa memory card, No. telepon 081218869371.
- 241 1 (satu) buha handphone merk SAMSUNG warna putih model GT-E1272 dengan SN:RV1G60BQKLH, IMEI 1 : 3575420641299401, IMEI 2: 357543064129933 yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210000608202199401 yang digunakan oleh ISMAIL FAHMI.
- 242 1 (satu) buah handphone merk Nokia 106 warna hitam dengan IMEI: 355145061742007, yang di dalamnya terdapat sim card XL dengan ICCID: 8962116101731443800 yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST.
- 243 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan ICCID: 621 0016 225622622, yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST
- 244 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 14/07 '15, OC KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 14 Juli 2015;
- 245 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 15/07 '15, OC KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 15 Juli 2015.
- 246 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA 25PH 29073231 yang berisikan antara lain :

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	a6d67adab87412c4a4f86a6bdb628164	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-07-01_23-45-38.pdf	c4567ea891d58e5f7f94fbb0c374616a	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	6281362101414_2015-07-04_17-30-15.pdf	4401f5bf0d660e6aae4fd3cb2c5c83a6	Softcopy Transkrip
4	6281362101414_2015-07-05_11-21-52.pdf	90b39962576c63eb284b8ebc88415af6	Softcopy Transkrip
5	6281362101414_2015-07-05_11-35-53.pdf	659e373fd2ac36e2f012420fe9460230	Softcopy Transkrip
6	6281362101414_2015-07-06_14-22-44.pdf	3b8b4fff2b0baa514fdf1304c51a8d77	Softcopy Transkrip
7	6281362101414_2015-07-06_14-25-14.pdf	76c886ee7033da39ea06932feac61e90	Softcopy Transkrip
8	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	9452e5edd5e25389d641bf95c2490543	Softcopy Transkrip
9	6281362101414_2015-07-07_12-54-30.pdf	4cc467e81122a3c6b961f5bad0b6128f	Softcopy Transkrip
10	6281269705761_2015-07-01_09-43-01.pdf	d90dd42b956bbafde4ef8b0a54683796	Softcopy Transkrip
11	6281269705761_2015-07-02_17-03-26.pdf	448a535b88f83f568edb38e24bc90381	Softcopy Transkrip
12	6281269705761_2015-07-02_20-30-02.pdf	65c77d29518b2a28398f7f3bc035d461	Softcopy Transkrip
13	6281269705761_2015-07-03_10-06-55.pdf	0f7476c31ad8b3d0c27ff8f1e8769027	Softcopy Transkrip
14	6281269705761_2015-07-05_22-28-05.pdf	9870fa2f8a363f88b7836916bc6afc65	Softcopy Transkrip
15	6281269705761_2015-07-06_08-09-59.pdf	075829afcf5730fbc0bdf6441502d9	Softcopy Transkrip
16	6281269705761_2015-07-06_09-06-17.pdf	8e0c7b8a676fbc371e3eb86a04ccab84	Softcopy Transkrip
17	6281269705761_2015-07-06_13-58-46.pdf	0791a7d4b3dc40426bac3c61c6ae7d4c	Softcopy Transkrip
18	6281269705761_2015-07-06_14-03-56.pdf	66ac812a21e83e873e512a7bf9cf3944	Softcopy Transkrip
19	6287883327443_2015-07-01_06-56-05.pdf	bec1b2091cb929c0f287d68462022841	Softcopy Transkrip
20	6287883327443_2015-07-01_09-55-17.pdf	69b51e6061149d4710c87ead32dfa5e7	Softcopy Transkrip
21	6287883327443_2015-07-01_09-58-06.pdf	d8870e27844331a819fb7325427e3ade	Softcopy Transkrip
22	6287883327443_2015-07-01_10-01-30.pdf	720c3cc9410bc4a48dd90e5e927e1a6a	Softcopy Transkrip
23	6287883327443_2015-07-01_10-07-14.pdf	11fa0a2d315d1a75a1d4adb0d26332ca	Softcopy Transkrip
24	6287883327443_2015-07-03_13-00-11.pdf	cccade84b0f69907df3718d05faafd40	Softcopy Transkrip
25	6287883327443_2015-07-05_11-34-10.pdf	26b9855ecf8f4210175f5ddab88b49e5	Softcopy Transkrip
26	6287883327443_2015-07-06_20-35-08.pdf	be4b72cb244ea8d84050d5171ddc3bf0	Softcopy Transkrip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	6287883327443_2015-07-07_11-59-48.pdf	8eae4a620ea7f40d2ccd9ee96dc99b05	Softcopy Transkrip
28	6287788877191_2015-06-05_18-04-07.pdf	8d49108ed577076b4460e1e158c1fb18	Softcopy Transkrip
29	6287788877191_2015-06-07_09-11-07.pdf	f6f545d8bc44252fa3c9b583f8145a7c	Softcopy Transkrip
30	6287788877191_2015-06-08_07-43-52.pdf	5f0ddea870e9f7250dd4816060ed4baf	Softcopy Transkrip
31	6287788877191_2015-06-09_15-18-12.pdf	6125fa24a5e33f46cec0bf2d7b08155e	Softcopy Transkrip
32	6287788877191_2015-06-10_07-41-23.pdf	554afa1043f47e3cb31f8419d91e025b	Softcopy Transkrip
33	6287788877191_2015-07-04_10-33-44.pdf	b942da3f293cd58e1b638423b57d12e3	Softcopy Transkrip
34	6287788877191_2015-07-05_02-47-58.pdf	fafa82aed79657ce895f3e71ba23810c	Softcopy Transkrip
35	6287788877191_2015-07-05_04-04-01.pdf	573a9b5d66c83296109735f9b646540b	Softcopy Transkrip
36	6287788877191_2015-07-05_04-08-14.pdf	eddb12b2412cd5f210b70d78d84afa3e	Softcopy Transkrip
37	6287788877191_2015-07-05_04-11-49.pdf	850a60073b00111a3f237263112cb13c	Softcopy Transkrip
38	6287788877191_2015-07-05_10-46-56.pdf	235bbd77a5f5bde22e4120a84abd6593	Softcopy Transkrip
39	6287788877191_2015-07-05_11-34-12.pdf	152b8d3eb82eb506be54fe613d541883	Softcopy Transkrip
40	6287788877191_2015-07-06_06-48-24.pdf	83faaebd1da6d05eb1aac1a95777da48	Softcopy Transkrip
41	6287788877191_2015-07-06_09-16-33.pdf	f83f08af322f0d2691b6c4927bae3dd7	Softcopy Transkrip
42	6287788877191_2015-07-06_09-19-39.pdf	6b67783b2ddd4eab7f528fc91c6e85d1	Softcopy Transkrip
43	6287788877191_2015-07-06_11-41-08.pdf	b9549c9fe211fe7b4e51f4565f2e2184	Softcopy Transkrip
44	6287788877191_2015-07-06_11-44-39.pdf	3456d3b1eabdbe203ec3fdc478df3b3e	Softcopy Transkrip
45	6287788877191_2015-07-06_13-48-14.pdf	7ca7162fb88c44ab127472d812f74b30	Softcopy Transkrip
46	6287788877191_2015-07-06_16-21-59.pdf	e782acedf0e8b58da9cb1f18b7011a3e	Softcopy Transkrip
47	6287788877191_2015-07-06_16-55-26.pdf	0f1ac8cede984e3b75fe009b16420708	Softcopy Transkrip
48	6287788877191_2015-07-07_08-57-21.pdf	188c2246138a37c1098e7c83f78a5ca3	Softcopy Transkrip
49	6287788877191_2015-07-07_11-55-32.pdf	cde979ae1a20a4163846606eba8b1419	Softcopy Transkrip
50	6287788877191_2015-07-07_13-08-00.pdf	7b9d3ce882a7a73138245edc7618a2f3	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	6287788877191_2015-07-07_13-10-42.pdf	6a63ee80646f3df596f50b90354ab837	Softcopy Transkrip
52	6287788877191_2015-07-07_13-14-16.pdf	606ace7e701f28f32c5c654180e5f96a	Softcopy Transkrip
53	6287788877191_2015-07-07_13-31-50.pdf	90bff85764a8a4e09062040831c19012	Softcopy Transkrip
54	6287788877191_2015-07-08_10-04-39.pdf	b203a865754e561895473bdbefeca84e	Softcopy Transkrip
55	6287788877191_2015-07-08_12-20-58.pdf	c159a54436147976393a33b11d2eccd1	Softcopy Transkrip
56	6287788877191_2015-07-08_12-24-28.pdf	72f2e8b8a1e9f4a70652823681032181	Softcopy Transkrip
57	6287788877191_2015-07-08_19-06-37.pdf	c724167525b73620d4ce218b4d89f7ba	Softcopy Transkrip
58	6287788877191_2015-07-08_19-27-38.pdf	97106fa240ebe2c6b69e42fb59620206	Softcopy Transkrip
59	6287788877191_2015-07-09_08-44-20.pdf	2c354456968764548b9c0044efb6cce2	Softcopy Transkrip
60	6287788877191_2015-07-09_09-53-02.pdf	cfb7fb63b60bb3bfef42b611066be248	Softcopy Transkrip
61	6281221848850_2015-06-03_18-38-58.pdf	a86a87c95536fe01617e59a7ebaaacb5	Softcopy Transkrip
62	6281221848850_2015-06-03_18-41-35.pdf	73c9f22e1a5710f0de599ee0ba4f78a0	Softcopy Transkrip
63	6281221848850_2015-06-03_19-05-22.pdf	0ab90155e6742627df8dd5bd375e5ebb	Softcopy Transkrip
64	6281221848850_2015-06-07_08-20-32.pdf	700bbce2eb1cbe276ced3c2cd3a2ef6a	Softcopy Transkrip
65	6281221848850_2015-06-07_19-27-42.pdf	2f031d5b43b3875b0ae02cf5866a3415	Softcopy Transkrip
66	6281221848850_2015-06-08_06-57-26.pdf	992dcdbd516bdfb954d4b0f247c9adf34	Softcopy Transkrip
67	6281221848850_2015-06-08_11-40-46.pdf	21fa99e52a8e728eba770261968cf7af	Softcopy Transkrip
68	6281221848850_2015-06-09_06-51-12.pdf	b78165bc5be718c0e50d37f5afa33cee	Softcopy Transkrip
69	6281221848850_2015-06-09_08-25-29.pdf	b141d08aca84f94646f8820a453cf29e	Softcopy Transkrip
70	6281221848850_2015-06-09_08-29-11.pdf	2d013f94c24261c33ea61d3e40e51b9f	Softcopy Transkrip
71	6281221848850_2015-06-09_11-00-08.pdf	180a2c06ee0081a4d594d8214524e293	Softcopy Transkrip
72	6281221848850_2015-06-10_17-20-05.pdf	098244a439e2cc952cf43ef9ef1e8f26	Softcopy Transkrip
73	6281221848850_2015-06-17_14-52-01.pdf	0499c0a7e22d74c16d07e93748aaf6be	Softcopy Transkrip
74	6281221848850_2015-06-24_09-13-24.pdf	c86aad6e8076be9cf3ab4db540bbcbd4	Softcopy Transkrip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	6281221848850_2015-06-25_13-00-50.pdf	8ab63d534121c8f20363ae05b787136e	Softcopy Transkrip
76	6281221848850_2015-06-29_08-53-02.pdf	4ff1a359a839202daecfba88c9cd34f2	Softcopy Transkrip
77	6281221848850_2015-07-01_10-24-58.pdf	4f8d2ca09d72580724054571622c16b6	Softcopy Transkrip
78	6281221848850_2015-07-01_22-17-48.pdf	d7cd6356f579836bc90cce33ab7e1f9e	Softcopy Transkrip
79	6281221848850_2015-07-01_22-26-09.pdf	d58fe8de8f30cb0e0b0f112a8a88d745	Softcopy Transkrip
80	6281221848850_2015-07-06_09-06-16.pdf	b6f5cf705fa21386342a874e56a65c2e	Softcopy Transkrip
81	6281221848850_2015-07-06_13-58-49.pdf	ebf5b8bcd95faf4d9c2b72ebf7bafa77	Softcopy Transkrip
82	6281221848850_2015-07-06_14-03-57.pdf	3a7bf9dfca07c96bc898f469005c0ac5	Softcopy Transkrip
83	6281221848850_2015-07-07_10-35-49.pdf	ddffcaebb7074213722fe289ab9a70a5	Softcopy Transkrip
84	6281221848850_2015-07-07_12-09-09.pdf	684e6d1cc24f02ae3987cef7ced0f672	Softcopy Transkrip
85	6281221848850_2015-07-09_10-29-49.pdf	d31163601b0ccfedfcc79f9158615e0	Softcopy Transkrip
86	6281221848850_2015-07-09_10-38-23.pdf	851677a8cafa5ba9b9fc40dd72400842	Softcopy Transkrip
87	6281221848850_2015-07-09_14-55-23.pdf	2b80eb533684ff27018d771a25b96dfb	Softcopy Transkrip
88	6281221848850_2015-07-09_15-30-57.pdf	b60796250c5b64407e7aa2c8dd55b08e	Softcopy Transkrip
89	6281221848850_2015-07-09_16-59-09.pdf	42670eb27ae2ff83d6593f8542e5fff6	Softcopy Transkrip
90	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	85d8b2ac4f3a3fa7d9b721f52774d0af	Softcopy Transkrip
91	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	5d972dcf358e03bcf3e6d72515efe755	Softcopy Transkrip
92	628161902088_2015-06-16_08-47-36.pdf	04727bf3cd3ab25ce82ea70b47563040	Softcopy Transkrip
93	628161902088_2015-07-01_07-02-25.pdf	86c52a660507194d1f25595f6a17158e	Softcopy Transkrip
94	628161902088_2015-07-01_07-05-28.pdf	91156c27ce45c056b6af7eb17e997d7c	Softcopy Transkrip
95	628161902088_2015-07-01_07-24-02.pdf	9d24f9e85d263ce1b553d73a04102322	Softcopy Transkrip
96	628161902088_2015-07-01_10-30-59.pdf	eb54d1196d9b51d2050e3c709bc74507	Softcopy Transkrip
97	628161902088_2015-07-01_15-25-45.pdf	7f4560f530d03a51574aff61bdcf62cb	Softcopy Transkrip
98	628161902088_2015-07-02_08-48-49.pdf	7acbb6d343731f81a9d490616c13a169	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99	628161902088_2015-07-02_08-52-43.pdf	65cedcf050629c87b2e38e9ea63b364b	Softcopy Transkrip
100	628161902088_2015-07-02_08-58-21.pdf	55f6b126cead5f4b4b795fee6bef18fd	Softcopy Transkrip
101	628161902088_2015-07-02_09-47-07.pdf	da29a9e600e3a773ccaf8f877619593d	Softcopy Transkrip
102	628161902088_2015-07-02_10-04-27.pdf	d37d7a22261954585d03f712a73cd76e	Softcopy Transkrip
103	628161902088_2015-07-03_06-10-21.pdf	a9511aa206b9fd543bc2bd4f6f3b5706	Softcopy Transkrip
104	628161902088_2015-07-03_13-00-08.pdf	8f780eb1d7add9f2678d8e13d59d7081	Softcopy Transkrip
105	628161902088_2015-07-03_13-50-34.pdf	88b56f23333ec02e67edc013a9867f7d	Softcopy Transkrip
106	628161902088_2015-07-05_04-45-00.pdf	72792e57550cb53680765a104846ad21	Softcopy Transkrip
107	628161902088_2015-07-05_08-24-08.pdf	cdd337be0044f87dedeb95078695c13c	Softcopy Transkrip
108	628161902088_2015-07-05_11-10-14.pdf	ea797cc01b11554512fea89fdbfdd5f0	Softcopy Transkrip
109	628161902088_2015-07-06_20-35-11.pdf	5e72b44dd243f5c31d12af9393f191e4	Softcopy Transkrip
110	628161902088_2015-07-07_12-02-20.pdf	5678b3d1dc5833304d1afad1a303343f	Softcopy Transkrip
111	628161902088_2015-07-09_09-54-39.pdf	9b54f1360d4659c553591cfdd0941942	Softcopy Transkrip
112	628161902088_2015-07-09_10-01-53.pdf	071250e906de5d8eafd3e20599130d0f	Softcopy Transkrip
113	628161902088_2015-07-09_10-20-59.pdf	245813582608158f55762e0d76baef12	Softcopy Transkrip
114	628161902088_2015-07-09_10-30-36.pdf	1b4880c99187ad75db00dd92458169e2	Softcopy Transkrip
115	628161902088_2015-07-09_10-48-00.pdf	f6e9193f773e3d53ef50617c60058381	Softcopy Transkrip
116	628161902088_2015-07-09_11-01-58.pdf	7b37bd9e6905e24fac8b1d43d9d9f6f5	Softcopy Transkrip
117	628161902088_2015-07-09_11-09-45.pdf	07c47fcf0e9b35db197245e61a46ef8d	Softcopy Transkrip
118	628161902088_2015-07-09_11-18-02.pdf	ac5cfd7b05b47c3ffb345534dc9ca251	Softcopy Transkrip
119	628161902088_2015-07-09_11-29-43.pdf	dbf7ec16b7604dcd3af34c35763e0904	Softcopy Transkrip
120	628161902088_2015-07-09_11-43-16.pdf	eb93ddb87c73366408e3fade06e7fa67	Softcopy Transkrip
121	628161902088_2015_07_09_09-55-39.pdf	ab55d76b4ebc37e482942e120cb076e9	Softcopy Transkrip



247. 1 (satu) Buah Compact Disk (CD) dengan Nomor
MAPA25PI102149454 yang berisikan antara lain :

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-06-16_15-24-31.pdf	743fbbeac81bf056c291fe8e6c215485	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-06-16_15-31-05.pdf	f1e5ec365ddd34da98ffe574d58dcb75	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	6281311183687_2015-06-27_21-30-15.pdf	249bdf77bcd14548590a7ef1b7c47388	Softcopy Transkrip
4	6282111000071_2015-06-22_18-55-51.pdf	85163fbfd3b7ae18564a7bf1bce0d8c9	Softcopy Transkrip
5	6282111000071_2015-06-30_11-14-38.pdf	237cec7fbb277e743c1ae4ee864a6e4f	Softcopy Transkrip
6	6282111000071_2015-07-04_11-55-16.pdf	ee754a872a64d2ad72d8a0b3c6781766	Softcopy Transkrip
7	6282111000071_2015-07-04_12-08-12.pdf	e0e7564970b465bdac5ec9f084f864e3	Softcopy Transkrip
8	6282111000071_2015-07-06_08-50-45.pdf	7e5619a287052788437d6968cc50f270	Softcopy Transkrip
9	6282111000071_2015-07-06_08-54-37.pdf	208eceda3d48069328fa32788359ffee	Softcopy Transkrip
10	6282111000071_2015-07-06_14-15-46.pdf	5fa47e65e01f278d6e3823118b94a999	Softcopy Transkrip
11	6282111000071_2015-07-06_14-25-12.pdf	28e01c4f22edefb1febb57c1d0722e0f	Softcopy Transkrip
12	6282111000071_2015-07-06_14-27-52.pdf	b26d720ef962b40b2e933e19b2b63806	Softcopy Transkrip
13	6282111000071_2015-07-07_11-35-35.pdf	85e022421c5f909a75b06f6de4447f16	Softcopy Transkrip
14	6282111000071_2015-07-07_12-09-56.pdf	665a863e85335752599418fb807399a8	Softcopy Transkrip
15	6282111000071_2015-07-07_12-37-31.pdf	7560c77430e4d8f68516c5385288e82b	Softcopy Transkrip
16	6282111000071_2015-07-07_12-42-05.pdf	809aa8edce196041191dcf284dde8f75	Softcopy Transkrip
17	6282111000071_2015-07-07_12-52-53.pdf	353ef0b750f2b7a0d31bf86af5b87e6b	Softcopy Transkrip
18	6282111000071_2015-07-09_09-47-30.pdf	ef2e19e0798979a8ed09db45dc7a448a	Softcopy Transkrip
19	6282111000071_2015-07-09_09-54-46.pdf	46c4fee597bd65e56572e3af6396d2a0	Softcopy Transkrip
20	6282111000071_2015-07-09_09-59-41.pdf	106bdfd5d64b020e8e09816c1e489bcc	Softcopy Transkrip
21	6282111000071_2015-07-09_10-02-56.pdf	48f9bd84ecfc317a2beda2150e6ff6fd	Softcopy Transkrip
22	6282111000071_2015-07-09_10-08-53.pdf	575b5277517faf64843860e315cd2379	Softcopy Transkrip
23	6282111000071_2015-07-09_10-38-21.pdf	6fb2ecde322b9058334604bd7904fea9	Softcopy Transkrip
24	6282111000071_2015-07-09_11-49-07.pdf	951e28d9a09f67a03aa7ffc6f73acee5	Softcopy Transkrip
25	6281375344283_2015-06-17_16-34-18.pdf	bd404f0453f6a1df2d09dc4bcc0aa345	Softcopy Transkrip
26	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	7482c51d403203ddd12de7faaf8e9b21	Softcopy Transkrip



27	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	e22592bfc2257ea091f27a29e7aa587b	Softcopy Transkrip
28	6281375344283_2015-07-02_11-12-28.pdf	c9c1b1baab2c99838a058252c6e06ba4	Softcopy Transkrip
29	6281375344283_2015-07-02_12-17-25.pdf	a7ced85e5652eaff1bfdc7193355cfee	Softcopy Transkrip
30	6281375344283_2015-07-06_08-09-59.pdf	05679d228901b99beb8f7f14079da1ec	Softcopy Transkrip
31	6281375344283_2015-07-06_14-22-45.pdf	8f3828ef4fca6cf83a27698aa5f66155	Softcopy Transkrip
32	6281375344283_2015-07-06_14-27-54.pdf	cf742e1cb2c70f72a82c825378785f80	Softcopy Transkrip
33	6281375344283_2015-07-07_12-54-32.pdf	36cc084b1e67423edf53fae57f5bb555	Softcopy Transkrip

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara atasnama terdakwa AMIR FAUZI.

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 15/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Januari 2016 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 126/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Januari 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2016;
5. Memori Banding tanggal 25 Februari 2016 dari Penuntut Umum yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Gebruari 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2016;
6. Kontra Memori Banding tanggal 4 Maret 2016 dari Terdakwa yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2016 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2016;
7. Pemberitahuan yang dibuat oleh Watty Wiarti, S.H.,M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat tanggal Maret 2016 Nomor. W.10.U1/4083/HN.05.III.2016.03, yang isinya memberikan kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya berisi keberatan sebagai berikut:

- Adapun yang menjadikan alasan-alasan dalam mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim tersebut adalah Putusan Majelis Hakim tingkat pertama bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan Masyarakat;

Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 235 menyatakan :

"Menimbang bahwa Terdakwa tidak ditetapkan sebagai Justice Collaborator sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 4 tahun 2011 Tentang perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam perkara tindak pidana tertentu, namun dari fakta hukum yang ada, ternyata fakta dari perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat menjadi Justice Collaborator, yakni Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, belum menikmati hasil perbuatannya, membantu mengungkap perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini, tidak menikmati hasil perbuatannya, bahkan uang yang diterima lebih sedikit jumlahnya dari

- uang yang diterima saksi Tripeni Irianto Putro yang ditetapkan sebagai Justice Collaborator, maka dengan demikian hal ini akan dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidana.*

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat kurang dari minimal pidana yang dipersyaratkan dalam ancaman pidana dalam dakwaan ini. ^a

- Bahwa pertimbangan Majelis Hukum tingkat pertama tersebut merupakan pertimbangan yang keliru, sehingga Penuntut Umum menyatakan keberatannya dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman), Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim dan Hakim Konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (*vide* penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman). Untuk itulah kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Namun kebebasan itu tidak mutlak karena tugas Hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (*vide* Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman). Dengan kata lain kebebasan Hakim itu tidak dapat diintervensi dalam keadaan dan oleh siapapun, tetapi secara substansial dibatasi oleh hukum dan keadilan itu sendiri (*vide* Luhut M.P Pangaribuan, *Lay Judges Dan hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai SPP Indonesia*, FHUI, 2009: Jakarta, hal 186).

- Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang tidak menganut asas jurisprudensi secara ketat (*non binding act / stare decisis*), maka sumber hukum utama yang harus dipergunakan oleh Hakim dalam memutus perkara adalah peraturan perundang-undangan. Dalam hal-hal tertentu Hakim dapat melakukan penemuan hukum jika peraturan perundang-undangannya tidak ada atau tidak jelas, bahkan Hakim dapat melakukan perluasan hukum sepanjang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun jika peraturan perundang-undangan telah mengaturnya secara jelas, sedapat mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikannya sebagai sumber hukum yang utama.
- Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Hakim dan Hakim Konstitusi dalam membuat putusan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya (*vide* Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : *Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*". Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 6 KUHAP yang menyatakan bahwa "*surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa*".

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga seharusnya memperhatikan pidana minimum khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, yakni pidana penjara paling singkat 4 (*empat*) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Ketentuan minimum khusus tersebut disusun berdasarkan rasa keadilan masyarakat yang dituangkan dalam UU yang salah satu pertimbangannya adalah karena akibat tindak pidana korupsi yang menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.
- Namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan di bawah pidana minimum khusus, dengan pertimbangan Terdakwa Dermawan Ginting telah memenuhi syarat sebagai *Justice Collaborator* sebagaimana diberikan kepada Tripeni Irianto Putro yang perkaranya telah diputus sebelumnya;
- Majelis Hakim tingkat pertama yang menyimpangi ketentuan pidana sebagaimana dalam pasal 12 c Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 hanya mendasarkan pada SEMA No. 4 tahun 2011 justru telah menempatkan Hakim sebagai corong undang-undang, karena penyimpangan penjatuhan pidana tersebut tidak berdasarkan penemuan hukum (*rechtsvinding*), melainkan berdasarkan pada SEMA No. 4 tahun 2011 yang seharusnya dimaknai sesuai ketentuan pasal 12 huruf c Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001;
- Bahwa didalam pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah menguraikan hal-hal yang memberatkan yakni "Terdakwa tidak menjaga kewibawaan korps Hakim Indonesia" seharusnya Majelis Hakim memperhatikan adanya keadaan yang memberatkan tersebut sebagai dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menjatuhkan putusan pidana. Dengan adanya keadaan yang memberatkan, tidak mungkin terdakwa dijatuhi pidana minimum, apalagi dibawah ancaman pidana minimum;

Selanjutnya Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara *a quo* memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berkenan memutuskan:

- 1 Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana ^stsuiat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2015.

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terdakwa pada pokoknya berisi keberatan sebagai berikut:

Bahwa sebelum TERBANDING menyampaikan tanggapan atas Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING, terlebih dahulu **TERBANDING menyatakan walau sebenarnya TERBANDING TIDAK SEPENUHNYA SEPENDAPAT DAN MENERIMA pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 126/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 20 Januari 2016**, namun TERBANDING di depan persidangan telah menyatakan dengan jelas dan tegas menerima putusan Judex Factie *Tingkat Pertama*;

- Bahwa TERBANDING menyatakan secara tegas **menolak seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh PEMBANDING dalam Memori Bandingnya** kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERBANDING.

Adapun Kontra Memori Banding dari TERBANDING adalah sebagai berikut:

TERBANDING TIDAK SEPENUHNYA SEPENDAPAT DENGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM pada PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

- 1 Bahwa walaupun TERDAKWA pada saat Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Januari 2016 menyatakan menerima Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim namun kami tetap akan menguraikan keberatan kami atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan pidana Penjara kepada



TERDAKWA DERMAWAN GINTING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

- 2 Bahwa TERBANDING berpendapat seharusnya Majelis Hakim menyatakan TERDAKWA DERMAWAN GINTING TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan baik dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua.
- 3 Bahwa TERBANDING berpendapat sebenarnya unsur Pasal 12 C Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi TIDAK TERPENUHI atau TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh TERBANDING.

- Terbanding menolak memori banding dari Pembanding (Penuntut Umum KPK) berkaitan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terbanding (Terdakwa Dermawan Ginting);

Untuk selanjutnya TERBANDING (TERDAKWA) mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Menolak Permohonan Banding/Memori Banding dari PEMBANDING (Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Banding/Memori Banding tidak dapat diterima;
- 2 **MENYATAKAN TERDAKWA DERMAWAN GINTING TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN, BAIK DIDALAM DAKWAAN PERTAMA maupun DAKWAAN KEDUA;**



3 Atau jika Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menguatkan Putusan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Negeri Padang Nomor. 126/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 20 Januari 2016.**

ATAU

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala isi memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori banding, setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa, mendalami dengan seksama keterangan para saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat keberatan-keberatan Penuntut Umum yang dituangkan didalam memori bandingnya tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Bahwa keberatan-keberatan Penuntut Umum dapat diterima, mengingat dalam perkara Terdakwa ini sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah tertangkap tangan, sehingga kriteria Terdakwa sebagai Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama tidak dimiliki oleh Terdakwa, lagipula Terdakwa menjadi saksi dalam perkara lain yang sama adalah suatu kewajiban karena kapasitasnya dalam perkara lain adalah saksi. Demikian juga keterangan Terdakwa ketika menjadi saksi tidak memberikan kesaksian yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkap pelaku-pelaku lain yang punya peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak akan menanggapinya, oleh karena apa yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan. Pada awal Kontra Memori Banding yang dibuat Penasihat Hukum Terdakwa sependapat



dan setuju kalau Terdakwa dinyatakan sebagai Justice Collaborator dan sependapat penjatuhan pidana yang dibawah pidana minimum, namun diakhir permohonan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Nomor : 126/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Januari 2016**, memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara aquo yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama adalah telah tepat dan benar serta beralasan hukum dan disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri serta dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya berdasarkan kepastian hukum atas perbuatan pidana yang terbukti yang dilakukan Terdakwa dan berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat dari segi Preventif dan Represif, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu diperberat sebagaimana dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut diatas maka lamanya pidana penjara terhadap terdakwa harus ditambahkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Selain Terdakwa tidak menjaga kewibawaan Korps Hakim, Terdakwa juga sebagai kawal depan utama yang harus lebih dulu menangkai perbuatan seperti ini;
- Perbuatan Terdakwa ibarat pagar makan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal dakwaan yang terbukti mengatur pidana minimal, sehingga tidak ada alasan untuk lari dari ketentuan pidana minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 126/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Januari 2016, yang dimintakan banding haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang berada dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan pasal 242 KUHP;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan peraturan lain yang berhubungan dengan itu.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 126/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DERMAWAN GINTING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Pearl, Imei: 351975042890962 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 0176 2583 9777 02, dan terdapat memory card micro SD 2 GB merk SanDisk.
 - 2 1 (satu) buah handphone Merk: Nokia, Tipe: RM-555, Model: N97-4, Imei: 358315/03/191732/1 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 1113 2580 9762, dan tanpa memory card
 - 3 1 (satu) buah tablet Merk: Samsung, Model: SM-T311, Imei: 357397/05/710829/1 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel tanpa No ICCID, dan tanpa memory card beserta 1 buah charger warna putih Samsung;
 - 4 1 (satu) KTP Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo a.n TRIPENI IRIANTO PUTRO no. 3307090507620006;
 - 5 1 (satu) buah tanda pengenal Mahkamah Agung RI a.n TRIPENI IRIANTO P., SH. MH, Dengan NIP 196207051988031004, Nomor tanda pengenal: 511/TPMA 2013 masa berlaku sampai dengan 13 Juni 2016, tertanggal 13 Juni 2013
 - 6 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a/n TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH, Msi dengan nomor NIP 196207051988031004
 - 7 2 (dua) buah kunci meja kerja di ruang kantor PTUN Medan.
 - 8 1 (satu) buah kartu atm BNI SYARIAH Master Card tanpa nama no.5264 2281 1031 6293.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) buah kartu atm Mandiri Visa tanpa nama no.4097 6621 5237 3083.
- 10 1 (satu) buah kartu atm Paspor BCA a.n TRIPENI IRIANTO PUTRO SH no. 6019 0010 5557 0612.
- 11 1 (satu) buah kartu anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH., Msi. Dengan nomor anggota 7326.
- 12 1 (satu) buah amplop coklat dengan kop amplop Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi 5 lembar uang pecahan @ Sing\$1.000,- dengan total Sing\$5.000,-
- 13 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 100 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD10.000,-.
- 14 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 50 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD5.000,-.
- 15 2 (dua) buah flashdisc:
- a Merk Toshiba sebesar 4 GB warna putih.
 - b Merk SanDisk sebesar 2 GB warna hitam.
- 16 1 (satu) buah buku berjudul “Barack Obama A Gift of Hope” karangan Otto Cornelis Kaligis.
- 17 2 (dua) buah buku berjudul “Antologi Tulisan Ilmu Hukum” Jilid 11, karangan Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.
- 18 3 (tiga) buah buku berjudul “Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia” ditulis oleh Prof. DR. O.C. Kaligis, SH., MH.
- 19 1 (satu) buah buku berjudul “Carut Marut Pemilu Legislatif 2014, Contoh Study Kasus” ditulis oleh Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH., MH.
- 20 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Curve, Imei: 356932046753699 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 1431 3237 6249, dan terdapat memory card.
- 21 Handphone Merk Apple, Type: iPhone, Model: MGAA2SA/A, SN: FK1NV33FG5QT, IMEI: 3544400067159434, MEID: 35444006715943, yang didalamnya terdapat simcard provider Telkomsel dengan ICCID: 8962100065624749201

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Torch, Imei: 35620 1043062805 yang didalamnya terdapat Simcard XL, No ICCID: 8962116113 54240640-5, dan terdapat memory card merk V-Gel Micro SD 2 GB.
- 23 1 (satu) buah kartu kredit Danamon Mastercard no. 5577 9114 4068 6285.
- 24 1 (satu) buah kartu Silver Debit Mandiri visa no. 4097 6624 0851 5081
- 25 1 (satu) buah kartu BRI Card Mastercard no. 5221 8410 9243 8794 a.n DERMAWAN GINTING SH.
- 26 1 (satu) buah kartu Mega Pass Visa no. 4214 0814 1004 5359 a.n RUFINA TARIGAN
- 27 1 (satu) buah kartu atm Bank BRI 6013 0113 8701 0530
- 28 1 (satu) buah kartu atm BCA no. 6019 0025 4525 2852.
- 29 1 (satu) buah kartu Paspor BCA no. 6019 0045 1791 8106.
- 30 1 (satu) buah kartu Silver Debit Mandiri visa no. 4097 6624 9115 1240.
- 31 1 (satu) buah A Card Flazz - BCA no. 0145 0018 0681 9722
- 32 2 (dua) buah kartu anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n DERMAWAN GINTING SH, no anggota 6428.
- 33 1 (satu) buah kartu Pengenal Mahkamah Agung RI no. 3512/TPMA/2009 a.n DERMAWAN GINTING, SH, nomor NIP: 040 069 069, tertanggal 1 Maret 2009.
- 34 3 (tiga) buah flashdisc:
- a Merk iLive-T Series.
 - b Merk Kingston.
 - c Tanpa merk warna abu-abu.
- 35 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, no. 3515183112650015 a.n DERMAWAN GINTING, SH berlaku hingga 31 Desember 2015.
- 36 1 (satu) buah simcard Telkomsel tanpa nomor.
- 37 1 (satu) bungkus bekas kartu Telkomsel Simpati no. 0813-6134 2420.
- 38 1 (satu) buah voice recorder merk Sony dengan no kode: 2660972.
- 39 1 (satu) bundel dokumen Kesimpulan; Dalam Perkara Permohonan Pengujian Kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor: 25/G/2015/PTUN.MDN atas nama pemohon: Drs. AHMAD FUAD LUBIS, MSI terhadap termohon: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates Advocates & Legal Consultants.
- 40 1 (satu) map warna hijau berisi:



- a. 1 (satu) bundel print out berjudul “Tentang Pertimbangan Hukum”.
- b. 1 (satu) bundel print out berjudul “PUTUSAN nomor: 25/G/2015/PTUN-MDN – DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan terdapat catatan Biaya Perkara no.25/G/2015 – Sheilla.
- 41 2 (dua) lembar kertas tulisan tangan berjudul “Tentang Pertimbangan Hukum”.
- 42 1 (satu) buah external hardisk warna hitam merk Seagate Expansion Portable Drive model SRD00F1PN1D6AP1-500, SN: NA43A7B3, kapasitas 500 GB beserta kabel.
- 43 1 (satu) buah laptop warna abu-abu hitam merk Toshiba Satellite L745, SN: 5B366858W yang di dalamnya terdapat hardisc merk HGST, SN: BM0549KP, Model: HTS543232A7A384, Kapasitas 320 GB.
- 44 1 (satu) buah handphone Merk: Samsung GT-I9060, Tipe: Galaxy Grand Neo Duos, Imei: 352700/06/328491/2 dan imei no;352726/06/328491/7 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 0044 2209 3591 dan Simcard XL, No ICCID: 8962116713 38286417-3 dan terdapat memory card 16 GB merk SanDisk.
45. 1 (satu) KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang a.n AMIR FAUZI no.3603280504690011.
46. 1 (satu) buah tanda pengenalan Mahkamah Agung RI a.n AMIR FAUZI SH. Dengan NIP 040 066 818, Nomor tanda pengenalan: PTUN /SEK /001/ VIII/2006 masa berlaku sampai dengan 31 Agustus 2011, tertanggal 31 Agustus 2006.
47. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI no.1380 TPMA/2015 a.n AMIR FAUZI, SH. MH. Dengan NIP: 196 904 05199 3031004 dengan jabatan Hakim PTUN Medan, tertanggal 07 Mei 2015 dan berlaku sampai dengan 7 Mei 2018.
48. 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Acer, Model: Aspire 4750 Series, Model No. MS2316, SN: LXRC80C02711508DFD2000.
49. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI PEMOHON yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: B-473/N.2.5/Fd./03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal: Permintaan Keterangan (BUKTI P-1).
 - b. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari C.H ENDRA GINTING, SH tanggal 24 Januari 2012 (BUKTI P-2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 25 Januari 2012 (BUKTI P-3).
- d. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 26 Januari 2012 (BUKTI P-4).
- e. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari MIMIN INDRAYATI, S.Sos tanggal 1 Februari 2012 (BUKTI P-5).
- f. 5 (lima) lembar copy print out Artikel internet tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan RI dan Kemendagri (BUKTI P-6).
- g. 7 (tujuh) lembar copy Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: 01/KB/I-VIII.3/07/2007, Nomor: KEP-071/A/JA/07/2007 Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana (BUKTI P-7).
- h. 1 (satu) lembar copy Lampiran IV Surat Nomor: 068 /KMA /HK.01/ VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012 Perihal: Permohonan Penerbitan Fatwa MA Tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BUKTI P-8).
- i. 1 (satu) bundel copy Dokumen Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Negara Pemerintah, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Politik, Seminar Nasional H.U.T Ikahi Ke – 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 maret 2015 (BUKTI P-9).
- j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang administrasi Pemerintahan), Dr. D. Andhi Nirwanto, Wakil Jaksa Agung RI, Seminar Nasional H.U.T Ikahi Ke – 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 maret 2015 (BUKTI P-10).
- k. 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2009 Di Medan, Nomor: 104/S/XVIII.MDN/05/2010 Tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P-11).
- l. 7 (tujuh) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010, Nomor: 198. A/S /XVIII. MDN/05/2011 Tanggal: 27 Mei 2011 (BUKTI P-12).



- m. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor: 43.B/LHP/XVIII.MDN/06/2012 Tanggal: 28 Juni 2012 (BUKTI P-13).
- n. 5 (lima) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor: 87. A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 Tanggal: 13 Mei 2013 (BUKTI P-14).
- o. 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor: 12.A/LHP/XVIII.MDN/05/2014 Tanggal: 20 Mei 2014 (BUKTI P-15).
- p. 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/1612/2014 Lampiran : 1.- Tanggal 2 Mei 2014 (BUKTI P-16).
50. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT KUASA yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Substitusi R. ANDIKA YOEDISTIRA, S.H., M.H., tanggal 24 Juni 2015.
 - b. 3 (tiga) lembar asli Daftar Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara Perdata Nomor: 05/G/2015/PTUN.MDN.
 - c. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Sdr. R. ANDIKA YOEDISTIRA, SH. Tanggal 11 Juni 2002.
 - d. 1 (satu) bundel surat kuasa khusus nomor : SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 2015, yang terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.
 - 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.
 - 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.
 - e. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK- 04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015, terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bundel asli Surat Substitusi Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.

f. 1 (satu) bundel asli dan 3 (tiga) bundel copy Surat Kuasa Nomor: 132/SK.IV/2015 Tanggal 28 April 2015 dan 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, S.H.

51. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru Nomor: 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:

a. 4 (empat) lembar Surat – Panggilan Ke II No. 25 / G / 2015 PTUN – MDN Tanggal 18 Mei 2015 dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT PANGGILAN.

b. 1 (satu) bundel tulisan tangan “*SprinLid =>”.

c. 1 (satu) bundel copy Dokumen Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya.

d. 1 (satu) bundel copy Kesimpulan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.

e. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

f. 1 (satu) bundel copy Dokumen Upaya Administratif Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Sudarsono, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya.

g. 1 (satu) bundel copy tanggapan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.
- i. 1 (satu) bundel copy Daftar Tambahan Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.
- j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Diskresi Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Tatiek Sri Djatminati, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya.
- k. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Santer Sitorus, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015.
- l. 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Pengadilan Atas Penerimaan Permohonan Untuk Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.
52. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan Berkas Perkara Gugatan No. 25/G/2015/PTUN-MDN tanggal 05 Mei 2015 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel Draf Tentang Pertimbangan Hukum (tulisan tangan).
 - b. 1 (satu) bundel Surat Asli Tanggal 5 Mei 2015 Perihal: Permohonan Pengujian Kewenangan.
 - c. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP C yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Perkara No. 25/G/2015/PTUN-MDN".
 - b) 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang Tgl. 9/6-15 Perkara No. 25/G/2015/PTUN-MDN".



- c) 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan “No. 25/G/2015/PTUN-MDN
Kamis, 11 Juni 2015”.
53. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP B yang terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar copy Riwayat Pendidikan / Pekerjaan a.n. Dr. Lintang Oloan Siahaan, SH., MH.
 - 6 (enam) lembar copy Daftar Riwayat Hidup a.n. Dr. H. Darwinsyah Minin, S.H., M.H.
 - 5 (lima) lembar copy Curriculum Vitae a.n. Muhammad Rullyandi, SH., HM.
 - 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor. 56 /Ket/ WD.II / FH/01/2015 Sdr. Muhammad Rullyyandi, SH., MH. Jabatan: Tenaga Pengajar Luar Biasa.
 - 6 (enam) lembar copy Curriculum Vitae a.n. Muhammad Rullyandi, SH., HM.
54. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI TERMOHON yang terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar Draf Bukti Surat Penggugat Dalam Perkara Nomor: 39/ G/2015/PTUN-MDN antara PT. Sinar Agung Jaya Lestari Diwakili Oleh: Flinery Linsangan Sugiyono Sebagai Penggugat Melawan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Pangkalan Dodek Sebagai Tergugat.
 - 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-31/ N.2/Fd.1/03/2015 (T.1).
 - 1 (satu) bundel copy Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 Tanggal: 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (T.2).
 - 2 (dua) lembar copy Surat Nomor: B-384/N.2.1/Fd.1/03/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.3).
 - 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: B-385/N.2.1/Fd.1/03/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Perihal: Permintaan Keterangan (T.4).
 - 3 (tiga) lembar copy KUHP dan KUHAP Dilengkapi Dengan Yurisprudendi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad R. Soenarto Soerodibroto, S.H Edisi Kelima. (T.5).



- g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B-470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6).
- h. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7).
55. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP A yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2009 Di Medan, Nomor: 104 B/S/XVIII.MDN/05/2010 Tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P-11).
 - b. 1 (satu) bundel copy Kesimpulan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.
 - c. 1 (satu) bundel asli Kesimpulan Dalam Perkara Permohonan Pengujian Kewenangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Atas Nama Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
 - d. 1 (satu) bundel Draf Surat No. 758/OCK.V/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Perihal: Akta Bukti Pemohon Pengujian Kewenangan.
 - e. 2 (dua) lembar copy legalisir cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.
 - f. 1 (satu) bundel asli Resume-Gugatan No. 25/G/215/PTUN-MDN beserta lampirannya.
56. 1 (satu) bundel dokumen asli dengan kalimat awal “ Akan kita beri kesempatan kepada termohon terlebih dahulu untuk bertanya kepada ahli.
57. 2 (dua) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan “No. 25/G/2015/PTUN-MDN (1)”.
58. 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan “Saksi Termohon”.
59. 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan “Saksi Penggugat/Pemohon”.
60. 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul menggunakan Tulisan Tangan “Saksi Ahli Dari Pemohon (2)”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul menggunakan Tulisan Tangan “Saksi Ahli Dari Pemohon (1)”.
62. 1 (satu) lembar printout Tanggal Persidangan Perkara No. 25/G/2015/PTUN-MDN dalam map warna hijau dengan tulisan Permohonan Pemohon.
63. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna kuning dengan tulisan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, No. Agenda: 428, Tgl. Masuk: 01 Juli 2015 beserta lampirannya.
 - b. 1 (satu) bundel asli Daftar Tambahan Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Sebagai Pemohon Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.
 - c. 1 (satu) bundel asli tanggapan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat No. 770/OCK.V/2015 Tanggal 22 Mei 2015 Perihal: Akta Bukti Tambahan Pemohon Pengujian Kewenangan.
64. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan Berita Acara No. 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan “Sidang tgl 29/6-15”.
 - b. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan “Sidang tgl 25/6-15”.
 - c. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan “Termohon”.
65. 1 (satu) buah hand phone warna hitam merk Sony, Model: D2403, Imei: 355101063719386, SN: ZH800670B2 yang didalamnya terdapat sim card dengan Provider Telkomsel dengan Kode: 6210 0075 3254 0720 04, tanpa memory card.
66. 1 (satu) buah Lifebook warna hitam merk Fujitsu, Model SH561, SN: R1501615 yang didalamnya terdapat hardisk merk Seagate, SN: 5WX3CNCR, Model: ST9640320AS, kapasitas 64GB.
67. 1 (satu) bundel tulisan tangan berjudul “Perkara No.25/6/2015/PTUN-MDN – BERITA ACARA SIDANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bundel dokumen asli dengan perihal: PERMOHONAN PENGUJIAN KEWENANGAN tertanggal 5 Mei 2015.
69. 1 (satu) buah handphone warna putih Merk: Apple, Tipe: Iphone, Imei: 354441067168003, No. ICCID: 8962119212418884377, Model MGA2PA/A.
70. 1 (satu) buah hp warna hitam merk Samsung, Type: Galaxy Note 3, Model: SM-N900, IMEI: 358916050746671, SN: RFID94VHJKX yang di dalamnya terdapat Memory Card Micro SD merk SanDisk, kapasitas 2 GB dan simcard XL.
71. 1 (satu) buah flashdisc warna hijau muda merk Toshiba, kapasitas 8 GB dengan kode: N723 D32210.
72. 1 (satu) buah kartu atm Paspor BCA no. 6019 0016 8898 2556.
73. 1 (satu) buah kartu BNI Mastercard Debit no. 5371 7618 1014 0993.
74. 1 (satu) buah kartu BNI Style Titanium Mastercard a.n M. YAGARI BHASTARA no.5241 2509 1001 2623.
75. 1 (satu) lembar boarding pass Garuda Indonesia tanggal 9 Juli 2015 rute Jakarta-Medan a.n GUNTUR/MYAGARIBHAS flight GA180.
76. 1 (satu) buah KTP Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar a.n MUHAMMAD YAGARI BHASTARA GUNTUR, no KTP: 737 1131 80585 0011.
77. 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta a.n MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, no: 3175081805850011.
78. 1 (satu) lembar tanda terima warna kuning dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 631/51.537/US.XII/2014, tertanggal 5 Desember 2014, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,- dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO.
79. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 261/51.218/US.V/2015, tertanggal 27 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp20.000.000,- dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO.
80. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 257/51.214/US.V/2015, tertanggal 26 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,- dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 301/51.245/US.VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015, sudah terima uang sebesar Rp60.000.000,- dari Ibu EVI.
82. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari OC Kaligis & Associates Surat no. 1006/OCK.VII/2015, tanggal surat 1 Juli 2015, Kepada Bapak Gatot Pujo Nugroho Gubernur Sumatera Utara.
83. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR S.H pada Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2014.
84. 1 (satu) buah buku yang berjudul Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan Pasca UU No 30 tahun 2014) yang ditulis Prof Dr OC Kaligis, SH MH.
85. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim diluar pasal 77 – pasal 83 KUHAP) yang ditulis oleh Prof Dr OC Kaligis, SH MH.
86. 1 (satu) buah buku yang berjudul Barack Obama A Gift Of Hope Karangan Prof Dr OC Kaligis, SH MH.
87. 1 (satu) buah buku mutasi besar yang di dalamnya terdapat tulisan sebagai berikut : No. 8, Nomor Perkara 25/G/2015/PTUN.MDN, Penggugat Drs. Ahmad Fuad Lubis, Ms, Tergugat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Majelis Hakim/ Panitera Pengganti: Tripeni Irianto Putro, SH, Msi, Dermawan Ginting, SH, MH , Amir Fauz SH, MH.
88. 1 (satu) map warna hijau bertuliskan Berita Acara No. 25/G/2015/PTUN-MDN yang berisi Berita Acara Reg No. 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs Ahmad Fuad Lubis, Msi sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai termohon.
89. 1 (satu) buah map warna hijau dengan lambang PTUN Medan, Nomor : No. 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs Ahmad Fuad Lubis, Msi sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai termohon.
90. 1 (satu) buah buku agenda warna biru tua bertuliskan Agenda Sidang Hakim Pengadilan TUN 2015.
91. 1 (satu) buah buku Agenda warna pink motif kotak bertuliskan College House Campus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) buah buku dengan judul Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
93. 1 (satu) buah amplop besar warna putih dengan lambang Garuda bertuliskan petikan keputusan Presiden RI Nomor 71/K TAHUN 2014 ditujukan kepada Tripeni Irianto Putro Ketua Pengadilan TUN Medan.
94. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang senilai total USD 5000 (Lima ribudolar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD 100 (Seratus dolar Amerika).
95. 1 (satu) buah buku yang berjudul Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan tulisan Dr. Ni'matul Huda SH, M. Hum dan R. Nazriyah SH, MH yang didalamnya terdapat amplop warna putih merk Jaya berisi uang senilai total USD 5000 (Lima ribudolar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD 100 (Seratus dolar Amerika).
96. 1 (satu) buah buku warna merah jambu bertuliskan perkara masuk tahu 2015 'PANSEK'.
97. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D-518-Kp.04.02-Th.1989 tanggal 22 Agustus 1989, yang menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama TRI PENI IRIANTO PUTRO, SH menjadi Pegawai Negeri Sipil.
98. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan Menjalankan Tugas Nomor : W1-TUN/833/Kp-04.6/IX/2012 tanggal 4 September 2012 yang menyatakan bahwa Tripeni Irianto Putro, SH Msi telah melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengadilan TUN Medan.
99. 1 (satu) bundel asli salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 35/KMA/SK/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengangkatan dan Penempatan Hakim Lingkungan Hidup.
100. 1 (satu) bundel asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 71/K/TAHUN 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan Golongan atas nama Tripeni Arianto Putro.
101. 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bpk HM PRASETYO Jaksa Agung Republik Indonesia No. 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal permohonan dan klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh Prof. DR. OC KALIGIS, SH MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102. 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bpk Muhammad Yusni SH MH Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal permohonan dan klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh Prof. DR. OC KALIGIS, SH MH.
103. 1 (satu) buah amplop warna putih tercetak OTTO CORNELIS KALIGIS dan Associates Advocat dan Legal Consultan Jalan Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160 Indonesia, yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar asli surat yang ditujukan kepada Yth Drs Ahmad Fuad Lubis, Msi No 759/OCK.V/2015 tertanggal 19 Mei 2013 hal Laporan sidang ke-1 yang ditandatangani oleh Prof Dr Oc Kaligis SH MH.
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai tempel Rp 6000,- dengan kop Otto Cornellis Kaligis No /249/51.208/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bpk Gatot Pujo Nugroho, banyaknya uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bp. M. YAGARI BHASTARI SH dan Ibu Yurinda Achyuni SH LLM) ke Medan tgl 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Prof Dr Oc Kaligis SH MH tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015.
 - c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai tempel Rp 6000,- dengan kop Otto Cornellis Kaligis No 250/51.209/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bpk Gatot Pujo Nugroho, banyaknya uang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bp. Yulius Irawansyah SH, Bp. M. YAGARI BHASTARI SH dan Ibu Yurinda Achyuni SH LLM) ke Medan tgl 21 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Prof Dr Oc Kaligis SH MH tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015.
 - d. 1 (satu) lembar asli ber kop Garuda Indonesia tertulis diantaranya booking beeing ticket by sales counter Garuda Indonesia HAFIS TOUR dan TRAVEL, Booking Code : 8RTMXP book date : 2015-01-11, Pasenger detail : 1. RICO PANDEIROT/MR. 2. YULIUS IRAWANSYA/MR. 3 YAGARI BHASTARA/MR. Total Payment 6.357. 600 IDR.
104. Uang senilai total USD 700 (Tujuh ratus dolar Amerika) yang terdiri dari 7 lembar uang pecahan USD 100 (Seratus dolar Amerika).
105. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim di luar pasal 77- Pasal 83 KUHAP) karangan Prof. DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.



106. 3 (tiga) lembar fotocopy draft Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Tahun Anggaran 2014.
107. 2 (dua) lembar print out Daftar Bansos Mesjid Yang Ada Dalam Buku APBD 2014.
108. 2 (dua) lembar fotocopy Penetapan No.01/Akta Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali atas nama RIDWAN PANJAITAN, S.Psi sebagai Terdakwa yang memberikan kuasa kepada Prof. Dr. O.C KALIGIS, SH. MH.
109. 1 (satu) lembar print out Resume Perkara Pemprov Sumut.
110. 1 (satu) buku berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim diluar pasal 77 – Pasal 83 KUHAP) karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH.
111. 1 (satu) buku berjudul Carut Marut Pemilu Legislatif 2014 Contoh Study Kasus, karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH.
112. 1 (satu) buku berjudul Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam tugas kedinasan (Pasca UU No .30 Tahun 2014), karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH.
113. 1 (satu) buku berjudul KONTRAK BISNIS Teori dan Praktik Jilid 2 karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH.
114. 1 (satu) lembar foto Prof. Dr. OC KALIGIS, SH., MH bersama Gatot Pujo Nugroho dan Yurinda Tri Achyuni. -
115. 1 (satu) bundel copy dokumen yang bertuliskan RESUME PERKARA PEMPROV SUMUT yang berisi :
 - a. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Gubernur Sumut, Nomor B-170/F/2/Fd.1/02/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal Bantuan Permintaan Keterangan (Pidsus 53).
 - 1 (satu) lembar copy dokumen Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Sekda Propinsi Sumut, Nomor B-768/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan.
 - 1 (satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Biro Keuangan Daerah Propinsi Sumut, Nomor B-767/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan.

- 1 (satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Gubernur Propinsi Sumut, Nomor B-973/F2/Fd.1/02/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Bantuan Permintaan Keterangan ke II.
- 1 (satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Sekda Propinsi Sumut, Nomor B-843/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan ke II.
- 1 (satu) lembar copy dokumen surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut Kepada Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahar Umum Daerah (BUD) Propinsi Sumut, Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan.
- 1 (satu) lembar copy dokumen surat Plh Sekda Propinsi Sumut kepada 1. Mahmud Segala (bendahara Umum Daerah Pempropu Periode 2012), 2. Baharuddin (Bendahara Umum Daerah Pempropu Periode Juni 2012-2014) 3. Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahar Umum Daerah (BUD) Propinsi Sumut Periode 2014, Nomor 180/2542/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Bantuan Pemanggilan.
- b. 1 (satu) bundel copy dokumen berisi dokumen sbb :
 - 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 24 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan C.H Endra Ginting,SH.
 - 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 25 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan M. Juli Samsir Siregar, S.Sos.
 - 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 26 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan M. Juli Samsir Siregar, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 1 Februari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan Mimin Indrayati, S.Sos.
- c. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 481/OCK.III/2015, tanggal 27 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk Maruli Hutagalung, SH, MH (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.
- d. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 48.../OCK.III/2015, tanggal Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk Tjahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri RI) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.
- e. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 482/OCK.III/2015, tanggal 30 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk Muhammad Yusni, SH, MH Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.
- f. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 489/OCK.III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.
- g. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 490/OCK.III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk HM Prasetyo (Jaksa Agung RI) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.
- h. 4 (empat) lembar copy Surat dari Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H.,M.H kepada Bapak H. M Prasetyo Jaksa Agung RI No 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum.
- i. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 513/OCK.IV/2015, tanggal 6 April 2015 yang ditujukan kepada Bpk Jaksa Agung Muda Bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawasan Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum tanpa tanda tangan.

- j. 1 (satu) lembar copy surat dari Mahkamah Agung RI Nomor: 068/KMA/HK.01VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 Perihal : Permohonan Penerbitan Fatwa MA tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/ Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang ditujukan kepada Ketua BPK.
 - k. 1 (satu) bundel copy dokumen “Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kejaksaan Agung RI” Nomor : 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan Nomor : KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK.
116. 1 (satu) bundel surat hasil print out dari Komputer MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dengan Nomor: 2318/OCK.XII/2014 yang ditujukan kepada Bpk Gatot Pujo Nugroho Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 1 Desember 2014 yang di dalamnya berisi Nomor urut 6 perihal Bantuan Sosial TA 2013, Nomor urut 7 (tujuh) perihal Dana Bagi Hasil, Nomor urut 8 perihal Bantuan Keuangan Provnsi, Nomor urut 9 perihal Bantuan Operasional Sekolah.
117. 3 (tiga) buah kartu nama, atas nama : Yurinda Tri Achyuni, M. Yagari Bhastara Guntur, Yulius Irwansyah, masing-masing dari Kantor OCK & Associates Advocates & Legal Consultants.
118. 1 (satu) buah map warna biru muda yang berlogo “OCK & Associates Advocates & Legal Consultants” yang di dalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) bundel copy dokumen yang bertuliskan Ahli Dr. Lintong Siahaan, SH, MH yang menerangkan dengan berjanji pada persidangan tanggal 9 Juni 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
 - b. 2 (dua) lembar copy dokumen yang pada point 1 (satu) bertuliskan Apakah Ahli mengetahui adanya UU NO. 30 TAHUN 2014? Tentang apa?
 - c. 4 (empat) rangkap copy dokumen yang berisi daftar pertanyaan-pertanyaan.
119. 1 (satu) lembar copy buku register yang bertuliskan surat kuasa tanggal 28 April 2015 atas nama Achmad Fuad Lubis, PH TUN Medan, 132, Gary yang dilegalisir oleh Afrian Bondjol.
120. 2 (dua) lembar print out foto yang masing-masing lembar terdapat 2 (dua) foto :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. HAM – 1356 size : 15,4 MB, created 21 Juni 2013, 9:56 : 08, midfied : 19 Juni 2013, 12:47 : 22.
 - b. HAM – 1357, 7,75 MB, created : 21 Juni 2013, 9:56:09, Modified: 20 Juni 2013, 10:29:11.
 - c. HAM – 1350, size 7,95MB, created 21 Juni 2013, 9:56:06, Modified 20 Juni 2013, 10:10:22.
 - d. HAM – 1355, size 6,36MB, created 21 Juni 2013, 9:56:08, Modified 20 Juni 2013, 10:22:08.
- 121.
- a. 1 (satu) lembar Foto copy warna KTP Provinsi DKI Jakarta, berlaminating atas nama O.C. KALIGIS, SH dengan NIK : 3171011906420005.
 - b. 1 (satu) lembar Foto copy warna Kartu Anggota PERADI dengan nomor anggota 78.10032 berlaku s/d 31-12-2015 atas nama O.C. KALIGIS.
 - c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).
- 122.
- a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibu Evie USD 900 Rp. (USD 40). --
 - b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGIS MR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal 01 Juli dengan No. Seat 8H.
 - c. 1 (satu) lembar asli kartu nama dari OCK & Associates Advocates & Legal Consultants atas nama Aryani Novitasari, SE.
123. 1 (satu) lembar copy Payroll Gaji Karyawan OCK Bulan Juni & THR melalui BCA tertulis tanggal 30/6.2015, Nomor urut 34. Moh Yagari Bastara.
124. 1 (satu) buah Handphone dengan merk :VIVO, type: Y15, Imei 1 :867590029019173, Imei 2: 867590029019165, SN: EX15OFB06A04, warna putih, di dalamnya terdapat Sim Card Telkomsel, No ICCID: 0520 0000 1011 4946 dan Nucri SD Winova 8 GB dengan No. HP 081375344283.
125. 1 (satu) buah HandPhone Merek VIVO warna putih dengan sarung handphone warna hitam dengan nomor telepon 085721711285, IMEI 1: 866403023065237 yang digunakan oleh RAMDAN TAUFIK SODIKIN.
126. Kartu Keluarga Nomor : 3217082208140009, dengan Nama Kepala Keluarga : G Pujo N, Alamat : Jl. Rambut Setra No. 16, Kota Baru Parahyangan,



RT:006/RW: 011, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat.

127. Sobekan Surat Nikah, antara seorang laki-laki yang bernama GATOT PUJO NUGROHO, Tempat tanggal lahir : Megelang, 11-06-1962, dengan seorang perempuan yang bernama EVY SUSANTI Binti HAIKIN RACHMAT.
128. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian antara GATOT PUJO NUGROHO dengan OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS tentang penunjukkan selaku Penasehat Hukum Tetap no.042/OCK.K.VII/2013 tanggal 23 September 2013.
129. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terkait Bantuan Sosial .
130. 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor : 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak H.M.Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia).
131. 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor : 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Husni (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara).
132. 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Mobil Nomor K-05913773, dengan Plat Nomor Mobil BK 14 GE, Merek Toyota, Type Vellfire ZG 2.4 A/T, Warna Hitam.
133. 1 (satu) bundel copy dokumen yang tertuliskan “daftar penanganan perkara tahun 2014”.
134. 1 (satu) lembar copy resume perkara pemprov Sumut.
135. 1 (satu) Bundel copy dokumen surat Bantuan Permintaan Keterangan dari kejaksaan kepada Pemprov Sumut
136. 1 (satu) Bundel copy dokumen Tanda terima data/dokumen/benda dari yang menyerahkan CH HENDRA GINTING, SH dan yang menerima Jaksa Penyelidik MURNANADA UTAMA, SH
137. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 481/OCK.III/2015 tanggal 27 Maret 2015 Perihal Permohonan Informasi dan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Maruli Hutagalung SH., M.H
138. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 483/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Tjahyo Kumolo



139. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 482/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Yusni, S.H., M.H
140. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 489/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia
141. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 490/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak HM Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia
142. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak HM Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia
143. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 513/OCK.IV/2015 tanggal 6 April 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
144. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen yang bertuliskan "LAMPIRAN"
145. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen yang bertuliskan "Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan"
146. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen yang bertuliskan "Arah Pemberantasan Korupsi ke depan"
147. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Permohonan penerbitan fatwa MA tentang kewenangan perhitungan kerugian negara/daerah oleh badan pemeriksa keuangan nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 dari ketua MA kepada Ketua BPK
148. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Kesepakatan Bersama BPK dan Kejaksaan RI Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007, nomor Kep : KEP-071/A/JA/07/2007 tentang tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana.
149. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Surat Nomor K/263/VI/2014/Ditreskrimsus Tanggal 12 Juni 2014 perihal Pemberitahuan penghentian penyidikan perkara atas nama Tersangka MUHAMMAD ILYAS, S.Sos., M.Si.
150. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang dibagian depan tertulis "Data Kepegawaian an: 1). Amir Fauzi, SH. 2). Dermawan Ginting, SH. 3). Syamsir Yusfan. Yang bertanda tangan Kasub.bag Kepegawaian Ramaida Silalahi. Yang didalamnya berisi dokumen berupa:



A. Data Kepegawaian an. AMIR FAUZI yang terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar asli beserta lampirannya : Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Selatan Nomor : W.5 189-KP.04.02 Th 1994, tanggal 15 Agustus 1994 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. AMIR FAUZI.
2. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir beserta lampirannya : Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : D.510.KP.04.10 Th.2002 tanggal 6 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara an. AMIR FAUZI, SH.
3. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta lampirannya, Nomor : 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan jabatan Baru beserta Tunjangan Jabatan an. AMIR FAUZI, SH, MH. NIP : 040066818.

B. Data Kepegawaian an. DERMAWAN GINTING yang terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar asli Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI Kantor Wilayah Bali beserta lampirannya, Nomor : W16-28-KP.04.02.TH.1995 tanggal 31 Maret 1995 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. DERMAWAN GINTING.
2. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir beserta lampirannya “Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal 20 Oktober 20113 Pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari an. DERMAWAN GINTING, SH. NIP : 040069069.

C. Data Kepegawaian an. SYAMSIR YUSFAN yang terdiri dari :

1. 2 (dua) lembar fotocopy “Petikan Keputusan Kepala Wilayah Departemen Kehadikan Propinsi Sumatera Utara Nomor : W2.20923.KP.04.Thn 1983 tanggal 21 Oktober 1983 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. SYAMSIR YUSFAN.
2. 3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 09/SK/DIRJEN-X/D1/PP/02/2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang



Pengangkatan Jabatan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu an. SYAMSIR YUSFAN, SH. NIP:040039212.

3. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir “Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan militer dan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pengangkatan Jabatan sebagai Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

151. 1 (satu) amplop coklat yang dibagian depan bertuliskan “Data Keuangan (gaji dan Renumerasi bulan Jan ’15 s/d Juli ’15) an. 1). Tripeni Irianto Putro. 2). Dermawan Ginting. 3). Amir Fauzi. 4). Syamsir Yusfan. Yang ditandatangani Mary I.N. Kasub.bag. KU, yang didalamnya berisi dokumen berupa :

- a. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji nduk Pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.
- b. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji nduk Pembayaran Gaji Induk bulan Februari 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.
- c. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji nduk Pembayaran Gaji Induk bulan Maret 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.

- d. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji nduk Pembayaran Gaji Induk bulan April 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.
- e. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji nduk Pembayaran Gaji Induk bulan Mei 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.
- f. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji nduk Pembayaran Gaji Induk bulan Juni 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.
- g. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji nduk Pembayaran Gaji Induk bulan Juli 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir “Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Klas 1A Bulan Januari s/ d Juni 2015, nomor urut 1 an. Syamsir Yusfan.
152. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas No. 4672 ter tanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Pemb honorarium 2 orang ahli u/ memberikan keterangan di PTUN.
153. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas No. 4671 ter tanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 60.000.000,- untuk Pemb uang saku Prof. Dr. O.C. Kaligis dan GERY menghadiri sidang di PTUN tanggal 9/6/2015 beserta 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 289/51.234/US.VI.2015.
154. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas No. 5328 ter tanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk uang saku Prof. Dr. O.C. Kaligis ke Medan tanggal 2/7 2015 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 334/51.274/US.VII.2015.
155. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas No. 5330 ter tanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 399.600.000,- untuk deposit/ cicilan retainer fee Pak GATOT PUJO USD 30.000 kurs Rp. 13.320,- beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 335/51.275/RF.VII.2015.
156. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas No. 5552 ter tanggal 7.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 33.000.000,- untuk deposit biaya administrasi untuk ambil salinan putusan PTUN Medan USD 2.500,- kurs Rp. 13.300,- beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 345/51.280/Adm.VII.2015.
157. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Tanpa Nomor ter tanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 325.000.000,- untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO.
158. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 3746 ter tanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SGD 55.000 senilai Rp. 538.615.000,- untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO.

159. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4346 ter tanggal 28/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk cicilan retainer fee GATOT PUDJO.
160. 1 (satu) lembar asli salinan Pengeluaran Kas No. 5329 ter tanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 50.000.000,- keperluan pengambilan uang saku sidang PTUN Medan.
161. 1 (satu) lembar asli salinan Pengeluaran Kas No. 5331 ter tanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah USD. 20.000, keperluan pengambilan tunai kurs Rp. 13.320.
162. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung model "SM-C111" dengan IMEI : 354598/06/010041/4 S/N : CF1F800DG6A warna putih beserta baterainya tanpa simcard.
163. 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry 9790 Model REC710W dengan IMEI : 354730054344985 PIN : 2AF97033 warna hitam beserta baterainya tanpa simcard dan tanpa penutup belakang.
164. 1 (satu) buah simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "621005623210141404".
165. 1 (satu) buah micro simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "6210027032920440".
166. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Velvire ZG 2.4 A/T (2.362 CC) Model Minibus Tahun Pembuatan 2013 Isi Silinder 2362, dengan Nomor Polisi BK 14 GE, No Rangka : ANH20-8299086, No. Mesin : 2AZ-G256793, Warna Hitam Tahun Registrasi 2013, Nomor BPKB : L00036706, Atas Nama : EVI SUSANTY, ALAMAT : DUSUN V KEL. LIMAU MANIS KEC. TANJUNG MORAWA D/S beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kuncinya.
167. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau model RM-1011 dengan IMEI-1 : 353672/06/020064/8 dan IMEI-2 : 353672/06/020065/5, yang didalamnya terdapat sim card XL dengan Nomor ICCID : 896211910166157700-4 tanpa memory card.
168. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Z10 PIN: 24E626DD, IMEI: 354010053823846 dengan SimCard Telkomsel tanpa memory card.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 3 (tiga) lembar prin out dokumen Rincian Perjalanan OC KALIGIS Team yang ditandatangani PENTA RIRIS LUBIS tertanggal 30 Juli 2015.
170. 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an. JEFRY HAMONANGAN dengan nomor rekening 137-00-0122207-0 periode 1 Mei 2015 sampai dengan 30 Juli 2015 cabang KCP Medan Ahmad Yani nomor katu 4617005117684239.
171. 5 (lima) lembar print out Enhanced Passenger Manifest dengan nomor flight : IW 7012 Date : 05 Juli 2015 untuk penerbangan dari Bandara Kuala Namu Medan ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta.
172. 3 (tiga) lembar print PNR (Print Number Record) yang diantaranya bertuliskan BMBTXP 2015/07/05 IW 7012 2015/07/04 2312 5 GWB 034 JKT 002 000 JKT 102.
173. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 28-04-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 29-04-2015, dengan nomor kamar yang dipesan kamar nomor 2001, 2033, jenis kamar Excutive Deluxe (ENK), dengan konfirmasi 3959468, dengan tanda tangan pemesan tanpa nama.
174. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2001, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,- nett, Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 11.23.
175. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2033, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,- nett, Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 12.05.
176. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. MUSTAFA, SE dengan no NIK 1271201308730005 berlaku hingga 13-08-2017.
177. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 01-07-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 02-07-2015, dengan nomor kamar yang dipesan kamar nomor 2906,2921,2927, (JNK) dengan konfirmasi 4252713, dengan tanda tangan pemesan MUSTAFA (081375344283).
178. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2921, type Junor Suit, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002002 Indonesia, Room rate IDR 3.750.000,- nett, Arrival 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 02 Juli 2015 time 14.34.

179. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2906, type Deluxe, Name Mr Mustafa, Mustafa Address Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,- nett, Arrival 01 Juli 2015 time 21.07, Departure 02 Juli 2015 time 13.20.

180. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2906 tanggal 02-07-2015 jam 03:31 AM dengan bill yang harus dibayar lunas Rp. 300.080,-

181. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2927, type Deluxe, Name Mr Mustafa, Mustafa Address Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,- nett, Arrival 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 02 Juli 2015 time 13.21.

182. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2927 tanggal 02-07-2015 jam 01:31 AM dengan bill yang harus dibayar lunas Rp. 469.480,-

183. 1 (satu) keping CD-R, Merk: Verbatim, warna: Silver, Kapasitas: 700 MG, S/N: C3131RE03214235LH dengan tulisan CCTV JW MARRIOTT MEDAN yang berisi rekaman CCTV dengan nama file :

1. Nama file: 003_150702002043.dav, MD5 HASH: 367 5EE 3FE 20A 39284385BF5241453, LOKASI: Lobby Depan Cam 3, MENIT: 12:20:43 s/d 12:21:20.

2. Nama file: 005_150702002043.dav, MD5 HASH: 9B47 C9E 5F 3815EBFC9D1C7BAC1250390, LOKASI: Lobby Depan Cam 5, MENIT: 12:20:43 s/d 12:21:20.

3. Nama file: 007_150702002118.dav, MD5 HASH: D 19CB A868 FE8C576C05F3E178FBA9251, LOKASI: COR HPL – Cam 7, MENIT: 12:21:18 s/d 12:21:38.

4. Archive_20150702_002300.600, MD5 HASH: F95 FCC9 2CC9E 8AB4E3359692369052FC, LOKASI: Level 28 Cor D, MENIT: 12:23:00 s/d 12:31:00.

184. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA192 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OTTO CORNELI dan BASTARA / Y. dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 April 2015 jam boarding 16.50 WIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama BASTARA / MYAGARI MR. dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 April 2015 jam boarding 13.45 WIB.
186. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / MR dan YAGARI / BHASTARA dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.
187. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 05 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB.
188. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / M BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 18 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.
189. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / ACHYUNI MRS dan M YAGARI / BHASTARA G MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 18 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB.
190. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / M BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.
191. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / ACHYUNI MRS dan YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB.
192. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YAGARI / BHASTARA MR dan ANIS / RIFAI MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.

193. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS / RIFAI MR dan M YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB.
194. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.
195. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB.
196. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARAM MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.
197. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARAM MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB.
198. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 11 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.
199. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama



YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 11 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB.

200. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.
201. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB.
202. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.
203. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 13.45 WIB.
204. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS /RIFAI MR dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 Juni 2015 jam boarding 13.45 WIB.
205. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA196 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / TRIACHYUNI MRS, OC / KALIGIS MR dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 01 Juli 2015 jam boarding 19.25 WIB.
206. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA187 yang terdapat penumpang atas nama OC / KALIGIS MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 02 Juli 2015 jam boarding 12.00 WIB.

207. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 02 Juli 2015 jam boarding 15.45 WIB.
208. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR, OC / KALIGIS MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 Juli 2015 jam boarding 05.15 WIB.
209. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS RIFAI, dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 07 Juli 2015 jam boarding 13.45 WIB.
210. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juli 2015 jam boarding 05.15 WIB.
211. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA186 yang terdapat penumpang atas nama AFRIAN / BONDJOL MR dan VINCENCIUS / TOBING MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 13 Juli 2015 jam boarding 10.30 WIB.
212. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Samsung, Tipe: GT-E1205Y, Imei: 356755064486219, warna hitam dan didalamnya terdapat Sim card Telkomsel-
213. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan nomor MAPA25PH290835117 yang berisikan antara lain :
 1. File PDF 6281262622622_2015-06-04_07-17-53
 2. File PDF 6281262622622_2015-06-29_16-15-02
 3. File PDF 6281262622622_2015-06-30_12-47-47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. File PDF 6281262622622_2015-07-01_09-31-11
5. File PDF 6281262622622_2015-07-01_09-33-43
6. File PDF 6281262622622_2015-07-01_23-45-37
7. File PDF 6281262622622_2015-07-04_07-30-14

214. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PH291350972 yang berisikan antara lain :

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_6281362101414_2015-05-18_17-28-55.pdf	efb5755a19db78ffbab1df6085294fc4	Softcopy SMS
2	SMS_6281362101414_2015-05-20_07-29-58.pdf	6cb882de4e81a6d3520df6ccdd8f31b	Softcopy SMS
3	SMS_6281362101414_2015-05-20_07-34-45.pdf	04f94d07f1604869ef8473c100db48ac	Softcopy SMS
4	SMS_6281362101414_2015-05-20_08-32-04.pdf	d67660763ce59643a2362841179cd51d	Softcopy SMS
5	SMS_6281362101414_2015-05-20_08-41-24.pdf	6ebce7badf3145e4892b14c0c8987f63	Softcopy SMS
6	SMS_6281362101414_2015-05-20_13-58-04.pdf	818f18d7623e918469fbc9d7be31c5f	Softcopy SMS
7	SMS_6281362101414_2015-05-21_20-52-00.pdf	b71e2cf2b94bdc6b74f82049d6a66385	Softcopy SMS
8	SMS_6281362101414_2015-05-21_20-53-10.pdf	3c507e645b7c3ac6b32271b82d011333	Softcopy SMS
9	SMS_6281362101414_2015-05-21_20-54-13.pdf	101d6769f06ae586b5884185f8dff235	Softcopy SMS
10	SMS_6281362101414_2015-05-21_20-56-42.pdf	fae6a13fa86043a7a6664c143979c627	Softcopy SMS
11	SMS_6281362101414_2015-05-21_20-57-43.pdf	9207389ded2f0f63c1338479d7a12dd4	Softcopy SMS
12	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-05-33.pdf	77fd5b6a6e3f67230eb884d84cf6413d	Softcopy SMS
13	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-07-41.pdf	251a59ae53b3a07f1754628e3cecef7df	Softcopy SMS
14	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-07-43.pdf	0f26633e4f27f93dcf499c0afbb86747	Softcopy SMS
15	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-07-51.pdf	2506479d73428a3757dd7b7be8f4bbfc	Softcopy SMS
16	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-24-43.pdf	baaed7ef6d05d6f803215a7a31a54c65	Softcopy SMS
17	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-28-35.pdf	09b6c4291218fcb3d221abe092732505	Softcopy SMS
18	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-32-01.pdf	56463b4bb980993edd741403614e3dc6	Softcopy SMS
19	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-04-50.pdf	6185ac826c216c0626921895c6954779	Softcopy SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-22-17.pdf	38cab774eb16d9b074f49d08cf7a48a4	Softcopy SMS
21	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-24-14.pdf	0f76eb41aa9991fe9c6679dffe68086e	Softcopy SMS
22	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-26-22.pdf	e1300a1fb209001574e63a942c32c275	Softcopy SMS
23	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-28-03.pdf	4d93a39f1a90e43a9288495341084a31	Softcopy SMS
24	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-28-17.pdf	d8bf2878dedfe0fdc83b7a028cd57401	Softcopy SMS
25	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-28-53.pdf	fab970de0d2d3887843b0798377945f5	Softcopy SMS
26	SMS_6281362101414_2015-05-22_09-13-51.pdf	4aaf323716c1f5c7d22967dea8112b83	Softcopy SMS
27	SMS_6281362101414_2015-05-22_09-26-29.pdf	4558fc7e0c08d3e32e9f9e127e93a6e0	Softcopy SMS
28	SMS_6281362101414_2015-05-22_09-27-07.pdf	5827346afb1c85d952c0027cfcea2466	Softcopy SMS
29	SMS_6281362101414_2015-05-22_15-03-07.pdf	de73c850c31d074cec2681411b07b3ad	Softcopy SMS
30	SMS_6281362101414_2015-06-01_09-04-21.pdf	92596273abf500b25e5c1826e5429b40	Softcopy SMS
31	SMS_6281362101414_2015-06-01_09-07-48.pdf	a4646065306f0bef057514d4ec97eee5	Softcopy SMS
32	SMS_6281362101414_2015-06-01_09-51-02.pdf	ef7e4fb3080308bf54cb62fde0d4e1fa	Softcopy SMS
33	SMS_6281362101414_2015-06-01_09-59-27.pdf	bc70377392313d5a568f665ae3b2dd73	Softcopy SMS
34	SMS_6281362101414_2015-06-01_10-06-04.pdf	d673110e31a4d8a42c1e1a690837ba42	Softcopy SMS
35	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-30-18.pdf	2aa2760e5c660d2a9fea5b67788fa8a5	Softcopy SMS
36	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-37-33.pdf	8ea3bc57b4729750291038f3f310eb4e	Softcopy SMS
37	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-39-10.pdf	a129cd3add3c88ca1a9bb17e838f6e0f	Softcopy SMS
38	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-40-05.pdf	acb6b32988550bcea8851215e38dd2	Softcopy SMS
39	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-42-08.pdf	12a3bd474de3f339f5ca7fdd16f0eda0	Softcopy SMS
40	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-42-48.pdf	cea4b66a7bbfceb7ac9b2034be7d8b29	Softcopy SMS
41	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-43-32.pdf	20eec616780035dff567f1d544674f48	Softcopy SMS
42	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-44-07.pdf	54437057ee424599d1627086eff4ade1	Softcopy SMS
43	SMS_6281362101414_2015-06-01_19-30-13.pdf	92196f96b6fbace659251d4a7bb4528	Softcopy SMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	SMS_6281362101414_2015-06-01_19-30-40.pdf	dcf78fbf37818233dfb0cd597e377617	Softcopy SMS
45	SMS_6281362101414_2015-06-01_20-23-05.pdf	845eb02a22ca3509fac61cd9d55b7f2c	Softcopy SMS
46	SMS_6281362101414_2015-06-01_20-26-04.pdf	5f2ec7da849c632f1aee9c62da6793c9	Softcopy SMS
47	Voice_call_34011337_6281362101414_2015-05-10_21-17-29.wav	35b36161568af1f7f9dbf8da2f446b2c	Voice
48	Voice_call_34052581_6281362101414_2015-05-14_07-33-28.wav	fe49f542af041fe67dc6c9b6a55d3a1e	Voice
49	Voice_call_34053629_6281362101414_2015-05-14_09-45-56.wav	1ebef4f21ad52ef24582ebb8cccace2a	Voice
50	Voice_call_34063420_6281362101414_2015-05-15_08-31-52.wav	25d3da860f1956933193a3fbc709f9e8	Voice
51	Voice_call_34066001_6281362101414_2015-05-15_11-43-12.wav	95db60ef713311f8ae11876a2970c392	Voice
52	Voice_call_34098674_6281362101414_2015-05-18_15-51-35.wav	1b11c8685086a7d02e2ce1b264460937	Voice
53	Voice_call_34103277_6281362101414_2015-05-18_22-16-47.wav	1dc8008ce9c18fa0e4dd158d2a2ea750	Voice
54	Voice_call_34117640_6281362101414_2015-05-19_22-39-32.wav	da9d5b9bb64f7b76c5ba0d0793dd66c5	Voice
55	Voice_call_34118817_6281362101414_2015-05-20_07-26-26.wav	02643d743d97f125ea2f5a50d0929753	Voice
56	Voice_call_34118885_6281362101414_2015-05-20_07-32-55.wav	c213f5115c927740443f74a1c4262005	Voice
57	Voice_call_34118932_6281362101414_2015-05-20_07-37-13.wav	4a2ed16b24b59185f528dd0cb444e762	Voice
58	Voice_call_34119210_6281362101414_2015-05-20_08-07-03.wav	f70a3e111ba962d573cc27498a1ed9c4	Voice
59	Voice_call_34125523_6281362101414_2015-05-20_15-14-01.wav	56d7387ef63163aeabd36713d2cfccbd	Voice
60	Voice_call_34269689_6281362101414_2015-05-21_11-32-53.wav	1557885e02c6f2dd88093e930b6370c1	Voice
61	Voice_call_34269690_6281362101414_2015-05-21_11-32-53.wav	59be457a95bd5bbe915c	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	62101414_2015-05-21_11-32-54.wav	148fde65217e	
62	Voice_call_34270507_62813 62101414_2015-05-21_12-20-42.wav	28aefdd7a7bfae5e09c76 5186a7fee26	Voice
63	Voice_call_34270745_62813 62101414_2015-05-21_12-37-53.wav	19902ddd9041824a09a8 d4773a9551dd	Voice
64	Voice_call_34277206_62813 62101414_2015-05-21_20-50-21.wav	3db239906064d260fba96 2ac9dda5a7e	Voice
65	Voice_call_34280673_62813 62101414_2015-05-22_09-31-33.wav	45a2f10ef15f965173b1c a2fe1e2be3b	Voice
66	Voice_call_34288163_62813 62101414_2015-05-22_18-35-45.wav	ff984cae2283e6db3ac94 537b7b424e3	Voice
67	Voice_call_34288521_62813 62101414_2015-05-22_19-07-47.wav	d55ddc3e1feb7b35f1008 cd75e3ef8fb	Voice
68	Voice_call_34288571_62813 62101414_2015-05-22_19-12-43.wav	aa113a5f1f9c763b71eb8 2dd3f1e3dba	Voice
69	Voice_call_34288679_62813 62101414_2015-05-22_19-18-16.wav	a8d3cd2670837f31cf2b9 e3d71220f18	Voice
70	Voice_call_34385649_62813 62101414_2015-05-31_10-51-57.wav	4644ee44d0d8d9343037 b0d5730f5fba	Voice
71	Voice_call_34392708_62813 62101414_2015-06-01_09-02-10.wav	4603d75f3ade464ddb6a3 fbf30f97a0f	Voice
72	Voice_call_34404985_62813 62101414_2015-06-01_22-45-07.wav	99b13e34a8a7a5aeadda3 ef95bd2ecbe	Voice
73	SMS_6281362101414_2015-06-05_13-54-40.pdf	01090dc9224b37912b3fd cdfb556dab9	Softcopy SMS
74	SMS_6281362101414_2015-06-05_13-55-41.pdf	852c8ba7e7885c75d2b7 de55d3628e2e	Softcopy SMS
75	SMS_6281362101414_2015-06-05_13-59-51.pdf	77738d6b08c66e6fbed94 6d83a88de53	Softcopy SMS
76	SMS_6281362101414_2015-06-05_14-00-06.pdf	561a2b926912267e0969 cf19efd464f0	Softcopy SMS
77	SMS_6281362101414_2015-06-06_16-59-36.pdf	b4838ffc4e39dba6fbddc 90d38cd751a	Softcopy SMS
78	SMS_6281362101414_2015-06-06_17-05-33.pdf	9dbb57f14a9eb6cf861c9 f4c187f3f67	Softcopy SMS
79	SMS_6281362101414_2015-	b15ec3d788338c4c39d0	Softcopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06-06_17-05-53.pdf	43c99e0cc2ee	SMS
80	SMS_6281362101414_2015-06-06_17-06-03.pdf	85cc027f703b08a3345d401cb1f512c2	Softcopy SMS
81	SMS_6281362101414_2015-06-06_17-27-37.pdf	2858633a06154cdd8bf9a89cb1413d3b	Softcopy SMS
82	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-18-55.pdf	13eea0804f30ceddd3c72063f3a08138	Softcopy SMS
83	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-19-38.pdf	2ffb69b6752351c6b9e8a9e712bfccf7	Softcopy SMS
84	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-32-34.pdf	7727cedee51e473abd0d89d9cb23a2c9	Softcopy SMS
85	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-34-45.pdf	8200ad27b5985a43407356e0fd3bf17d	Softcopy SMS
86	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-35-28.pdf	4b197d8433ca00f293ea04b931794b65	Softcopy SMS
87	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-35-38.pdf	de2117e8af210a3224009af6a62fb8d0	Softcopy SMS
88	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-36-23.pdf	c0b20a3128ae6796f0fa91289c2accb8	Softcopy SMS
89	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-36-45.pdf	40b27a87df0ab88f85d843458192563a	Softcopy SMS
90	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-42-57.pdf	53f7eadf7ad851938410012ec642c34c	Softcopy SMS
91	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-43-36.pdf	d49c652a0c736aae1f806d43bad939c9	Softcopy SMS
92	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-45-58.pdf	f91d4b8c74a8210c3e5d629822bb8d17	Softcopy SMS
93	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-46-48.pdf	538b37711de239b6b52fa740a529d4e2	Softcopy SMS
94	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-48-29.pdf	7a840c36da08f6c193ef88f7dccbf3c	Softcopy SMS
95	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-50-18.pdf	bac338997a8b7586b99188b86a2b3240	Softcopy SMS
96	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-50-25.pdf	c9b5765286e0eb6dbb48daf563251b1c	Softcopy SMS
97	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-58-07.pdf	390c20e174fbadf6570a7f9f6d3c6275	Softcopy SMS
98	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-59-58.pdf	3f49bf0580df27abff92f179aafc5fef	Softcopy SMS
99	SMS_6281362101414_2015-06-06_20-29-10.pdf	d65c277c5f784b859c64fb33f9301e1c	Softcopy SMS
100	SMS_6281362101414_2015-06-08_07-32-54.pdf	df493a1417560e5c8832fd289938fe11	Softcopy SMS
101	SMS_6281362101414_2015-06-08_16-34-32.pdf	640ad9de6d9f94f88b818bd549ee6eb8	Softcopy SMS
102	SMS_6281362101414_2015-06-09_08-38-42.pdf	22bde247dfa1fee607628fccf0f30fef	Softcopy SMS
103	SMS_6281362101414_2015-	0a564d78863b61f74fd52	Softcopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06-09_08-41-55.pdf	48f78a1b6bd	SMS
104	SMS_6281362101414_2015-06-09_08-42-25.pdf	a02148afb6f6f64b5428ce36d7cfd1a87	Softcopy SMS
105	SMS_6281362101414_2015-06-09_08-51-48.pdf	b30657406a0d24b7305fb23e6c95dc09	Softcopy SMS
106	SMS_6281362101414_2015-06-09_08-52-08.pdf	e2ff77236c034f28bcb69c63bbc44848	Softcopy SMS
107	SMS_6281362101414_2015-06-16_15-25-40.pdf	df5a167caec13e1e990b13639c4dbbd9	Softcopy SMS
108	SMS_6281362101414_2015-06-16_15-26-59.pdf	05228ba908ca7232de976a599ba11a0e	Softcopy SMS
109	SMS_6281362101414_2015-06-16_15-27-02.pdf	96950ae64ca0458eba07e5c300b2e047	Softcopy SMS
110	SMS_6281362101414_2015-06-17_18-01-25.pdf	7ca3da6d5fc3a4b1e7a7836eb944a18c	Softcopy SMS
111	SMS_6281362101414_2015-06-17_18-13-14.pdf	2b3afc57645848176651f8e1a85e14b6	Softcopy SMS
112	SMS_6281362101414_2015-06-17_18-14-15.pdf	ac567ddcff7ac1d62251f346c10c3254	Softcopy SMS
113	SMS_6281362101414_2015-06-19_12-21-48.pdf	1f87b800a8e99554d4a655a36dc459ad	Softcopy SMS
114	Voice_call_34441919_6281362101414_2015-06-05_08-31-14.wav	677c67dcc72fa72b9305ff47772ec122	Voice
115	Voice_call_34455385_6281362101414_2015-06-06_09-46-57.wav	136d946bd6928e7cd281943078f12436	Voice
116	Voice_call_34455413_6281362101414_2015-06-06_09-50-41.wav	f55abf4c26cf1a0b16229f39e7ba3c7f	Voice
117	Voice_call_34459791_6281362101414_2015-06-06_17-22-34.wav	3913d64e698c7347dac933f4bf6ee07d	Voice
118	Voice_call_34461183_6281362101414_2015-06-06_19-43-40.wav	d62b840030f6178103ca053c5255f3c1	Voice
119	Voice_call_34462716_6281362101414_2015-06-06_22-48-46.wav	12d47b31d8a2b311c5697071bd7fa7e8	Voice
120	Voice_call_34470609_6281362101414_2015-06-07_19-27-43.wav	8389176732dcd084472deaaaa2e395e9	Voice
121	Voice_call_34477792_6281362101414_2015-06-08_11-40-47.wav	f909a2241f6a99a1ca4e87fc0ee5648b	Voice
122	Voice_call_34482362_6281362101414_2015-06-08_16-35-41.wav	00acabd54c9326cb7fb09ca0a4f9e227	Voice
123	Voice_call_34487364_6281362101414_2015-06-08_16-35-41.wav	e9f8feedd5bceae3c41cfa	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	62101414_2015-06-09_06-49-14.wav	7d6bea8726	
124	Voice_call_34487382_62813 62101414_2015-06-09_06-51-09.wav	8622ee352c871687427f2 3b1d0e4ce3d	Voice
125	Voice_call_34488677_62813 62101414_2015-06-09_08-28-05.wav	f483d294f8ec906fa6720 63e7158f8cc	Voice
126	Voice_call_34488701_62813 62101414_2015-06-09_08-29-09.wav	d4bdb9c77dc012460276 39c9b75d6e6c	Voice
127	Voice_call_34511030_62813 62101414_2015-06-10_17-02-38.wav	84acf7ec026bf2836c7f70 78ae1c66e2	Voice
128	Voice_call_34571408_62813 62101414_2015-06-15_23-26-42.wav	01f40a5266c2dbb36ff4f5 b35f19d9f5	Voice
129	Voice_call_34573571_62813 62101414_2015-06-16_08-15-30.wav	12a82976fdb0dfbc15c82 f5570989d40	Voice
130	Voice_call_34578888_62813 62101414_2015-06-16_14-36-44.wav	a92b78d303644a07c0d1 deb6fc870b07	Voice
131	Voice_call_34579008_62813 62101414_2015-06-16_14-44-14.wav	e657e52b93f7aa8dba6fc 19aacc7a5f9	Voice
132	Voice_call_34579553_62813 62101414_2015-06-16_15-24-31.wav	1211643613a7922f3ea8a 0bdeb15d2f9	Voice
133	Voice_call_34579638_62813 62101414_2015-06-16_15-31-05.wav	647e165985613a83737d 784306caaa24	Voice
134	Voice_call_34593794_62813 62101414_2015-06-17_17-13-03.wav	980ea40ef532efae4b6bc 1f14a86682b	Voice
135	Voice_call_34593848_62813 62101414_2015-06-17_17-16-33.wav	dd18b812ac03e1242629 2ace7259db13	Voice
136	Voice_call_34594055_62813 62101414_2015-06-17_17-35-25.wav	a07148dd3be63de2e6abb bef08d084e6	Voice
137	Voice_call_34594148_62813 62101414_2015-06-17_17-42-26.wav	97c9f6ae8e4f9084b90afe f62c3fd6bc	Voice
138	Voice_call_34607530_62813 62101414_2015-06-18_23-47-29.wav	88e8b160dcba6579710 a96542e736bc	Voice
139	Voice_call_34609969_62813 62101414_2015-06-19_09-20-12.wav	3708548118624340a639 123b7d70d184	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-36.wav		
140	Voice_call_34643364_62813 62101414_2015-06-22_18-55 -49.wav	6f1ad6cac55584a896016 818eedac52f	Voice
141	Voice_call_34653171_62813 62101414_2015-06-24_09-12 -27.wav	f83a6c894a8e4bc87c472 9230cb026af	Voice
142	Voice_call_34680615_62813 62101414_2015-06-27_22-45 -45.wav	10170dde8a16ab7099ae0 bc6ac1e28d4	Voice
143	Voice_call_34699326_62813 62101414_2015-06-30_11-14 -40.wav	4e2022a1650b8d38a7cfd 3fa87d8d508	Voice
144	Voice_call_34699826_62813 62101414_2015-06-30_11-43 -28.wav	e3ff6577cf127815f06ed1 4ee9709650	Voice
145	Voice_call_34700708_62813 62101414_2015-06-30_12-41 -54.wav	fd9e48f1ecb711add9839 abda700ae8d	Voice
146	Voice_call_34700780_62813 62101414_2015-06-30_12-47 -48.wav	7a0966ca98faf4aa06379 396a6ec18e3	Voice
147	Voice_call_34710119_62813 62101414_2015-07-01_09-31 -12.wav	175b56156bafc2b3c011c ff77262c25e	Voice
148	Voice_call_34710176_62813 62101414_2015-07-01_09-33 -44.wav	89295eb49baec3e1d0e50 b36ec46cc6d	Voice
149	Voice_call_34710842_62813 62101414_2015-07-01_10-19 -06.wav	e8de7c9310fd7cffe7255a e78f3ffea2	Voice
150	Voice_call_34710941_62813 62101414_2015-07-01_10-26 -34.wav	09e1888b5a28c88a9404f ce1255f2421	Voice
151	Voice_call_34719693_62813 62101414_2015-07-01_22-17 -47.wav	780cd9a6f1d648399d0e6 c48c8f063de	Voice
152	Voice_call_34720219_62813 62101414_2015-07-01_23-45 -38.wav	6845b4fc4b118cbd0b232 e0db8fddc1e	Voice
153	Voice_call_34743989_62813 62101414_2015-07-04_12-08 -15.wav	66785bdff609f66a09166 496e9910b9c	Voice
154	Voice_call_34749043_62813 62101414_2015-07-04_22-19 -40.wav	af1697f3554e74ca534d5 3cf604063a6	Voice
155	SMS_6287788877191_2015- 07-05_11-48-04.pdf	a67d1a89a755d583d0b4 96430e3d6bb6	Softcopy SMS
156	SMS_6287788877191_2015-	80346eba2eaaf49c9f21ef	Softcopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-05_11-48-57.pdf	ab7b041fb2	SMS
157	Voice_call_34773172_628161902088_2015-07-07_12-02-20.wav	4820f8cddf304bf730d761b46d318e47	Voice
158	SMS_6281221848850_2015-06-07_08-16-55.pdf	6c95e9a1e5d065fcb650a148b9a8f402	Softcopy SMS
159	SMS_6281221848850_2015-06-07_08-24-47.pdf	3c0f4cd29ff00e79707518157567f6ab	Softcopy SMS
160	SMS_6281221848850_2015-06-07_08-34-16.pdf	cd4460a94891f396620500db939241bf	Softcopy SMS
161	SMS_6281221848850_2015-06-07_10-01-05.pdf	85d5ffc2b181507efa6309aab9b45159	Softcopy SMS
162	SMS_6281221848850_2015-06-07_10-02-01.pdf	25a065232728fcb81ab8b4143f990c8	Softcopy SMS
163	SMS_6281221848850_2015-06-08_07-32-46.pdf	ce2363f41e43786751c24d06c9f97d7e	Softcopy SMS
164	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-38-33.pdf	11b79b5497d03a57aa9b0f401e322c4e	Softcopy SMS
165	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-41-47.pdf	f87d51c992886ec05c0419300e9bd6c0	Softcopy SMS
166	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-51-40.pdf	28c5e2c540466aa7b9a42c25f907c24a	Softcopy SMS
167	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-52-08.pdf	0383501c92029cfbad34b9353fbccaff	Softcopy SMS
168	SMS_6281221848850_2015-06-09_09-46-56.pdf	2bfc9e69547a307fe26ec9652d8be932	Softcopy SMS
169	SMS_6281221848850_2015-06-09_10-49-37.pdf	2da6a8efb177b517f4f653e884fe3836	Softcopy SMS
170	SMS_6281221848850_2015-06-09_10-52-35.pdf	7d3122ccc429d4bf930b2debfabab7ab	Softcopy SMS
171	SMS_6281221848850_2015-06-26_08-30-25.pdf	6757fc61f92663901bd03903df2061fd	Softcopy SMS
172	Voice_call_34422375_6281221848850_2015-06-03_18-38-58.wav	23632205887f8e400b1c323d167612ed	Voice
173	Voice_call_34422404_6281221848850_2015-06-03_18-41-35.wav	e9963c3a0899e6a9afb0a4776cfb5f90	Voice
174	Voice_call_34422773_6281221848850_2015-06-03_19-05-22.wav	cb056b6750bc44e7aeabab9000072619	Voice
175	Voice_call_34464211_6281221848850_2015-06-07_08-20-32.wav	0f00e60561df62930ac167f4d54c3cf0	Voice
176	Voice_call_34470608_6281221848850_2015-06-07_19-27-42.wav	9cca08076dead39acbc25ed56e26b816	Voice
177	Voice_call_34473182_6281221848850_2015-06-08_06-57	716e2471a77998ab301244370cc6b1b3	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-26.wav		
178	Voice_call_34477789_62812 21848850_2015-06-08_11-40 -46.wav	6e4511374140dd6e69e2f 6b3da0c0b70	Voice
179	Voice_call_34487383_62812 21848850_2015-06-09_06-51 -12.wav	cc1cfc6b6af0a664b91f66 a9a0f17492	Voice
180	Voice_call_34488636_62812 21848850_2015-06-09_08-25 -29.wav	db5a4c85b549b0758367 35da81182d5c	Voice
181	Voice_call_34488703_62812 21848850_2015-06-09_08-29 -11.wav	aa9e00d3aa17bd4bf36f5 e5dfc8271ed	Voice
182	Voice_call_34491548_62812 21848850_2015-06-09_11-00 -08.wav	0ca8e00e58636a8ef9f93 e9f3672f764	Voice
183	Voice_call_34511325_62812 21848850_2015-06-10_17-20 -05.wav	8e43c4ce25a05f5f08177 14fb34c44a9	Voice
184	Voice_call_34592000_62812 21848850_2015-06-17_14-52 -01.wav	5833ec0fb4cb5c406891c 2af8b1a47e8	Voice
185	Voice_call_34653178_62812 21848850_2015-06-24_09-13 -24.wav	8d0e9040afbfe7ba1b661 3d2fa6ac5d5	Voice
186	Voice_call_34661000_62812 21848850_2015-06-25_13-00 -50.wav	0e5320a7d46255f3ff357 a420a7d1b6d	Voice
187	Voice_call_34687337_62812 21848850_2015-06-29_08-53 -02.wav	c670dcc98e83d8b71891 2a9d1433d156	Voice
188	Voice_call_34710916_62812 21848850_2015-07-01_10-24 -58.wav	1bf9b6f1a08a4e60bb36f 460c9632f2c	Voice
189	Voice_call_34719694_62812 21848850_2015-07-01_22-17 -48.wav	3312d26a79f6310b1b67e da493125ad0	Voice
190	Voice_call_34719755_62812 21848850_2015-07-01_22-26 -09.wav	9a9b73fbe2091e328a246 a08172f9e15	Voice
191	Voice_call_34758771_62812 21848850_2015-07-06_09-06 -16.wav	a7e0534b1868b23aadfa1 a413c4b816d	Voice
192	Voice_call_34762777_62812 21848850_2015-07-06_13-58 -49.wav	7025a305e4918307aec97 703b2352e6c	Voice
193	Voice_call_34762860_62812 21848850_2015-07-06_14-03 -57.wav	fa944d5f32f350b6a99d9 69d1ba45750	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194	Voice_call_34771730_62812 21848850_2015-07-07_10-35-49.wav	98087a2dbbbcafdcaffd243c33f0d18a	Voice
195	Voice_call_34773308_62812 21848850_2015-07-07_12-09-09.wav	a28540792979415dfaa06ec1b4abc791	Voice
196	Voice_call_34798486_62812 21848850_2015-07-09_10-29-49.wav	9e96ffda76357fe6c4a5c7fbadc943d3	Voice
197	Voice_call_34798624_62812 21848850_2015-07-09_10-38-23.wav	a53fd9570420b7c2ce8e6142a8893596	Voice
198	Voice_call_34802883_62812 21848850_2015-07-09_14-55-23.wav	b2ee69a699de6831c606720afa494f71	Voice
199	Voice_call_34803389_62812 21848850_2015-07-09_15-30-57.wav	b1be665400d09584a824d7b32294cfb1	Voice
200	Voice_call_34804743_62812 21848850_2015-07-09_16-59-09.wav	a486f2864c681ad35152d605c3054702	Voice
201	Voice_call_34680188_62813 11183687_2015-06-27_21-30-15.wav	c6946248dc685bfd8e27ff2e76e2d651	Voice
202	SMS_6282111000071_2015-07-07_12-34-12.pdf	85dce338dd071e8050f3e3a262cf34a2	Softcopy SMS
203	SMS_6282111000071_2015-07-07_12-58-39.pdf	8d33d32dc81ff2090a76805dd046eb65	Softcopy SMS
204	SMS_6282111000071_2015-07-07_12-59-48.pdf	85690f90329ab2bca16a9e68a17d089a	Softcopy SMS
205	SMS_6282111000071_2015-07-09_00-15-15.pdf	9b1b3e9838161f571b13ee24f9b8ee80	Softcopy SMS
206	Voice_call_34643366_62821 11000071_2015-06-22_18-55-51.wav	fb4a11361147e0871dc38c8814898433	Voice
207	Voice_call_34699325_62821 11000071_2015-06-30_11-14-38.wav	493c83fc9ea0793d30ecd5bb5f6e6b9b	Voice
208	Voice_call_34743894_62821 11000071_2015-07-04_11-55-16.wav	7a7144a1f1db12944a0650e5ad4439de	Voice
209	Voice_call_34743988_62821 11000071_2015-07-04_12-08-12.wav	54b2335eef25b609f6d97d180ca61c59	Voice
210	Voice_call_34758562_62821 11000071_2015-07-06_08-50-45.wav	22f5c6af955c75ef7a4c7c95afe04a13	Voice
211	Voice_call_34758599_62821 11000071_2015-07-06_08-54	826739816c49bfcf6763c724cee7db6e	Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	-37.wav		
212	Voice_call_34763025_62821 11000071_2015-07-06_14-15 -46.wav	1677762d9a3cf9be9b423 7a78697692e	Voice
213	Voice_call_34763154_62821 11000071_2015-07-06_14-25 -12.wav	1484d318e9e1a636da59e eacb54c45d9	Voice
214	Voice_call_34763199_62821 11000071_2015-07-06_14-27 -52.wav	14360281766016e3a35e 1656ba9d8c3b	Voice
215	Voice_call_34772727_62821 11000071_2015-07-07_11-35 -35.wav	1631af5954ab7dbcf932 a23a77839b7	Voice
216	Voice_call_34773328_62821 11000071_2015-07-07_12-09 -56.wav	274c14ace420f70258066 a722180e1f4	Voice
217	Voice_call_34773840_62821 11000071_2015-07-07_12-37 -31.wav	e71f1d00436b71ac5e97e de127da876c	Voice
218	Voice_call_34773928_62821 11000071_2015-07-07_12-42 -05.wav	40966a0d33a0e624d62c 20c481a39018	Voice
219	Voice_call_34774118_62821 11000071_2015-07-07_12-52 -53.wav	8def3496392814448092e 9c9e7772190	Voice
220	Voice_call_34797777_62821 11000071_2015-07-09_09-47 -30.wav	e4de501f8c2ec42495034 a063461dd2b	Voice
221	Voice_call_34797887_62821 11000071_2015-07-09_09-54 -46.wav	d3ef4e88056fef81d7e87 48fc1547581	Voice
222	Voice_call_34797969_62821 11000071_2015-07-09_09-59 -41.wav	f1526268bc8e390585e96 1bf11df19b5	Voice
223	Voice_call_34798022_62821 11000071_2015-07-09_10-02 -56.wav	e93094a4a173edff9ee95 7056cd90f2e	Voice
224	Voice_call_34798102_62821 11000071_2015-07-09_10-08 -53.wav	1657feddf36a8a8113082 27e137718d5	Voice
225	Voice_call_34798623_62821 11000071_2015-07-09_10-38 -21.wav	c2c0904baf2962ae0395 a1854b99369	Voice
226	Voice_call_34799925_62821 11000071_2015-07-09_11-49 -07.wav	35588e03e0e8dd37b259 88dcb08cca41	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215 2 (dua) lembar print out Registrasi Data Pelanggan dengan Nomor Handphone 628161902088, nama pemilik nomor Kantor Pengacara O.C.KALIGIS, Alamat Komp. Majapahit Permai Blok B123 No. 18 20 - 22.

216 1 (satu) bundel print out CDR (Call Data Record) untuk nomor 628161902088 dari bulan April 2015 sampai dengan Desember 2015.

217 Data rekaman CCTV dengan nama file "CCTVBANDARA.iso" yang memiliki MD5 Has : 3923fa213ec0d8f53d1f77daed5b24cf, dan nilai SHA-1 Hash : fae 2d15 a7a7 555499 dc1e9 ea2254867a78de8bf5 dihitung dengan aplikasi Gizmo Manager V2.7, yang disimpan kedalam DVD Logo KPK dengan S/n: MAPA02RD25031632 5. Yang berisi rekaman CCTV sbb :

1 Rekaman CCTV tanggal 1 Juli 2015 diantaranya sbb.

- a CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 22.27.07 s/d 22.27.23.
- b CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 22.28.43 s/d 22.28.47.
- c CCTV Departure Luar Zona Lantai 2 pada jam 22.30.30 s/d 22.32.37.
- d CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 22.31.37 s/d 22.32.40.

1 Rekaman CCTV tanggal 2 Juli 2015 diantaranya sbb.

- a CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.08.39 s/d 12.09.02.
- b CCTV Garbarata 2 + Parking 27 pada jam 12.09.59 s/d 12.10.14.
- c CCTV Dropzone Keberangkatan (239) pada jam 10.58.33 s/d 10.59.37.
- d CCTV Travelator WR Scp Dome Lantai 2 pada jam 11.13.53 s/d 11.14.33.
- e CCTV Automatic Gate zona Lt 2 pada jam 11.09.52 s/d 11.11.12.
- f CCTV Departure dalam zona Lantai 2 (238) pada jam 10.59.10 s/d 10.59.47
- g CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 15.54.00 s/d 15.33.03.
- h CCTV Departure dalam zona lantai 2 pada jam 15.13.00 s/d 15.13.34.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i CCTV Garbarata H+Parking 27 pada jam 15.55.07 s/d 15.57.57.

3 Rekaman CCTV tanggal 5 Juli 2015 diantaranya sbb .

- a. CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 08.08.52 s/d 08.09.05.
- b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 08.15.41 s/d 08.15.49.
- c. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 08.18.39 s/d 08.19.43.
- a CCTV Departure luar zona lantai 2 keberangkatan pada jam 08.18.19 s/d 08.18.49.
- b CCTV Main Gate waiting room domestic 9-12 lantai 2 pada jam 12.14.40 s/d 12.15.46.
- c CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.15.49 s/d 12.16.35.
- d CCTV Automatic gate zona lantai 2 pada jam 11.43.15 s/d 11.43.47.
- e CCTV Automatic gate zona lantai 2 (237) pada jam 11.41.56 s/d 11.42.50.
- f CCTV Waiting Room Gate 10 Lantai 2 pada jam 12.16.34 s/d 12.17.05.
- g CCTV Departure luar zona lantai 2 pada jam 11.38.26 s/d 11.39.32.
- h CCTV Gate 10 pada jam 12.16.34 s/d 12.17.05.

4 Rekaman CCTV tanggal 7 Juli 2015 diantaranya sbb :

- a CCTV Garbarata G+Parking 29 (197) pada jam 14.06.35 s/d 14.06.44.
- b CCTV automatic gate zona lantai 2 pada jam 13.48.16 s/d 13.48.36.
- c CCTV Dept Dalam Zona Lantai 2 pada jam 13.41.24 s/d 13.41.52.

5 Rekaman CCTV tanggal 9 Juli 2015 diantaranya sbb :-

- a CCTV Garbarata H+Parking 27 pada jam 08.12.19 s/d 08.12.37.-
- b CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 (156) pada jam 08.16.00 s/d 08.16.12.-
- c CCTV Pintu Arrival Dom Lantai 1 pada jam 08.34.10 s/d 08.35.53.
- d CCTV Main Gate arrival lantai 1 (145) pada jam 08.35.42 s/ 08.35.53.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan serial number (SN) MAPA25PH291921771 yang berisi :

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_6281362101414_2015-07-06_20-39-35.pdf	f647c978e4dbc218c921ba54a2615261	Softcopy SMS
2	Voice_call_34720219_6281362101414_2015-07-01_23-45-38.wav	6845b4fc4b118cbd0b232e0db8fddc1e	Voice
3	Voice_call_34746745_6281362101414_2015-07-04_17-30-15.wav	1f89fcc53422b8277b210433a30c1e6	Voice
4	Voice_call_34752424_6281362101414_2015-07-05_11-21-52.wav	8f5b3a6891933d47f06592eff9f73123	Voice
5	Voice_call_34752545_6281362101414_2015-07-05_11-35-53.wav	cf698eb64004ee6e2e6f4a4d6c08b7e5	Voice
6	Voice_call_34763121_6281362101414_2015-07-06_14-22-44.wav	7a90e33da400d48b43708c2231b84806	Voice
7	Voice_call_34763156_6281362101414_2015-07-06_14-25-14.wav	ffdf4760c167f58c892a41363f48f1da	Voice
8	Voice_call_34773186_6281362101414_2015-07-07_12-03-08.wav	196a2d8d81d5a22a48cc73ebfbad302	Voice
9	Voice_call_34773837_6281362101414_2015-07-07_12-37-26.wav	c8c872a146565a6211a6303d23fc0537	Voice
10	Voice_call_34774151_6281362101414_2015-07-07_12-54-30.wav	d8c857b20e2ee8087dc94e4cd28a2087	Voice
11	Voice_call_34710277_6281269705761_2015-07-01_09-43-01.wav	46ef250cd251f43dfef772836511d3d	Voice
12	Voice_call_34727117_6281269705761_2015-07-02_17-03-26.wav	083598ac849911a98686974578dcdfc	Voice
13	Voice_call_34728827_6281269705761_2015-07-02_20-30-02.wav	a0196f07739d30d21cbeed8a387f599f	Voice
14	Voice_call_34732650_6281269705761_2015-07-03_10-06-55.wav	4da44d63b0526cdd7596c498d2573bd7	Voice
15	Voice_call_34756623_6281269705761_2015-07-05_22-28-05.wav	7f7bd6ba7b21d460be0eca0e3e32ee83	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Voice_call_34758142_6281 269705761_2015-07-06_08-09-59.wav	4243bf443e56a307cf 8fdbae6d610ec6	Voice
17	Voice_call_34758772_6281 269705761_2015-07-06_09-06-17.wav	e110135a13c451d234 188ee682bdb7fc	Voice
18	Voice_call_34762776_6281 269705761_2015-07-06_13-58-46.wav	917acc98a51ae939e2 a0314d23d10b23	Voice
19	Voice_call_34762859_6281 269705761_2015-07-06_14-03-56.wav	480b7bbba0fe136385 84a20bf85d0954	Voice
20	SMS_6287883327443_2015-07-01_11-28-50.pdf	86bb8caf3653e3a206 9150bb73de4ce9	Softcopy SMS
21	SMS_6287883327443_2015-07-03_11-01-07.pdf	dcf97e72b77746a64d fbc7b7671b667e	Softcopy SMS
22	SMS_6287883327443_2015-07-03_13-08-11.pdf	636130bca6a530002a e42b9a669572b5	Softcopy SMS
23	Voice_call_34708495_6287 883327443_2015-07-01_06-56-05.wav	77dac2233984e6927e 797b40e5fd53f1	Voice
24	Voice_call_34710475_6287 883327443_2015-07-01_09-55-17.wav	2ed373ad16552bcaed ffbd33607302ce	Voice
25	Voice_call_34710515_6287 883327443_2015-07-01_09-58-06.wav	033b7714e558ad0ac6 b8aa2eea8087ce	Voice
26	Voice_call_34710582_6287 883327443_2015-07-01_10-01-30.wav	dd9104ffcd2d963d56 97741438ebdeba	Voice
27	Voice_call_34710661_6287 883327443_2015-07-01_10-07-14.wav	b4207947bcbbc43642 f27a51d17bb879	Voice
28	Voice_call_34710900_6287 883327443_2015-07-01_10-23-33.wav	d5b1270b248a23b58c b845a3312f6587	Voice
29	Voice_call_34734337_6287 883327443_2015-07-03_13-00-11.wav	542d98bb7af5541d03 5ab47eda0bd680	Voice
30	Voice_call_34752532_6287 883327443_2015-07-05_11-34-10.wav	babf073394b4a2e1f5 37317cc66242bf	Voice
31	Voice_call_34767251_6287 883327443_2015-07-06_20-35-08.wav	2784180b4bc810ae8f d846734dbc899a	Voice
32	Voice_call_34773131_6287 883327443_2015-07-07_11-59-48.wav	c6d30b308bbd25af28 11f1377e481b03	Voice
33	SMS_6281262622622_2015	97695390c9c2c4f9e1	Softcopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-07-06_09-10-02.pdf	3a314819fc74f2	SMS
34	Voice_call_34435906_6281 262622622_2015-06-04_17- 55-13.wav	f325fc2a15c37d73c9b 54665ff7b4c30	Voice
35	Voice_call_34441914_6281 262622622_2015-06-05_08- 31-12.wav	64748c961a4df6e439 20ee0073ebc883	Voice
36	Voice_call_34450871_6281 262622622_2015-06-05_19- 26-38.wav	146425cb607d3c7de4 33f1468ab8f02f	Voice
37	Voice_call_34450929_6281 262622622_2015-06-05_19- 31-31.wav	956234273d645be609 778e486933c62e	Voice
38	Voice_call_34462717_6281 262622622_2015-06-06_22- 48-48.wav	1a317db12a841f7981 7be6e3e067667a	Voice
39	Voice_call_34462866_6281 262622622_2015-06-06_23- 35-02.wav	b2689cb92020004af6 cb9c05662c0041	Voice
40	Voice_call_34680614_6281 262622622_2015-06-27_22- 45-44.wav	b7bf7eb5a863cded8c 76b1f2673d9aa7	Voice
41	Voice_call_34693032_6281 262622622_2015-06-29_16- 15-02.wav	53103ad0b9dbdb533b 22146a21e06632	Voice
42	Voice_call_34710118_6281 262622622_2015-07-01_09- 31-11.wav	301aa232e2a18c3e91 2c66cf5d91cde2	Voice
43	Voice_call_34710175_6281 262622622_2015-07-01_09- 33-43.wav	be0be1a206396053c7 264293b47038a8	Voice
44	Voice_call_34720218_6281 262622622_2015-07-01_23- 45-37.wav	8965677d29b5b845ed e28cd68e96ad0c	Voice
45	Voice_call_34746744_6281 262622622_2015-07-04_17- 30-14.wav	e06f10ebb4d843ed80 3e93f19c964e60	Voice
46	SMS_6287788877191_2015 -06-08_17-52-19.pdf	9eac6e4dbc89c04044 c0ba53e1329fa8	Softcopy SMS
47	SMS_6287788877191_2015 -07-04_09-37-37.pdf	87d67481821c3f59db b9f4ac092635c6	Softcopy SMS
48	SMS_6287788877191_2015 -07-04_10-17-46.pdf	2afbb3f09c3eedeb8a2 314dd66ec8541	Softcopy SMS
49	SMS_6287788877191_2015 -07-04_10-19-11.pdf	f47da370759e8a25e3 214f36fb8f9a84	Softcopy SMS
50	SMS_6287788877191_2015 -07-07_13-37-19.pdf	be96746b93e982c182 bb74a667a01ada	Softcopy SMS
51	SMS_6287788877191_2015 -07-07_13-38-29.pdf	9e891d967b16031d3a bc8bef12fea15f	Softcopy SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	SMS_6287788877191_2015-07-07_13-38-42.pdf	6fe67d6baadfc1b6214afd1ce5f8b27d	Softcopy SMS
53	SMS_6287788877191_2015-07-07_13-38-51.pdf	a13244aae2c661908b485161b9103322	Softcopy SMS
54	SMS_6287788877191_2015-07-08_12-28-51.pdf	f88a07cd762e4eddd03c20114c22086a6	Softcopy SMS
55	SMS_6287788877191_2015-07-08_12-30-14.pdf	660527af7433d91352b9741687ef2bf5	Softcopy SMS
56	SMS_6287788877191_2015-07-08_12-30-41.pdf	53e288400a0183e94d96d866da23fb8b	Softcopy SMS
57	SMS_6287788877191_2015-07-08_12-31-43.pdf	7ea581422a96ec1e0cf2bfab732ca5f7	Softcopy SMS
58	SMS_6287788877191_2015-07-08_13-41-20.pdf	81832dbcb20aa76e185c86792ad3154	Softcopy SMS
59	SMS_6287788877191_2015-07-08_16-13-41.pdf	b8e5738decff025d81f375c4b729e246	Softcopy SMS
60	SMS_6287788877191_2015-07-08_17-50-11.pdf	3c19bab778d58e5c7c777d4c79e7dc82	Softcopy SMS
61	Voice_call_34449985_6287788877191_2015-06-05_18-04-07.wav	6c8b0c0c4a46a48e01493ec24f1479d0	Voice
62	Voice_call_34464575_6287788877191_2015-06-07_09-11-07.wav	7c2d18aaf7ff569afb392e77eb0c048b	Voice
63	Voice_call_34473669_6287788877191_2015-06-08_07-43-52.wav	0b7e98d43ac80c9b075fb42cd259e804	Voice
64	Voice_call_34495672_6287788877191_2015-06-09_15-18-12.wav	42bc2d571e1552f741d942bcc01cedfa	Voice
65	Voice_call_34502411_6287788877191_2015-06-10_07-41-21.wav	d820f05086aac890a207e685d7882d5d	Voice
66	Voice_call_34743134_6287788877191_2015-07-04_10-33-44.wav	8827ced676e0e70fe1dce9fdd7d90207	Voice
67	Voice_call_34749976_6287788877191_2015-07-05_02-47-58.wav	38c3dac6b641120b3d4ce35ecac74015	Voice
68	Voice_call_34750183_6287788877191_2015-07-05_04-04-01.wav	af933c7b032a87625be9afef511986f1	Voice
69	Voice_call_34750198_6287788877191_2015-07-05_04-08-14.wav	d31013e3474810af714d51e43231a887	Voice
70	Voice_call_34750208_6287788877191_2015-07-05_04-11-49.wav	d22093408874a53e6cc1072ceccc551	Voice
71	Voice_call_34752099_6287	d994abc0fa5a0af7ee3	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	788877191_2015-07-05_10-46-56.wav	e8f3a4ea6643b	
72	Voice_call_34752534_6287788877191_2015-07-05_11-34-12.wav	d5e1447ecd9a7a76b455e928f9961e45	Voice
73	Voice_call_34757577_6287788877191_2015-07-06_06-48-24.wav	c1092212a700bb0d96a7db84fba75946	Voice
74	Voice_call_34758886_6287788877191_2015-07-06_09-16-33.wav	6c555b71cff2538e4202d83797464a67	Voice
75	Voice_call_34758923_6287788877191_2015-07-06_09-19-39.wav	021b6c9adb27a470600cecbd51c215ae	Voice
76	Voice_call_34760889_6287788877191_2015-07-06_11-41-08.wav	b648bbc769899602e790a0a8d3ff0b66	Voice
77	Voice_call_34760936_6287788877191_2015-07-06_11-44-39.wav	5bb704a299f8109de0b0abe8f82a4a15	Voice
78	Voice_call_34762578_6287788877191_2015-07-06_13-48-14.wav	0a2d7876d42bf9dee2cd744a0b342d66	Voice
79	Voice_call_34764880_6287788877191_2015-07-06_16-21-59.wav	b8a5d58a4a7041df1c2779113ccf971f	Voice
80	Voice_call_34765302_6287788877191_2015-07-06_16-55-26.wav	6970a7bac118a29026a440e728d982e8	Voice
81	Voice_call_34770320_6287788877191_2015-07-07_08-57-21.wav	40afcef06ce5aab48d02e52e5f5e2fad	Voice
82	Voice_call_34773073_6287788877191_2015-07-07_11-55-32.wav	61a120e77d79d982a04249b0839a3796	Voice
83	Voice_call_34774410_6287788877191_2015-07-07_13-08-00.wav	a9d2a70f13dd82cd3ade0987cc388089	Voice
84	Voice_call_34774458_6287788877191_2015-07-07_13-10-42.wav	c0ac219c10bdd0ecff604fad50710106	Voice
85	Voice_call_34774532_6287788877191_2015-07-07_13-14-16.wav	05aad2372e45424ceffa44621e9016f	Voice
86	Voice_call_34774872_6287788877191_2015-07-07_13-31-50.wav	6e4b9676b2d062c8ac9d569853f110ec	Voice
87	Voice_call_34784580_6287788877191_2015-07-08_10-	9b16300b4a1f634dc96e0f59d1a71172	Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	04-39.wav		
88	Voice_call_34787002_6287788877191_2015-07-08_12-20-58.wav	48357d41bf9dce413670263ee837636	Voice
89	Voice_call_34787061_6287788877191_2015-07-08_12-24-28.wav	7a6d1e5c4a8daf261cec90d6e63929b4	Voice
90	Voice_call_34792778_6287788877191_2015-07-08_19-06-37.wav	b43d69f8ee77a6aedc9a1b82fe1f8c2	Voice
91	Voice_call_34792971_6287788877191_2015-07-08_19-27-38.wav	b097d201331b479871a65c7d655f5673	Voice
92	Voice_call_34796822_6287788877191_2015-07-09_08-44-20.wav	a6fe9066eb5c416f50281bb2d1324cd2	Voice
93	Voice_call_34797857_6287788877191_2015-07-09_09-53-02.wav	ef4133c3b3611e02970e22ff268cb37f	Voice
94	Voice_call_34691379_6282111000071_2015-06-29_13-54-49.wav	c59716b5fd4e1097a7fe26acc02f86	Voice
95	Voice_call_34700707_6282111000071_2015-06-30_12-41-52.wav	6936d53fb6106329ae38830adc0b4184	Voice
96	Voice_call_34710841_6282111000071_2015-07-01_10-19-03.wav	16da9a4dc9d35f9ce44cd353528b838d	Voice
97	Voice_call_34710939_6282111000071_2015-07-01_10-26-32.wav	fd911c97591b361e20c9295ce9f1f248	Voice
98	Voice_call_34734401_6282111000071_2015-07-03_13-05-10.wav	9c656be2c7c70b589afb815bc5b597a8	Voice
99	Voice_call_34743132_6282111000071_2015-07-04_10-33-42.wav	ebb54efd503ec4a0917d52bb90193a14	Voice
100	SMS_6281221848850_2015-06-08_07-32-46.pdf	fb0acaff93cc64a0fd1380a63c79f284	Softcopy SMS
101	SMS_6281221848850_2015-06-09_10-49-37.pdf	3b55b1b5665509b648c2d6ef346740c8	Softcopy SMS
102	SMS_6281221848850_2015-06-09_10-52-35.pdf	56e9ca3559f2ba65a30626a11a6c72c0	Softcopy SMS
103	Voice_call_34470608_6281221848850_2015-06-07_19-27-42.wav	9cca08076dead39acb2c5ed56e26b816	Voice
104	Voice_call_34473182_6281221848850_2015-06-08_06-57-26.wav	716e2471a77998ab301244370cc6b1b3	Voice



105	Voice_call_34473667_6281 221848850_2015-06-08_07- 43-49.wav	edc9d01a29ebd41d77 67f16eb7741ec5	Voice
106	Voice_call_34477789_6281 221848850_2015-06-08_11- 40-46.wav	fd15e2274bed957d13 1f262f15e2c1a8	Voice
107	Voice_call_34487383_6281 221848850_2015-06-09_06- 51-12.wav	cc1cfc6b6af0a664b91 f66a9a0f17492	Voice
108	Voice_call_34593223_6281 375344283_2015-06-17_16- 34-18.wav	255f7e55a2978f4a8de a37796c7bbc0e	Voice
109	Voice_call_34653230_6281 375344283_2015-06-24_09- 19-15.wav	aa12ba301698aa4ae6 13386ac1c79b49	Voice
110	Voice_call_34710278_6281 375344283_2015-07-01_09- 43-04.wav	b90bc2ae451a80a3f7 72c4d3ac7cede0	Voice
111	Voice_call_34723613_6281 375344283_2015-07-02_11- 12-28.wav	bc89af1efc1547f596d 56e1cfa9d58a2	Voice
112	Voice_call_34724304_6281 375344283_2015-07-02_12- 17-25.wav	8a7c30f84581d8be33 2c91e2340b6a9e	Voice
113	Voice_call_34758143_6281 375344283_2015-07-06_08- 09-59.wav	3dc8275903444cd9db 8caae93eaa1623	Voice
114	Voice_call_34763122_6281 375344283_2015-07-06_14- 22-45.wav	8ddaed8f0c830cc001 e2f34dd55bbf12	Voice
115	Voice_call_34763201_6281 375344283_2015-07-06_14- 27-54.wav	c53ec6b2adc81a0bda ac6b934a95ccea	Voice
116	Voice_call_34774155_6281 375344283_2015-07-07_12- 54-32.wav	85aa9cf97371ea3788 24ad2eabd84dd1	Voice
117	SMS_628161902088_2015- 07-03_13-08-14.pdf	d9859a7ae5d197c51c 2670388e461f76	Softcopy SMS
118	SMS_628161902088_2015- 07-06_20-34-23.pdf	7c5d902c49b1fb16e5 4a112dc04a7bd8	Softcopy SMS
119	Voice_call_34573985_6281 61902088_2015-06-16_08-4 7-36.wav	84c1709aa6cdaf1c5c7 d33af68f963de	Voice
120	Voice_call_34708522_6281 61902088_2015-07-01_07-0 2-25.wav	7c8c5b8c22daa57b8d fc0a69712726aa	Voice
121	Voice_call_34708530_6281 61902088_2015-07-01_07-0 5-28.wav	aa8874b9fd73e291cd 9ec9826e8f1035	Voice



122	Voice_call_34708646_6281 61902088_2015-07-01_07-2 4-02.wav	fda450bfe47de2a6b2f eb9c30d86b949	Voice
123	Voice_call_34711028_6281 61902088_2015-07-01_10-3 0-59.wav	1f27f1041d6fb71541c 60c3ae916cfe1	Voice
124	Voice_call_34715839_6281 61902088_2015-07-01_15-2 5-45.wav	a5671170b1daa2b017 d2a70240d7c983	Voice
125	Voice_call_34721823_6281 61902088_2015-07-02_08-4 8-49.wav	eddc8623a7e890853 46f3bc63c96475	Voice
126	Voice_call_34721880_6281 61902088_2015-07-02_08-5 2-43.wav	4f49e0111712a3fb24 a998d525b4ca38	Voice
127	Voice_call_34721957_6281 61902088_2015-07-02_08-5 8-21.wav	1fab0839b2a35b0020 3f4d3897845201	Voice
128	Voice_call_34722497_6281 61902088_2015-07-02_09-4 7-07.wav	a2085fc6139ddd4c36 e9485ee563270b	Voice
129	Voice_call_34722729_6281 61902088_2015-07-02_10-0 4-27.wav	f038d218119a52b54b 5cd440bbe2f84c	Voice
130	Voice_call_34730756_6281 61902088_2015-07-03_06-1 0-21.wav	d529b85b323e8eeaac 8bb3fd5ee38205	Voice
131	Voice_call_34734334_6281 61902088_2015-07-03_13-0 0-08.wav	a50b0dbf8c14a02318 420a25852df5a6	Voice
132	Voice_call_34735091_6281 61902088_2015-07-03_13-5 0-34.wav	54a04a4620c6afe1a0 8397bfafed43a4	Voice
133	Voice_call_34750322_6281 61902088_2015-07-05_04-4 5-00.wav	f1573aa5f94f05fc9a0 122a03ac0bfa7	Voice
134	Voice_call_34751050_6281 61902088_2015-07-05_08-2 4-08.wav	0fa0c6a74ddf3a5fb28 d93b419b95d28	Voice
135	Voice_call_34752351_6281 61902088_2015-07-05_11-1 0-14.wav	60a77f4fc0d6b1e318 86fbcca25ef547	Voice
136	Voice_call_34767252_6281 61902088_2015-07-06_20-3 5-11.wav	a153eacbf7ddd6ef101 97047e871299e	Voice
137	Voice_call_34797886_6281 61902088_2015-07-09_09-5 4-39.wav	954afc426096d4ed77 f5536d32bf53b4	Voice
138	Voice_call_34797901_6281	771b858acb1c3e205d	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	61902088_2015-07-09_09-55-39.wav	a6943abec18636	
139	Voice_call_34798000_628161902088_2015-07-09_10-01-53.wav	2105b7804b11da109bf05b28422a1253	Voice
140	Voice_call_34798328_628161902088_2015-07-09_10-20-59.wav	6ac15b9d3a179505f957f00cb503f16a	Voice
141	Voice_call_34798503_628161902088_2015-07-09_10-30-36.wav	343eb58e832be8c179800626f329d69f	Voice
142	Voice_call_34798807_628161902088_2015-07-09_10-48-00.wav	c4deba8b4ba21cf44fc5c64e9483d59c	Voice
143	Voice_call_34799030_628161902088_2015-07-09_11-01-58.wav	e40ea1a3b3e30e39a24d1f1548154e7b	Voice
144	Voice_call_34799179_628161902088_2015-07-09_11-09-45.wav	3ae403075c7a83fc9952f4f50a5880dd	Voice
145	Voice_call_34799326_628161902088_2015-07-09_11-18-02.wav	95ec1a42225e04346176fc02ad0774c7	Voice
146	Voice_call_34799581_628161902088_2015-07-09_11-29-43.wav	10bd3923957bab8855acc650696f483d	Voice
147	Voice_call_34799842_628161902088_2015-07-09_11-43-16.wav	9e117bf59ecb1f267f027e75e7c44897	Voice
148	SMS_6281375540717_2015-07-07_10-51-28.pdf	e97695d111f7b05c98b173dca80c35b9	Softcopy SMS
149	SMS_6281375540717_2015-07-08_12-30-55.pdf	a3d3375db22dcd430bde51e0a6f17dda	Softcopy SMS
150	SMS_6281375540717_2015-07-08_12-31-44.pdf	2d63bc5d5793783f6ca0d93429da907d	Softcopy SMS
151	Voice_call_34771965_6281375540717_2015-07-07_10-48-49.wav	d04fbce9f99b9a571269dfc345ec0a31	Voice
152	Voice_call_34773074_6281375540717_2015-07-07_11-55-32.wav	7bed89d0215598254f9170b1d6b6bec6	Voice
153	Voice_call_34786966_6281375540717_2015-07-08_12-18-28.wav	f94609de3560bbd51360b9cc8f91f7ba	Voice
154	Voice_call_34786989_6281375540717_2015-07-08_12-19-57.wav	683bd853f6207181c0f6377ae57f59ec	Voice
155	Voice_call_34787064_6281375540717_2015-07-08_12-	e48efa9b462c340a0efa6285e6820f57	Voice



	24-32.wav		
156	Voice_call_34787156_6281375540717_2015-07-08_12-28-48.wav	26a2f20262d2f97eb3fb8ddc5fc2dee6	Voice
157	Voice_call_34787332_6281375540717_2015-07-08_12-40-25.wav	632667ccae33358b6021673d88177e45	Voice

219 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

220 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

221 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu No 979/HUK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal : permintaan keperluan seminar (Mobil, Ulos, Penginapan dan Ruangan VIP Kualanamun) beserta 1 (satu) lembar Disposisi dan 1(satu) lembar fotocopy Invoice JW Mariot tanggal 27 April 2015 untuk sewa 6 (enam) kamar tanggal 13 April 2015 dengan total sebesar Rp 9.975.000,-(sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

222 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu No 1113/HUK/IV/2015 tanggal 10 April 2015 perihal : permintaan fasilitasi jamuan makan siang bersama Prof DR O.C kaligis, SH, MH untuk kegiatan Seminar terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan dalam rangka hari jadi Pemerintah Propinsi Sumut ke-67 beserta 2 (dua) lembar Disposisi.

223 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 3 Juni 2015 Nomor 13/BP/KDH/WKDH/ 2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5. 1.1.03.02 untuk pembayaran belanja penunjang operasional kepala Daerah tahun 2015 sebesar Rp 517.904.500,- (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah). dengan lampiran 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 03 Juni 2015 dan 1 (satu Bundel) Rincian penggunaan biaya penunjang operasional Gubernur Sumut bulan Februari dan Maret 2015 dengan lampiran dokumen pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 15 Juli 2015 Nomor 18/BP/KDH/WKDH/2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5. 1.1.03.02 untuk pembayaran belanja penunjang operasional kepala Daerah tahun 2015 sebesar Rp 405.200.000,- (empat ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan lampiran 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 15 Juli 2015 dan 1 (satu Bundel) Rincian penggunaan biaya penunjang operasional Gubernur Sumut dengan lampiran dokumen pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran).
- 225 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D.498-KP.04.10-92 tanggal 06 Agustus 1992 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si sebagai Penata Muda (III/a) dalam jabatan Hakim Pengadilan Negeri yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementrian Kehakiman Republik Indonesia.
- 226 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 47/DjMT/KEP/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si dalam Jabatan baru sebagai Hakim Madya Uatama/Pembina Utama Muda/Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 227 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal 20 Oktober 2003 beserta lampirannya tentang pencatatan Sdr. DERMAWAN GINTING, SH sebagai Penata Muda Tk I (III/b) dengan status Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementrian Kehakiman Republik Indonesia.
- 228 3 (Tiga) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 58.a/DjMT/KEP/IX/2013 tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. DERMAWAN GINTING, SH dalam Jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I /Hakim Pengadilan Tata Uasaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229 1 (Satu) lembar Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 84/M tahun 2002 tanggal 01 Mei 2002 tentang pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, SH. Sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia.
- 230 3 (Tiga) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, SH.,MH dalam Jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I /Hakim Pengadilan Tata Uasaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 231 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. SYAMSIR YUSFAN, S.H., MH dalam Jabatan baru sebagai Pembina Tingkat I, Panitera/Sekertaris Pengadilan Tata Uasaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 232 1 (satu) Bundel dokumen invoice nomor 115042013 tanggal 02 April 2015 table 09 dengan jumlah total Rp 2.596.459,- (Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)
- 233 1 (satu) lembar print out rekapitulasi kasir tanggal 02 April 2015.
- 234 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir tabel kas harian kantor pengacara OC Kaligis & Associates terkait pembayaran dari Ibu EVY dan Pak GATOT pada tahun 2015.
- 235 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengeluaran Kas No. 3732 ter tanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 260.000.000,- keperluan USD 20.000.
- 236 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengeluaran Kas No. 3748 ter tanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 293.790.000,- keperluan pengambilan tunai SGD 30.000.
- 237 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penerimaan Kas No. 4062 ter tanggal 20/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Deposit LF perkara PTUN Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 238 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengeluaran Kas No. 5577 ter tanggal 7/7/2015, sejumlah Rp. 20.000.000,- keperluan pengambilan tunai.
- 239 HP Warna Merah Merk Nokia E90 dengan IMEI : 35 366 0011887373 yang didalamnya terdapat SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan no kode : 6210 0211 2584 8850, No Telepon : 081221848850, Memory Card Micro SD Merk V-Gen Kapasitas 2GB dengan no kode : P 1019445.
- 240 HP Warna Putih Merk Blackberry Model ; Q10, IMEI : 3577 5905 38454467 Pin BB : 2B1D7E9B, yang didalamnya terhadap SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan ICC ID : 89 62100 118 258693714 dan tanpa memory card, No. telepon 081218869371.
- 241 1 (satu) buha handphone merk SAMSUNG warna putih model GT-E1272 dengan SN:RV1G60BQKLH, IMEI 1 : 3575420641299401, IMEI 2: 357543064129933 yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210000608202199401 yang digunakan oleh ISMAIL FAHMI.
- 242 1 (satu) buah handphone merk Nokia 106 warna hitam dengan IMEI: 355145061742007, yang di dalamnya terdapat sim card XL dengan ICCID: 8962116101731443800 yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST.
- 243 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan ICCID: 621 0016 225622622, yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST
- 244 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 14/07 '15, OC KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 14 Juli 2015;
- 245 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 15/07 '15, OC KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 15 Juli 2015.
- 246 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA 25PH 29073231 yang berisikan antara lain :

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	a6d67adab87412c4a4f86a6bdb628164	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-07-01_23-45-38.pdf	c4567ea891d58e5f7f94fbb0c374616a	Softcopy Transkrip
3	6281362101414_2015-07-04_17-30-15.pdf	4401f5bf0d660e6aae4fd3cb2c5c83a6	Softcopy Transkrip
4	6281362101414_2015-07-05_11-21-52.pdf	90b39962576c63eb284b8ebc88415af6	Softcopy Transkrip
5	6281362101414_2015-07-05_11-35-53.pdf	659e373fd2ac36e2f012420fe9460230	Softcopy Transkrip
6	6281362101414_2015-07-06_14-22-44.pdf	3b8b4fff2b0baa514fdf1304c51a8d77	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	6281362101414_2015-07-06_14-25-14.pdf	76c886ee7033da39ea06932feac61e90	Softcopy Transkrip
8	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	9452e5edd5e25389d641bf95c2490543	Softcopy Transkrip
9	6281362101414_2015-07-07_12-54-30.pdf	4cc467e81122a3c6b961f5bad0b6128f	Softcopy Transkrip
10	6281269705761_2015-07-01_09-43-01.pdf	d90dd42b956bbafde4ef8b0a54683796	Softcopy Transkrip
11	6281269705761_2015-07-02_17-03-26.pdf	448a535b88f83f568edb38e24bc90381	Softcopy Transkrip
12	6281269705761_2015-07-02_20-30-02.pdf	65c77d29518b2a28398f7f3bc035d461	Softcopy Transkrip
13	6281269705761_2015-07-03_10-06-55.pdf	0f7476c31ad8b3d0c27ff8f1e8769027	Softcopy Transkrip
14	6281269705761_2015-07-05_22-28-05.pdf	9870fa2f8a363f88b7836916bc6afc65	Softcopy Transkrip
15	6281269705761_2015-07-06_08-09-59.pdf	075829afcf5730fbc0bdf6441502d9	Softcopy Transkrip
16	6281269705761_2015-07-06_09-06-17.pdf	8e0c7b8a676fbc371e3eb86a04ccab84	Softcopy Transkrip
17	6281269705761_2015-07-06_13-58-46.pdf	0791a7d4b3dc40426bac3c61c6ae7d4c	Softcopy Transkrip
18	6281269705761_2015-07-06_14-03-56.pdf	66ac812a21e83e873e512a7bf9cf3944	Softcopy Transkrip
19	6287883327443_2015-07-01_06-56-05.pdf	bec1b2091cb929c0f287d68462022841	Softcopy Transkrip
20	6287883327443_2015-07-01_09-55-17.pdf	69b51e6061149d4710c87ead32dfa5e7	Softcopy Transkrip
21	6287883327443_2015-07-01_09-58-06.pdf	d8870e27844331a819fb7325427e3ade	Softcopy Transkrip
22	6287883327443_2015-07-01_10-01-30.pdf	720c3cc9410bc4a48dd90e5e927e1a6a	Softcopy Transkrip
23	6287883327443_2015-07-01_10-07-14.pdf	11fa0a2d315d1a75a1d4adb0d26332ca	Softcopy Transkrip
24	6287883327443_2015-07-03_13-00-11.pdf	cccade84b0f69907df3718d05faafd40	Softcopy Transkrip
25	6287883327443_2015-07-05_11-34-10.pdf	26b9855ecf8f4210175f5ddab88b49e5	Softcopy Transkrip
26	6287883327443_2015-07-06_20-35-08.pdf	be4b72cb244ea8d84050d5171ddc3bf0	Softcopy Transkrip
27	6287883327443_2015-07-07_11-59-48.pdf	8eae4a620ea7f40d2ccd9ee96dc99b05	Softcopy Transkrip
28	6287788877191_2015-06-05_18-04-07.pdf	8d49108ed577076b4460e1e158c1fb18	Softcopy Transkrip
29	6287788877191_2015-06-07_09-11-07.pdf	f6f545d8bc44252fa3c9b583f8145a7c	Softcopy Transkrip
30	6287788877191_2015-06-08_07-43-52.pdf	5f0ddea870e9f7250dd4816060ed4baf	Softcopy Transkrip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	6287788877191_2015-06-09_15-18-12.pdf	6125fa24a5e33f46cec0bf2d7b08155e	Softcopy Transkrip
32	6287788877191_2015-06-10_07-41-23.pdf	554afa1043f47e3cb31f8419d91e025b	Softcopy Transkrip
33	6287788877191_2015-07-04_10-33-44.pdf	b942da3f293cd58e1b638423b57d12e3	Softcopy Transkrip
34	6287788877191_2015-07-05_02-47-58.pdf	fafa82aed79657ce895f3e71ba23810c	Softcopy Transkrip
35	6287788877191_2015-07-05_04-04-01.pdf	573a9b5d66c83296109735f9b646540b	Softcopy Transkrip
36	6287788877191_2015-07-05_04-08-14.pdf	eddb12b2412cd5f210b70d78d84afa3e	Softcopy Transkrip
37	6287788877191_2015-07-05_04-11-49.pdf	850a60073b00111a3f237263112cb13c	Softcopy Transkrip
38	6287788877191_2015-07-05_10-46-56.pdf	235bbd77a5f5bde22e4120a84abd6593	Softcopy Transkrip
39	6287788877191_2015-07-05_11-34-12.pdf	152b8d3eb82eb506be54fe613d541883	Softcopy Transkrip
40	6287788877191_2015-07-06_06-48-24.pdf	83faaebd1da6d05eb1aac1a95777da48	Softcopy Transkrip
41	6287788877191_2015-07-06_09-16-33.pdf	f83f08af322f0d2691b6c4927bae3dd7	Softcopy Transkrip
42	6287788877191_2015-07-06_09-19-39.pdf	6b67783b2ddd4eab7f528fe91c6e85d1	Softcopy Transkrip
43	6287788877191_2015-07-06_11-41-08.pdf	b9549c9fe211fe7b4e51f4565f2e2184	Softcopy Transkrip
44	6287788877191_2015-07-06_11-44-39.pdf	3456d3b1eabdbe203ec3fdc478df3b3e	Softcopy Transkrip
45	6287788877191_2015-07-06_13-48-14.pdf	7ca7162fb88c44ab127472d812f74b30	Softcopy Transkrip
46	6287788877191_2015-07-06_16-21-59.pdf	e782acedf0e8b58da9cb1f18b7011a3e	Softcopy Transkrip
47	6287788877191_2015-07-06_16-55-26.pdf	0f1ac8cede984e3b75fe009b16420708	Softcopy Transkrip
48	6287788877191_2015-07-07_08-57-21.pdf	188c2246138a37c1098e7c83f78a5ca3	Softcopy Transkrip
49	6287788877191_2015-07-07_11-55-32.pdf	cde979ae1a20a4163846606eba8b1419	Softcopy Transkrip
50	6287788877191_2015-07-07_13-08-00.pdf	7b9d3ce882a7a73138245edc7618a2f3	Softcopy Transkrip
51	6287788877191_2015-07-07_13-10-42.pdf	6a63ee80646f3df596f50b90354ab837	Softcopy Transkrip
52	6287788877191_2015-07-07_13-14-16.pdf	606ace7e701f28f32c5c654180e5f96a	Softcopy Transkrip
53	6287788877191_2015-07-07_13-31-50.pdf	90bff85764a8a4e09062040831c19012	Softcopy Transkrip
54	6287788877191_2015-07-08_10-04-39.pdf	b203a865754e561895473bdbefeca84e	Softcopy Transkrip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	6287788877191_2015-07-08_12-20-58.pdf	c159a54436147976393a33b11d2eccd1	Softcopy Transkrip
56	6287788877191_2015-07-08_12-24-28.pdf	72f2e8b8a1e9f4a70652823681032181	Softcopy Transkrip
57	6287788877191_2015-07-08_19-06-37.pdf	c724167525b73620d4ce218b4d89f7ba	Softcopy Transkrip
58	6287788877191_2015-07-08_19-27-38.pdf	97106fa240ebe2c6b69e42fb59620206	Softcopy Transkrip
59	6287788877191_2015-07-09_08-44-20.pdf	2c354456968764548b9c0044efb6cce2	Softcopy Transkrip
60	6287788877191_2015-07-09_09-53-02.pdf	cfb7fb63b60bb3bfef42b611066be248	Softcopy Transkrip
61	6281221848850_2015-06-03_18-38-58.pdf	a86a87c95536fe01617e59a7ebaaac5	Softcopy Transkrip
62	6281221848850_2015-06-03_18-41-35.pdf	73c9f22e1a5710f0de599ee0ba4f78a0	Softcopy Transkrip
63	6281221848850_2015-06-03_19-05-22.pdf	0ab90155e6742627df8dd5bd375e5ebb	Softcopy Transkrip
64	6281221848850_2015-06-07_08-20-32.pdf	700bbce2eb1cbe276ced3c2cd3a2ef6a	Softcopy Transkrip
65	6281221848850_2015-06-07_19-27-42.pdf	2f031d5b43b3875b0ae02cf5866a3415	Softcopy Transkrip
66	6281221848850_2015-06-08_06-57-26.pdf	992dcbd516bdfb954d4b0f247c9adf34	Softcopy Transkrip
67	6281221848850_2015-06-08_11-40-46.pdf	21fa99e52a8e728eba770261968cf7af	Softcopy Transkrip
68	6281221848850_2015-06-09_06-51-12.pdf	b78165bc5be718c0e50d37f5afa33cee	Softcopy Transkrip
69	6281221848850_2015-06-09_08-25-29.pdf	b141d08aca84f94646f8820a453cf29e	Softcopy Transkrip
70	6281221848850_2015-06-09_08-29-11.pdf	2d013f94c24261c33ea61d3e40e51b9f	Softcopy Transkrip
71	6281221848850_2015-06-09_11-00-08.pdf	180a2c06ee0081a4d594d8214524e293	Softcopy Transkrip
72	6281221848850_2015-06-10_17-20-05.pdf	098244a439e2cc952cf43ef9ef1e8f26	Softcopy Transkrip
73	6281221848850_2015-06-17_14-52-01.pdf	0499c0a7e22d74c16d07e93748aaf6be	Softcopy Transkrip
74	6281221848850_2015-06-24_09-13-24.pdf	c86aad6e8076be9cf3ab4db540bbcbd4	Softcopy Transkrip
75	6281221848850_2015-06-25_13-00-50.pdf	8ab63d534121c8f20363ae05b787136e	Softcopy Transkrip
76	6281221848850_2015-06-29_08-53-02.pdf	4ff1a359a839202daecfba88c9cd34f2	Softcopy Transkrip
77	6281221848850_2015-07-01_10-24-58.pdf	4f8d2ca09d72580724054571622c16b6	Softcopy Transkrip
78	6281221848850_2015-07-01_22-17-48.pdf	d7cd6356f579836bc90cce33ab7e1f9e	Softcopy Transkrip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	6281221848850_2015-07-01_22-26-09.pdf	d58fe8de8f30cb0e0b0f112a8a88d745	Softcopy Transkrip
80	6281221848850_2015-07-06_09-06-16.pdf	b6f5cf705fa21386342a874e56a65c2e	Softcopy Transkrip
81	6281221848850_2015-07-06_13-58-49.pdf	ebf5b8bcd95faf4d9c2b72ebf7bfa77	Softcopy Transkrip
82	6281221848850_2015-07-06_14-03-57.pdf	3a7bf9dfca07c96bc898f469005c0ac5	Softcopy Transkrip
83	6281221848850_2015-07-07_10-35-49.pdf	ddffcaebbb7074213722fe289ab9a70a5	Softcopy Transkrip
84	6281221848850_2015-07-07_12-09-09.pdf	684e6d1cc24f02ae3987cef7ced0f672	Softcopy Transkrip
85	6281221848850_2015-07-09_10-29-49.pdf	d31163601b0ccfcedfcc79f9158615e0	Softcopy Transkrip
86	6281221848850_2015-07-09_10-38-23.pdf	851677a8cafa5ba9b9fc40dd72400842	Softcopy Transkrip
87	6281221848850_2015-07-09_14-55-23.pdf	2b80eb533684ff27018d771a25b96dfb	Softcopy Transkrip
88	6281221848850_2015-07-09_15-30-57.pdf	b60796250c5b64407e7aa2c8dd55b08e	Softcopy Transkrip
89	6281221848850_2015-07-09_16-59-09.pdf	42670eb27ae2ff83d6593f8542e5fff6	Softcopy Transkrip
90	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	85d8b2ac4f3a3fa7d9b721f52774d0af	Softcopy Transkrip
91	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	5d972dcf358e03bcf3e6d72515efe755	Softcopy Transkrip
92	628161902088_2015-06-16_08-47-36.pdf	04727bf3cd3ab25ce82ea70b47563040	Softcopy Transkrip
93	628161902088_2015-07-01_07-02-25.pdf	86c52a660507194d1f25595f6a17158e	Softcopy Transkrip
94	628161902088_2015-07-01_07-05-28.pdf	91156c27ce45c056b6af7eb17e997d7c	Softcopy Transkrip
95	628161902088_2015-07-01_07-24-02.pdf	9d24f9e85d263ce1b553d73a04102322	Softcopy Transkrip
96	628161902088_2015-07-01_10-30-59.pdf	eb54d1196d9b51d2050e3c709bc74507	Softcopy Transkrip
97	628161902088_2015-07-01_15-25-45.pdf	7f4560f530d03a51574aff61bdcf62cb	Softcopy Transkrip
98	628161902088_2015-07-02_08-48-49.pdf	7acbb6d343731f81a9d490616c13a169	Softcopy Transkrip
99	628161902088_2015-07-02_08-52-43.pdf	65cedcf050629c87b2e38e9ea63b364b	Softcopy Transkrip
100	628161902088_2015-07-02_08-58-21.pdf	55f6b126cead5f4b4b795fee6bef18fd	Softcopy Transkrip
101	628161902088_2015-07-02_09-47-07.pdf	da29a9e600e3a773ccaf8f877619593d	Softcopy Transkrip
102	628161902088_2015-07-02_10-04-27.pdf	d37d7a22261954585d03f712a73cd76e	Softcopy Transkrip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	628161902088_2015-07-03_06-10-21.pdf	a9511aa206b9fd543bc2bd4f6f3b5706	Softcopy Transkrip
104	628161902088_2015-07-03_13-00-08.pdf	8f780eb1d7add9f2678d8e13d59d7081	Softcopy Transkrip
105	628161902088_2015-07-03_13-50-34.pdf	88b56f23333ec02e67edc013a9867f7d	Softcopy Transkrip
106	628161902088_2015-07-05_04-45-00.pdf	72792e57550cb53680765a104846ad21	Softcopy Transkrip
107	628161902088_2015-07-05_08-24-08.pdf	cdd337be0044f87dedeb95078695c13c	Softcopy Transkrip
108	628161902088_2015-07-05_11-10-14.pdf	ea797cc01b11554512fea89fdbfdd5f0	Softcopy Transkrip
109	628161902088_2015-07-06_20-35-11.pdf	5e72b44dd243f5c31d12af9393f191e4	Softcopy Transkrip
110	628161902088_2015-07-07_12-02-20.pdf	5678b3d1dc5833304d1afad1a303343f	Softcopy Transkrip
111	628161902088_2015-07-09_09-54-39.pdf	9b54f1360d4659c553591cfdd0941942	Softcopy Transkrip
112	628161902088_2015-07-09_10-01-53.pdf	071250e906de5d8eafd3e20599130d0f	Softcopy Transkrip
113	628161902088_2015-07-09_10-20-59.pdf	245813582608158f55762e0d76baef12	Softcopy Transkrip
114	628161902088_2015-07-09_10-30-36.pdf	1b4880c99187ad75db00dd92458169e2	Softcopy Transkrip
115	628161902088_2015-07-09_10-48-00.pdf	f6e9193f773e3d53ef50617c60058381	Softcopy Transkrip
116	628161902088_2015-07-09_11-01-58.pdf	7b37bd9e6905e24fac8b1d43d9d9f6f5	Softcopy Transkrip
117	628161902088_2015-07-09_11-09-45.pdf	07c47fcf0e9b35db197245e61a46ef8d	Softcopy Transkrip
118	628161902088_2015-07-09_11-18-02.pdf	ac5cfd7b05b47c3ffb345534dc9ca251	Softcopy Transkrip
119	628161902088_2015-07-09_11-29-43.pdf	dbf7ec16b7604dcd3af34c35763e0904	Softcopy Transkrip
120	628161902088_2015-07-09_11-43-16.pdf	eb93ddb87c73366408e3fade06e7fa67	Softcopy Transkrip
121	628161902088_2015_07_09_09-55-39.pdf	ab55d76b4ebc37e482942e120cb076e9	Softcopy Transkrip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



247. 1 (satu) Buah Compact Disk (CD) dengan Nomor
MAPA25PI102149454 yang berisikan antara lain :

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-06-16_15-24-31.pdf	743fbbeac81bf056c291fe8e6c215485	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-06-16_15-31-05.pdf	f1e5ec365ddd34da98ffe574d58dcb75	Softcopy Transkrip
3	6281311183687_2015-06-27_21-30-15.pdf	249bdf77bcd14548590a7ef1b7c47388	Softcopy Transkrip
4	6282111000071_2015-06-22_18-55-51.pdf	85163fbfd3b7ae18564a7bf1bce0d8c9	Softcopy Transkrip
5	6282111000071_2015-06-30_11-14-38.pdf	237cec7fbb277e743c1ae4ee864a6e4f	Softcopy Transkrip
6	6282111000071_2015-07-04_11-55-16.pdf	ee754a872a64d2ad72d8a0b3c6781766	Softcopy Transkrip
7	6282111000071_2015-07-04_12-08-12.pdf	e0e7564970b465bdac5ec9f084f864e3	Softcopy Transkrip
8	6282111000071_2015-07-06_08-50-45.pdf	7e5619a287052788437d6968cc50f270	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	6282111000071_2015-07-06_08-54-37.pdf	208eceda3d48069328fa32788359ffee	Softcopy Transkrip
10	6282111000071_2015-07-06_14-15-46.pdf	5fa47e65e01f278d6e3823118b94a999	Softcopy Transkrip
11	6282111000071_2015-07-06_14-25-12.pdf	28e01c4f22edefb1febb57c1d0722e0f	Softcopy Transkrip
12	6282111000071_2015-07-06_14-27-52.pdf	b26d720ef962b40b2e933e19b2b63806	Softcopy Transkrip
13	6282111000071_2015-07-07_11-35-35.pdf	85e022421c5f909a75b06f6de4447f16	Softcopy Transkrip
14	6282111000071_2015-07-07_12-09-56.pdf	665a863e85335752599418fb807399a8	Softcopy Transkrip
15	6282111000071_2015-07-07_12-37-31.pdf	7560c77430e4d8f68516c5385288e82b	Softcopy Transkrip
16	6282111000071_2015-07-07_12-42-05.pdf	809aa8edce196041191dcf284dde8f75	Softcopy Transkrip
17	6282111000071_2015-07-07_12-52-53.pdf	353ef0b750f2b7a0d31bf86af5b87e6b	Softcopy Transkrip
18	6282111000071_2015-07-09_09-47-30.pdf	ef2e19e0798979a8ed09db45dc7a448a	Softcopy Transkrip
19	6282111000071_2015-07-09_09-54-46.pdf	46c4fee597bd65e56572e3af6396d2a0	Softcopy Transkrip
20	6282111000071_2015-07-09_09-59-41.pdf	106bdfd5d64b020e8e09816c1e489bcc	Softcopy Transkrip
21	6282111000071_2015-07-09_10-02-56.pdf	48f9bd84ecfc317a2beda2150e6ff6fd	Softcopy Transkrip
22	6282111000071_2015-07-09_10-08-53.pdf	575b5277517faf64843860e315cd2379	Softcopy Transkrip
23	6282111000071_2015-07-09_10-38-21.pdf	6fb2ecde322b9058334604bd7904fea9	Softcopy Transkrip
24	6282111000071_2015-07-09_11-49-07.pdf	951e28d9a09f67a03aa7ffc6f73acee5	Softcopy Transkrip
25	6281375344283_2015-06-17_16-34-18.pdf	bd404f0453f6a1df2d09dc4bcc0aa345	Softcopy Transkrip
26	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	7482c51d403203ddd12de7faaf8e9b21	Softcopy Transkrip
27	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	e22592bfc2257ea091f27a29e7aa587b	Softcopy Transkrip
28	6281375344283_2015-07-02_11-12-28.pdf	c9c1b1baab2c99838a058252c6e06ba4	Softcopy Transkrip
29	6281375344283_2015-07-02_12-17-25.pdf	a7ced85e5652eaff1bfdc7193355cfee	Softcopy Transkrip
30	6281375344283_2015-07-06_08-09-59.pdf	05679d228901b99beb8f7f14079da1ec	Softcopy Transkrip
31	6281375344283_2015-07-06_14-22-45.pdf	8f3828ef4fca6cf83a27698aa5f66155	Softcopy Transkrip
32	6281375344283_2015-07-06_14-27-54.pdf	cf742e1cb2c70f72a82c825378785f80	Softcopy Transkrip



33	6281375344283_2015-07-07_12-54-32.pdf	36cc084b1e67423edf53fae57f5bb555	Softcopy Transkrip
----	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa AMIR FAUZI.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari **–Jum’at tanggal 29 April 2016** oleh kami **H.M. MAS’UD HALIM, S.H.,M.Hum.,** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **SUTARTO K.S, S.H.,M.H.,** dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.,** Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, serta **Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H.,M.H.,** dan **ANTHON ROBINSON SARAGIH, S.H.,M.H.,** Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Maret 2016 Nomor : 22/Pid/TPK/2016/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN Tanggal 09 Mei 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 22/Pid/TPK/2016/PT.DKI tanggal 28 Maret 2016, tanpa hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA :

1. **SUTARTO K.S, S.H.,M.H.,**

H.M. MAS’UD HALIM, S.H.,M.Hum.,

2. **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.,**



3. Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H.,M.H.,

4. ANTHON ROBINSON SARAGIH, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI :

HJ.SRI IRIANI PUDJIATI, SH.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)